PEMERINTAH KOTA SERANG

# PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2021
# T E N T A N G
# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2019
# T E N T A N G
# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"

**WALIKOTA SERANG**
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. bahwa dalam kondisi saat ini terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi, perubahan kebijakan nasional dan kebijakan daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SIstem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Covid-19) Dan.Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SIstem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RPJMD Tahun 2018-2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi pedoman untuk penyusunan :
a. Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. RKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.

3. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 September 2021
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
( NOMOR URUT PERDA 2) / ( TAHUN 2021 )

# KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan perubahan atas dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Serang berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian serta perubahan mendasar dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023 yang bersinergi dengan visi misi Provinsi Banten dan Nasional yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan pembangunan daerah tahunan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Serang dalam melaksanakan pembangunan Kota Serang sampai Tahun 2023 yang diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Serang, yaitu “Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya”.

**WALIKOTA SERANG**

**SYAFRUDIN**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... xii
DAFTAR GRAFIK ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... I-1
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-7
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I-8
1.5 Sistematika Penulisan ..... I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II-1
2.1.2 Arahan Pengembangan Wilayah ..... II-15
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..... II-18
2.1.4 Demografi ..... II-19
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-25
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-25
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-36
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ..... II-43
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II-45
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ..... II-45
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II-59
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan ..... II-76
2.3.4 Layanan Urusan Penunjang ..... II-82
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-86
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-86

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur ..... II-89
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-94
2.4.4 Fokus Sumber daya Manusia ..... II-98
2.5 Standar Pelayanan Minimal..... II-112
2.5.1 Bidang PelayananPendidikan Dasar ..... II-112
2.5.2 Bidang Pelayanan Kesehatan..... II-112
2.5.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-113
2.5.4 Bidang Perumahan Rakyat ..... II-113
2.5.5 Bidang Keteneraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Rakyat ..... II-113
2.5.6 Bidang Sosial..... II-114
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III-2
3.1.2 Neraca Daerah..... III-5
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III-8
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III-8
3.2.2 Analisa Pembiayaan ..... III-9
3.3 Kerangka Pendanaan..... III-11
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III-11
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III-17
3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran ..... III-18
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH..... IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... IV-1
4.2 Isu Strategis ..... IV-10
4.2.1 Isu Internasional ..... IV-10
4.2.2 Isu Strategis Nasional..... IV-14
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Banten ..... IV-16
4.2.4 Isu Strategis RPJPD Kota Serang..... IV-20
4.2.5 Isu Strategis Penelaahan RTRW..... IV-21

4.2.6 Isu Strategis Penelaahan KLHS ..... IV-36
4.2.7 Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 ..... IV-37
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... V-1
5.1 Visi ..... V-1
5.2 Misi ..... V-6
5.3 Tujuan Dan Sasaran ..... V-8
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI-1
6.1 Strategi ..... VI-1
6.2 Arah Kebijakan ..... VI-2
6.2.1 Arah Kebijakan Pembentukan BUMD ..... VI-17
6.3 Program Pembangunan Daerah ..... VI-20
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
BAB IX PENUTUP ..... IX-1

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2020 II-1
Tabel 2.2 Kelurahan di Kota Serang.....II-2
Tabel 2.3 Jenis Tanah Kota Serang.....II-5
Tabel 2.4 Ketinggian Lahan Kota Serang.....II-6
Tabel 2.5 Perkembangan Rata-rata Klimatologi di Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-9
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kota Serang (Ha) Tahun 2016-2020.....II-10
Tabel 2.7 Jenis dan Wilayah Rawan Bencana .....II-19
Tabel 2.8 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2016–2020 .....II-20
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2016 –2020 .....II-20
Tabel 2.10 Distribusi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016 - 2020.....II-21
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kota Serang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 – 2020 .....II-22
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kota Serang Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2016 – 2020 .....II-22
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Pendidikan Tahun 2016-2020.....II-23
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016 - 2020.....II-23
Tabel 2.15 Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Agama/Kepercayaan Tahun 2016 - 2020 .....II-24
Tabel 2.16 Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kota Serang Tahun 2019 - 2020 (Juta Rupiah) .....II-28
Tabel 2.17 Pertumbuhan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)) .....II-29
Tabel 2.18 Pertumbuhan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) .....II-29
Tabel 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-37
Tabel 2.20 Angka Melek Huruf Kota Serang Tahun 2020.....II-37
Tabel 2.21 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-37
Tabel 2.22 Pencapaian Layanan Pendidikan Tahun 2016 – 2020.....II-38

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Layanan Kesehatan di Kota Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-39
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan di Kota Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-40
Tabel 2.25 Kasus Kriminalitas yang Terjadi di Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.26 Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-43
Tabel 2.27 Perkembangan Seni dan Budaya Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel 2.28 Perkembangan Olahraga Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-44
Tabel 2.29 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2020 ..... II-45
Tabel 2.30 Perkembangan Capaian Indikator Pendidikan Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-46
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II-47
Tabel 2.33Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) dan Penduduk Usia Sekolah Kota Serang Tahun 2013-2018 ..... II-47
Tabel 2.34Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II-48
Tabel 2.35 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020 ..... II-48
Tabel 2.36 Perkembangan Capaian Indikator Kesehatan di Kota Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-50
Tabel 2.37 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Kota Serang Tahun 2020 ..... II-52
Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2016 - 2020 ..... II-53
Tabel 2.39 Jumlah Tempat Ibadah Kota Serang Tahun 2020 ..... II-54
Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020 ..... II-54
Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-56

Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-56
Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Jumlah LSM, Ormas, Linmas, Unjuk Rasa dan Indikator Kesbangpol Lainnya Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-57
Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Sosial Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-58
Tabel 2.45 Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Serang Tahun 2019 – 2020 ..... II-58
Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-60
Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Serang Tahun 2016 – 2020..... II-60
Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2016 - 2020..... II-62
Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Pertanahan Kota Serang Tahun 2016-2020..... II-62
Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016 – 2020..... II-63
Tabel 2.51 Perkembangan Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Tahun 2016 - 20208..... II-64
Tabel 2.52 Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-65
Tabel 2.53 Perkembangan Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Serang Tahun 2016- 2020..... II-66
Tabel 2.54 Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan di Kota Serang Tahun 2016 - 2020..... II-68
Tabel 2.55 Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2016-2020..... II-69
Tabel 2.56 Perkembangan Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang Tahun 2016-2020..... II-70
Tabel 2.57 Jumlah Investor di Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-71
Tabel 2.58 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-71
Tabel 2.59 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... II-72

Tabel 2.60 Perkembangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Serang Tahun 2016 – 20208.....II-72
Tabel 2.61 Perkembangan Urusan Bidang Statistik di Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-73
Tabel 2.62 Perkembangan Urusan Bidang Kebudayaan di Kota Serang Tahun 2016 - 2020.....II-74
Tabel 2.63 Perkembangan Urusan Perpustakaan Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-74
Tabel 2.64 Perkembangan Urusan Kearsipan Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-75
Tabel 2.65 Perkembangan Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-76
Tabel 2.66 Perkembangan Urusan Pariwisata Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-77
Tabel 2.67 Perkembangan Urusan Pertanian Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-78
Tabel 2.68 Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2016-2020.....II-79
Tabel 2.69 Jumlah Pembinaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2016-2020.....II-80
Tabel 2.70 Jumlah Pembinaan Kelompok Pengrajin Tahun 2016-2020 ....II-80
Tabel 2.71 Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020.....II-80
Tabel 2.72 Perkembangan Indikator Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2020.....II-81
Tabel 2.73 Pengiriman Transmigrasi Swakarsa Tahun 2016-2020.....II-81
Tabel 2.74 Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020..... II-82
Tabel 2.75 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.76 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan PelatihanKota Serang Tahun 2016-2020 .....II-84
Tabel 2.77 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Serang Tahun 2017-2020.....II-84
Tabel 2.78 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-85
Tabel 2.79 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-86
Tabel 2.80 Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Serang Tahun 2016 – 2020 ..... II-87

Tabel 2.81 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-87
Tabel 2.82 Rasio Konsumsi RT Non Pangan Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-88
Tabel 2.83 Produktivitas Total Daerah Kota Serang Tahun 2019 .....II-89
Tabel 2.84 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-90
Tabel 2.85 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2016-2020.....II-90
Tabel 2.86 Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Serang Tahun 2016-2020 .II-90
Tabel 2.87 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Tahun 2016-2020 ....II-92
Tabel 2.88 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.89 Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-93
Tabel 2.90 Ketersediaan Penginapan di Kota Serang Tahun 2019 – 2020 .....II-94
Tabel 2.91 Angka Kriminalitas di Kota Serang Tahun 2016 – 2020.....II-95
Tabel 2.92 Jumlah Demonstrasi Kota Serang Tahun 2016 – 2020.....II-96
Tabel 2.93 Kemudahan Perijinan di Kota Serang .....II-96
Tabel 2.94 Jumlah dan Macam Pajak di Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-97
Tabel 2.95 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Di Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-98
Tabel 2.96 Kualitas Tenaga Kerja Di Kota Serang Tahun 2016-2020 .....II-99
Tabel 2.97 Tingkat Ketergantungan Di Kota Serang Tahun 2016-2020...II-100
Tabel 2.98 Hasil Analsis Target Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Indikator Kinreja Utama Kota Serang Tahun 2019-2020 .....II-100
Tabel 2.99 Hasil Analisis Gambar Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Serang Tahun 2091-2020 ..... II-101
Tabel 2.100 Perkembangan SPM Kota Serang Tahun 2019-2020.....II-114
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2014 - 2018 .....III-2
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Serang Tahun 2014 - 2018.....III-4
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Serang Tahun 2014 - 2018.....III-5

Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Serang ..... III-8
Tabel 3.5 Defisit Riil Anggaran Kota Serang ..... III-9
Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Serang ..... III-9
Tabel 3.7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Serang ..... III-10
Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 20123 ..... III-11
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2019-2020 ..... III-13
Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 20123) ..... III–15
Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 ..... III–19
Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Serang Tahun 2021-2023 ..... III-19
Tabel 4.1 Program RPJMN 2020-2024 di Kota Serang ..... IV-15
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi Antar Dokumen Perencanaan ..... V-6
Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Serang ..... V-11
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023 ..... VI-1
Tabel 6.2 Tahapan dan Tema RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 ... VI-3
Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang ..... VI-4
Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pengembangan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Serang Tahun 2021-2023 ..... VI-19
Tabel 6.5 Rumusan Pelaksanaan Program Mendesak Tahun 2019-2023 ..... VI-21
Tabel 6.6 Rumusan Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2019-2023 ..... VI-24
Tabel 6.7 Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Serang VI-27
Tabel 6.8 Indikasi Program Pemanfaatan Pola Ruang Kota Serang ..... VI-35
Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Serang ..... VI-42
Tabel 6.10 Keselarasan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 ..... VI-55

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023 (Perda Nomor 3 Tahun 2019).....VII-2
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2021-2023.....VII-3
Tabel 7.3 Capaian Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020 Menurut Urusan Pemerintahan .....VII-4
Tabel 7.4 Capaian Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020 (Non Urusan) ...VII-22
Tabel 7.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019).....VII-34
Tabel 7.6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan..... VII-46
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 .....VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 .....VIII-4
Tabel 8.3 Indikator SPM Pemerintah Kota Serang.....VIII-25
Tabel 8.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Serang Tahun 2018-2023 (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021) ..... VIII - 30

# DAFTAR GRAFIK


Grafik 2.1 Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Serang Tahun 2016-2020.....II-11

Grafik 2.2 Persentase Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kota Serang Tahun 2020.....II–11

Grafik 2.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II–21

Grafik 2.4 Perkembangan LPE Kota Serang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 –2020 ..... II-25

Grafik 2.5 Rataan Distribusi PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 - 2020 (Dalam Juta Rupiah) .....II-26

Grafik 2.6 Perkembangan PDRB Kota Serang ADHK dan ADHB Tahun 2016 - 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) ..... II-27

Grafik 2.7 Persentase Distribusi Sektor Ekonomi Kota Serang Tahun 20209 ..... II-30

Grafik 2.8 Laju Inflasi di Kota Serang Tahun 2016 - 2020 (%) ..... II-31

Grafik 2.9 PDRB Per Kapita (Rp juta/jiwa) Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-32

Grafik 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-33

Grafik 2.11 Perkembangan Penduduk Miskin Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....II-33

Grafik 2.12 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Kota Serang Tahun 2016 – 2020 (dalam Rupiah)) .....II-34

Grafik 2.13 Perkembangan Aspek Dasar Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-35

Grafik 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2020 .....II-35

Grafik 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016 – 2020 .....II-38

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD.....I-5

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....I-8

Gambar 5.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 .....V-7

Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.....V-7

Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 .....V-8

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan daerah pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah dimana skenario pembangunan tersebut dirancang dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui RPJMD inilah perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan. Untuk maksud inilah RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 disusun agar dapat menjadi cetak biru rencana pembangunan jangka menengah di Kota Serang Tahun 2018-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang didalamnya memuat visi, misi, kebijakan dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD Kota Serang ini merupakan dokumen perencanaan yang integral dengan seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah di tingkat nasional dan provinsi sebagaimana

dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023 menjadi kebutuhan untuk dilakukan meskipun saat ini tengah berjalan di tahun ketiga, mengingat sejumlah alasan dan kebutuhan berdasarkan perkembangan kondisi yang terjadi serta sebagai wujud upaya penyelarasan perubahan kebijakan nasional dan provinsi. Namun demikian, nantinya sejumlah perubahan, penyelarasan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas tetap didasarkan pada upaya pencapaian visi dan misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023.

Secara teknis, penyusunan RPJMD dan perubahan RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa tahapan dan penyusunan perubahan RPJMD bersifat *mutatis mutandis* dengan penyusunan RPJMD.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Serang dengan berpedoman pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan (3) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 lebih kepada kondisi terjadi perubahan yang mendasar,

diantaranya mencakup terjadinya bencana, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional, antara lain penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Sedangkan pada tingkat nasional, telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana perlu adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimuktakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD disebabkan kejadian bencana non alam pandemi COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan target indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan program. Disamping itu perlu dilakukan penetapan kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukan perlu dilakukan perumusan kembali indikator kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan fungsi perangkat daerah atau SOTK dan juga adanya substansi yang belum terakomodir, seperti terkait kebijakan rencana pembentukan BUMD dan penyertaan modal sebagaimana mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu arah kebijakan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan.

Dengan beberapa latar belakang dan sebab diatas maka substansi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang secara politis merupakan abstraksi dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu H. Syafrudin, S.Sos, M.Si dan H. Subadri Ushuludin, SH yang resmi dilantik pada tanggal 5 Desember 2018 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan janji-janji politik dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang 2008-2025 yang menyebutkan bahwa pembangunan RPJMD ke-3 (Tahun 2018-2023) ditujukan dalam rangka persiapan menuju kondisi Kota Serang "SMART" (Sejahtera, Maju, Adil, Religius dan Tertib) dengan berbekal kemantapan kekuatan dan kemampuan potensi dan sumber daya daerah yang menjadi orientasi pada tahapan pembangunan sebelumnya dengan menekankan pada upaya peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian penggunaan lahan; pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Visi Pembangunan Kota Serang Tahun 2008-2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Serang 2008-2025 adalah "Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025" dengan rumusan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Bekualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Keserasian Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Asri;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Transparan dan Berwibawa

Adapun prioritas pembangunan RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kualitas, Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu melalui pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, serta *bottom up* dan *top down*, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan stakeholder. Sementara secara substantif, Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 berorientasi pada pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial untuk menjamin perencanaan yang jelas dan terarah.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

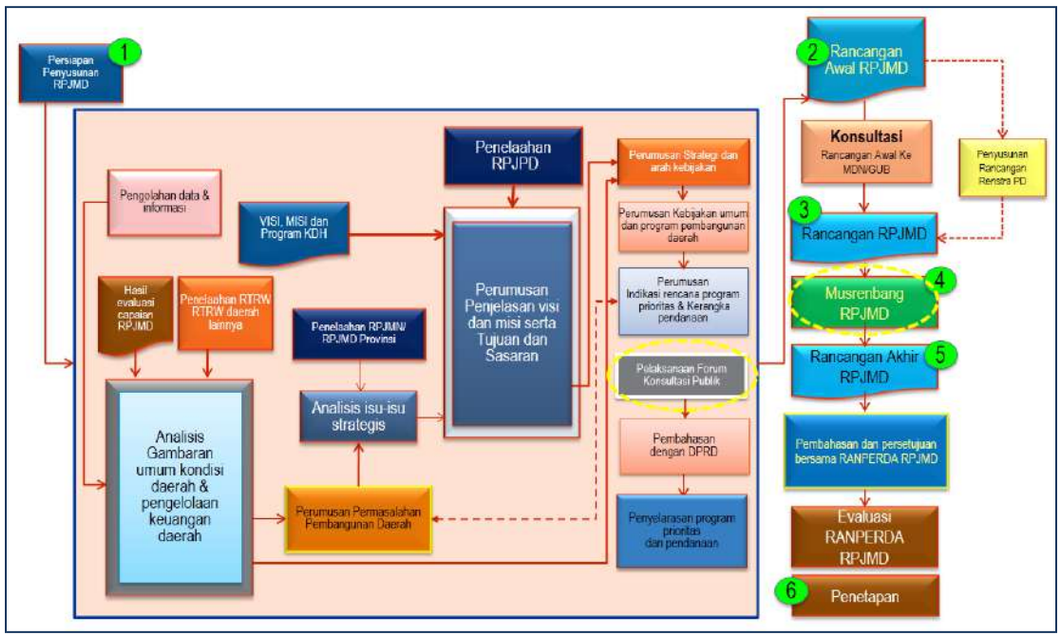


**Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD**

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimuktakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu juga perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Dari segi waktu dokumen perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan satu bagian yang utuh dengan dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, serta merupakan kerangka acuan dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana akan dijabarkan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya. Karakteristik substansi rencana dalam RPJMD adalah bersifat makro dan strategis, yang bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi operasionalisasi dan eksekusi di tingkat teknis.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pada hakekatnya merupakan pedoman pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang pada suatu wilayah yang memuat tentang rencana

struktur ruang wilayah yang mengatur pengembangan/pembangunan berbagai sistem prasarana dan sarana wilayah, rencana pola ruang wilayah yang mengatur pemanfaatan/peruntukan suatu kawasan. Sebagai acuan pembangunan, dokumen perencanaan pembangunan harus mengacu dan selaras dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang telah ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gambaran mengenai hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

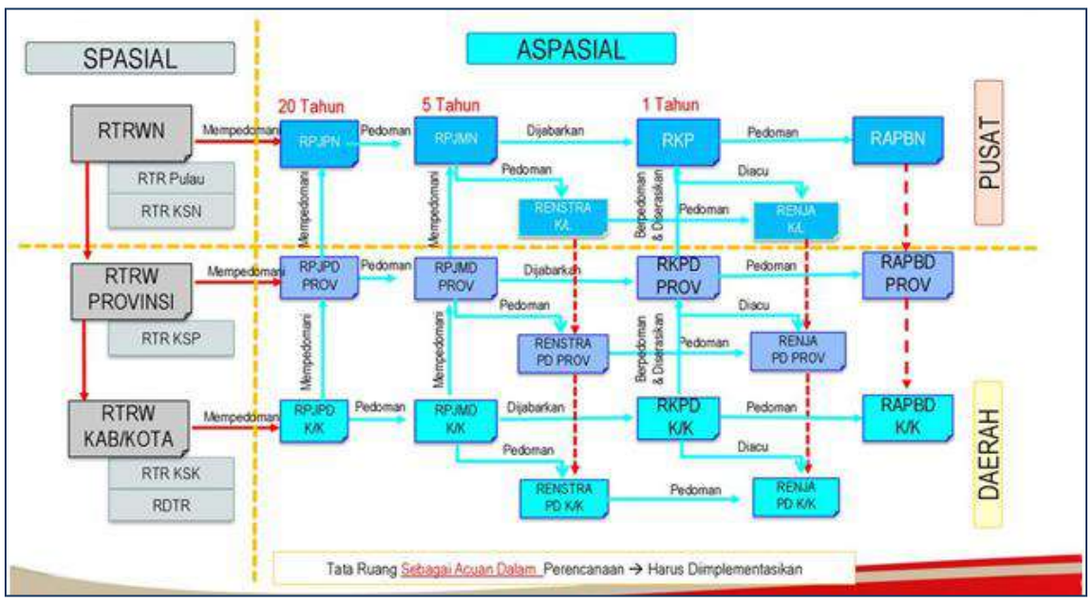


**Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk dapat memberikan arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2023 terutama bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Kota Serang sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun kedua.

Sementara tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mensinergikan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi, untuk dipadukan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Serang;
2. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kota Serang dalam menentukan prioritas program tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam rangka memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan dengan merubah indikator kinerja, kerangka pendanaan dan target kinerja RPJMD yang belum tepat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah dan Standar Pelayanan Minimal.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini diuraikan berdasarkan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah

dirumuskan dari masing masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023.

BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2007. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040. Semula luas wilayah Kota Serang adalah 266,74 km$^2$ menjadi 266,18 km$^2$. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 68,85 km$^2$ atau sekitar 25,87% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,9% dari luas wilayah Kota Serang atau sekitar 26,55 km$^2$. Berdasarkan hasil inventarisasi luas wilayah dari 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,18 km$^2$. Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

**Tabel 2.1**
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Luas (km2) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curug | 10 | 38,96 | 14,64 |
| 2 | Walantaka | 14 | 36,56 | 13,73 |
| 3 | Cipocok Jaya | 8 | 34,10 | 12,81 |
| 4 | Serang | 12 | 26,55 | 9,97 |
| 5 | Taktakan | 13 | 61,16 | 22,98 |
| 6 | Kasemen | 10 | 68,85 | 25,87 |
| | | **67** | **266,18** | **100,00** |

*Sumber : RTRW Kota Serang, 2020*

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur;

(2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

(3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan

(4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Perkembangan kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) desa menjadi kelurahan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Pada tahun 2012 dilakukan kembali perubahan status 15 (lima belas) desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 jumlah kelurahan adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) kelurahan dan pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung, dengan rincian berikut:

**Tabel 2.2**
**Kelurahan di Kota Serang**

| No | KECAMATAN/KELURAHAN | No | KECAMATAN/KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| **I** | **KECAMATAN CIPOCOK JAYA** | **II** | **KECAMATAN CURUG** |
| 1 | Kelurahan Banjaragung; | 1 | Kelurahan Cilaku; |
| 2 | Kelurahan Banjarsari; | 2 | Kelurahan Cipete; |
| 3 | Kelurahan Cipocokjaya; | 3 | Kelurahan Curug; |
| 4 | Kelurahan Dalung; | 4 | Kelurahan Curugmanis; |
| 5 | Kelurahan Gelam; | 5 | Kelurahan Kemanisan; |
| 6 | Kelurahan Karundang; | 6 | Kelurahan Pancalaksana; |
| 7 | Kelurahan Penancangan; | 7 | Kelurahan Sukajaya; |
| 8 | Kelurahan Tembong; | 8 | Kelurahan Sukalaksana; |
| | | 9 | Kelurahan Sukawana; dan |
| | | 10 | Kelurahan Tinggar |

| No | KECAMATAN/KELURAHAN | No | KECAMATAN/KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| **III** | **KECAMATAN SERANG** | **IV** | **KECAMATAN TAKTAKAN** |
| 1 | Kelurahan Cimuncang; | 1 | Kelurahan Taman Baru; |
| 2 | Kelurahan Cipare; | 2 | Kelurahan Umbultengah; |
| 3 | Kelurahan Kagungan; | 3 | Kelurahan Cilowong; |
| 4 | Kelurahan Kaligandu; | 4 | Kelurahan Drangong; |
| 5 | Kelurahan Kotabaru; | 5 | Kelurahan Karanganyar; |
| 6 | Kelurahan Lontarbaru; | 6 | Kelurahan Kuranji; |
| 7 | Kelurahan Lopang; | 7 | Kelurahan Lialang; |
| 8 | Kelurahan Serang; | 8 | Kelurahan Pancur; |
| 9 | Kelurahan Sukawana; | 9 | Kelurahan Panggungjati; |
| 10 | Kelurahan Sumurpecung; | 10 | Kelurahan Sayar; |
| 11 | Kelurahan Trondol; dan | 11 | Kelurahan Sepang; |
| 12 | Kelurahan Unyur; | 12 | Kelurahan Taktakan; |
| | | 13 | Kelurahan Cibendung |
| **V** | **KECAMATAN KASEMEN** | **VI** | **KECAMATAN WALANTAKA** |
| 1 | Kelurahan Banten; | 1 | Kelurahan Nyapah; |
| 2 | Kelurahan Bendung; | 2 | Kelurahan Pabuaran; |
| 3 | Kelurahan Kasemen; | 3 | Kelurahan Pengampelan; |
| 4 | Kelurahan Kasunyatan; | 4 | Kelurahan Cigoong; |
| 5 | Kelurahan Kilasah; | 5 | Kelurahan Kepuren; |
| 6 | Kelurahan Margaluyu; | 6 | Kelurahan Kiara; |
| 7 | Kelurahan Mesjidpriyayi; | 7 | Kelurahan Kalodran |
| 8 | Kelurahan Sawahluhur; | 8 | Kelurahan Lebakwangi; |
| 9 | Kelurahan Terumbu; dan | 9 | Kelurahan Pageragung; |
| 10 | Kelurahan Warungjaud | 10 | Kelurahan Pasuluhan; |
| | | 11 | Kelurahan Pipitan; |
| | | 12 | Kelurahan Tegalsari; |
| | | 13 | Kelurahan Teritih; |
| | | 14 | Kelurahan Walantaka |

*Sumber: Bappeda Kota Serang, 2020*

## B. Letak dan kondisi geografis

### 1) Posisi Astronomis

Posisi Kota Serang secara astronomi terletak pada koordinat 5°99' - 6°22' Lintang Selatan dan 106°07' - 106°25' Bujur Timur. Apabila diukur dengan menggunakan koordinat sistem *Universal Transfer Mercator* (UTM) Zone 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar

21,7 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km.

**2) Posisi Geostrategis**

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara dan memiliki posisi strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang didukung oleh infrastruktur perhubungan darat yaitu terbentangnya Jalan Tol Jakarta-Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota Serang, serta berbatasan langsung dengan padatnya lalu lintas Laut Jawa dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten, Wilayah Kota Serang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis yaitu :

a. Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota, meliputi:
   - kawasan perdagangan pusat kota di Kecamatan Serang;
   - kawasan Pelabuhan Karangantu; dan
   - Kawasan Cepat Tumbuh Kota di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug.
b. Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya:
   - Kawasan Banten Lama
c. Kawasan kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:
   - Kawasan Cagar Alam Pulau Dua

**3) Kondisi Kawasan**

Secara eksisting, kondisi antar kecamatan dan kelurahan di Kota Serang saling terhubung dengan infrastuktur jalan sehingga dapat ditempuh dengan alat transportasi yang memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kota Serang memiliki kawasan Pesisir, tepatnya di Kecamatan Kasemen yang terkoneksi langsung dengan Laut Jawa dan Kawasan perbukitan yang terbentang di Kecamatan Taktakan.

## C. Topografi

### 1). Kemiringan Lahan

Secara topografis, kondisi alam Kota Serang menunjukkan permukaan tanah yang relatif menunjukkan permukaan tanah yang relatif datar, dengan kemiringan lahan di Kota Serang berkisar antara 0-40%.

Daratan di Kota Serang merupakan daerah subur, karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan alluvial dan batu vulkanis kuarter, serta terdapat sungai-sungai besar yaitu Sungai Cidurian dan Sungai Cibanten. Keadaan tanah (soil) terbagi menjadi empat jenis berdasarkan bahan induk penyusunannya yaitu: jenis lava gunung danau, jenis tuva gunung danau, jenis lahar gunung mankangen dan jenis basalt.

Sebagian besar tanah di dataran alluvial wilayah utara yang berasal dari pegunungan di selatan yang merupakan endapan detrius (*detrial sediment*) bertekstur sangat halus baik berupa lumpur maupun suspensi karena merupakan hasil kikisan aliran air dan telah mengalami jarak transportasi yang cukup panjang, khususnya pada saat air sungai banjir. Meskipun demikian tanah-tanah tersebut mempunyai sedikit perbedaan dalam bentuk dan kandungannya terhadap endapan dari dasar-dasar sungai, muara, dan laut. Endapan yang ada kebanyakan terdiri dari tanah liat yang halus, pasir dan kerikil.

Keadaan tanah *(soil)* di Wilayah Kota Serang terdiri dari 5 (lima) jenis, berdasarkan bahan induk penyusunnya yaitu: jenis *podsoik merah*, jenis *asosiasi podsolik kuning*, dan *hidromorf kelabu*, *regosol kelabu kekuningan*, *regosol kelabu*, jenis *asosiasi latosol cokelat kemerahan*, dan *latosol coklat.* Adapun Tabel 2.3 di bawah ini menunjukkan jenis tanah.

**Tabel 2.3**
**Jenis Tanah Kota Serang**

| Wilayah | Jenis Tanah (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Alluvial | Gley | Latosol | Regosol | Podsolik |
| **Serang Barat** | 329 | - | - | 3.641 | 818 |
| **Serang Selatan** | 436 | - | - | 188 | 4.336 |
| **Serang Timur** | 403 | - | - | 161 | 4.284 |
| **Serang Utara** | 3.802 | - | - | 270 | 2.264 |
| **Serang Tengah** | 634 | - | - | 942 | 4.166 |
| **Jumlah** | 5.604 | - | - | 5.202 | 15.868 |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

**2). Ketinggian Lahan**

Wilayah Kota Serang berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Serang terdiri dari dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Adapun Tabel 2.4 di bawah ini menunjukkan kondisi ketinggian lahan di Kota Serang.

**Tabel 2.4**
**Ketinggian Lahan Kota Serang**

| Wilayah Pembangunan | Ketinggian dari Permukaan Laut (Meter) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-3 | 3-25 | 25-100 | 100-300 | 300-500 | >1001 |
| **Serang Barat** | - | - | 3.004 | 1.051 | 133 | - |
| **Serang Selatan** | - | 2.866 | - | - | - | - |
| **Serang Timur** | - | 2.958 | - | - | - | - |
| **Serang Utara** | 3.396 | 2.940 | - | - | - | - |
| **Serang Tengah** | - | 3.164 | - | 465 | - | - |
| **Jumlah** | 3.396 | 11.928 | 11.928 | 1.516 | 133 | - |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

## D. Geologi

**1). Struktur dan Karakteristik**

Secara geologis Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan. Bagian terbesar adalah jenis batuan *pretertiary sediments* dan batuan *aluvium,* selain itu terdapat sedikit daerah termasuk batuan *Young Quartenary Volcanic Products,* yaitu pada bagian paling selatan Kota Serang (di Kelurahan Gelam).

**2). Potensi Kandungan**

Sebagian besar wilayah Kota Serang terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai. Dari batuan yang tersingkap (*outcrop)* di Kota Serang, dapat diketahui stratigrafi dan sejarah geologi pembentukan daratan, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang ada di daerah ini. Secara umum semua batuan dan satuan sedimen yang ada berumur muda. Batuan tertua berumur Pleistosen Bawah, mungkin sekitar tujuh juta tahun lalu, pada saat mana terbentuk batuan vulkanik lava andesit dan breksi vulkanik yang berkaitan dengannya akibat proses desintregrasi/pelapukan fisik dan gerakan tanah (land movement) pada daerah gunung api, baik dalam bentuk runtuhan, longsor, ataupun rayapan tanah perbukitan vulkanik yang terbentuk.

## E. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Wilayah Kota Serang meliputi sistem air bawah tanah dan air permukaan. Secara umum baik air bawah tanah maupun air permukaan tersedia cukup memadai. Adapun sistem air tanah Kota Serang yang dikelompokkan berdasarkan kelompok aquifer sebagai berikut:

a. Kelompok aquifer air tanah tertekan yang terdapat pada Tufa Banten di mana air mengalir melalui ruang antar butiran, lapisan ini dapat dijumpai pada kedalaman sampai lebih dari 100 m di bawah permukaan laut. Air tanah dalam kelompok ini dapat dijumpai sebagai air tanah bebas maupun tertekan.
b. Kelompok aquifer air tanah jarang yang terdapat pada lapisan-lapisan batuan vulkanik tua seperti lava dan andesit. Lapisan aquifer ini terjadi karena formasi struktur batuannya,seperti sesar atau kekar. Aquifer ini umumnya kurang produktif dan berkelulusan rendah.
c. Kelompok aquifer produktif, dimana kelompok ini merupakan gabungan antara sistem aquifer yang menerus dan tidak menerus. Kelompok ini terdapat pada bidang kontak antara Tufa Banten dan kelompok batuan vulkanik. Wilayah Kota Serang umumnya termasuk aquifer produktif dengan debit air 5-10 liter/detik.

### 1) Daerah Aliran Sungai

Air permukaan di wilayah Kota Serang dipengaruhi oleh kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten, sungai yang berhulu di Gunung Karang Kabupaten Pandeglang pada ketinggian ±1.772 mdpl, melintasi Kabupaten Serang dan mengalir ke arah utara masuk ke Kota Serang di Kecamatan Cipocok Jaya, melintasi Kecamatan Serang dan bermuara di laut di Teluk Banten di Kecamatan Kasemen. Sungai Cibanten memiliki panjang dari hulu ke hilir sekitar 43,88 km dan luas *catchment area* sekitar 200,65 km$^2$, lebar rata-rata 12 m, dan tinggi sekitar 5,5 m. Air Sungai Cibanten sebagian dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi seluas ±1.813 hektar di Kota Serang, sumber air bersih untuk keperluan air minum dan MCK rumah tangga dan perkantoran, sebagai badan air yang menerima air hujan dari saluran drainase, serta sebagai badan air yang menerima air limbah rumah tangga wilayah Kota Serang.

DAS Cibanten di wilayah Kota Serang dibagi dalam 5 (lima) sub blok yaitu:

(1) DAS Cibanten Utara yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Unyur, Trondol dan Banten Lama.

(2) DAS Cibanten Selatan yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu Cigeplak, Curug-Ciwatek, Cilaku dan Kubang.

(3) DAS Cibanten Tengah yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Sumur Pecung, Penancangan dan Kali Bedeng.

(4) DAS Cibanten Timur yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Ciwaka, Ciwatek, Geplak, Cilaku dan Kubang.

(5) DAS Cibanten Barat yang terbagi dalam Sub Blok, yaitu: Pelamunan, Cikaduan, Cirengas, Ciwaktu, Cikentang dan Ciracas.

**2) Sungai, Danau dan Rawa**

Selain sungai yang berfungsi sebagai badan air penerima, terdapat pula Danau atau Situ Ciwaka seluas 2,6 Ha yang terletak di Kecamatan Walantaka dan Situ Cukulur di Kecamatan Serang, yang secara alamiah berfungsi sebagai tandon air atau kolam retensi guna menahan/memperlambat aliran air sungai ke daerah hilirnya.

**3) Debit**

Debit Sungai Cibanten pada ruas wilayah perencanaan atau sepanjang ±14,1 km, berdasarkan pendataan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan mulai dari tahun (1951 – 1991) adalah sebagai berikut :

- Debit maksimum (Qmax) : 11,353 $m^3$/detik
- Debit rata-rata (Qrata) : 2,007 $m^3$/detik
- Debit minimum (Qmin) : 0,93 $m^3$/detik

Meskipun secara umum kondisi air di Kota Serang memadai, pada beberapa wilayah kondisi air tanah kualitasnya kurang layak untuk kebutuhan konsumsi, sehingga pemenuhan kebutuhan air wilayah rawan air bersih tersebut sebagian dipenuhi melalui jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Serang. Sedangkan sebagian kecil lainnya dipenuhi oleh PT. Sauh Bahtera Samudra yaitu perusahaan swasta yang menyuplai air curah meski pada skala yang belum mencukupi seluruh kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah tersebut.

## F. Klimatologi

**1) Tipe**

Sebagian besar wilayah Kota Serang adalah dataran rendah dengan iklim tropis yang khas sebagaimana umumnya karakteristik daerah yang terletak di sekitar wilayah pesisir Pantai Utara Laut Jawa. Dengan

tipologi iklim tropis dataran rendah tersebut, curah hujan di Kota Serang terbilang cukup tinggi.

**2) Curah Hujan**

Pada tahun 2020 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 28,80 $mm^3$. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari yaitu 368,10 $mm^3$.

**3) Suhu**

Suhu minimum sepanjang 2020 adalah 20,80$^0$C, terjadi di bulan Agustus, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Maret dan September, sebesar 35,00$^0$C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu 28,21$^0$C dan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Desember sebesar 27,14$^0$C.

**4) Kelembaban**

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2020 sebesar 41% terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan Januari, yaitu 99%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 76,10%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 84,40%.

Tekanan udara sekitar 1.005,66 mb ; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 43,55%-78,6% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2020 tercatat pada bulan Mei, yaitu 1.000,50 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan November, yaitu 1.012,00 mb.

Tabel 2.5 di bawah ini menggambarkan lebih rinci bagaimana perkembangan rata-rata klimatologi di Kota Serang Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.5**
**Perkembangan Rata-rata Klimatologi di Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | KLIMATOLOGI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhu Udara | 27,58 | 27,58 | 27,44 | 27,92 | 27,73 |
| 2 | Kelembaban relatif | 83,58 | 83,58 | 80,73 | 77,62 | 80,70 |
| 3 | Tekanan Udara | 1.009,70 | 1.009,40 | 1.009,63 | 1.007,32 | 1.005,67 |
| 4 | Curah Hujan | 151,07 | 151,31 | 113,99 | 104,75 | 165,67 |
| 5 | Hari Hujan | 20,17 | 16,83 | 15,42 | 10,42 | 18,33 |
| 6 | Kecepatan Angin | 1,60 | 1,70 | 1,88 | 1,81 | 0,99 |
| 7 | Penyinaran Matahari | 54,50 | 59,20 | 65,45 | 60,60 | 61,39 |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

**5) Penggunaan Lahan**

Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, wilayah Kota Serang merupakan wilayah yang terbentuk secara alamiah sedemikian rupa sebagai hasil dari perkembangan kota sejak masa Kesultanan Islam Banten hingga era ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Serang. Kota Serang mempunyai fungsi penting bagi perkembangan wilayah Provinsi Banten. Selain menjadi ibukota administratif, kota Serang juga diarahkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN berdasarkan RTRW Kota Serang 2020-2040. Diperkirakan Kota Serang akan menghadapi pertambahan penduduk, alih fungsi lahan serta peningkatan polusi atau limbah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali dan hanya mementingkan sektor ekonomi.

Pada tahun 2020, penggunaan lahan paling rendah di Kota Serang adalah untuk hutan yaitu sebesar 177,32 Ha. Penggunaan lahan yang terbesar di Kota Serang adalah untuk pertanian, yaitu sebesar 18.452,28 Ha. Hal ini didasari pada fakta bahwa penduduk Kota Serang lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penggunaan lahan untuk perumahan mengalami kenaikan dari seluas 5.265,84 Ha menjadi 5.455,08 Ha. Tabel 2.6 di bawah ini menggambarkan lebih rinci bagaimana penggunaan lahan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.6**
**Penggunaan Lahan di Kota Serang (Ha) Tahun 2016-2020**

| No | Penggunaan Lahan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Hutan | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 |
| b | Industri | 216,43 | 216,48 | 216,48 | 226,52 | 257,03 |
| c | Perairan | 975,75 | 946,79 | 984,96 | 946,79 | 946,79 |
| d | Tanah Jasa | 188,16 | 190,13 | 190,13 | 194,13 | 194,13 |
| e | Tanah Perumahan | 5.059,83 | 5.125,69 | 5.250,27 | 5.265,84 | 5.455,08 |
| f | Tanah Perusahaan | 1.124,12 | 1.127,32 | 1.164,56 | 1.193,13 | 1.193,13 |
| g | Pertanian | 18.714,41 | 18.672,28 | 18.472,28 | 18.452,28 | 18.452,28 |
| | **Jumlah Total** | **26.456,02** | **26.456,01** | **26.456,14** | **26.456,014** | **26.456,014** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Grafik 2.1 menggambarkan perkembangan penggunaan lahan selama tahun 2016-2020 dan grafik 2.2 menggambarkan kondisi

eksisting penggunaan lahan di Kota Serang pada Tahun 2020, dimana penggunaan lahan terbesar di Kota Serang selama kurun waktu tersebut masih dipergunakan untuk pertanian dan perumahan, sisanya tanah perusahaan, perairan, industri, tanah jasa dan hutan.

**Grafik 2.1**
**Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

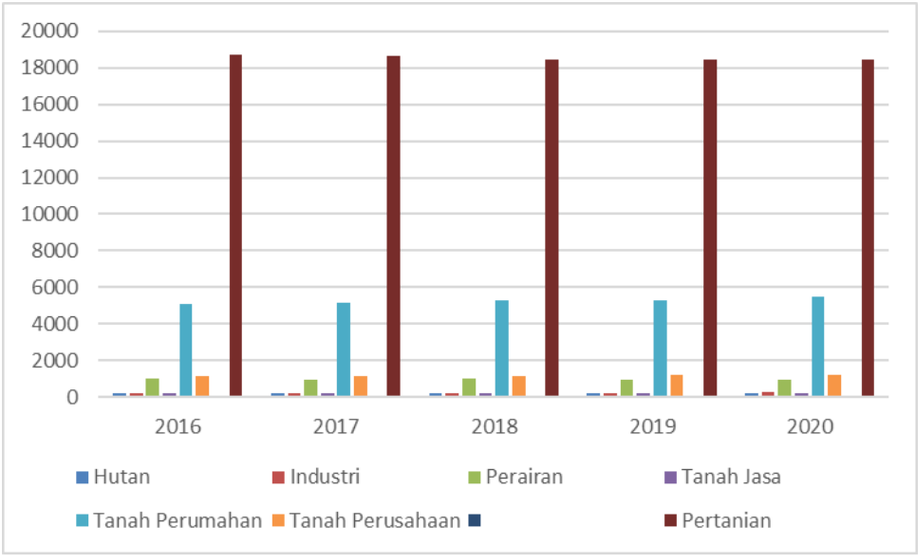


*Sumber : BPS Kota Serang, 2020*

**Grafik 2.2**
**Persentase Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kota Serang**
**Tahun 2020**

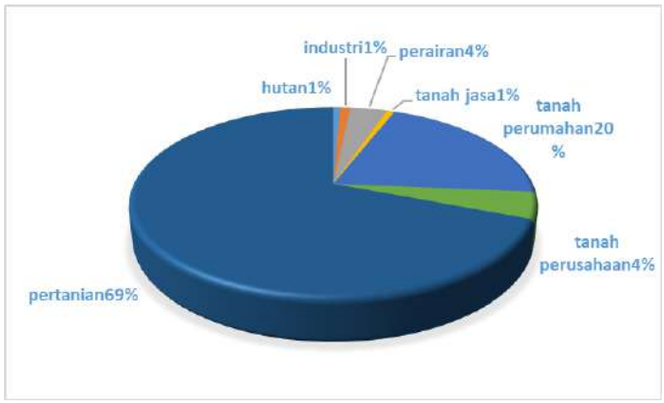


*Sumber : BPS Kota Serang, 2020*

Berdasarkan pola pemanfaatan lahan yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian budidaya, maka Kota Serang secara alamiah adalah Kota yang berciri agraris meski kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terbilang sangat kecil, yaitu sebesar 5-6% saja per tahun. Karenanya, dengan modalitas alamiahnya tersebut Kota Serang memiliki kesempatan dalam mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan yang masih potensial di sebagian kecamatan, guna menopang ketahanan pangan di Kota Serang sekaligus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya bertransformasi ke sektor sekunder. Kota Serang masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakannya untuk menopang industri yang berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian sebagai bahan bakunya yang banyak berkembang di sepanjang bagian Utara Provinsi Banten, serta memenuhi kebutuhan sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Serang dan sekitarnya.

Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 bahwa rencana pola ruang wilayah Kota Serang meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

**1. Kawasan Peruntukkan Lindung**

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang Kota Serang meliputi:

b. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air dengan luas 786 hektar atau 3%. Kawasan resapan air meliputi sebagian wilayah Kecamatan Taktakan dan sebagian wilayah Kecamatan Curug.

c. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat dengan luas 275 hektar atau 1,05% meliputi Kawasan sempadan pantai dengan luas paling rendah 57 hektar atau 0,22% terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur dan Kawasan sempadan sungai dengan luas paling rendah 218 hektar atau 0,83% terletak di sekitar sempadan sungai di Cibanten, dan sempadan sungai di sekitar kawasan permukiman yang mencakup Cibanten, Kali Pembuangan Banten, Ciwatu, Ciwaka, Cilaku, Cikadueun, Cigeplak, Kali Kubang, Kali Ciwatek, Kali Ciracas, Cikentang, dan Cirengas.

d. Kawasan konservasi;

Kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam di Pulau Dua seluas 34,52 hektar atau 0,13% berfungsi sebagai kawasan suaka marga satwa.

e. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya luas total 215 hektar atau 0,82% berupa lingkungan bangunan gedung dan halamannya meliputi pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kawasan Banten Lama yang terdiri atas Masjid Agung Banten

Lama, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Vihara Avalokittesvara dan Benteng Speelwijk.

f. Ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau terdiri atas Ruang terbuka hijau publik dengan luas 3.043 hektar.

**2. Kawasan Budidaya**

Kawasan peruntukan budidaya dengan luas total 22.600,52 hektar atau 86,37% meliputi:

a. Kawasan hutan produksi tetap;

Kawasan hutan produksi berada di Kawasan Gunung Gedor Kecamatan Taktakan dengan luas 177,52 hektar atau 0,68%

b. Kawasan Pertanian;

Kawasan pertanian dengan luas total paling rendah seluas 3.054 hektar atau 11,67%, meliputi:

1) Kawasan pertanian tanaman pangan; dengan luas total 3.054 hektar meliputi Kawasan sawah beririgasi, merupakan sawah dengan sistem irigasi maupun irigasi setengah teknis yang terdapat di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka; dan
2) Kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang tersebar di wilayah Kota dengan luas total 3.054 hektar, meliputi:
    1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) hektar; dan
    2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 32 (tiga puluh dua) hektar.

c. Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan peruntukan industri dengan luas total 1.053 hektar atau 4,02 % diarahkan di:

1) Kecamatan Kasemen; dan
2) Kecamatan Walantaka.

d. Kawasan Pariwisata;

Kawasan pariwisata tersebar di beberapa bagian wilayah Kota, dengan luas paling rendah 142 hektar atau 0,67%. Kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pariwisata religi dan pariwisata alam terletak di koridor utara Kecamatan Kasemen yang memiliki karakteristik sebagai pusat berbagai peninggalan sejarah seperti makam dan wisata khusus seperti

ziarah, gedung-gedung tua, dan situs sejarah, di samping potensi alam dan perikanannya yang besar untuk dikembangkan.

e. Kawasan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi:

1) Kawasan perumahan dengan luas total paling rendah seluas 13.716 hektar atau 52,42% tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Serang;
2) Kawasan perdagangan dan jasa tersebar di wilayah Kota dengan total luas paling rendah seluas 3.913 hektar atau 14,95% terdiri dari pasar induk dan grosir, pusat perbelanjaan dan pertokoan serta pasar tradisional, pasar modern, Perdagangan sektor informal serta pergudangan.
3) Kawasan perkantoran dengan luas total paling rendah 125 hektar atau 0,48% meliputi Kawasan perkantoran di pusat Kota dan kawasan pusat pemerintahan. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan perkantoran meliputi kawasan pusat pemerintahan kota diarahkan di pusat kota, kawasan pelayanan jasa di arahkan menyebar di seluruh kecamatan, kawasan fungsi campuran berada di Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya, KP3B diarahkan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug, kawasan perkantoran yang bercampur dengan kawasan perdagangan, jasa dan fasilitas umum dan sosial diarahkan menyebar di seluruh wilayah kota.
4) Kawasan transportasi dengan luas area paling rendah 109 hektar atau 0,42% berupa area pelabuhan yang terdapat di Kecamatan Kasemen yaitu di Kelurahan Banten. Arah pengembangan kawasan meliputi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Kasemen.
5) Ruang terbuka non hijau dengan luas total paling rendah 103 hektar atau 0,39% merupakan area penyangga yang membatasi kawasan industri dengan kawasan cagar alam Pulau Dua dan kawasan sempadan pantai yang terletak di Kecamatan Kasemen.

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas area paling sedikit seluas 208 ha atau 0,79% meliputi:

1) Kawasan Markas Grup I Kopassus dengan luas paling sedikit 205 hektar terdapat di Kecamatan Taktakan.
2) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya dengan terdiri dari area Komando Resort Militer di Kelurahan Kota Baru, area Komando Distrik Militer di Kelurahan Karundang; dan area Kepolisian Daerah di Kelurahan Lontar Baru dan Kelurahan Banjarsari.

### 2.1.2 Arahan Pengembangan Wilayah

Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, parawisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Arahan pengembangan wilayah di Kota Serang dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Arahan pengembangan pengelolaan kawasan pertanian meliputi:
   a. pengembangan sawah irigasi dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
   b. perubahan kawasan pertanian tanaman pangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. peruntukan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu dengan mengembangkan kawasan pertanian berteknologi tinggi; dan
   d. pembatasan alih fungsi kawasan pertanian eksisting untuk kawasan budidaya selain pertanian.
   e. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) hektar; dan
   f. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 32 (tiga puluh dua) hektar.
2) Arahan pengembangan kawasan industri di Kota Serang meliputi:

a. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas.
b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; dan
c. Pengembangan kegiatan pergudangan di kawasan peruntukan industri yang ada di Kota diperbolehkan secara terbatas dan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri.

3) Arahan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Serang meliputi:
a. melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
b. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
c. melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
d. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
e. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
f. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
g. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
h. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
i. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu;
j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

4) Arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Serang meliputi:
a. pengembangan kawasan budidaya untuk perumahan harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;

b. pengembangan perumahan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar kelurahan, pusat pelayanan setiap kelurahan, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok perumahan;
c. penyediaan lahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. pengembangan perumahan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
e. membentuk cluster perumahan untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan perumahan, dan diantara cluster perumahan disediakan ruang terbuka hijau;
f. pembentukan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota dihubungkan dengan sistem transportasi yang memadai;
g. pengembangan perumahan sub pusat pelayanan dilakukan dengan membentuk pelayanan dalam wilayah tersebut yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya;
h. pengembangan perumahan pusat lingkungan dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kelurahan; dan
i. Peningkatan kualitas terhadap kawasan perumahan kumuh serta upaya pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru.

5) Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Serang meliputi:
a. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan secara hierarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan/atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Serang;
c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi;
d. pengembangan kawasan dan atau lokasi perdagangan yang terkait dengan sarana dan prasarana yang dikelola Kota;
e. Perdagangan sektor informal diarahkan pada kawasan Royal dan kawasan Serang Plaza;

f. Pengembangan kegiatan pergudangan di kawasan peruntukan industri yang ada di Kota diperbolehkan secara terbatas dan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa.

6) Arahan pengembangan kawasan perkantoran meliputi:
   a. mempertahankan dan melakukan penataan kawasan perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta di Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya; dan
   b. Melakukan pembangunan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten yang terletak di di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug.
7) Arahan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Serang meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   b. mengembangkan kawasan budidaya tidak terbangun sebagai zona penyangga di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Di samping berbagai potensi pengembangan di masa depan, terdapat sejumlah daerah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana, khususnya bencana alam mengingat karakteristik wilayahnya yang rentan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, wilayah rawan bencana di Kota Serang diidentifikasi sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam yang masuk dalam kategori Kawasan Lindung dalam konteks Pola Ruang Wilayah Kota Serang. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi 3 (tiga) kategori kawasan rawan bencana, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir yang tersebar di Cipocok Jaya, Banjarsari, Ciracas, Sumur Pecung, Kaujon, Kota Baru, Cipare, Lopang, Kaligandu, Trondol, Sukawana, Priyayi, dan sejumlah titik di Kecamatan Kasemen;
2. Kawasan rawan gempa, gerakan tanah, longsor, dan banjir bandang yang terdapat di sebagian wilayah Taktakan dan Cipocok Jaya; serta
3. Kawasan rawan tsunami yang terdapat di sepanjang Pantai Utara Kota Serang yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda.

Meski skala bencana yang terjadi masih dalam skala kecil dan bersifat lokal, namun penanganan yang sistematis dan efektif tetap diperlukan guna mencegah meluasnya cakupan dampak yang dihasilkan

di masa mendatang. Termasuk upaya mencegah terjadinya bencana akibat gerakan tanah yang labil, yang dapat diantisipasi melalui implementasi rencana tata ruang yang relevan guna mengantisipasi terjadinya bencana tersebut.

Berdasarkan hasil inventarisasi wilayah dan kerawanan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, dapat digambarkan dalam Tabel 2.7 di bawah ini:

**Tabel 2.7**
**Jenis dan Wilayah Rawan Bencana**

| No | Jenis Bencana | Kec. Serang | Kec Cipocok Jaya | Kec. Taktakan | Kec. Kasemen | Kec. Walantaka | Kec. Curug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempa Bumi | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Tsunami | - | - | - | * | - | - |
| 3 | Letusan Gunung Berapi | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Banjir | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Tanah Longsor | - | - | * | - | - | * |
| 6 | Kebakaran Hutan / Lahan | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Kekeringan | - | - | * | * | * | * |
| 8 | Epidemi dan Wabah Penyakit | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Kebakaran Gedung dan Pemukiman | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Kegagalan Teknologi | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Puting Beliung | * | * | * | * | * | * |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*
*Keterangan : * Terkena Bencana - Tidak Terkena Bencana*

Dari tabel tersebut, Kota Serang relatif aman dari bencana gunung merapi. Wilayah yang rawan tsunami yaitu Kecamatan Kasemen karena berbatasan langsung dengan laut Jawa, sedangkan wilayah yang rawan tanah longsor adalah Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Cipocok Jaya karena kondisi geografis wilayah tersebut perbukitan. Adapun jenis bencana yang lain seperti gempa bumi, banjir, kebakaran lahan, kekeringan, epidemi, kebakaran, puting beliung beresiko terjadi seluruh wilayah di Kota Serang.

### 2.1.4 Demografi

#### A. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Dalam konteks demografi Jumlah penduduk Kota Serang yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 681.012 jiwa dengan rata-rata laju

pertumbuhan sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai 1,79 persen per tahun.

**Tabel 2.8**
**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang**
**Tahun 2016–2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jumlah Penduduk Tahun ke-t | 628.434 | 635.632 | 642.586 | 652.192 | 681.012 | 647.971 |
| 2 | Jumlah Penduduk Tahun sebelumnya | 623.429 | 628.434 | 635.632 | 642.589 | 652.192 | 636.455 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,80 | 1,15 | 1,09 | 1,49 | 4,42 | 1,79 |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Tabel 2.9 dan Grafik 2.3 berikut ini menggambarkan perkembangan jumlah penduduk di Kota Serang sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

**Tabel 2.9**
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang**
**Tahun 2016 –2020**

| No | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 85.958 | 88.232 | 90.213 | 91.996 | 96.549 |
| 2 | Curug | 53.269 | 53.505 | 53.436 | 53.625 | 56.940 |
| 3 | Kasemen | 94.345 | 95.669 | 94.677 | 97.430 | 102.368 |
| 4 | Serang | 220.423 | 220.608 | 223.050 | 224.546 | 229.901 |
| 5 | Taktakan | 88.421 | 89.819 | 90.537 | 92.361 | 97.250 |
| 6 | Walantaka | 86.018 | 87.799 | 90.673 | 92.234 | 98.004 |
| | **Jumlah** | **628.434** | **635.632** | **642.586** | **652.192** | **681.012** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang sebagai kawasan pemukiman bagi kaum *urban commuter* yang bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya, dengan luas wilayah yang hanya seluas 266,18 hektar maka kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.558,46 jiwa per km$^2$ pada Tahun 2020. Kecamatan Serang merupakan tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha (33,76%) dengan kepadatan mencapai 8.659,17 jiwa per km$^2$ meski luas wilayah Kecamatan Serang hanya sekitar 9,97% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara Kecamatan Curug merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 1.461,50 jiwa per km$^2$. Tabel 2.10 menggambarkan distribusi tingkat kepadatan penduduk Kota Serang dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Grafik 2.3**
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

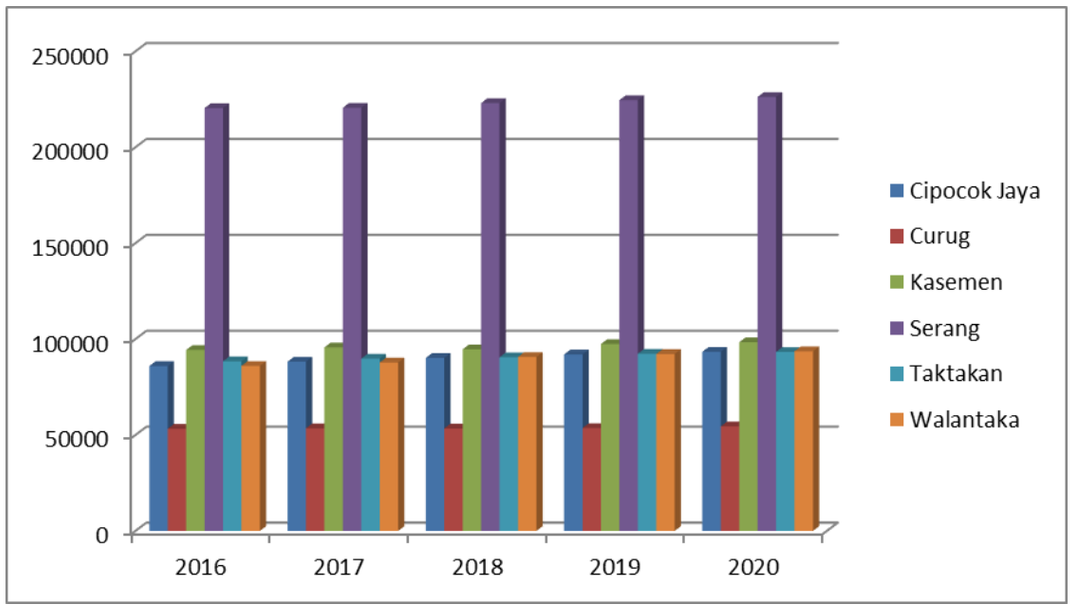


*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Data grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kota Serang selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terlihat berpusat di Kecamatan Serang. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Serang memiliki wilayah yang sangat kecil namun pertumbuhan penduduknya tinggi sedangkan kecamatan lain dengan wilayah yang luas namun jumlah pertumbuhan penduduknya belum signifikan mengalami kenaikan.

**Tabel 2.10**
**Distribusi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Kecamatan | Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cipocok Jaya | 2.725,36 | 2.797,46 | 2.860,27 | 2.916,80 | 2.831,35 |
| 2 | Curug | 1.073,97 | 1.078,73 | 1.077,34 | 1.081,15 | 1.461,50 |
| 3 | Kasemen | 1.489,03 | 1.509,93 | 1.494,27 | 1.537,72 | 1.486,83 |
| 4 | Serang | 8.517,12 | 8.524,27 | 8.618,62 | 8.676,43 | 8659,17 |
| 5 | Taktakan | 1.846,72 | 1.875,92 | 1.890,91 | 1.929,01 | 1.590,09 |
| 6 | Walantaka | 1.774,30 | 1.811,04 | 1.870,32 | 1.902,52 | 2.680,63 |
| **Rata-rata** | | **2.355,98** | **2.382,96** | **2.968,62** | **2.445,05** | **2.558,46** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

## B. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur usia penduduk Kota Serang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun dengan rata-rata selama jangka waktu tersebut sekitar 456.371 jiwa atau 70,43 persen, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun sebesar 172.601 jiwa (26,64 persen) dan usia diatas 65 tahun sebesar 19.000 (2,93 persen). Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dari tabel komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2016 - 2020 berikut.

**Tabel 2.11**
**Jumlah Penduduk Kota Serang Berdasarkan Kelompok Umur**
**Tahun 2016 – 2020**

| Kelompok Umur | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 – 4 | 49.863 | 44.793 | 53.622 | 54.994 | 58.410 |
| 5-9 | 59.090 | 59.738 | 55.796 | 63.247 | 68.557 |
| 10-14 | 60.713 | 60.417 | 53.549 | 56.459 | 63.757 |
| 15 – 19 | 60.925 | 62.072 | 59.733 | 41.716 | 48.873 |
| 20 – 24 | 62.416 | 62.943 | 63.091 | 62.151 | 63.260 |
| 25 – 29 | 59.518 | 60.944 | 60.168 | 62.172 | 63.833 |
| 30 – 34 | 57.840 | 57.920 | 57.481 | 59.870 | 60.675 |
| 35 – 39 | 50.990 | 53.903 | 54.199 | 55.534 | 56.105 |
| 40 – 44 | 47.507 | 48.115 | 49.228 | 50.984 | 51.328 |
| 45 – 49 | 39.068 | 41.386 | 42.869 | 44.023 | 44.500 |
| 50 – 54 | 29.434 | 30.537 | 33.175 | 35.814 | 36.582 |
| 55 – 59 | 21.226 | 22.292 | 24.186 | 25.846 | 25.654 |
| 60 – 64 | 13.820 | 14.196 | 16.097 | 17.191 | 18.463 |
| 65 – 69 | 7.723 | 8.185 | 9.564 | 11.118 | 10.339 |
| 70 -74 | 4.640 | 4.296 | 4.927 | 5.514 | 5.553 |
| 75+ | 3.661 | 3.895 | 4.901 | 5.559 | 5.123 |
| **Jumlah** | **628.434** | **635.632** | **642.586** | **652.192** | **681.012** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Sementara jika dilihat dari perbandingan jenis kelaminnya, penduduk Kota Serang pada Tahun 2020 terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 50,93 persen dan penduduk perempuan sebanyak 49,07 persen. Gambaran Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Serang berdasarkan komposisi sex ratio pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut:

**Tabel 2.12**
**Jumlah Penduduk Kota Serang Berdasarkan Sex Ratio**
**Tahun 2016 – 2020**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Sex Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 628.434 | 323.286 | 305.148 | 1,06 |
| 2017 | 635.632 | 325.997 | 309.635 | 1,05 |
| 2018 | 642.586 | 328.797 | 313.789 | 1,05 |
| 2019 | 652.192 | 332.912 | 319.280 | 1,04 |
| 2020 | 681.012 | 346.829 | 334.183 | 1,04 |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kota Serang selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terindikasi masih rendah, dimana sebagian besar tamat sekolah dasar persentase rata-rata sebesar 27,93 persen, diikuti penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 26,60 persen, serta penduduk berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 20,26 persen dan berpendidikan SMP/sederajat sebanyak 12,71 persen. Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut ini:

**Tabel 2.13**
**Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Pendidikan**
**Tahun 2016-2020**

| PENDIDIKAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata selama 5 tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 165.223 | 164.376 | 162.967 | 173.528 | 195.585 | 26,60 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 35.966 | 36.846 | 40.417 | 34.107 | 39.345 | 5,76 |
| Tamat SD / Sederajat | 188.173 | 184.501 | 181.157 | 177.972 | 173.220 | 27,93 |
| SMP / Sederajat | 80.450 | 82.037 | 83.044 | 82.649 | 83.504 | 12,71 |
| SMA / Sederajat | 120.458 | 126.809 | 130.885 | 137.449 | 140.939 | 20,26 |
| Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda | 10.296 | 10.599 | 11.198 | 11.462 | 11.652 | 1,70 |
| Diploma IV / Strata I | 25.367 | 27.672 | 29.826 | 31.743 | 33.325 | 4,57 |
| Strata II | 2.382 | 2.665 | 2.961 | 3.128 | 3.276 | 0,44 |
| Strata III | 119 | 127 | 131 | 154 | 166 | 0,02 |
| **JUMLAH** | **628.434** | **635.632** | **642.586** | **652.192** | **681.012** | **100** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Sementara dilihat dari ragam jenis pekerjaannya, Kota Serang menggambarkan karakter wilayah perkotaan transisional, dimana sektor jasa, perdagangan dan industri mulai tumbuh secara pesat. Gambaran

tentang keragaman pekerjaan penduduk Kota Serang dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini:

**Tabel 2.14**
**Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Pekerjaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga | 480.812 | 319.661 | 326.340 | 336.693 | 360.717 |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 637 | 109.655 | 104.075 | 97.738 | 101.595 |
| 3 | Pensiunan | 2.230 | 2.629 | 2.904 | 3.035 | 2.642 |
| 4 | PNS/TNI/POLRI, Perangkat Desa | 12.166 | 17.822 | 18.427 | 18.534 | 18.451 |
| 5 | Petani/Pekebun/Nelayan/ Peternak | 5.430 | 5.682 | 5.867 | 6.049 | 4.207 |
| 6 | Wiraswasta | 53.420 | 64.436 | 64.075 | 62.804 | 61.340 |
| 7 | Karyawan Swasta, BUMN/BUMD | 31.272 | 47.848 | 53.752 | 53.414 | 53.742 |
| 8 | Buruh Harian Lepas | 36.150 | 43.697 | 48.940 | 53.142 | 56.574 |
| 9 | Dosen/Guru/Peneliti/Tenaga kesehatan | 1.131 | 2.697 | 4.666 | 5.101 | 3.357 |
| 10 | Pedagang/Pialang | 2.160 | 1.905 | 2.662 | 2.014 | 1.961 |
| 11 | Lainnya | 3.026 | 19.600 | 10.878 | 13.668 | 16.426 |
| | **JUMLAH** | **628.434** | **635.632** | **642.586** | **652.192** | **681.012** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan Tabel diatas jenis pekerjaan yang mendominasi dari penduduk Kota Serang adalah Wiraswasta diikuti dengan karyawan swasta dan buruh harian lepas. Sedangkan jenis pekerjaan belum/tidak bekerja komponennya adalah ibu rumah tangga dan anak yang masih dalam tanggungan orang tua.

Karakter kota transisi juga tampak dari mulai beragamnya agama/kepercayaan yang dianut penduduk Kota Serang yang mulai mencerminkan komposisi penduduk yang heterogen. Penduduk Kota Serang mayoritas muslim sebesar 666.611 orang atau sebesar 97,89 persen. Hal ini tampak dari komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan sebagaimana tampak pada tabel 2.15 berikut:

**Tabel 2.15**
**Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Agama/Kepercayaan**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Agama | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 615.956 | 622.666 | 629.291 | 638.474 | 666.611 |
| 2 | Kristen Protestan | 6.781 | 7.203 | 7.651 | 8.003 | 8.530 |
| 3 | Kristen Katolik | 2.939 | 2.999 | 2.930 | 2.934 | 3.045 |
| 4 | Hindu | 256 | 257 | 261 | 246 | 273 |
| 5 | Budha | 2.498 | 2.504 | 2.449 | 2.532 | 2.541 |

| No | Agama | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Kepercayaan | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| **TOTAL JUMLAH** | | **628.434** | **635.632** | **642.586** | **652.192** | **681.012** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator ekonomi makro, misalnya: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, dan Persentase Penduduk Miskin, dan lain-lain. Meski indikator-indikator di atas tidak menggambarkan secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum mengingat sifatnya yang merupakan komposit dari fungsi perekonomian daerah yang merepresentasi kesejahteraan rakyat secara umum.

**A. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)**

Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau perode tertentu.

Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi serta perbandingan laju pertumbuhan perekonomian Kota Serang di bandingkan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.4**
**Perkembangan LPE Kota Serang, Provinsi dan Nasional**
**Tahun 2016 –2020 (%)**

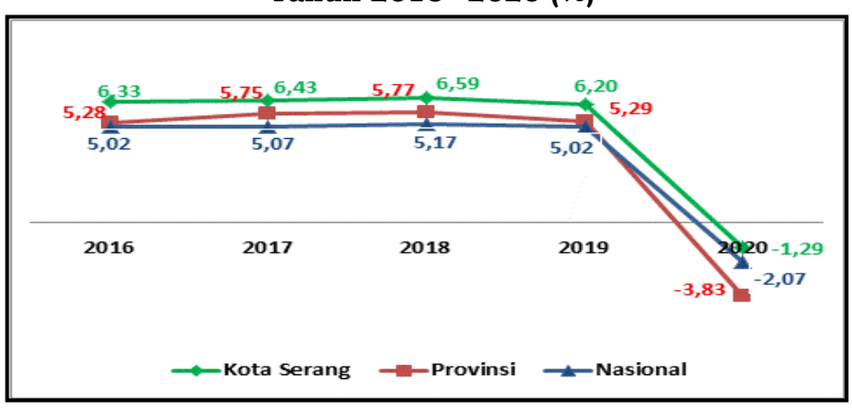


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Berdasarkan data BPS (2019) pertumbuhan ekonomi Kota Serang menunjukkan angka yang fluktuatif sepanjang tahun 2016–2019. LPE pada tahun 2016 senilai 6,28 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2017 dan pada tahun 2018 LPE Kota Serang senilai 6,59 persen. LPE pada tahun 2019 sedikit melambat yaitu senilai 6,20 persen dari tahun 2018 namun masih berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya pada kisaran 5-6 persen. Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 yang mengakibatkan hampir semua sub sektor perekonomian mengalami penurunan sehingga LPE mengalami perlambatan yang sangat signifikan, bahkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional pun mengalami kontraksi sangat tajam di triwulan 2 tahun 2020 hingga akhir tahun hanya mengalami sedikit perbaikan.

Tahun 2020 walaupun mengalami kontraksi senilai (-1,29 persen), nilai laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang lebih tinggi dibandingkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional hal ini dipengaruhi oleh kontribusi dari sektor informasi dan komunikasi serta sektor pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Pada 4 triwulan Tahun 2020, dari 17 sub sektor PDRB hanya 3 sub sektor yang tidak mengalami kontraksi dan selalu bernilai positif pertumbuhannya yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, serta informasi dan komunikasi.

Sementara gambaran mengenai konstruksi perekonomian daerah di Kota Serang dapat dilihat dari rerata kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

**Grafik 2.5**
**Rataan Distribusi PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 - 2020 (Dalam Juta Rupiah)**

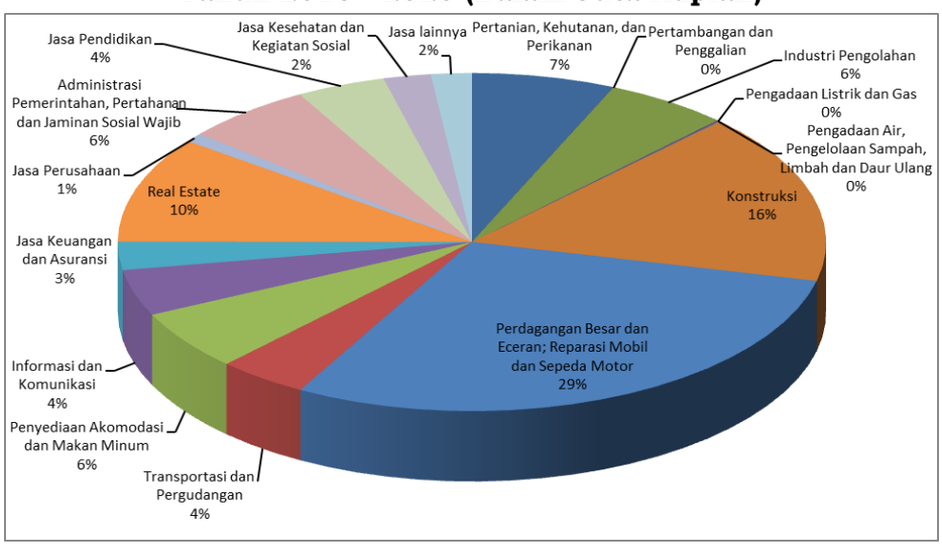


*Sumber : BPS Kota Serang, 2020*

Secara rata-rata berdasarkan lapangan usaha di Kota Serang sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020, lapangan usaha masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan sumbangan tertinggi sebesar 28 persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 18 persen, lapangan usaha real estate sebesar 9 persen. Selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum 6 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6 persen serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 6 persen. Namun di tahun 2020 kelima lapangan usaha yang disebutkan di awal tidak lagi mendominasi. Lapangan usaha yang mampu bertahan dengan tingkat pertumbuhan tetap positif adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta lapangan usaha komunikasi dan informatika.

Secara makro, perekonomian Kota Serang terus bertumbuh dalam empat tahun terakhir hingga tahun 2019 namun pertumbuhan ini tidak terus berlanjut mengingat perekonomian Kota Serang Tahun 2020 dihantam pandemi covid 19 sehingga banyak sektor dominan seperti Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor konstruksi sempat mengalami colaps. Dengan era new normal iklim usaha diharapkan akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga kian kondusif dan mampu meningkatkan nilai total PDRB kembali. Gambaran tentang perkembangan PDRB Kota Serang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.6**
**Perkembangan PDRB Kota Serang ADHK dan ADHB**
**Tahun 2016 - 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)**

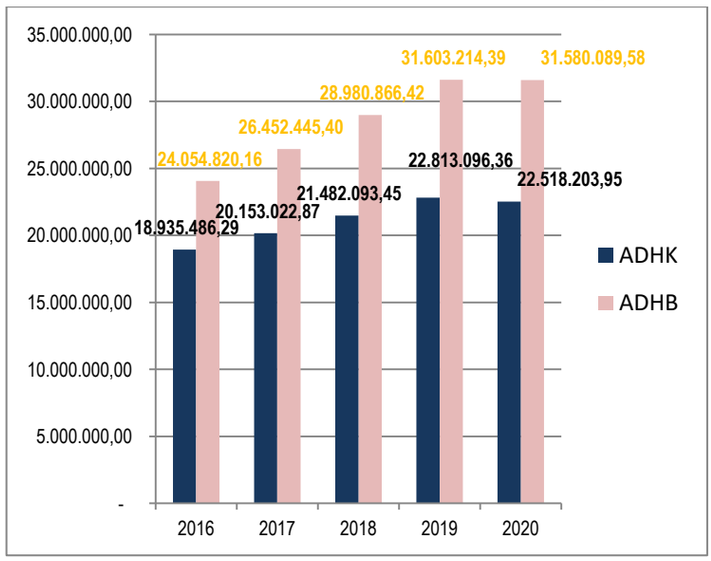


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Pengklasifikasian PDRB terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dan PDRB atas dasar harga konstan (adhk). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kategori atau sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.16**
**Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku**
**Kota Serang Tahun 2019 - 2020 (Juta Rupiah)**

| SEKTOR | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,67 | 5,32 | 4,79 | 5,46 |
| Pertambangan & Penggalian | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Industri Pengolahan | 4,67 | 4,41 | 4,73 | 4,48 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,15 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Konstruksi | 17,29 | 19,35 | 16,84 | 18,69 |
| Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 29,54 | 28,08 | 29,00 | 27,75 |
| Transportasi dan Pergudangan | 4,75 | 4,85 | 44,56 | 4,69 |
| Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 6,33 | 6,27 | 6,16 | 6,08 |
| Informasi dan Komunikasi | 5,95 | 3,80 | 6,57 | 4,10 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,90 | 3,00 | 3,11 | 3,25 |
| Real Estate | 10,22 | 9,01 | 10,44 | 9,21 |
| Jasa Perusahaan | 0,88 | 0,95 | 0,85 | 0,92 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib | 4,83 | 6,14 | 4,83 | 6,31 |
| Jasa Pendidikan | 3,82 | 4,46 | 3,91 | 4,62 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,10 | 2,12 | 2,25 | 2,27 |
| Jasa Lainnya | 1,87 | 2,03 | 1,80 | 1,99 |
| **Jumlah** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Dengan perkembangan pembangunan daerah, maka kondisi perekonomian Kota Serang setiap tahunnya biasanya selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang positif. Secara makro ekonomi

akibat pandemi Covid 19 kondisi ini berubah, dapat tergambarkan dari terkontraksinya nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) Kota Serang, yaitu dari Rp 31,60 trilyun pada Tahun 2019 menjadi Rp 31,58 trilyun pada Tahun 2020.

**Tabel 2.17**
**Pertumbuhan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku**
**Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)**

| SEKTOR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.474.762,90 | 1.542.035,12 | 1.624.147,14 | 1.681.054,50 | 1.724.981,56 |
| Pertambangan & Penggalian | 1.704,48 | 1.732,49 | 1.932,31 | 1.990,31 | 1.951,46 |
| Industri Pengolahan | 1.169.284,31 | 1.266.370,42 | 1.321.541,72 | 1.394.817,01 | 1.415.284,53 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 40.141,44 | 47.926,39 | 51.743,38 | 55.226,65 | 48.480,97 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.439,21 | 6.223,96 | 6.810,38 | 7.309,35 | 7.979,92 |
| Konstruksi | 4.474.044,13 | 4.935.427,86 | 5.533.562,23 | 6.116.457,44 | 5.901.557,23 |
| Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6.710.520,01 | 7.402.005,55 | 8.183.829,32 | 8.875.586,20 | 8.764.930,91 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1.150.820,24 | 1.268.497,74 | 1.385.896,24 | 1.531.925,10 | 1.480.452,40 |
| Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 1.533.254,16 | 1.694.733,85 | 1.837.445,77 | 1.981.057,41 | 1.919.477,44 |
| Informasi dan Komunikasi | 924.738,84 | 1.037.549,53 | 1.111.341,89 | 1.202.492,11 | 1.295.429,73 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 717.083,38 | 798.765,53 | 878.363,59 | 946.893,68 | 1.025.760,74 |
| Real Estate | 2.126.036,76 | 2.359.469,27 | 2.571.418,58 | 2.847.048,45 | 2.908.003,75 |
| Jasa Perusahaan | 221.439,28 | 245.075,37 | 266.421,69 | 299.573,40 | 289.159,99 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib | 1.521.503,84 | 1.646.636,96 | 1.758.505,01 | 1.940.101,46 | 1.991.507,94 |
| Jasa Pendidikan | 1.018.898,69 | 1.124.067,34 | 1.264.644,83 | 1.411.049,98 | 1.458.792,33 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 491.358,01 | 543.083,61 | 600.392,26 | 668.978,67 | 718.420,47 |
| Jasa Lainnya | 473.790,48 | 532.844,40 | 582.870,06 | 641.652,69 | 627.918,11 |
| **Jumlah** | **24.054.820,16** | **26.452.445,40** | **28.980.866,42** | **31.603.214,39** | **31.580.089,58** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Menurunnya PDRB adhb juga diikuti dengan terkontraksinya nilai PDRB adhk. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) dalam kurun waktu tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yaitu dari Rp 22,81 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp 22,51 trilyun pada tahun 2020.

**Tabel 2.18**
**Pertumbuhan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan**
**Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)**

| SEKTOR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.013.983,64 | 1.031.518,54 | 1.047.881,34 | 1.064.639,06 | 1.077.640,13 |
| Pertambangan & Penggalian | 1.281,86 | 1.278,95 | 1.369,75 | 1.394,68 | 1.339,73 |
| Industri Pengolahan | 956.343,09 | 1.002.152,55 | 1.024.041,09 | 1.065.416,90 | 1.064.608,62 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 25.224,71 | 27.003,28 | 28.669,38 | 30.108,58 | 26.555,77 |

| SEKTOR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.204,58 | 5.565,77 | 5.950,92 | 6.341,89 | 6.879,68 |
| Konstruksi | 3.186.526,20 | 3.411.855,46 | 3.671.156,47 | 3.944.657,63 | 3.792.788,31 |
| Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5.646.819,00 | 5.980.951,47 | 6.423.154,74 | 6.738.754,08 | 6.531.138,37 |
| Transportasi dan Pergudangan | 865.362,71 | 933.505,67 | 1.002.298,26 | 1.084.331,31 | 1.025.946,65 |
| Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 1.160.628,82 | 1.262.903,19 | 1.352.298,06 | 1.444.101,13 | 1.388.108,93 |
| Informasi dan Komunikasi | 1.067.699,09 | 1.161.616,65 | 1.260.237,90 | 1.358.032,36 | 1.479.712,06 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 555.209,30 | 592.468,64 | 629.997,39 | 661.028,36 | 701.210,03 |
| Real Estate | 1.896.234,42 | 2.029.545,10 | 2.165.727,57 | 2.330.972,59 | 2.351.485,14 |
| Jasa Perusahaan | 164.334,26 | 175.151,00 | 185.274,72 | 200.837,80 | 190.916,41 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib | 937.369,26 | 981.564,52 | 1.027.796,20 | 1.102.619,77 | 1.086.631,78 |
| Jasa Pendidikan | 720.023,29 | 764.305,42 | 814.367,42 | 872.187,51 | 880.822,16 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 391.678,88 | 420.956,03 | 444.613,75 | 480.182,85 | 506.304,80 |
| Jasa Lainnya | 341.563,38 | 370.680,62 | 397.258,42 | 427.489,78 | 406.115,29 |
| **Jumlah** | **18.935.486,96** | **20.153.022,87** | **21.482.093,45** | **22.813.096,36** | **22.518.203,95** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Meningkatnya PDRB adhb dalam empat tahun terakhir (2016-2019) menggambarkan kondusifitas iklim perekonomian daerah, sehingga PDRB adhb tumbuh rata-rata sebesar 9,74 persen selama kurun waktu empat tahun tersebut. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan positif sektor-sektor pembentuknya, terutama sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta jasa-jasa yang tumbuh signifikan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Serang. Kondisi berbeda terjadi di Tahun 2020 ketika pandemi Covid 19 melanda. Tujuh sektor PDRB dapat tumbuh positif sedangkan sisanya mengalami kontraksi. Berikut gambaran mengenai konstruksi perekonomian daerah di Kota Serang;

**Grafik 2.7**

**Persentase Distribusi Sektor Ekonomi Kota Serang Tahun 2020**

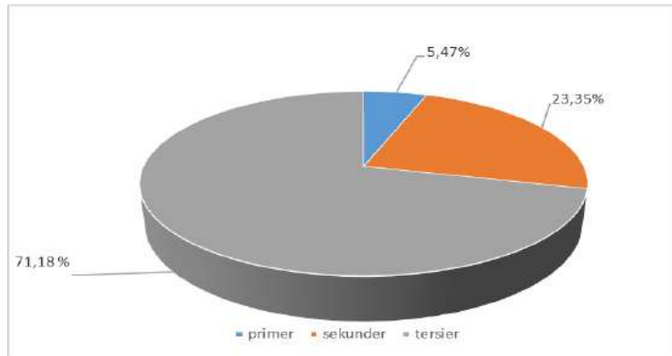


*Sumber : BPS Kota Serang, 2020*

Grafik di atas menggambarkan bahwa struktur perekonomian Kota Serang Tahun 2020 masih ditopang oleh Sektor Tersier (terdiri dari Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kategori Informasi dan Komunikasi, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Real Estate, Kategori Jasa Perusahaan, Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Kategori Jasa lainnya) sebesar 71,18 persen, selebihnya disumbang oleh Sektor Sekunder (Kategori Industri Pengolahan, Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Kategori Konstruksi) sebesar 23,35 persen dan Sektor Primer (Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalian) sebesar 5,47 persen.

## B. Laju Inflasi

Pandemi Covid 19 tidak dielakan lagi mempengaruhi iklim perekonomian nasional dan regional yang cukup terasa dampaknya terhadap perekonomian Kota Serang. Posisi Kota Serang yang menjadi titik aglomerasi perekonomian wilayah di samping berdampak positif bagi kemajuan ekonomi, juga berdampak negatif berupa potensi inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fakta ini tampak dari tingkat inflasi di Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya resiliensi perekonomian daerah akibat faktor-faktor eksternal tersebut. Dalam empat tahun terakhir, inflasi tahun 2017 cukup tinggi yaitu sebesar 5,17 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1,91 persen. Rata-rata laju inflasi selama kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 3,44 persen, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

**Grafik 2.8**
**Laju Inflasi di Kota Serang Tahun 2016 - 2020 (%)**

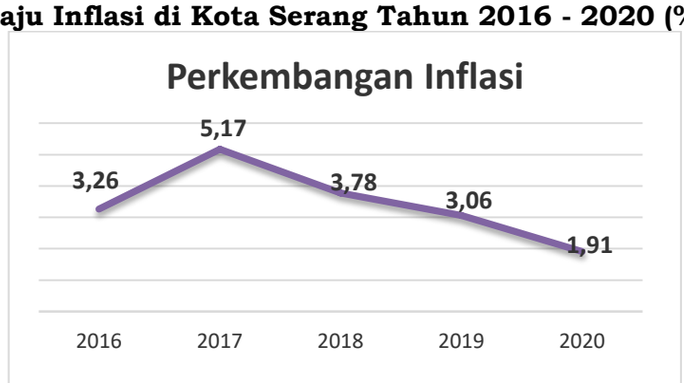


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

## C. PDRB Perkapita

PDRB per Kapita merupakan indikator kesejahteraan yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2016-2019, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Serang mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Fakta ini menjelaskan kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari trend peningkatan nilai PDRB per kapita tersebut yang tercatat naik signifikan sebesar 28,98 persen dari sebesar Rp 36,72 juta per jiwa pada tahun 2016 menjadi Rp 45,89 juta per jiwa pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 karena dampak pandemi Covid 19 menyebabkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku terkontraksi sehingga mempengaruhi nilai PDRB perkapita menjadi sebesar Rp 45,17 juta per jiwa. Ini artinya tingkat kesejahteraan penduduk Kota Serang sedikit menurun. Gambaran trend perkembangan PDRB per kapita ini dapat dilihat pada grafik 2.9 berikut ini:

**Grafik 2.9**
**PDRB Per Kapita (Rp juta/jiwa) Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

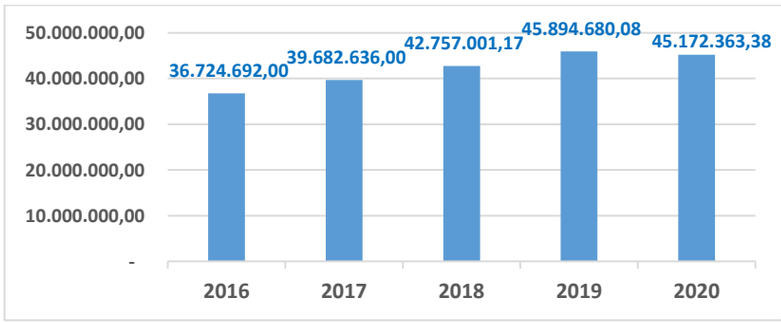


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

## D. Persentase Penduduk Miskin

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, kenaikan harga minyak dunia dan sebagainya. Persentase penduduk miskin di Kota Serang pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,58 persen kondisi ini dapat dikendalikan secara efektif hingga menurun secara optimis serta mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 5,28 persen. Akibat pandemi Covid 19 tingkat kemiskinan Kota Serang Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 6,06 persen. Gambaran mengenai dinamika angka

kemiskinan di Kota Serang sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.10**
**Persentase Penduduk Miskin Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

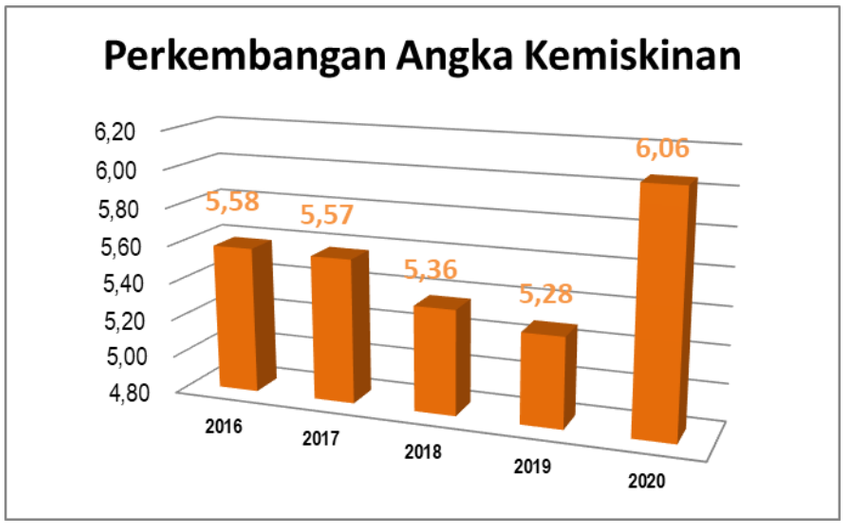


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

**Grafik 2.11**
**Perkembangan Penduduk Miskin Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

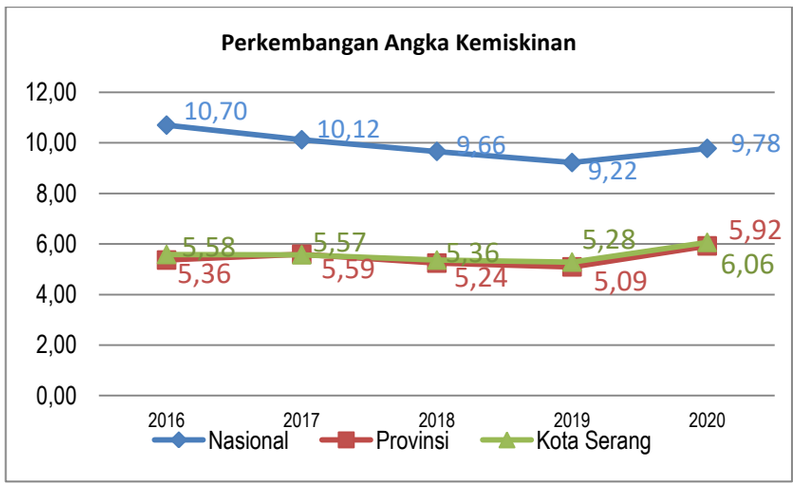


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Perkembangan penduduk miskin di Kota Serang berbanding lurus dengan trend peningkatan Indeks Daya Beli Masyarakat yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Meski peningkatannya tidak begitu besar namun daya beli masyarakat terbukti cenderung naik dari tahun 2016 sampai denga tahun 2019. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu

terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Tercatat pada pada tahun 2019 pengeluaran rata-rata per bulan masyarakat sebesar Rp. 1.341.800/bulan namun akibat dampak Covid 19 turun menjadi Rp. 1.321.200,- pada tahun 2020. Gambaran tentang trend kenaikan pengeluaran perkapita dimaksud tampak nyata sebagaimana digambarkan secara grafis sebagai berikut:

**Grafik 2.12**
**Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Kota Serang Tahun 2016 – 2020 (dalam Rupiah)**

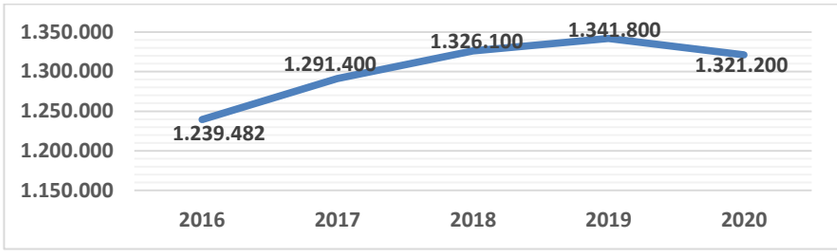


*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga tercermin dari meningkatnya indikator komposit pembangunan manusia, yang menggambarkan secara kuantitatif kapasitas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

IPM Kota Serang selama kurun waktu empat tahun (2016-2019) menunjukkan kemajuan yang positif secara kumulatif maupun pada masing-masing indeks kompositnya. IPM pada tahun 2016 sebesar 71,09; naik cukup memuaskan hingga tahun 2019 sebesar 72,10 atau naik sebesar 1,01 poin dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,56 persen per tahun.

Berdasarkan grafik 2.13 capaian IPM Kota Serang pada Tahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu mencapai nilai 72,16 dengan perkiraan capaian komponen penyusunnya yaitu Indeks Pendidikan sebesar 64,70, Indeks Kesehatan 73,85 dan Indeks Pengeluaran sebesar 78,65. Apabila dilihat dari komponen penyusun IPM maka dapat terlihat bahwa Indek Pendidikan menyumbang nilai yang paling rendah sementara Indek Pendapatan yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat menyumbang nilai yang paling besar

walaupun akibat pandemi Covid 19 nilai indeks kompositnya mengalami penurunan sebesar 0,47 persen dari tahun 2019 .

Gambaran tentang perkembangan aspek dasar IPM Kota Serang Tahun 2016-2020 di atas dapat dilihat pada grafik 2.13.

**Grafik 2.13**
**Perkembangan Aspek Dasar Indeks Pembangunan Manusia**
**Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

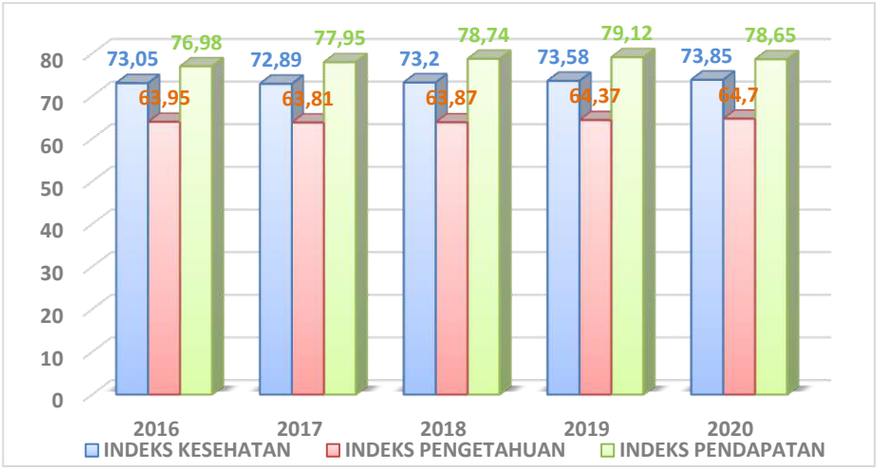


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Gambaran tentang kemajuan kualitas pembangunan manusia di atas dapat dilihat pada grafik 2.14 berikut ini.

**Grafik 2.14**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**
**Tahun 2016 – 2020**

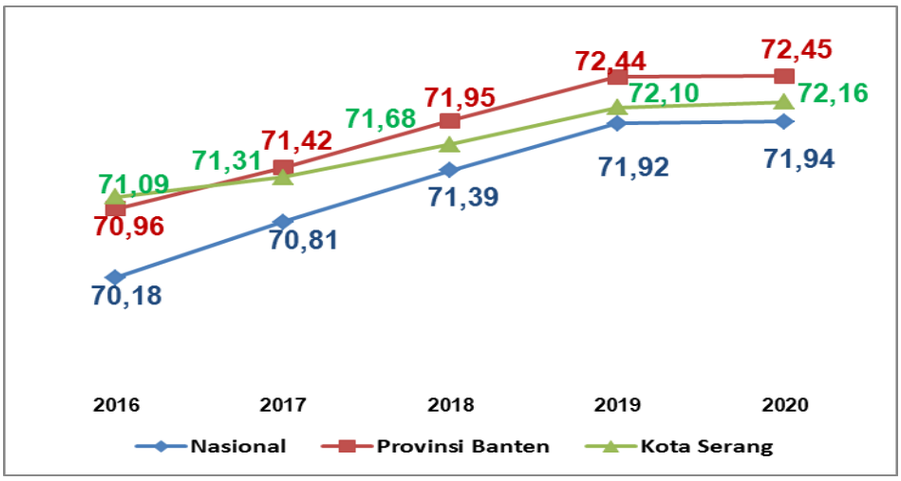


*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Berdasarkan grafik 2.14 dapat dilihat pertumbuhan IPM Kota Serang pada tahun 2016 berada diatas nilai IPM Provinsi Banten dan Nasional namun pada tahun 2017 hingga 2020 nilai IPM Kota Serang berada di bawah nilai Provinsi Banten namun di atas nilai nasional. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor karena komponen IPM tersusun dari Indeks Pengetahuan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendapatan.

Komponen IPM terendah Kota Serang yaitu indeks pengetahuan, hal ini menggambarkan bahwa pendidikan di Kota Serang khususnya angka rata-rata lama sekolah masih perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah setempat selain itu kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan untuk menaikkan angka IPM ini.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja

**A. Pendidikan**

Pemerintah Kota Serang bertanggung jawab terhadap pembangunan di segala bidang. Yang memiliki peran sangat strategis pembangunan daerah antara lain adalah pada bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat akan sangat mendukung pembangunan Kota Serang secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan melalui tingkat pendidikan yang tinggi maka tingkat kemajuan pembangunan akan berjalan searah dengan daya saing SDM di Kota Serang. Hal ini pula yang mendasari Pemerintah Kota Serang perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kota Serang.

Sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tiap jenjang pendidikan. Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya). Data pada dinas terkait menunjukkan peningkatan AMH selama kurun waktu lima tahun. AMH pada tahun 2016 telah mencapai 96,25% dan meningkat di tahun 2017 mencapai 97,47 persen dan menjadi 100 persen pada tahun 2020. Berikut tabel 2.19 menggambarkan perkembangan angka melek huruf Kota Serang Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.19**
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk usia di atas 15 th yang bisa membaca dan menulis | 441.564 | 458.776 | 479.352 | 477.396 | 486.160 |
| 2 | Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas | 458.768 | 470.684 | 479.619 | 477.492 | 486.160 |
| | **Angka Melek Huruf** | **96,25** | **97,47** | **99,94** | **99,98** | **100,00** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.20**
**Angka Melek Huruf Kota Serang Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk usia di atas 15 th yang bisa membaca dan menulis | Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas | Angka Melek Huruf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 116.424 | 116.424 | 100,0 |
| 2 | Curug | 54.555 | 54.555 | 100,0 |
| 3 | Kasemen | 30.155 | 30.155 | 100,0 |
| 4 | Serang | 125.729 | 125.729 | 100,0 |
| 5 | Taktakan | 96.062 | 96.062 | 100,0 |
| 6 | Walantaka | 63.235 | 63.235 | 100,0 |
| | **Jumlah** | **486.160** | **486.160** | **100,00** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Tabel 2.21 menunjukkan rata-rata lama sekolah di tahun 2020 dan grafik 2.15 menunjukkan perkembangan angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu lima tahun.

**Tabel 2.21**
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 th | 39.454 | 40.526 | 41.265 | 41.398 | 42.600 |
| 2 | Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas | 458.768 | 470.684 | 479.619 | 477.492 | 486.160 |
| | **Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** | **8,60** | **8,61** | **8,62** | **8,67** | **8,76** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Serang yang dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dimana pada akhir tahun 2020

RLS telah naik menjadi 8,76 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa Penduduk Kota Serang menempuh jenis pendidikan formal selama 8,76 tahun. Hal ini masih di bawah target Pemerintah Pusat dimana mencanangkan wajib belajar sekolah 12 tahun.

Dari tabel 2.21 di atas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Serang selalu meningkat meskipun kenaikannya tidak signifikan. Sedangkan grafik 2.15 di bawah menggambarkan penduduk di Kota Serang hampir seluruhnya sudah melek huruf dengan capaian tahun 2020 sebesar 100 persen.

**Grafik 2.15**
**Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

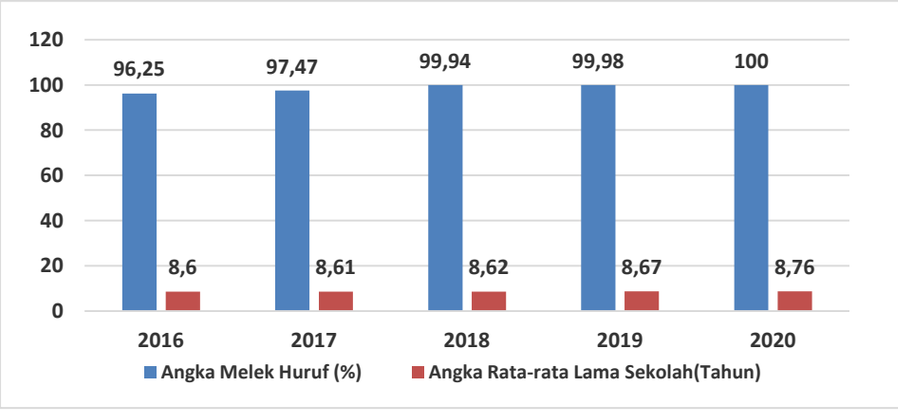


*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Tabel 2.22 berikut mendeskripsikan indikator capaian layanan pendidikan di Kota Serang pada kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 2.22**
**Pencapaian Layanan Pendidikan Tahun 2016 – 2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Angka Melek Huruf | % | 96,25 | 97,47 | 99,94 | 99,98 | 100,00 |
| 1.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Thn | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,67 | 8,76 |
| 1.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | | | | |
| | APK SD/MI/Sederajat | % | 108,72 | 108,78 | 134,85 | 128,60 | 126,51 |
| | APK SMP/MTs/Sederajat | % | 92,24 | 89,32 | 117,04 | 117,35 | 117,97 |
| | APK SMA/SMK/MA/Sederajat | % | 70,51 | 72,61 | - | - | - |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | | | |
| | APM SD/MI/Sederajat | % | 99,11 | 97,55 | 100 | 100 | 100 |
| | APM SMP/MTs/Sederajat | % | ` | 80,98 | 99,28 | 99,45 | 99,46 |
| | APM SMA/SMK/MA/Sederajat | % | 60,57 | 60,02 | - | - | |
| 1.4 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): | | | | | | |
| | Angka Partisipasi PAUD (APM) | % | 84,96 | 91,48 | 93,20 | 93,65 | 93,66 |
| 1.5 | Angka Putus Sekolah: | | | | | | |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,05 |

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0,14 | 0,15 | 0,33 | 0,29 | 0,25 |
| | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | % | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 1.6 | Angka Kelulusan: | | | | | | |
| | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | % | 91,43 | 99,86 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | % | 99,43 | 99,42 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.7 | Angka Melanjutkan: | | | | | | |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 91,57 | 108,54 | 72,41 | 100 | 100,00 |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 99,70 | 138,58 | 100,00 | 100 | 100,00 |

*Sumber: Disdikbud Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan urusan pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar 12 tahun. Angka putus sekolah masih terjadi di Kota Serang yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain biaya pendidikan yang semakin tinggi. Namun pemerintah daerah telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah pertama, hal ini sangat membantu sekali untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta murid berprestasi yang kesulitan melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi.

## B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Derajat kesehatan merupakan salah satu parameter kesejahteraan rakyat yang diukur dari sejumlah indikator, antara lain: angka harapan hidup, tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, tingkat kesakitan, angka gizi buruk, dan lain-lain. Tabel 2.23 berikut ini memberikan gambaran tentang kondisi eksisting dan capaian kinerja layanan kesehatan di Kota Serang sebagaimana direpresentasi oleh sejumlah indikator dimaksud.

**Tabel 2.23**
**Capaian Kinerja Layanan Kesehatan di Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Rasio | 11 | 14 | 0,18 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Angka Kematian Bayi (AKB) | % | 0,30 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angka Usia Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 67,36 | 67,38 | 67,58 | 67,83 | 68,00 |
| 4 | Persentase balita gizi buruk | % | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,17 | 0,16 |
| 5 | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : BPS Kota Serang, Dinkes Kota Serang dan SIPD Kota Serang, 2020*

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Serang selama kurun waktu 2018–2020 mengalami fluktuasi namun secara absolute jumlah ibu yang meninggal cenderung menurun. Sedangkan Angka Kematian Bayi dapat ditekan menjadi 0,22 persen pada tahun 2019 namun meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,25 persen. Persentase balita gizi buruk selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami fluktuasi di tahun 2020 pada angka 0,16 persen. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Serang mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mencapai 68 tahun. Cakupan desa siaga aktif mencapai 100 persen.

Permasalahan kinerja layanan kesehatan yang belum terselesaikan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita gizi buruk yang masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita gizi buruk ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan lintas Sektor dan pemangku stakeholder terkait karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, pengetahuan tentang kesehatan dan pemberian nutrisi makanan serta kesadaran untuk hidup sehat.

## C. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan informasi penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun dibidang sosial. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24**
**Capaian Kinerja Ketenagakerjaan di Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkatan kerja | Org | 263.521 | 286.169 | 312.412 | 307.276 | 322.484 |
| | a. Penduduk yang bekerja | Org | 202.328 | 268.480 | 209.267 | 282.443 | 292.638 |
| | b.Pengangguran terbuka | Org | 39.271 | 24.720 | 37.555 | 24.833 | 29.846 |
| 2 | Bukan Angkatan Kerja | Org | 185.690 | 172.280 | 182.359 | 175.770 | 183.064 |
| 3 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 57,44 | 60,80 | 65,14 | 63,61 | 63,79 |
| 4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 59,52 | 62,99 | 63,03 | 63,61 | 63,79 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 8,87 | 8,43 | 8,16 | 8,08 | 9,26 |
| 6 | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | % | 91,13 | 91,57 | 91.84 | 91,92 | 90,74 |
| 7 | Rasio Penduduk yang Bekerja | Rasio | 76,78 | 93,82 | 66,98 | 91,92 | 90,74 |
| 8 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | % | 71,86 | 70,40 | 68,66 | 74,32 | 62,47 |
| 9 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | Rasio | 44,10 | 57,89 | 44,27 | 58,65 | 58,67 |

*Sumber : SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Pada Tahun 2020 disebabkan antara lain akibat dampak pandemi Covid 19 dimana banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak COVID 19 selain itu karena tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, juga karena perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Serang sampai dengan Tahun 2020 sebesar 9,26 persen meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 8,08 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. TPAK pada tahun 2016 sebesar 59,52 persen dan meningkat di tahun 2017 menjadi 62,99 persen, angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 sebesar 63,61 persen. TPAK Tahun 2020 naik

menjadi 63,79 persen. TPAK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja dipasar tenaga kerja yang ada. Ukuran ini dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas. TPAK memberikan informasi tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

## D. Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminalitas oleh aparat penegak hukum. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang terjadi selama tahun 2016-2020. Tabel 2.25 menggambarkan angka kriminalitas yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016-2020.

**Tabel 2.25**
**Kasus Kriminalitas yang Terjadi di Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Kejahatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembunuhan | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Penganiayaan Berat | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Penganiayaan ringan | 102 | 80 | 80 | 78 | 86 |
| 4 | Penculikan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Pencurian dengan Kekerasan | 40 | 0 | 26 | 20 | 10 |
| 6 | Pencurian dengan Pemberatan | 156 | 0 | 118 | 112 | 103 |
| 7 | Pencurian Ranmor | 220 | 197 | 123 | 146 | 177 |
| 8 | Pencurian Kawat Telpon | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pemerkosaan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Narkotika | 62 | 49 | 52 | 65 | 98 |
| 11 | Penipuan | 146 | 124 | 71 | 75 | 99 |
| 12 | Senpi/Handak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pemerasan | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Penggelapan | 37 | 816 | 20 | 21 | 32 |
| 15 | Pemalsuan uang | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| | **Jumlah** | **811** | **1282** | **494** | **532** | **606** |

*Sumber: Kepolisian Resort Kota Serang, 2021*

Dari tabel 2.25 di atas dapat dilihat bahwa dari kurun waktu 2018 – 2020 jenis kejahatan di Kota Serang cenderung meningkat. Jenis

kejahatan yang meningkat tajam yaitu kasus pencurian ranmor mencapai 177 kasus pada tahun 2020.

## E. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Serang menunjukkan adanya penurunan persentase sepanjang 5 tahun ini. Persentase ini diperoleh dengan melakukan perbandingan antara jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I terhadap jumlah seluruh kepala keluarga di Kota Serang sebagaimana tersaji pada Tabel 2.26 di bawah ini.

**Tabel 2.26**
**Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Keluarga Pra Sejahtera | 22.648 | 22.672 | 22.948 | 23.030 | 23.030 |
| 2 | Jumlah Keluarga Sejahtera I | 82.266 | 82.312 | 74.379 | 74.456 | 74.456 |
| 3 | Jumlah Keluarga | 133.079 | 142.176 | 142.176 | 144.272 | 144.272 |
| | **Persentase** | **78,83** | **73,84** | **68,45** | **67,64** | **67,64** |

*Sumber: DP3AKB Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2021*

Berdasarkan Tabel di atas presentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I meningkat pada tahun 2016 sejumlah 78,83 persen hal ini disebabkan terjadi pendataan ulang di tahun 2016 dan diketahui bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I meningkat cukup signifikan. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Kota Serang sehingga jumlah keluarga Sejahtera I berkurang dan persentase perbandingannya dengan total seluruh jumlah keluarga yang terdata dari DP3AKB berjumlah 68,45 persen. Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 67,64 persen. Sedangkan Tahun 2020 karena refocusing dan kondisi pandemic, DP3AKB tidak melakukan pendataan keluarga sehingga data keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 masih menggunakan data updating keluarga tahun sebelumnya.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga Kota Serang selama kurun waktu 2016-2020 rasio jumlah grup kesenian maupun jumlah klub dan jumlah gedung olahraga masih jauh berbeda, namun event kesenian dan olahraga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan

kegemaran akan kesenian dan olahraga di Kota Serang masih tinggi sebagaimana tersaji pada tabel 2.27 dan tabel 2.28 sebagai berikut:

**Tabel 2.27**
**Perkembangan Seni dan Budaya Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk | Rasio | 5,81 | 5,19 | 0,84 | 5,06 | 4,85 |
| 2 | Jumlah grup kesenian | Group | 365 | 330 | 54 | 330 | 330 |
| 3 | Jumlah event seni budaya dalam 1 tahun | Event | 15 | 9 | 9 | 9 | 2 |

*Sumber: Dindikbud Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah grup kesenian tidak mengalami perubahan pada 2020 tetap sebanyak 330 grup. Karena jumlah penduduk pada tahun 2020 meningkat maka rasio grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami penurunan. Di bidang kebudayaan, Pemerintah Kota Serang terus berupaya untuk meningkatkan seni budaya dengan mengadakan event-event kebudayaan, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah grup kesenian. Namun karena adanya pembatasan kegiatan berkerumun selama kondisi pandemi maka jumlah event seni budaya Tahun 2020 menurun.

**Tabel 2.28**
**Perkembangan Olahraga Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk | Rasio | 2,23 | 2,23 | 2,16 | 2,5 | 2,39 |
| 2 | Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk | Rasio | 0.064 | 0.110 | 0.093 | 0,123 | 0,117 |
| 3 | Jumlah klub olahraga | Klub | 140 | 142 | 139 | 163 | 163 |
| 4 | Jumlah gedung olahraga | Gedung | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Jumlah event olahraga dalam 1 tahun | Event | 2 | 2 | 4 | 4 | - |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah klub olahraga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya berfluktuatif. Tahun 2020 jumlah klub olahraga tetap sama dengan tahun sebelumnya. Di sektor olahraga Pemerintah Kota Serang terus berupaya untuk meningkatkan prestasi melalui pelatihan rutin, pembangunan/rehabilitasi gedung olahraga, mengadakan event-event

olahraga setiap tahun dan bantuan dana pembinaan bagi organisasi olahraga di bawah naungan KONI.

**Tabel 2.29**
**Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga**
**Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah grup kesenian Per 10.000 Penduduk | Jumlah Gedung kesenian Per 10.000 Penduduk | Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk | Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 5,07 | 0 | 2,38 | 0,52 |
| 2 | Curug | 2,81 | 0 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Kasemen | 3,32 | 0 | 0,49 | 0,10 |
| 4 | Serang | 7,78 | 0 | 3,22 | 1,00 |
| 5 | Taktakan | 3,59 | 0 | 2,57 | 0,10 |
| 6 | Walantaka | 1,73 | 0 | 1,02 | 0,00 |
| | **Jumlah** | **4,84** | **0** | **2,04** | **0,47** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

### A. Layanan Urusan Wajib Dasar

### 1) Pendidikan

Urusan wajib yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Serang adalah Pendidikan. Hal ini karena Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan. Sementara itu SDM yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. Hal ini akan membawa dampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.30**
**Perkembangan Capaian Indikator Pendidikan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | | | |
| | 1. APS SD/MI/Sederajat | % | 100,00 | 99,45 | 105,04 | 105,90 | 105,90 |
| | 2. APS SMP/MTs/Sederajat | % | 95,10 | 93,95 | 99,28 | 99,49 | 99,50 |
| | 3. APS SMA/SMK/MA/Sederajat | % | 68,59 | 67,96 | - | - | - |
| 1.2 | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | |
| | 1. Gedung SD/MI berkondisi baik | % | 77,58 | 90,27 | 94,06 | 94,25 | 94,45 |
| | 2. Gedung SMP/MTs berkondisi baik | % | 77,20 | 89,16 | 93,38 | 94,00 | 95,65 |

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Gedung SMA/SMK/MA berkondisi baik | % | 80,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Rasio Ketersediaan Sekolah: | | | | | | |
| | 1. RKS SD/MI | Rasio | 37,91 | 37,98 | 41,44 | 41,64 | 41,94 |
| | 2. RKS SMP/MTs | Rasio | 35,43 | 36,23 | 41,63 | 41,73 | 41,83 |
| | 3. RKS SMA/SMK/MA | Rasio | 29,30 | 28,60 | - | 0 | - |
| 1.4 | Rasio Jumlah Guru/Jumlah Murid Per kelas | | | | | | |
| | 1. RGM-K SD/MI | Rasio | 1:25 | 1:23 | 1:35 | 1:40 | 1:42 |
| | 2. RGM-K SMP/MTs | Rasio | 1:13 | 1:19 | 1:16 | 1:40 | 1:48 |
| | 3. RGM-K SMA/SMK/MA | Rasio | 1:10 | 1:10 | - | - | - |
| 1.5 | Jumlah Tenaga Pendidik | | | | | | |
| | 1. Tenaga Pendidik Paud/TK/RA | Orang | 684 | 850 | 850 | 850 | 1043 |
| | 2. Tenaga Pendidik SD/MI | Orang | 3157 | 3340 | 3782 | 3424 | 3.309 |
| | 3. Tenaga Pendidik SMP/MTs | Orang | 2567 | 1765 | 2389 | 1619 | 2.684 |
| | 4. Tenaga Pendidik SMA/SMK/MA | Orang | 2659 | - | - | 0 | - |
| 1.6 | Jumlah Guru Bersertifikasi | | | | | | |
| | 1. Guru SD/MI | Orang | 1427 | 1487 | 1851 | 1685 | 2941 |
| | 2. Guru SMP/MTs | Orang | 589 | 676 | 804 | 674 | 1303 |
| | 3. Guru SMA/SMK/MA | Orang | 1.250 | - | - | 0 | - |
| 1.7 | Jumlah Ruang Kelas | | | | | | |
| | 1. RKB TK/RA | Ruang | 384 | 372 | 506 | 433 | 438 |
| | 2. RKB SD/MI | Ruang | 2.462 | 2.231 | 2.139 | 2.278 | 2320 |
| | 3. RKB SMP/MTs | Ruang | 842 | 904 | 846 | 983 | 892 |
| | 4. RKB SMA/SMK/MA | Ruang | 976 | - | - | 0 | - |
| 1.8 | Jumlah Lembaga Pendidikan | Unit | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.31**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SD/MI/PAKET A** | | | | | |
| 1.1 | Jumlah siswa usia 7-12 th | 71.481 | 71.230 | 68.943 | 69.505 | 77.775 |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn | 71.481 | 71.624 | 65.632 | 65.632 | 73.441 |
| 1.3 | APS SD/MI/PAKET A | 100,00 | 99,45 | 105,04 | 105,90 | 105,90 |
| 2 | **SMP/MTS/PAKET B** | | | | | |
| 2.1 | Jumlah siswa usia 13-15 th | 34.625 | 34.748 | 31.956 | 32.011 | 32.003 |

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn | 36.409 | 36.986 | 32.188 | 32.188 | 32.167 |
| 2.3 | APS SMP/MTS/PAKET B | 95,10 | 93,95 | 99,28 | 99,49 | 99,50 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Pembangunan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan terdiri atas pengembangan sarana prasarana sekolah dan kualitas pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari nilai APM, APK dan APS yang selalu meningkat setiap tahunnya. Fasilitas yang dibangun untuk memenuhi standar pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang selama kurun waktu 2016-2019, hal ini dapat dilihat dengan persentase gedung berkondisi baik semakin meningkat dan di tahun 2020 sebesar 100 persen untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

**Tabel 2.32**
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2020**

| No | Kecamatan | SD/MI/PAKET A | | | SMP/MTS/PAKET B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah siswa usia 7-12 th | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn | APS | Jumlah siswa usia 13-15 th | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn | APS |
| 1 | Cipocok Jaya | 10.848 | 10.859 | 99,9 | 4.391 | 4.652 | 94,4 |
| 2 | Curug | 9.776 | 5.848 | 167,2 | 4.051 | 2.625 | 154,3 |
| 3 | Kasemen | 9.488 | 11.396 | 83,3 | 5.141 | 5.217 | 98,5 |
| 4 | Serang | 28.509 | 24.382 | 116,9 | 10.621 | 10.672 | 99,5 |
| 5 | Taktakan | 9.854 | 10.649 | 92,5 | 3.854 | 4.627 | 83,3 |
| 6 | Walantaka | 9.300 | 10.307 | 90,2 | 3.945 | 4.374 | 90,2 |
| | **Jumlah** | **77.775** | **73.441** | **105,90** | **32.003** | **32.167** | **99,50** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.33**
**Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) dan Penduduk Usia Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SD/MI/PAKET A** | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Gedung Sekolah | 271 | 272 | 272 | 276 | 276 |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn | 71.481 | 71.624 | 65.632 | 66.282 | 73.441 |
| 1.3 | RKS SD/MI/PAKET A | 37,91 | 37,98 | 41,44 | 41,64 | 41,94 |
| 2 | **SMP/MTS/PAKET B** | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Gedung Sekolah | 129 | 134 | 134 | 134 | 148 |
| 2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn | 36.409 | 36.986 | 32.188 | 32.111 | 32.167 |
| 2.3 | RKS SMP/MTS/PAKET B | 35,43 | 36,23 | 41,63 | 41,73 | 41,83 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Rasio ketersediaan sekolah diukur dari jumlah gedung sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Berdasarkan tabel diatas bahwa RKS untuk pendidikan dasar di Kota Serang baru tercapai sebesar 41,94 persen untuk SD dan 41,83 persen untuk SMP. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan gedung sekolah di Kota Serang belum bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah. Sedangkan untuk rasio jumlah murid dengan guru perkelas sudah memenuhi standar mutu perbandingan 1:42 dan 1:48 per kelas yang berarti untuk satu guru memegang 42 murid per kelas untuk tingkat SD dan 48 murid per kelas untuk tingkat SMP .

**Tabel 2.34**
**Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2020**

| No | Kecamatan | SD/MI/PAKET A | | | SMP/MTS/PAKET B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Gedung Sekolah | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn | RKS | Jumlah Gedung Sekolah | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn | RKS |
| 1 | Cipocok Jaya | 41 | 10,859 | 37.76 | 20 | 4,652 | 42.99 |
| 2 | Curug | 25 | 5,848 | 42.75 | 13 | 2,625 | 49.52 |
| 3 | Kasemen | 41 | 11,396 | 35.98 | 9 | 5,217 | 17.25 |
| 4 | Serang | 89 | 24,382 | 36.50 | 51 | 10,672 | 47.79 |
| 5 | Taktakan | 41 | 10,649 | 38.50 | 26 | 4,627 | 56.19 |
| 6 | Walantaka | 40 | 10,307 | 38.81 | 24 | 4,374 | 54.87 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Meningkatnya aksesibilitas pendidikan sebagaimana tampak pada APK dan APM sebanding dengan meningkatnya cakupan layanan pendidikan sebagaimana tergambarkan dengan kenaikan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan di Kota Serang, pada jenjang pra sekolah, Sekolah Dasar dan lembaga pendidikan non formal. Berikut gambaran tentang eksisting jumlah lembaga-lembaga pendidikan serta kondisi prasarana pendidikan di Kota Serang.

**Tabel 2.35**
**Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020**

| No | Jenjang Pendidikan | Penyelenggara | Kecamatan | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Serang | Cipocok Jaya | Kasemen | Taktakan | Walantaka | Curug | |
| 1 | TK | Negeri | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| | TK | Swasta | 56 | 24 | 10 | 7 | 13 | 2 | 114 |
| | Madrasah | | 33 | 6 | 7 | 15 | 10 | 8 | 79 |
| 2 | SD | Negeri | 72 | 28 | 39 | 34 | 29 | 21 | 223 |
| | SD | Swasta | 15 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 32 |
| | Madrasah | | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 21 |

| No | Jenjang Pendidikan | Penyelenggara | Kecamatan | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Serang | Cipocok Jaya | Kasemen | Taktakan | Walantaka | Curug | |
| 3 | SMP | Negeri | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| | SMP | Swasta | 25 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 54 |
| | Madrasah | | 17 | 6 | 3 | 13 | 12 | 9 | 60 |
| 4 | SMA | Negeri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| | SMA | Swasta | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 23 |
| | Madrasah | | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 27 |
| 5 | SMK | Negeri | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | SMK | Swasta | 17 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Pondok | Pesantren | 38 | 10 | 17 | 29 | 14 | 28 | 136 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2020*

Permasalahan di urusan pendidikan Kota Serang yaitu masih terbatasnya jumlah guru yang mengajar di pendidikan dasar, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan kualitas kompetensi siswa yang bersekolah masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,76 persen sedangkan nasional sudah mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun.

**2) Kesehatan**

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak terkecuali di wilayah kota Serang. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai kondisi kesehatan yang lebih baik.

Setiap tahunnya pemerintah kota Serang melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Guna menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal, maka terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur. Melalui perbandingan antara target dan realisasi, akan memudahkan bagi Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan untuk menggambarkan bagaimana indikator tersebut dapat terus tercapai di masyarakat.

Tabel 2.36 dan 2.37 berikut memberikan gambaran tentang eksisting capaian urusan kesehatan di Kota Serang selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Dari tabel tersebut capaian urusan kesehatan masih harus ditingkatkan sehingga layanan kesehatan semakin baik dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.36**
**Perkembangan Capaian Indikator Kesehatan di Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio posyandu per 1000 balita | Rasio | 8,76 | 9,21 | 9,88 | 9,59 | 10,104 |
| 2 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk | Rasio | 0,0481 | 0,0477 | 0,0467 | 0,0445 | 0,0406 |
| 3 | Rasio Medis (dr+drg) per 1000 penduduk | Rasio | 0,056 | 0,057 | 0,073 | 0,005 | 0,011 |
| 4 | Rasio Paramedis (Bidan+Perawat)per 1000 penduduk | Rasio | 0,452 | 0,445 | 0,479 | 0,39 | 0,048 |
| 5 | Cakupan Ibu Hamil K4 | % | 81,78 | 76,30 | 78,97 | 85,79 | 74,77 |
| 6 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 55,41 | 80,23 | 84,34 | 91,62 | 27,15 |
| 7 | Cakupan Linakes (fasilitas kesehatan) | % | 87,22 | 90,72 | 93,74 | 95,18 | 82,80 |
| 8 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 83,65 | 87,10 | 88,92 | 90,82 | 85,97 |
| 9 | Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 16,70 | 35,04 | 32,06 | 45,06 | 29,41 |
| 10 | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 97,13 | 89,15 | 90,58 | 88,93 | 85,70 |
| 11 | Cakupan Desa UCI | % | 80,30 | 90,91 | 87,88 | 86,36 | 28,36 |
| 12 | Cakupan Pelayanan Balita | % | 53,26 | 61,91 | 76,17 | 71,01 | 54,41 |
| 13 | Kelas Ibu Hamil | % | 1,28 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 14 | Presentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Ekslusif | % | 52,00 | 57,00 | 51,00 | 55,13 | 38,98 |
| 15 | Presentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Presentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet Selama masa Kehamilan | % | 52,00 | 85,00 | 86,00 | 83 | 79,4 |
| 17 | Presentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) | % | 20,00 | 20,40 | 32,30 | 24,6 | 57,76 |
| 18 | Persentase Bayi yang Baru Lahir mendapat IMD | % | 65,00 | 58,00 | 67,00 | 71,2 | 89,27 |
| 19 | Presentase Balita Kurus yang Mendapat makanan Tambahan | % | 100,00 | 88,3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Cakupan Penderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | % | 100 | 99,58 | 99,42 | 100,00 | 11,20 |
| 22 | AFP Lebih Besar atau sama dengan 2 per 100.000 Penduduk dibawah Umur 15 tahun | % | 3,2 | 2,43 | 4,06 | 0, 0001 | 0,0002 |
| 23 | Penemuan Pneumonia Balita | % | 70,98 | 68,25 | 58,74 | 57,32 | 48,05 |
| 24 | Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) | % | 84,54 | 62,20 | 75,97 | 100,00 | 67,81 |
| 25 | Penemuan penderita DBD yang Ditangani | % | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 |
| 26 | Penemuan Penderita Diare | % | 61,8 | 67,76 | 65,30 | 65,04 | 50,85 |

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 95,12 | 106,72 | 83,12 | 119,72 | 136,56 |
| 28 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | % | 100 | 106,72 | 83,12 | 3,05 | 4,20 |
| 29 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| 30 | Cakupan Puskesmas | % | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 266,60 | 266,60 |
| 31 | Cakupan Puskesmas Pembantu | % | 21,21 | 20,90 | 20,90 | 19,70 | 19,4 |
| 32 | Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan STBM Pilar ke 1 (satu) | % | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Presentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan | % | 15 | 45 | 50,00 | 50,00 | 52,00 |
| 34 | Presentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan (MS) | % | 25 | 30 | 35,00 | 83,00 | 40,00 |
| 35 | Presentase Rumah Sakit (RS) yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar | % | 71,42 | 40 | 25,00 | 45,00 | 48,00 |
| 36 | Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat | % | 20 | 20 | 18,00 | 36,00 | 38,00 |
| 37 | Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat | % | 6,06 | 18 | 18 | 28,79 | 28,79 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran capaian kinerja urusan kesehatan selama kurun waktu 2016-2020, namun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai maksimal antara lain rasio puskesmas yang melayani per 1000 jumlah penduduk, rasio medis dan paramedis yang masih rendah, pelayanan terhadap ibu hamil serta bayi dan balita, pelayanan gizi terhadap anak dan ibu hamil yang masih kurang untuk Kota Serang, penanganan terhadap penemuan pasien penderita penyakit yang belum maksimal sehingga terkadang mengakibatkan korban jiwa karena kurangnya fasilitas kesehatan yang menjangkau di seluruh pelosok Kota Serang. Urusan kesehatan ini menjadi prioritas kepala daerah terpilih untuk masa lima tahun ke depan agar bisa lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup penduduk Kota Serang.

**Tabel 2.37**
**Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis**
**Kota Serang Tahun 2020**

| No | Indikator | Kecamatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cipocok Jaya | Curug | Kasemen | Serang | Taktakan | Walantaka | Jumlah |
| **1** | **Jumlah Sarana Kesehatan** | | | | | | | |
| a. | **Rumah Sakit** | **4** | **0** | **0** | **4** | **3** | **0** | **11** |
| | RSU Tipe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RSU Tipe B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | RSU Tipe C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | RSU Tipe D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | RSU Tipe E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RS AD/AU/AL/Polri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | **Rumah sakit Swasta** | **1** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0** | **7** |
| | **Rumah Sakit Khusus** | **0** | **0** | **0** | **1** | **2** | **0** | **3** |
| **b.** | **Puskesmas** | **7** | **3** | **5** | **7** | **3** | **4** | **29** |
| | Puskesmas Non Rawat inap | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | Puskesmas Rawat Inap | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| | Puskesmas Pembantu | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| **c.** | **Posyandu** | **99** | **44** | **131** | **197** | **88** | **100** | **659** |
| | Posyandu Pratama | 44 | 0 | 75 | 5 | 31 | 11 | 87 |
| | Posyandu Madya | 23 | 43 | 40 | 87 | 29 | 85 | 306 |
| | Posyandu Purnama | 19 | 0 | 15 | 85 | 9 | 4 | 125 |
| | Posyandu Mandiri | 13 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 49 |
| **d.** | **Pos Kesehatan Desa** | **0** | **3** | **5** | **3** | **6** | **2** | **19** |
| **2** | **Jumlah Tenaga Medis** | **165** | **27** | **40** | **68** | **43** | **41** | **384** |
| | Jumlah Dokter Umum | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 38 |
| | Jumlah Dokter Spesialis | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | Jumlah Dokter Gigi | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| | Jumlah Perawat | 72 | 7 | 15 | 20 | 13 | 10 | 137 |
| | Jumlah Bidan | 55 | 17 | 17 | 36 | 26 | 27 | 178 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Sarana Kesehatan di Kota Serang masih banyak dibutuhkan khususnya Rumah sakit yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat menengah atas dan bawah. Kota Serang sudah memiliki RSUD yang dibangun pada tahun 2017 dan mulai beroperasi Tahun 2019 namun belum bisa melayani secara optimal karena masih ada fasilitas dan pelayanan yang belum tersedia di RSUD tersebut. Selama terjadinya pandemi, RSUD Kota Serang menjadi pusat penanganan/pelayanan pasien Covid. Dengan dirintisnya RSUD dan puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) pada tahun 2021 maka diharapkan dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan urusan kesehatan

sehingga masyarakat Kota Serang dapat merasakan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

**3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Serang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tugas dan fungsinya mencakup layanan infrastruktur dan penataan ruang di Kota Serang. Berikut ini dipaparkan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 2.38**
**Perkembangan Capaian Indikator Pekerjaan Umum**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **Kondisi jaringan jalan (km)** | **208,16** | **208,16** | **208,16** | **208,16** | **208,16** |
| | 1. Kondisi Baik | 112,984 | 133,239 | 132,449 | 122,359 | 137,074 |
| | 2. Kondisi Sedang | 79,225 | 64,470 | 66,235 | 63,050 | 54,785 |
| | 3. Kondisi Rusak Ringan | 15,850 | 10,450 | 9,475 | 22,150 | 16,300 |
| | 4. Kondisi Rusak Berat | 0,100 | 0 | 0 | 0,600 | 0 |
| | **Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik** | **54,28** | **64,01** | **63,63** | **65,5** | **65,85** |
| 2 | **Kondisi jaringan jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km)** | **208,16** | **208,16** | **208,16** | **208,16** | **208,16** |
| | 1. Di Aspal | 197,039 | 189,54 | 185,970 | 177,520 | 176,999 |
| | 2. Di Beton | 6,32 | 15,18 | 21,785 | 30,641 | 31,160 |
| | 3. Kerikil | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 |
| | 4. Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Panjang Saluran Irigasi Sekunder (M)** | **34.410,50** | **34.410,50** | **34.410,50** | **34.410,50** | **34.410,50** |
| | Saluran Kondisi Baik | 26.299,50 | 26.299,50 | 26.299,50 | 26.299,50 | 31.313,55 |
| | Saluran Kondisi Sedang | 4.584 | 4.584 | 4.584 | 4.584 | 0 |
| | Saluran Kondisi Rusak Ringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saluran Kondisi Rusak Berat | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.096,95 |
| | **Persentase Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik** | **76,43** | **76,43** | **89,98** | **91** | **90,43** |
| 4 | **Jumlah Jembatan (unit)** | **90** | **91** | **91** | **91** | 91 |
| | Jembatan Dengan Kondisi Baik | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 |
| | Jembatan Dengan Kondisi Sedang | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| | Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk (%) | 33,92 | 15,08 | 33,08 | 1.048,09 | 1.037,56 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m) | 9.700 | 5.699 | 71.804,00 | 57.731,31 | 60.131,31 |
| 7 | Luas irigasi Kota dalam kondisi baik ($m^2$) | 27.220,70 | 14.163,46 | 790 | 907 | 907 |
| 8 | Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi | 56,43 | 50,34 | 72,6 | 79,27 | 69,33 |
| 9 | Persentase Penduduk Berakses air minum | 94,28 | 98,12 | 55,78 | 39,01 | 71,91 |
| 10 | % Areal Kawasan Kumuh Pemukiman | 53,2 | 5,57 | 9,56 | 73,32 | 72,30 |
| 11 | Tersedianya fasilitas Pengurangan sampah (%) | 46,71 | 48,64 | 51,92 | 55,58 | 61,34 |
| 12 | Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk | 1,97 | 2,11 | 2,08 | 1,73 | 1,66 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.39**
**Jumlah Tempat Ibadah Kota Serang Tahun 2020**

| No | Indikator | Kecamatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cipocok Jaya | Curug | Kasemen | Serang | Taktakan | Walantaka | Jumlah |
| 1 | Mesjid/Langgar/ Musholla | 131 | 206 | 159 | 315 | 197 | 113 | 1121 |
| 2 | Gereja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Vihara | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | **Jumlah** | **131** | **206** | **160** | **321** | **201** | **113** | **1132** |

*Sumber: Kemenag Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.40**
**Perkembangan Capaian Indikator Penataan Ruang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Luas Ruang Terbuka Hijau (km2)** | NA | NA | NA | 1,58 | 1,83 |
| | Luas wilayah (Km2) | 266,74 | 266,74 | 266,74 | 266,74 | 266,18 |
| | Rasio RTH Per Satuan Luas Wilayah | NA | NA | NA | 0,00595 | 0,00688 |
| 2 | Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) | 31,71 | 31,86 | 37,00 | 37,57 | 37,67 |
| 3 | Ruang publik yang berubah peruntukannya (%) | 20 | 20 | 6,06 | 8,57 | 8,97 |

*Sumber: DPRKP, DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Untuk Urusan Pekerjaan umum selama kurun waktu tahun 2016-2020 terdapat beberapa indikator kinerjanya yang tidak tercapai seperti infrastruktur jalan di beberapa daerah kondisinya masih banyak yang berlubang dan rusak dengan capaian di akhir tahun 2020 kondisi jaringan jalan baik tercapai sebesar 60,16 persen. Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik tercapai 91 persen, drainase masih banyak yang tersumbat di sepanjang jalan Kota Serang sehingga terjadi banjir jika

hujan turun. Rasio tempat pemakaman umum baru tercapai 1.037,56. Rumah tangga bersanitasi tahun 2020 turun menjadi sebesar 69,33 persen dari 79,27 persen di tahun 2019. Hal ini menandakan masih banyak rumah tinggal yang belum dilengkapi sarana sanitasi.

Penduduk berakses air minum baru tercapai 72,30 persen yang dilengkapi dengan air hidran selebihnya masih menggunakan air tanah atau air sumur untuk minum. Kawasan kumuh di Kota Serang yang tersisa sekitar 6,50 persen yang masih perlu perhatian dari pemerintah agar bisa tertata dengan baik. Fasilitas pengurangan sampah baru tercapai 61,34 persen sehingga masih perlu penanganan pengolahan sampah di Kota Serang agar sampah yang tertimbun bisa ditangani dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat mengenai permasalahan sampah.

Dari tabel 2.40 di atas luas ruang terbuka hijau tahun 2020 di angka 1,83 Km2 sedangkan persentase bangunan ber IMB di Kota Serang pada tahun 2020 baru mencapai 37,67%. Hal ini menggambarkan masih perlu adanya ruang terbuka hijau di setiap kecamatan mengingat pentingnya fungsi dari RTH tersebut yaitu selain sebagai sarana rekreasi dan fasilitas umum, RTH juga berperan dalam keseimbangan ekosistem di alam.

Bangunan ber IMB se Kota Serang meningkat setiap tahunnya yang menjadi permasalahan adalah belum adanya pembaharuan data total jumlah bangunan yang berdiri di seluruh Kota Serang sehingga di tahun mendatang perlu adanya pendataan kembali mengingat Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten yang sedang dalam membangun dan menata perlu data yang akurat dalam pembangunannya.

**4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang mencakup seluruh kegiatan antara lain penanganan rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga yang menggunakan listrik, penanganan pemukiman yang tertata, penanganan lingkungan pemukiman kumuh, rasio rumah dan pemukiman layak huni. Terdapat indicator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu lima tahun yang belum tercapai antara lain persentase rumah tangga pengguna air bersih yang baru tercapai 39,63%. Hal ini disebabkan sarana dan fasilitas air bersih masih perlu di prioritaskan untuk dibangun. Gambaran tentang kondisi eksisting dan

capaian kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.41**
**Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih | 52,62 | 63,32 | 53,77 | 53,77 | 53,77 |
| 2 | Persentase Rumah tangga pengguna listrik | 99,00 | 99,82 | 99,83 | 176,34 | 183,89 |
| 3 | Persentase Pemukiman Tertata | 46,8 | 94,43 | 93,18 | 99,19 | 93,18 |
| 4 | Persentase Lingkungan pemukiman kumuh | 53,2 | 5,57 | 9,56 | 6,82 | 6,50 |
| 5 | Rasio Rumah layak huni | 0,725 | 0,737 | 0,969 | 0,867 | 0,871 |
| 6 | Rasio permukiman layak huni | 0,480 | 0,944 | 0,932 | 0,992 | 0,955 |

*Sumber: DPRKP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Dari indikator kinerja tersebut, dapat digambarkan bahwa akses masyarakat terhadap ketersediaan air bersih masih rendah, begitu juga dengan masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang harus ditata kedepannya.

**5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Serang mencakup seluruh kegiatan antara lain rasio jumlah linmas, tingkat penyelesaian pelanggaran kemanan dan ketertiban yang ditemukan di Kota Serang, cakupan pelayanan kebakaran, cakupan penegakan perda dan rasio jumlah polisi pamong praja. Gambaran tentang kondisi eksisting dan capaian kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.42**
**Perkembangan Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 38,19 | 30,80 | 30.47 | 42 | 42 |
| 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 | 100 | 100 | 97,90 | 98,24 | 99,02 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 72,16 | 72,16 |
| 4 | Cakupan Penegakan Perda | 100 | 100 | 91,38 | 97,43 | 99,76 |
| 5 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja | 0,41 | 0,52 | 0,50 | 0,40 | 0,37 |

*Sumber: Satpol PP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Dari tabel 2.42 dan 2.43 terlihat bahwa rasio jumlah linmas dan jumlah Polisi Pamong Praja masih kurang ideal sehingga cakupan penegakan Perda baru mencapai 99,76 persen di tahun 2020. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat nilainya fluktuatif setiap tahunnya hal ini disebabkan jumlah linmas dan polisi pamong praja naik turun namun jumlah penduduk yang harus dilayani setiap tahun bertambah.

**Tabel 2.43**
**Perkembangan Capaian Jumlah LSM, Ormas, Linmas, Unjuk Rasa dan Indikator Kesbangpol Lainnya Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah LSM | 77 | 169 | 147 | 154 | 180 |
| 2 | Jumlah Ormas | 8 | 8 | 10 | 18 | 26 |
| 3 | Pembinaan LSM & Ormas | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Kasus Kerusuhan / Konflik Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| 6 | Jumlah Linmas | 2400 | 1958 | 1958 | 1558 | 1558 |
| 7 | Jumlah pos ronda/kamling | 667 | 667 | 668 | 668 | 668 |
| 8 | Jumlah pelaksanaan operasi pekat | 169 | 598 | 523 | 28 | 63 |
| 9 | Jumlah unjuk rasa | 16 | 20 | 22 | 9 | 8 |
| 10 | Jumlah operasi penegakan perda | 169 | 598 | 523 | 108 | 111 |

*Sumber: Satpol PP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, pemerintah Kota Serang senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik, maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah.

**6) Sosial**

Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang mencakup seluruh layanan di bidang kesejahteraan sosial, antara lain: layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani masalah sosial disaat setelah terjadi bencana (alam/non alam) di Kota Serang. Gambaran tentang kondisi eksisting dan capaian kinerja urusan sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.44**
**Perkembangan Capaian Indikator Sosial Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Sarana Sosial | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 |
| | a. Panti Asuhan | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 |
| | b. Panti Jompo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c. Panti Rehabilitasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | d. Rumah Singgah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial | 84,12 | 21,75 | 21,80 | 62,70 | 63,31 |
| 3 | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 77,54 | 22,11 | 22,14 | 63,33 | 64,18 |
| 4 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial | 34,74 | 30,23 | 16,32 | 45,82 | 31,19 |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Dari tabel 2.44 di atas persentase PMKS dapat ditekan atau pelayanan terhadap PMKS hampir semua tertangani dengan baik. Namum Kota Serang belum memiliki panti jompo dan kurangnya panti rehabilitasi dan rumah singgah sehingga pelayanan sosial yang dilakukan kurang maksimal. Permasalahan urusan indikator sosial adalah jumlah sarana sosial di Kota Serang hanya sebagai tempat penitipan namun belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Penanganan masalah kesejahteraan sosial sudah dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, konseling dan memberikan pelatihan bagi para penyandang kesejahteraan sosial, namun belum dapat mengakomodir secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Tabel 2.45**
**Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Serang**
**Tahun 2019 – 2020**

| NO | JENIS PSKS | 2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERANG | CIPCOK JAYA | CURUG | KASEMEN | TAKTAKAN | WALANTAKA | JUMLAH |
| 1 | PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 330 |
| 3 | WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PENYULUH SOSIAL | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 |

| NO | JENIS PSKS | SERANG | CIPCOK JAYA | CURUG | KASEMEN | TAKTAKAN | WALANTAKA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | | | | | |
| 5 | TARUNA SIAGA BENCANA | 39 | 49 | 44 | 13 | 16 | 30 | 191 |
| 6 | KARANG TARUNA | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 72 |
| 7 | WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 330 |
| 8 | LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 29 |
| 9 | LEMBAKA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | KELUARGA PIONEER | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 330 |
| 11 | TKSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | DUNIA USAHA YANG MELAKUKAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| | **JUMLAH** | **316** | **248** | **247** | **203** | **235** | **284** | **1533** |
| | | | 2019 | | | | | |
| 1 | PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 330 |
| 3 | WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PENYULUH SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TARUNA SIAGA BENCANA | 39 | 48 | 39 | 30 | 17 | 24 | 197 |
| 6 | KARANG TARUNA | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 72 |
| 7 | WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 66 |
| 8 | LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24 |
| 9 | LEMBAKA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KEUARGA PIONEER | 48 | 32 | 40 | 40 | 48 | 56 | 264 |
| 11 | TKSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | DUNIA USAHA YANG MELAKUKAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL | - | - | - | - | | - | - |
| | **JUMLAH** | **190** | **140** | **150** | **145** | **154** | **181** | **960** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Rekapitulasi PSKS di Kota Serang Tahun 2019 sebanyak 960 orang dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1.533 orang. Jenis PSKS yang mengalami kenaikan jumlah personil adalah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan keluarga pioneer masing-masing sebanyak 330.

### 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 1) Tenaga Kerja

Urusan bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, yang mencakup seluruh layanan di bidang ketenagakerjaan antara lain : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, peningkatan kesempatan kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Gambaran tentang kinerja capaian layanan urusan ketenagakerjaan sepanjang tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut ini :

**Tabel 2.46**
**Perkembangan Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 21,35 | 0,65 | 0,86 | 6,45 | 4,89 |
| 2 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 0,61 | 6,74 | 4,17 | 8,82 | 7,35 |
| 3 | Keselamatan dan perlindungan | 43,39 | 44,72 | 45,37 | - | - |
| 4 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 44,35 | 47,93 | 51,23 | 53,70 | 54,60 |

*Sumber: Disnakertrans Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

**2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mencakup seluruh layanan terhadap perempuan dan perlindungannya. Gambaran tentang kinerja capaiannya sepanjang tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.47 beriku ini:

**Tabel 2.47**
**Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 6,16 | 6,01 | 6,24 | 6,24 | 13,09 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 13,33 | 13,33 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 69,03 | 70,10 | 68,06 | 32,73 | 34,50 |
| 4 | Rasio KDRT | 5,68 | 5,94 | 0,98 | 0,56 | 0,0047 |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | 5,85 | 4,54 | 3,72 | 1,56 | 0,75 |
| 6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 44,54 | 45,34 | 45,94 | 48,68 | 45,94 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pelayanan terpadu | 52.63 | 92,08 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 26,32 | 34,65 | 71,43 | 94,00 | 100,00 |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan | 52,63 | 92,08 | 76,47 | 80,00 | 100,00 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | | | | | |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 72,50 | 68,63 | 57,14 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 31,58 | 79,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 73,68 | 97,03 | 65,00 | 60,00 | 100,00 |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 52,63 | 95,05 | 100,00 | 90 | 100 |
| 14 | Indeks Pembangunan Gender | 63,37 | 63,37 | 91,40 | 91,16 | 92,28 |
| 15 | Indeks Pemberdayaan Gender | 63,88 | 64,50 | 62,65 | 62,1 | 62,26 |

*Sumber: DP3AKB Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak harus terus ditingkatkan. Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah Kota Serang. Namun kesenjangan gender masih terlihat terjadi di berbagai sektor pembangunan.

Kesenjangan tersebut menghambat keterlibatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan untuk memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Pelaksanaan kesetaraan gender akan secara tidak langsung berdampak positif pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan didalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga masih dihadapai oleh sebagian rumah tangga di kota Serang. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun isteri. Meski begitu rasio KDRT yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terus mengalami fluktuatif.

### 3) Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang mencakup ketersediaan pangan utama dan regulasi mengenai ketahanan pangan di Kota Serang. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak

hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi, namun juga dalam bentuk peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Gambaran tentang kinerja capaiannya sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut ini:

**Tabel 2.48**
**Perkembangan Capaian Indikator Pangan Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Regulasi ketahanan pangan | Ada/ Perda SOTK | Ada/ Perda SOTK | Penyusunan Naskah Akademis | Ada/ Perda SOTK | Ada/ Perda SOTK |
| 2 | Ketersediaan pangan utama (persen) | 49,59 | 60,72 | 48,48 | 71,72 | 77,24 |

*Sumber: Distan Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan di Kota Serang untuk urusan pangan adalah belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang ketahanan pangan. Kondisi saat ini hanya berupa penyusunan naskah akademis dan dalam bentuk Perda SOTK dalam menangani masalah ketahanan pangan.

**4) Pertanahan**

Urusan Pertanahan mencakup persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Gambaran tentang kinerja capaiannya tahun 2016 - 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.49**
**Perkembangan Capaian Indikator Pertanahan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Tanah (ha) | 26.419,47 | 26.419,47 | 26.419,47 | 26.419,47 | 26.618 |
| 2 | Jumlah lahan bersertifikat | 5.117 | 6.215 | 7.352 | 9.415,3 | 11.015 |
| 3 | Jumlah Penduduk | 628.434 | 635.632 | 642.586 | 652.192 | 681.012 |
| 4 | Jumlah Penduduk memiliki lahan | 121.729 | 157.590 | 229.003 | 230.003 | 255.303 |
| 5 | Persentase Penduduk memiliki lahan | 19,37 | 24,79 | 35,64 | 35,27 | 37,48 |
| 6 | Persentase Luas lahan Bersertifikat | 19,37 | 24,79 | 35,64 | 35,64 | 41,69 |
| 7 | Jumlah Ijin Lokasi | 22 | 21 | 30 | 23 | 18 |

*Sumber: DPMPTSP, DPU, DPerkim & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan untuk urusan pertanahan adalah sebagian indikator masih kewenangan badan pertanahan nasional Kabupaten Serang yang

mengeluarkan sertifikat atas pengukuran lahan di Kota Serang sehingga data yang disajikan masih harus berkoordinasi dengan BPN setempat. Sedangkan jumlah ijin lokasi setiap tahun datanya meningkat yang dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu Kota Serang. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperoleh perijinan yang legal. Namun hal itu semua masih perlu ditingkatkan mengingat Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten yang memungkinkan akan terus tumbuh dan berkembang dimasa akan datang.

**5) Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang mencakup persentase jumlah sampah yang tertangani, cakupan pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor, cakupan pengawasan pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah dan penegakan hukum lingkungan. Gambaran tentang kinerja capaiannya sepanjang tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut ini:

**Tabel 2.50**
**Perkembangan Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase jumlah sampah yang ditangani | 46,71 | 48,64 | 51,92 | 55,58 | 61,60 |
| 2 | Pencemaran status mutu air (%) | 58,33 | 61,11 | 83,33 | 51,05 | 43,33 |
| 3 | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) | 7,14 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) | 50,00 | 46,15 | 50,00 | 58,82 | 60,23 |
| 5 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) | 25,14 | 24,86 | 24,43 | 38,27 | 38,40 |
| 6 | Penegakan hukum lingkungan (%) | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: DLH Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase penanganan sampah tahun 2020 adalah sebesar 61,6 persen, atau meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 55,58 persen. Sedangkan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebesar 38,40 persen, hal ini menggambarkan bahwa TPS yang ada saat ini baru bisa melayani 38,40 persen sampah penduduk Kota Serang. Pencemaran status mutu air meningkat pada tahun 2020 yang diperoleh dari titik pencemaran yang dianalisis mutunya hanya

sebesar 43,33 persen dibandingkan dengan total yang harus dianalisis. Hal ini harus menjadi skala prioritas untuk pemerintah daerah karena masalah lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan harus segera ditangani.

**6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang yang mencakup pelayanan kependudukan. Gambaran tentang kinerja capaiannya sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut ini:

**Tabel 2.51**
**Perkembangan Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk Wajib KTP | 434.017 | 446.601 | 457.618 | 461.916 | 465.794 |
| 2 | Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan | 387.034 | 407.179 | 445.557 | 456.158 | 465.224 |
| 3 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 89,17 | 91,17 | 97,36 | 98,75 | 99 |
| 4 | Penduduk yang sudah ber-Akte Lahir | 170.297 | 191.430 | 198.607 | 272.022 | 307.158 |
| 5 | Jumlah Penduduk | 628.434 | 635.632 | 642.586 | 652.192 | 681.012 |
| 6 | Persentase Penduduk ber akte Lahir | 27 | 30 | 34 | 41,7 | 45 |
| 7 | Rasio bayi berakte lahir | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,96 | 0,92 |
| 8 | Jumlah Kepala Keluarga | 167.400 | 170.056 | 193.332 | 190.675 | 203.363 |
| 9 | Keluarga yang sudah ber-KK | 160.637 | 158.895 | 158.895 | 179.410 | 186.478 |
| 10 | Keluarga yang memiliki Akte Nikah | 87.036 | 89.234 | 105.224 | 70.501 | 103.528 |
| 11 | Persentase Keluarga yang sudah ber KK | 96 | 93 | 82 | 94 | 91,7 |
| 12 | Persentase Keluarga yang sudah ber Akte Nikah | 59 | 61 | 65 | 44 | 32 |
| 13 | Persentase ber-Akta Kematian | 7 | 19 | 36 | 38 | 38 |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, khususnya untuk pelayanan kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini terlihat dari cakupan penerbitan KTP tahun 2016 sebesar 89,17 persen meningkat menjadi 99,88 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik.

Sedangkan persentase keluarga dengan kepemilikan akte nikah pada tahun 2020 sebesar 32,3 persen meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 59 persen dan persentase penduduk dengan kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 54,90 persen.

Permasalahan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah pelayanan yang belum maksimal dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Selain itu untuk persentase akta kematian nilainya masih rendah karena kesadaran kerabat penduduk yang meninggal tidak melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga masih perlu sosialisasi dan pemberitahuan yang berkelanjutan mengenai pentingnya pencatatan dokumen kependudukan.

**7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.52**
**Perkembangan Capaian Indikator**
**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran Kelurahan yang baik | % | 15,15 | 19,40 | 41,79 | 49,25 | 52,24 |
| 2 | Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Klp | 50 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | rerata | 0.76 | 1,00 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah kelompok binaan PKK | klp | 78 | 132 | 134 | 74 | 73 |
| 5 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | rerata | 1,18 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | LPM Berprestasi | % | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 14,5 | 5,66 | 5,66 | 5,70 | 64,18 |
| 13 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 6,5 | 5,66 | 5,66 | 5,70 | 9,30 |

*Sumber: DP3AKB Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Masyarakat desa/kelurahan adalah target penting dalam pembangunan yang bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya

tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu Aktif.

Cakupan sarana prasarana perkantoran kelurahan semakin berkondisi baik selama kurun waktu 2016-2020 walaupun nilainya baru 52,24 persen namun masih ada beberapa kantor kelurahan yang masih sewa atau kontrak. Jumlah kelompok binaan LPM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan di setiap kelurahan ada 1 kelompok yang dibina hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Jumlah PKK aktif dari tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlahnya mengalami peningkatan tetapi di tahun 2019 dan 2020 jumlahnya menurun menjadi 73 kelompok serta jumlah kelompok binaan PKK juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 73 kelompok yang dibina. Posyandu di tahun 2020 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 624 unit dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 625 unit. Peran lembaga ini perlu ditingkatkan karena memudahkan masyarakat dalam memeriksakan anak balitanya ke tempat pelayanan terdekat.

**8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.53**
**Perkembangan Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Serang Tahun 2016- 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1,74 | 1,27 | 1,08 | 2,34 | 2,47 |
| 2 | Rasio Akseptor KB | 0,64 | 0,74 | 69,5 | 80,14 | 73,59 |
| 3 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | 63,84 | 74,22 | 69,5 | 80,14 | 73,59 |
| 4 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | 4,90 | 4,95 | 1,59 | 1,00 | 32,5 |
| 5 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 51,39 | 51,08 | 5,76 | 32,28 | 32,28 |
| 6 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 25,92 | 26,34 | 16,49 | 11,57 | 16,50 |
| 7 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 16,37 | 29,65 | 21,93 | 72,47 | 15,8 |
| 8 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | 54,19 | 47,17 | 2,2 | 2,62 | 1,31 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 100 | 70,08 | 71,38 | 85,24 | 83,89 |
| 10 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 100 | 60,37 | 59,76 | 83,98 | 90,38 |
| 11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 100 | 62,91 | 60,46 | 85,75 | 84,54 |
| 12 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 0 | 116,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 100 | 98,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 33,12 | 37,26 | 26,21 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | 34,66 | 29,25 | 18,00 | 19,00 | 21,00 |

*Sumber: DP3AKB Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Pemerintah Kota Serang menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kota Serang secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Mencegah kehamilan adalah salah satu cara menekan kuantitas penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk sesuai yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yaitu keluarga dengan dua anak akan lebih baik sesuai keadaan sosial ekonominya.

Penundaan usia perkawinan pertama dan penggunaan alat kontrasepsi juga menjadi salah satu cara program pemerintah untuk menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, khusus program alat kontrasepsi dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan.

Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra-Sejahtera dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih kurangnya kesadaran pasangan usia subur untuk menjaga jarak kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi dan

masih berprinsip banyak anak banyak rejeki. Namun untuk cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun sudah menurun dengan signifikan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya usia nikah yang ideal.

**9) Perhubungan**

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.54**
**Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan di Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | | |
| | a. Penumpang Bus | 595.000 | 678.654 | 382.216 | 382.550 | 58.403 |
| | b. Penumpang kereta api | 196.981 | 355.320 | 522.720 | 535.200 | 147.285 |
| | c. Penumpang Kapal Laut | - | - | - | - | 6.210 |
| | d. Angkutan Darat | - | - | - | - | 198.865 |
| 2 | Jumlah Ijin trayek perkotaan | 2.725 | 1.560 | 2.537 | 754 | 1.337 |
| 3 | Rasio ijin trayek | 43,36 | 24,54 | 0,082 | 0,30 | 0,002 |
| 4 | Jumlah uji kir angkutan umum | 6782 | 4.378 | 5.585 | 4.036 | 5.450 |
| 5 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Persentase layanan angkutan darat | 0,95 | 0,68 | 0,86 | 0,86 | 0,68 |
| 7 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 89,79 | 62,49 | 71,68 | 94,40 | 97,96 |
| 8 | Pemasangan Rambu-rambu | 25 | 47,60 | 54,90 | 64,90 | 77,1 |
| 9 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,95 | 8,36 | 0,71 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | 595.000 | 1.033.974 | 904.936 | 450.592 | 410.763 |
| 11 | Jumlah orang melalui dermaga/terminal per tahun | - | - | 453.762 | 329.036 | 395.157 |

*Sumber: Dishub Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Urusan perhubungan tidak bisa dilepaskan dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, karena itu transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal.

Sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat, jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2020 adalah sebesar 410.763 orang turun hampir 8,83 persen dari tahun 2019 yang sebesar 450.592 orang. Hal ini akibat dari penerapan PSBB di saat mulai terjadinya pandemic Covid 19 hingga beberapa bulan berikutnya. Di sisi lain, Pemerintah Kota Serang telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan

perhubungan kepada masyarakat. Permasalahan urusan perhubungan di Kota Serang adalah peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Kemacetan sudah terjadi di setiap jalur perlintasan lampu merah, hal ini membutuhkan penanganan yang serius dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani kemacetan. Trayek angkutan umum masih perlu pembenahan lebih lanjut karena kondisi saat ini angkutan umum tidak mempunyai trayek yang jelas serta angkutan online yang saat ini sudah semakin menjamur di Kota Serang semakin menambah kesemrawutan kondisi lalu lintas dan perhubungan di Kota Serang.

**10) Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis sejak tahun 2017 menjadi urusan wajib Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.55**
**Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika**
**Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Jaringan Komunikasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 136 |
| | a. Jumlah Jaringan Telepon Genggam | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
| | b. Jumlah Jaringan Telepon Stasioner | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 2 | Jumlah Wartel | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah Warnet | 41 | 73 | 58 | 73 | 284 |
| 4 | Jumlah Surat Kabar Nasional | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 5 | Jumlah Surat Kabar Lokal | 14 | 14 | 14 | 25 | 7 |
| 6 | Jumlah Radio Lokal | 15 | 18 | 14 | 115 | 15 |
| 7 | Jumlah Radio Nasional | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Jumlah Penyiaran TV lokal | 3 | 1 | 6 | 12 | 8 |
| 9 | Jumlah Penyiaran TV nasional | 26 | 28 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Website milik pemerintah/OPD | 13 | 19 | 37 | 39 | 95 |

*Sumber: Diskominfo Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika adalah mengenai keterbukaan informasi publik untuk menangkal berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Akses internet gratis belum bisa menjangkau ke pelosok daerah di Kota Serang. Selain itu ketersediaan teknlogi informasi komunikasi sangat berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik melalui layanan e-government.

**11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis menjadi urusan wajib Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.56**
**Perkembangan Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase koperasi aktif | 37,15 | 40,06 | 48,53 | 36,17 | 35,42 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 120 | 131 | 182 | 133 | 130 |
| 3 | Jumlah usaha mikro | 6.449 | 6.479 | 6.815 | 7.174 | 7.560 |
| 4 | Jumlah usaha kecil | 3.354 | 3.354 | 3.365 | 3.294 | 3.433 |
| 5 | Jumlah usaha menengah | 22 | 22 | 26 | 23 | 29 |
| 6 | Jumlah BPR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 99,78 | 99,78 | 99,74 | 99,77 | 99,79 |

*Sumber: Disdaginkop Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Koperasi merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kota Serang. Koperasi bermanfaat karena bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi aktif dan penambahan jumlah usaha kecil dan mikro di Kota Serang.

Permasalahan urusan koperasi usaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal dalam membuat usaha produktif dan sebagian besar koperasi di Kota Serang hanya berupa koperasi simpan pinjam. Jumlah usaha mikro mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 7.560 unit, usaha kecil 3.433 unit dan usaha menengah 29 unit. Namun usaha UMKM yang sudah ada saat ini masih perlu dibina dan dikembangkan agar memiliki daya saing yang tinggi.

**12) Penanaman Modal**

Urusan wajib penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang. Sebagai kota administratif yang terus berkembang, Kota Serang memiliki prospek yang tinggi dalam pengembangan berbagai jenis usaha skala sedang hingga besar, sejauh ini hal itu telah cukup dilakukan melalui masuknya investasi yang terus meningkat baik jumlah maupun nilainya.

Selanjutnya tabel berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan capaian investasi di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

**Tabel 2.57**
**Jumlah Investor di Kota Serang Tahun 2016-2020**

| Tahun | Uraian | PMDN | PMA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jumlah Investor | 1833 | 4 | 1837 |
| 2017 | Jumlah Investor | 1260 | 0 | 1260 |
| 2018 | Jumlah Investor | 891 | 0 | 891 |
| 2019 | Jumlah Investor | 1794 | 2 | 1796 |
| 2020 | Jumlah Investor | 670 | 1 | 671 |

*Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

**Tabel 2.58**
**Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Serang Tahun 2016-2020**

| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp) |
| 2016 | 1837 | 3.250.000.000.000 | 1837 | 3.664.721.493.874 |
| 2017 | 1260 | 3.500.000.000.000 | 1260 | 4.643.775.813.430 |
| 2018 | 891 | 3.750.000.000.000 | 891 | 5.204.482.301.294 |
| 2019 | 991 | 5.464.500.000.000 | 1796 | 3.899.078.708.844 |
| 2020 | 1041 | 3.000.000.000.000 | 671 | 3.143.083.089.632 |

*Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.59**
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Serang Tahun 2016-2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 5.869 | 12.197 | 6.335 | 10.448 | 3.800 |
| Jumlah seluruh PMA/PMDN | 1.837 | 1.260 | 891 | 1.796 | 671 |
| **Rasio daya serap tenaga kerja** | **3,19** | **9,68** | **7,11** | **5,82** | **5,66** |

*Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa investasi PMDN/PMA di Kota Serang cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2020 mengalami penurunan nilai investasi dibandingkan Tahun 2019. Pandemi Covid 19 berpengaruh pada realisasi investasi Tahun 2020 di Kota Serang dari persetujuan 1.041 proyek hanya terealisasi 671 proyek dan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN hanya sebanyak 3.800 orang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke Kota Serang adalah perusahaan yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup banyak misalnya investasi di bidang properti dan perumahan. Diharapkan di tahun berikutnya kondisi perekonomian semakin membaik sehingga investasi dapat meningkat kembali.

### 13) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan wajib kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Selanjutnya tabel berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

**Tabel 2.60**
**Perkembangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemuda | | | | | |
| | Jumlah Organisasi Pemuda | 78 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | Jumlah kegiatan pemuda | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | Olah Raga | | | | | |
| | Jumlah Organisasi Olah Raga | 179 | 78 | 194 | 194 | 194 |
| | Jumlah kegiatan Olah Raga | 13 | 8 | 8 | 8 | - |
| 3 | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Lapangan olahraga | 12 | 12 | 12 | 59 | 65 |
| 5 | Jumlah Wirausaha muda | 145 | 245 | 245 | 257 | 270 |

*Sumber: Disparpora Kota Serang dan SIPD Kota Serang, 2020*

Pemuda merupakan aset bangsa. Mereka adalah aktor utama dalam pembangunan, terutama pembangunan di bidang SDM. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga tidak mengalami perubahan sejak 2 tahun terakhir. Begitu pula sarana prasarana serta jenis olahraga dan kepemudaan yang jumlahnya relatif sama setiap tahunnya selama kurun waktu 2016-2019. Lapangan olahraga bertambah jumlahnya karena memperhitungkan lapangan sekolah se Kota Serang. Pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 beberapa kegiatan pemuda dan olahraga berkurang bahkan dihilangkan. Hal ini selain karena refocusing juga adanya kebijakan pembatasan social di Kota Serang. Sesungguhnya di bidang olahraga Kota Serang telah banyak menghasilkan atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, namun hal ini masih harus terus ditingkatkan dan didukung dengan fasilitas dan sarana yang memadai agar para atlet bisa membawa nama Kota Serang di tingkat nasional dan internasional.

**14) Statistik dan Persandian**

Urusan Statistik dan Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis sejak tahun 2017 menjadi urusan wajib Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 2.61**
**Perkembangan Urusan Bidang Statistik di Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku ”Kota Serang Dalam Angka” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Buku ”PDRB Kota Serang” | ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Diskominfo Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Urusan statistik dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan Badan Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang untuk mempublikasikan data statistik.

**15) Kebudayaan**

Kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Karena itu pemerintah daerah harus memiliki peran yang besar dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Urusan Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang secara teknis menjadi urusan wajib Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan kebudayaan.

**Tabel 2.62**
**Perkembangan Urusan Bidang Kebudayaan di Kota Serang**
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 49 | 42 | 58 | 58 | 14 |
| 2 | Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba dan pawai | 15 | 9 | 8 | 13 | 2 |

*Sumber: Dindikbud Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Salah satu indikator pengelolaan budaya dapat terlihat dari tabel di atas. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif dari 49 situs di tahun 2016 menurun menjadi 14 situs tahun 2020 dari sejumlah 58 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada.

**16) Perpustakaan**

Urusan Perpustakaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai indikator kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan, sebagai berikut:

**Tabel 2.63**
**Perkembangan Urusan Perpustakaan Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah perpustakaan milik Non Pemda | 325 | 441 | 441 | 441 | 385 |
| 3 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 124.035 | 103.732 | 132.563 | 5.042 | 9.670 |
| 4 | Rasio Koleksi judul buku | 3,05 | 2,00 | 2,26 | 5,64 | 41,43 |
| 5 | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan | 2455 | 3788 | 4532 | 5100 | 6629 |
| 6 | Jumlah Koleksi Buku | 7494 | 7570 | 10232 | 12068 | 16000 |
| 7 | Cakupan Kunjungan ke Perpustakaan | 19,74 | 16,32 | 26,06 | 2,65 | 33 |

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk | 0,52 | 0,70 | 0,69 | 0,41 | 0,58 |

*Sumber: DPK Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar maka dibutuhkan perpustakaan yang dikelola secara baik dan terstandar. Hal ini diperlukan karena dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Perpustakaan juga merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat.

Pemerintah Kota Serang terus menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka serta menambah sumber daya manusia yang mengelola kearsipan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan pelayanan perpustakaan yaitu dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan dan mengikutsertakan petugas dalam kursus/ bimtek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah perpustakaan belum bisa menjangkau ke seluruh pelosok daerah di Kota Serang, belum bisa menumbuh kembangkan minat baca dari para penduduk usia sekolah serta koleksi judul buku belum bisa mengakomodir semua kebutuhan para siswa sekolah dalam mencari literatur dalam rangka memenuhi tugas sekolah. Pencarian cepat di internet juga menjadi masalah dalam penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan karena masyarakat ingin yang cepat dan instan dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

**17) Kearsipan**

Urusan Kearsipan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai indikator kinerja urusan kearsipan, sebagai berikut:

**Tabel 2.64**
**Perkembangan Urusan Kearsipan Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan arsip secara baku | OPD | 30 | 33 | 33 | 33,33 | 30,30 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | orang | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 |

*Sumber: DPK Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Urusan kearsipan dilaksanakan dengan fungsi strategis yaitu dalam rangka perkembangan daerah guna menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumen daerah. Penanganan arsip sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kearsipan diantaranya adalah melalui bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Permasalahan kearsipan adalah belum mempunyai gedung arsip yang dapat menampung arsip dari seluruh OPD di Kota Serang serta belum adanya arsip digital yang dibutuhkan dalam rangka mengamankan arsip penting jika terjadi bencana alam atau kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk sumber daya manusia yang mengelola kearsipan, sejak tahun 2018 sudah ada pegawai yang menjadi fungsional kearsipan dan terus bertambah hingga tahun 2020 berjumlah 15 orang. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi agar kearsipan pemerintah Kota Serang bisa tertata sebagaimana mestinya.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Serang yang tupoksinya mencakup sejumlah program antara lain: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan.

Perkembangan capaian urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.65**
**Perkembangan Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi perikanan Budidaya | 1953,40 | 2090,96 | 2.219,88 | 1.017,65 | 1.634,65 |
| 2 | Produksi perikanan Tangkap | 2964,30 | 3706,22 | 3.891,53 | 3.521,17 | 3.096,13 |
| 3 | Kapal Penangkap Ikan | 187 | 586 | 589 | 585 | 585 |
| 4 | Tempat Pelelangan Ikan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Konsumsi ikan | 21,44 | 24,99 | 27,85 | 27,98 | 21,76 |

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah Kelompok Nelayan Terbina | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 |

*Sumber: Distan Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Produksi perikanan budidaya dan tangkap mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini diikuti pula dengan menurunnya tingkat konsumsi ikan dimana dihitung dari jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Serang. Tempat pelelangan ikan belum ada penambahan, Kota Serang masih memiliki satu tempat pelelangan ikan. Permasalahan mengenai urusan kelautan dan perikanan di Kota Serang adalah nelayan dan pembudidaya masih dalam skala tradisional dalam menangkap ikan di alam sehingga produksi ikan yang dihasilkan tidak maksimal. Serta masih perlunya pembinaan dan sosialisasi mengenai alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

**2) Pariwisata**

Urusan pariwisata merupakan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang. Selanjutnya tabel 2.66 berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan urusan pariwisata di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

**Tabel 2.66**
**Perkembangan Urusan Pariwisata Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunjungan wisatawan asing | 788 | 1.174 | 1.269 | 735 | 144 |
| 2 | Kunjungan wisatawan domestik | 309.117 | 1.068.087 | 2.231.747 | 12.822.876 | 19.153.677 |
| 3 | Obyek Wisata | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |

*Sumber: Disparpora Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan urusan pariwisata adalah angka kunjungan wisata tahun 2020 menurun drastis dari tahun sebelumnya akibat pandemi yang menyebabkan adanya kebijakan PSBB. Selain itu objek wisata yang saat ini sudah ada belum terkelola dengan baik sehingga banyak wisatawan yang belum mengetahui potensi wisata di Kota Serang. Wisata Banten Lama sudah mulai di tata dengan baik dibantu oleh Provinsi Banten dalam penataannya karena Banten Lama ini merupakan ikon Provinsi Banten yang bertempat di Kota Serang.

**3) Pertanian**

Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Serang yang tupoksinya mencakup sejumlah program antara lain: Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Capaian urusan pertanian selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.67**
**Perkembangan Urusan Pertanian Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) | 5,89 | 5,65 | 5,36 | 5,49 | 5,53 |
| 2 | Cakupan bina kelompok petani (%) | 76,63 | 42,46 | 47,94 | 100 | 100 |
| 3 | Populasi Ternak (Sapi dan Kerbau) | 4.567 | 4.455 | 8.787 | 2386 | 2568 |
| 4 | Produksi Hasil Ternak (Sapi dan Kerbau) (kg) | 2.147.050 | 2.380.980 | 3.621.413 | 2.448.584 | 2.333,53 |
| 5 | Populasi Ternak Kambing/Domba | 57.953 | 57.847 | 112.722 | 52.141 | 52.511 |
| 6 | Produksi Hasil Ternak Kambing/Domba (kg) | 481.760 | 315.185 | 409.075 | 320.615 | 154,56 |
| 7 | Populasi Ternak Unggas | 2.222.066 | 2.450.266 | 4.121.716 | 19.269.991 | 21.360.542 |
| 8 | Produksi Hasil Ternak Unggas (kg) | 10.039.445 | 8.818.173 | 9.921.271 | 11.781.728 | 9.807,63 |

*Sumber: Distan Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Produktivitas padi atau bahan pangan utama meningkat dipengaruhi oleh faktor pola tanam dan penggunaan bibit yang berkualitas. Hasil produktivitas padi per hektar pada tahun 2020 sebesar 5,53 ton/ha. Populasi dan produksi ternak mamalia tahun 2020 menurun. Ternak ungas populasinya meningkat tajam hal ini diperoleh selain produksi lokal juga dari impor luar daerah untuk memenuhi kebutuhan stok daging di Kota Serang namun hasil produksinya menurun drastis.

Permasalahan Pertanian adalah sawah yang terdapat di Kota Serang saat ini sudah banyak terkonversi menjadi lahan perumahan sehingga produksi pertanian lokal menurun untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kota Serang diperoleh dengan mengimpor produksi pangan dari

luar daerah Kota Serang. Selain konversi lahan persawahan menjadi perumahan produksi pertanian menurun juga disebabkan karena faktor cuaca dan jenis bibit yang ditanam sehingga mudah terserang hama dan megakibatkan gagal panen.

**4) Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pemerintah Kota Serang secara khusus tidak melaksanakan urusan pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, hal dikarenakan pertimbangan atas potensi energi dan sumberdaya mineral yang relatif kecil. Kebutuhan listrik di Kota Serang sebagian besar sudah terakomodir dengan baik. Berikut adalah disajikan salah satu capaian urusan energi dan sumberdaya mineral berupa data pengguna listrik sebagai berikut:

**Tabel 2.68**
**Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT dengan daya 450 VA | 86.518 | 87.492 | 88.817 | 88.817 | 88.817 |
| 2 | RT dengan daya 900 VA | 71.691 | 77.748 | 83.387 | 100.215 | 101.345 |
| 3 | RT dengan daya 1300 VA | 32.031 | 37.295 | 40.242 | 52.863 | 61.204 |
| 4 | RT dengan daya 2200 VA | 7.450 | 7.900 | 8.372 | 16.786 | 17.945 |
| 5 | RT dengan daya >2200 VA | 1.795 | 1.952 | 2.132 | 6.339 | 7.560 |
| 6 | Total Jumlah Pelanggan RT | 199.485 | 212.387 | 222.950 | 265.019 | 276.871 |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

**5) Perdagangan dan Perindustrian**

Urusan pilihan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Serang yang tupoksinya mencakup berbagai program dan kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian, antara lain: Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM), Kerjasama Pembangunan, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, Peningkatan Kemampuan Industri, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, serta Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, berikut dipaparkan kondisi eksisting urusan perdagangan di Kota Serang, sebagaimana tampak pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.69**
**Jumlah Pembinaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kasemen | 658 | 789 | 128 | 125 | 125 |
| 4 | Serang | 921 | 1.686 | 415 | 436 | 436 |
| 5 | Taktakan | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | Walantaka | 71 | 121 | 89 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **1753** | **2615** | **651** | **561** | **561** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.70**
**Jumlah Pembinaan Kelompok Pengrajin**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 495 | 600 | 3 | 19 | 4 |
| 2 | Curug | 550 | 580 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Kasemen | 409 | 500 | 5 | 16 | 1 |
| 4 | Serang | 923 | 1073 | 5 | 23 | 3 |
| 5 | Taktakan | 680 | 730 | 2 | 14 | 5 |
| 6 | Walantaka | 646 | 675 | 4 | 10 | 1 |
| **Jumlah** | | **3703** | **4158** | **21** | **84** | **15** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Urusan Perdagangan memiliki peran penting karena menyangkut distribusi barang-barang termasuk di dalamnya adalah barang kebutuhan pokok rakyat. Pelayanan dibidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah.Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional.

Urusan Perindustrian juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Serang. Hal ini ditujukan guna mendukung kegiatan perekonomian kota Serang. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah fasilitasi pengembangan industri kecil ramah lingkungan dan perbaikan mutu produk industri yang dihasilkan.

**Tabel 2.71**
**Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 12,93 | 17,50 | 10,45 | 13,08 | 1,27 |
| 2 | Curug | 8,73 | 5,17 | 7,20 | 0.37 | 0,18 |
| 3 | Kasemen | 12,22 | 18,20 | 10,71 | 13,09 | 1,18 |
| 4 | Serang | 14,19 | 13,98 | 6,12 | 9,39 | 1,02 |
| 5 | Taktakan | 9,85 | 6,85 | 6,41 | 8,72 | 1,08 |
| 6 | Walantaka | 15,33 | 4,30 | 6,90 | 4,56 | 0,29 |
| **Jumlah** | | **12,40** | **10,94** | **7,66** | **49,21** | **5,02** |

*Sumber: Disdaginkopukm Kota Serang, 2020*

Permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian adalah penataan pedagang kaki lima yang masih sulit untuk ditata karena berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini perlu koordinasi lintas OPD dalam menangani permasalahan ini.

**Tabel 2.72**
**Perkembangan Indikator Perdagangan dan Perindustrian**
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Perdagangan** | | | | | | |
| 1.1 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 27,80 | 28,56 | 28,42 | 28,18 | 27,75 |
| 1.2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 21,22 | 22,53 | 25,27 | 21,78 | 21,78 |
| **2** | **Perindustrian** | | | | | | |
| 2.1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 4,87 | 4,82 | 4,79 | 4,45 | 4,48 |
| 2.2 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | % | 3,33 | 4,55 | 3,60 | 3,06 | - |
| 2.3 | Pertumbuhan Industri. | % | 5,51 | 4,79 | 2,18 | 4,04 | (0,08) |
| 2.4 | Cakupan bina kelompok pengrajin/IKM | % | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,62 | 3,56 |

*Sumber: Disdaginkop UKM Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

**6) Transmigrasi**

Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. Selanjutnya tabel 2.73 berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan urusan transmigrasi di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

**Tabel 2.73**
**Pengiriman Transmigrasi Swakarsa Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipocok Jaya | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Curug | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kasemen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Serang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Taktakan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Walantaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **10** | **10** | **5** | **5** | **0** |

*Sumber: Disnakertrans Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Pengiriman transmigrasi swakarsa di Kota Serang terbanyak masih berasal dari Kecamatan Kasemen. Pada tahun 2020 KK yang rencananya berangkat dibatalkan karena terjadinya pandemic Covid 19 menyebabkan anggaran direfocusing dan ada kebijakan dari pusat untuk menangguhkan pengiriman transmigran tahun 2020. Di luar terjadinya pandemi, permasalahan urusan transmigrasi adalah kurangnya frekuensi pembinaan pasca penempatan transmigran di lokasi transmigrasi (setelah beberapa tahun dikirim sesuai kesepakatan dalam KSAD/PKS). Selan itu dalam melakukan pembinaan transmigran ke lokasi transmigrasi tidak disertai dengan pemberian bantuan (baik uang maupun barang) padahal ini yang banyak diharapkan oleh transmigran. Permasalahan yang lain adalah penyelesaian kerjasama antar daerah/perjanjian kerjasama (KSAD/PKS) dengan pemerintah daerah di lokasi penempatan belum tepat waktu.

### 2.3.4 Layanan Urusan Penunjang

#### 1) Perencanaan Pembangunan

Urusan penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang selama kurun waktu lima tahun. Capaian urusan perencanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut ini:

**Tabel 2.74**
**Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Jumlah Program RKPD tahun berkenaan | 237 | 209 | 202 | 120 | 120 |
| 5 | Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan | 216 | 216 | 216 | 120 | 120 |
| 6 | Jumlah Program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan | 237 | 209 | 202 | 120 | 120 |
| 7 | Persentase Program Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 86,11 | 96,76 | 97 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase Program Konsistensi program RKPD ke dalam APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappeda Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Persentase kekonsistenan program RPJMD ke dalam program RKPD tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan semua program dan kegiatan di RPJMD dilaksanakan di RKPD Tahun 2020. Sedangkan kekonsistenan RKPD ke dalam APBD sebesar 100 persen hal ini menunjukkan bahwa kegiatan di RKPD diakomodir semua di dalam APBD. Permasalahan dalam bidang perencanaan pembangunan adalah ketidak konsistenan program dan kegiatan antara RPJMD, RKPD dan APBD karena ada program BOS dan DAU yang belum masuk di RPJMD serta adanya aturan/kebijakan baru dari pusat terkait perencanaan dan keuangangan daerah serta nomenklatur yang perlu penyesuaian/pemetaan ketika pertama kali diterapkan.

**2) Keuangan**

Urusan penunjang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang serta Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Selama kurun waktu lima tahun tabel berikut menampilkan perkembangannya di Kota Serang. Capaian urusan keuangan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.75**
**Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase SILPA | 16,34 | 6,97 | 8,08 | 8,04) | 1,16 |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | 16,38 | 6,45 | 8,18 | 7,50 | 1,03 |
| 4 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | 11,21 | 18,88 | 13,22 | 14,16 | 15,91 |
| 5 | Persentase PAD terhadap APBD (Kemampuan keuangan daerah) | 11,23 | 17,47 | 13,37 | 13,28 | 13,04 |
| 6 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 6,69 | 10,19 | 35,72 | 35,22 | 34,06 |
| 7 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 4,62 | 7,78 | 10,95 | 11,25 | 9,88 |
| 8 | Perbandingan antara belanja langsung terhadap total APBD | 50,83 | 60,09 | 55,46 | 56,07 | 51,40 |
| 9 | Perbandingan antara belanja tidak langsung terhadap total APBD | 49,17 | 39,91 | 44,54 | 43,93 | 48,60 |
| 10 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 10,43 | 9,14 | 9,25 | 9,92 | 5,46 |

*Sumber: BPKAD Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan dalam bidang keuangan adalah pelimpahan aset yang belum selesai dari Kabupaten Serang, selain itu adalah kapasitas fiskal yang rendah sehingga masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Banten karena pendapatan asli daerah belum mampu untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan di Kota Serang.

**3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang. Capaian urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut ini:

**Tabel 2.76**
**Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah PNS | 4543 | 4429 | 4273 | 4236 | 4224 |
| 2 | Jumlah PNS Perempuan | 2845 | 2808 | 3025 | 2735 | 2790 |
| | Jumlah Perempuan Pejabat Eselon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Perempuan Pejabat Eselon III | 25 | 23 | 27 | 29 | 33 |
| | Jumlah Perempuan Pejabat Eselon IV | 274 | 262 | 292 | 324 | 302 |
| | Jumlah Perempuan Non Eselon IV | 2546 | 2523 | 2688 | 2382 | 2455 |
| 3 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0,13 | 0,09 | 5,52 | 4,96 | 0,81 |
| 4 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 5,02 | 6,12 | 7,16 | 7,3 | 2,27 |
| 5 | Jumlah kasus pelanggaran disiplin | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi | 100,00 | 70,00 | 85,00 | 92,00 | 91,43 |

*Sumber: BKPSDM Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan urusan kepegawaian di Kota Serang adalah masih banyaknya jumlah ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini bisa terlihat dari tabel di atas baru tercapai 0,81 persen. Sedangkan pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan striktural baru tercapai 2,27 persen. Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi baru tercapai sekitar 91,43 persen.

**4) Penelitian dan Pengembangan**

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang selama kurun waktu empat tahun. Capaian urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut ini:

**Tabel 2.77**
**Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Serang Tahun 2017-2020**

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah | 30,00 | 70,00 | 50,00 | 70,00 |

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 78,00 |

*Sumber: Bappeda Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

**5) Pengawasan**

Urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Serang selama kurun waktu lima tahun. Capaian urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut ini:

**Tabel 2.78**
**Capaian Indikator Urusan Pengawasan**
**Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | - | 74,26 | 82,25 | 79,07 | 76,97 |
| 2 | Jumlah temuan BPK | 25 | 17 | 37 | 48 | 11 |
| 3 | Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi. | 98,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase Penyelesaian dokumen anjab | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | SKPD yang memiliki SOP | 31,00 | 11,00 | 14,00 | 33,00 | 33,00 |
| 6 | Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN | 24,00 | 63,41 | 71,43 | 94,12 | 94,48 |
| 7 | Nilai LAKIP Kota | C | CC | 52,31 | 54,65 | 55,33 |
| 8 | Nilai LPPD Kota | 3.0230 | 3.2344 | 3.2346 | 3.4365 | 3.4426 |
| 9 | Jumlah Perda Inisiatif Disahkan | 2 | 5 | 4 | - | 3 |
| 10 | Perda dalam Prolegda yang disahkan | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 9 |

*Sumber: Setda; Inspektorat Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Permasalahan di bidang pengawasan adalah nilai LAKIP masih CC menggambarkan bahwa antara perencanaan dengan aplikasi pelaksanaan pembangunan masih perlu adanya koordinasi lebih intens. Tingkat maturitas atau kepatuhan mengenai SPIP masih dalam level 3. Penyelesaian tindak lanjut temuan baru berkisar 76,97 persen di tahun 2020. Seiring dengan adanya paradigma baru di inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya *watchtdog* menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

**6) Sekretariat Dewan**

Urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Kota Serang selama kurun waktu lima tahun. Capaian urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.79 berikut ini:

**Tabel 2.79**
**Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Persentase penyelesaian pelaksanaan kegiatan DPRD sesuai dengan fungsi DPRD (Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan | 95,22 | 92,24 | 92,34 | 94,00 | 98,00 |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari :

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi digambarkan oleh kapasitas/produktivitas masyarakat daerah yang diukur dari produk domestic regional bruto yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah gambaran produktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud di atas.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Semakin besar rasio atau angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

**Tabel 2.80**
**Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Pengeluaran RT (Rp) | 1.145.472 | 1.207.976 | 1.115.050 | 1.342.302 | 1.629.900 |
| 2 | Jumlah RT | 143.032 | 145.476 | 147.895 | 150.288 | 152.648 |
| | **Rasio** | **8,00** | **8,30** | **7,54** | **8,93** | **10,68** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi untuk masing-masing rumah tangga yang ada di Kota Serang.

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

**Tabel 2.81**
**Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Tukar Petani | 101,49 | NA | NA | 99,49 | NA |

*Sumber: Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Data NTP Kota Serang tersedia tahun 2016 berdasarkan kajian adalah sebesar 101,49 maka dapat digambarkan kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Sementara untuk tahun 2017, 2018 dan 2020 tidak dilakukan kajian. Di Tahun 2019 NTP Kota Serang adalah 99,49 ini artinya kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani tidak lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga atau kegiatan pertanian tidak memberikan keuntungan bagi petaninya.

c. **Pengeluaran konsumsi non Pangan per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)**

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran

**Tabel 2.82**
**Rasio Konsumsi RT Non Pangan Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Pengeluaran RT Non Pangan | 2.794.531 | 2.607.380 | 2.316.626 | 2.967.503 | 3.587.971 |
| 2 | Total Pengeluaran RT Pangan | 2.451.731 | 2.922.613 | 2.785.620 | 3.171.650 | 3.863.117 |
| | **Rasio** | **1,14** | **0,89** | **0,83** | **0,94** | **0,93** |

*Sumber: BPS Kota Serang, 2020*

Kota Serang pada tahun 2017-2020 memiliki pola konsumsi pangan lebih tinggi dibandingkan dengan pola konsumsi non pangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang belum mengikuti pola konsumsi perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang lebih banyak menghabiskan pendapatanya untuk kebutuhan makan.

d. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung

produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

**Tabel 2.83**
**Produktivitas Total Daerah Kota Serang**
**Tahun 2020**

| No | Sektor | PDRB | Tenaga Kerja | Produktivitas |
|---|---|---|---|---|
| | | ADHK | Sektor | sektor |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.077.640,13 | 12.419 | 86,77 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 1.339,73 | 393 | 3,41 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.064.608,62 | 47.745 | 22,30 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 26.555,77 | 2.207 | 12,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.879,68 | 3.321 | 2,07 |
| 6 | Konstruksi | 3.792.788,31 | 20.158 | 188,15 |
| 7 | Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6.531.138,37 | 82.023 | 79,63 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1.025.946,65 | 13.718 | 74,79 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 1.388.108,93 | 23.940 | 57,98 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.479.712,06 | 4.355 | 339,77 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 701.210,03 | 2.040 | 343,73 |
| 12 | Real Estate | 2.351.485,14 | 786 | 2.991,71 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 190.916,41 | 5.320 | 35,89 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib | 1.086.631,78 | 21.873 | 49,68 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 880.822,16 | 21.809 | 40,39 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 506.304,80 | 4.646 | 108,98 |
| 17 | Jasa Lainnya | 406.115,29 | 25.885 | 15,69 |
| | **Jumlah** | **22.518.203,95** | **292.638** | **76,95** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

**1) Aksesibilitas Daerah**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.84**
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang Jalan (km) | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 |
| 2 | Jumlah Kendaraan (unit) | 219.182 | 248.990 | 284.900 | 285.050 | 260.060 |
| | **Rasio** | **0,95** | **0,84** | **0,73** | **0,73** | **0,80** |

*Sumber: DPUPR; Dishub; SIPD Kota Serang, 2020*

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Serang selama kurun waktu 2016-2020 terjadi fluktuatif nilai. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan per tahun terjadi penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 260.060 unit. Kenaikan jumlah unit kendaraan ini harus diantisipasi dengan baik karena jika tidak terkontrol akan menyebabkan kemacetan di Kota Serang akibat jumlah kendaraan yang meningkat.

**2) Penataan Wilayah**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Ketaatan terhadap RTRW di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.85**
**Rasio Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi RTRW | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.618 |
| 2 | Rencana Peruntukkan | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.618 |
| | **Rasio** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: Dinas PUPR Kota Serang, 2020*

**Tabel 2.86**
**Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Wilayah Produktif (ha) | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.674 | 26.618 |
| 2 | Luas Seluruh Budidaya (ha) | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 22.600 |
| | **Rasio** | **1,27** | **1,27** | **1,27** | **1,27** | **1,18** |

*Sumber: RTRW Kota Serang, 2020*

Penataan ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena menjadi dasar bagi keberlangsungan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Karena itu penataan ruang merupakan kunci dari

pembangunan. Tantangan terbesar dalam pembangunan adalah bagaimana mengintegrasikan rencana-rencana pembangunan tersebut ke dalam penataan ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antarfungsi dalam proses pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dapat menjadi dasar yang jelas bagi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di dalam wilayah. Untuk itu dokumen RTRW menjadi instrument utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah yang dengannya harus menjadi acuan. Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

**3) Fasilitas Bank dan Non Bank**

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

**3.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perkembangan jenis dan jumlah bank dan cabangnya yang berada di Kota serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.87**
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Umum | | | | | |
| | Konvensional | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| | Syariah | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | BPR | | | | | |
| | Konvensional | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **16** | **16** | **17** | **15** | **18** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Pada tahun 2019, Bank Perkreditan Rakyat berkurang karena BPR tersebut merupakan BPR Kabupaten Serang dan kantornya pindah ke Ciruas. Bank umum konvensional dan syariah bertambah masing-masing menjadi 9 di tahun 2020 yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, Victona Syariah, Bank Danamon Solusi Emas Syariah, dan Mega Syariah.

### 3.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip syariah. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.88**
**Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan Asuransi Kerugian | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | a. Konvensional | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | b. Syariah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Perusahaan Asuransi Jiwa | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| | a. Konvensional | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | b. Syariah | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | **Jumlah** | **9** | **9** | **6** | **5** | **5** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

**4) Ketersediaan Air Bersih**

Air Bersih *(Clean Water)* adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum *(drinking water)* yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal
5. Air Sumur Dalam

Perkembangan rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Serang dapat dilihat pada tabel 2.89 berikut ini:

**Tabel 2.89**
**Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di Kota Serang**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leding (perpipaan) | 3.699 | 75.276 | 70.434 | 70.434 | 70.434 |
| 2 | Sumur Lindung | 67.165 | 14.805 | 21.428 | 21.428 | 21.428 |
| 3 | Sumur Tidak Terlindung | 2.480 | 3.011 | 4.062 | 4.062 | 4.062 |
| 4 | Mata air Terlindung | 170 | 170 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| 5 | Mata air Tidak Terlindung | 100 | 100 | 689 | 689 | 689 |
| 6 | Sungai | NA | NA | 2546 | 2546 | 2546 |
| 7 | Danau/Waduk | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | Air Hujan | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 |
| 9 | Air Kemasan | 13.306 | 13.495 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
| 10 | Lainnya | 1.113 | 770 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 11 | Jumlah RT | 167.400 | 170.056 | 193.332 | 193.332 | 193.332 |
| 12 | Jumlah RT yang menggunakan air bersih | 88.079 | 107.673 | 103.955 | 103.955 | 103.955 |
| | **Persentase RT yang menggunakan air bersih** | **52,62** | **63,32** | **53,77** | **53,77** | **53,77** |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Serang sebagian besar sudah beralih menggunakan perpipaan tidak lagi menggunakan sumur lindung. Hal ini menggambarkan semakin tingginya kesadaran utuk menggunakan air bersih yang sudah dilindungi dengan pipa dan diolah terlebih dahulu melalui mekanisme filterisasi agar air yang dipakai aman dari bakteri *e-coli* yang biasa terdapat pada air tanah. Permasalahannya adalah saluran air bersih perpipaan ini belum bisa menjangkau ke

seluruh pelosok di Kota Serang sehingga masih banyak rumah tangga yang menggunakan sumur dan sungai. Hal ini bisa terlihat di tabel 2.90 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih baru tercapai 53,77% di tahun 2020.

**5) Ketersediaan Penginapan**

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Perkembangan ketersediaan penginapan di Kota Serang selama kurun waktu 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.90**
**Ketersediaan Penginapan di Kota Serang**
**Tahun 2019 – 2020**

| No | Jenis Penginapan/Hotel | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
| 1. | Hotel Bintang 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hotel Bintang 4 | 2 | 213 | 450 | 2 | 213 | 450 |
| 3. | Hotel Bintang 3 | 1 | 34 | 100 | 1 | 34 | 100 |
| 4. | Hotel Bintang 2 | 4 | 255 | 600 | 4 | 255 | 600 |
| 5. | Hotel Bintang 1 | 1 | 53 | 150 | 1 | 53 | 150 |
| 6. | Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) | 17 | 525 | 1297 | 17 | 525 | 1297 |
| | **Total Jumlah penginapan/Hotel** | **25** | **1080** | **2597** | **25** | **1080** | **2597** |

*Sumber: Disparpora Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

1) Angka kriminalitas;
2) Jumlah demonstrasi;
3) Lama proses perijinan;
4) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
5) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

6) Persentase desa/Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Desa/Kelurahan.

**1) Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.91**
**Angka Kriminalitas di Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenis Kriminal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kasus Narkoba | 62 | 49 | 52 | 65 | 98 |
| 2 | Jumlah Kasus Pembunuhan | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Jumlah Kejahatan Seksual | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Jumlah Kasus Penganiayaan | 105 | 89 | 82 | 82 | 87 |
| 5 | Jumlah Kasus Pencurian | 457 | 197 | 267 | 278 | 327 |
| 6 | Jumlah Kasus Penipuan | 146 | 124 | 71 | 75 | 99 |
| 7 | Jumlah Kasus Pemalsuan uang | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jumlah Kasus Penggelapan | 37 | 816 | 20 | 21 | 49 |
| 9 | Total Tindak Kriminal Selama 1 tahun | 809 | 1282 | 494 | 532 | 762 |
| 10 | Jumlah Penduduk | 628.434 | 635.632 | 642.586 | 652.192 | 681.012 |
| | **Angka Kriminalitas** | **12,87** | **20,17** | **7,69** | **8,16** | **11,19** |

*Sumber: Polres Serang Kota, 2020*

**2) Jumlah Demonstrasi Kota Serang**

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.92**
**Jumlah Demonstrasi Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenis Kriminal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Politik | 10 | 3 | 3 | 8 | 26 |
| 2 | Ekonomi | 4 | 6 | 8 | 13 | - |
| 3 | Kasus Pemogokan Kerja | 2 | 1 | 2 | - | 10 |
| 4 | Bidang Agama | 0 | 1 | 4 | - | 12 |
| 5 | Lainnya | 0 | 1 | 5 | 5 | 85 |
| | **Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa** | **16** | **12** | **22** | **26** | **133** |

*Sumber: Polres Serang Kota, 2020*

Demonstrasi yang sering terjadi mengenai ekonomi berkaitan dengan demonstrasi buruh berkaitan dengan kenaikan upah minimum regional sedangkan politik, kasus pemogokan kerja dan bidang agama tidak terlalu signifikan terjadi di Kota Serang.

### 3) Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.93**
**Kemudahan Perijinan di Kota Serang**

| No | Uraian | Keterangan | Biaya resmi |
|---|---|---|---|
| 1. | SIUP | OSS => NIB | Gratis |
| 2. | TDP | OSS = >NIB | Gratis |
| 3. | IUI | OSS = >NIB | Gratis |
| 4. | TDI | OSS = >NIB | Gratis |
| 5. | IMB | | - L x Index X HSB untuk Semua IMB<br>(1) Sektor IMB Rumah Tinggal, Jasa, Sosial Budaya<br>(2) Khusus Tempat Ibadah Rp = 0<br>NIB : Nomor Induk Berusaha |

*Sumber: DPMPTSP Kota Serang, 2020*

Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

### 4) Pengenaan Pajak Daerah (jumlah dan macam pajak daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Perkembangan jumlah dan pajak di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.94**
**Jumlah dan Macam Pajak di Kota Serang Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Pajak yang dikeluarkan | 92.026.846.894 | 117.703.375.555 | 129.994.111.102 | 145.581.543.385 | 139.179.329.606 |
| 2. | Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi | - | - | - | - | - |
| 3. | Jumlah Retribusi yang dikeluarkan | 10.023.696.548 | 8.561.723.485 | 8.560.072.708 | 13.732.010.605 | 15.346.436.105 |
| 4. | Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi | - | - | - | - | - |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Permasalahan untuk retribusi dan pajak daerah adalah belum maksimalnya dalam menangani hal ini di lapangan sedangkan potensi retribusi dan pajak sangat besar dilapangan. Hal ini masih perlu perhatian yang lebih untuk pemerintah kota serang khususnya badan pengelola keuangan daerah selaku OPD yang bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut.

### 5) Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.95**
**Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Di Kota Serang**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Perda terkait perijinan | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 2. | Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: SIPD Kota Serang, 2020*

Peraturan daerah sepanjang kurun waktu 2016-2020 yang sudah disahkan sebanyak 20 perda diantaranya 14 perda terkait perijinan, 5 perda terkait lalu lintas barang dan jasa serta 1 perda terkait ketenaga kerjaan.

### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

#### 1) Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Kualitas tenaga kerja di Kota Serang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.96**
**Kualitas Tenaga Kerja Di Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah lulusan S1 | 25.367 | 27.672 | 29.826 | 31.743 | 32.651 |
| 2. | Jumlah lulusan S2 | 2.382 | 2.665 | 2.961 | 3.128 | 3.225 |
| 3. | Jumlah lulusan S3 | 119 | 127 | 131 | 154 | 157 |
| 4. | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 27.868 | 30.464 | 32.918 | 35.025 | 36.033 |
| 5. | Jumlah penduduk | 628.434 | 635.632 | 642.586 | 652.192 | 681.012 |
| 6. | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 44,35 | 47,93 | 51,23 | 53,70 | 52,91 |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel 2.97 bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Serang sebesar 52,91 persen sudah lulusan SI, S2 dan S3. Angka ini setengahnya dari total seluruh penduduk di Kota Serang yang komposisinya pada usia yang non produktif.

**2) Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang

semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kota Serang dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.97**
**Tingkat Ketergantungan Di Kota Serang Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 169.666 | 164.948 | 162.967 | 174.700 | 190.724 |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun | 16.024 | 16.376 | 19.392 | 22.191 | 21.015 |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif | 185.690 | 181.324 | 182.359 | 196.891 | 211.739 |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia Produktif | 442.744 | 454.308 | 460.227 | 455.301 | 469.273 |
| | **Rasio Ketergantungan** | **41,94** | **39,91** | **39,62** | **43,24** | **45,12** |

*Sumber: Disdukcapil Kota Serang; SIPD Kota Serang, 2020*

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk usia non produktif sebesar 45,12 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2020. Rasio ketergantungan selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan beban yang ditanggung penduduk usia produktif di Kota Serang semakin meningkat.

Hasil analisis Target Indikator Kinerja Utama terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Kota Serang Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.98**
**Hasil Analisis Target Indikator Kinerja Utama**
**Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Serang Tahun 2019-2020**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | TARGET RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 72,07 | 72,10 | 72,47 | 72,16 | 73,92 | < |
| 2 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,63 | 8,67 | 8,64 | 8,76 | 8,68 | > |
| 3 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,67 | 12,77 | 12,69 | 12,78 | 12,77 | > |
| 4 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 67,80 | 67,83 | 68,03 | 68,00 | 68,75 | < |
| 5 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,08 | 1,49 | 1,06 | 4,42 | 1,00 | < |
| 6 | Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI) | Poin | 57,70 | 57,71 | 60,7 | 61,87 | 70 | < |
| 7 | Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah | % | 71,00 | 67,55 | 74,00 | 70,09 | 83,00 | < |
| 8 | Persentase kawasan kumuh | % | 2,01 | 6,82 | 2,00 | 6,50 | 1,07 | < |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | TARGET RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 9 | Persentase potensi titik kemacetan | % | 40,00 | 44,20 | 32 | 44,3 | 12,00 | < |
| 10 | Indeks kualitas lingkungan hidup | Point | 50,20 | 47,35 | 50.35 | 54,34 | 51.30 | > |
| 11 | Indeks kualitas mutu udara | Poin | 65,00 | 67,2 | 67.50 | 72,46 | 71 | > |
| 12 | Indeks kualitas mutu air | Poin | 53,00 | 51,05 | 51,00 | 43,33 | 48,00 | > |
| 13 | Indeks kualitas mutu tutupan lahan | Poin | 37,00 | 29,7 | 37 | 39,71 | 39,00 | > |
| 14 | Cakupan penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 15 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,51 | 6,20 | 6,61 | -1,29 | 6,91 | < |
| 16 | Tingkat inflasi daerah | % | 3-5 | 3,06 | 3-5 | 1,91 | 3-5 | > |
| 17 | Indeks daya beli | Poin | 79,59 | 79,12 | 80,44 | 78,65 | 83,61 | < |
| 18 | PDRB per kapita | Juta Rp | 44,5 | 45,89 | 46,5 | 45,17 | 52,5 | < |
| 19 | Indeks Ketimpangan Regional Williamson | Poin | 0,54 | 0,45 | 0,53 | 0,48 | 0,5 | > |
| 20 | Angka Kemiskinan | % | 5,26 | 5,28 | 5,16 | 6,06 | 4,86 | < |
| 21 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 8,16 | 8,08 | 8,08 | 8,05 | 9,26 | 7,93 | < |
| 22 | Indeks Reformasi Birokrasi Daerah | Poin | 70 | 59,14 | 72,5 | 65 | 80 | < |
| 23 | Indeks kepuasan masyarakat (SKM) | poin | 73 | 77,8 | 75.00 | 77,74 | 81.00 | < |
| 24 | Nilai LPPD Kota | Kategori | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi | < |
| 25 | Hasil Evaluasi AKIP | Kategori | B | CC | B | CC | BB | < |
| 26 | Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Kategori | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | = |

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Serang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.99**
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**
**Kota Serang Tahun 2019-2020**

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB (LPE) | Persen | 6,51 | 6,2 | 6,61 | -1,29 | 5,5 | < |
| 2 | Laju inflasi | Persen | 3-5 | 3,06 | 3-5 | 1,91 | 3-5 | > |
| 3 | PDRB Perkapita | Juta Rp | 44,5 | 45,89 | 46,5 | 45,17 | 51,67 | < |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 72,07 | 72,10 | 72,47 | 72,16 | 73,09 | < |
| 5 | Persentase PAD terhadap pendapatan | Persen | 14,26 | 14,16 | 14,52 | 14,38 | 15,09 | < |
| 6 | Angka melek huruf | Persen | 100 | 99,98 | 100 | 100 | 100,00 | = |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,63 | 8,67 | 8,64 | 8,76 | 8,91 | > |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 8 | Indeks Ketimpangan regional (Williamson) | Poin | 0,54 | 0,45 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | > |
| 9 | Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan | Persen | 94,74 | 94,72 | 94,84 | 93,94 | 94,24 | < |
| 10 | Angka usia harapan hidup | Tahun | 67,80 | 67,83 | 67,5 | 68 | 68,51 | < |
| 11 | Persentase balita gizi buruk | Persen | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | < |
| 12 | Prevalensi balita gizi kurang | Persen | 2,72 | 1,60 | 2,71 | 2,19 | 2,68 | > |
| 13 | Cakupan Desa Siaga Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | > |
| 14 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 8,08 | 8,08 | 8,05 | 9,26 | 8,96 | < |
| 15 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | = |
| 16 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | Persen | 5,7 | 5,32 | 5,75 | 5,46 | 6,00 | < |
| 17 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | Persen | 5,7 | NA | 5,75 | NA | 6,00 | |
| 18 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | Persen | 0,58 | 0,68 | 0,58 | NA | 0,58 | |
| 19 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 6,55 | 6,27 | 6,66 | 6,08 | 7,02 | < |
| 20 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | Persen | 27,9 | 28,08 | 28,05 | 27,75 | 28,50 | < |
| 21 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | Persen | 4,84 | 4,45 | 4,86 | 4,48 | 4,90 | < |
| 22 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | Persen | 4,57 | 3,06 | 4,59 | NA | 4,64 | |
| 23 | Indeks kepuasan masyarakat | Persen | 73 | 77,8 | 75 | 77,74 | 81,00 | < |
| 24 | Pencapaian pola skor pangan harapan (PHP) | Persen | 80 | 87,8 | 81 | 87,7 | 90,42 | > |
| **ASPEK DAYA SAING** | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | Persen | 101 | 99,49 | 102 | NA | 105 | < |
| 2 | Rasio Ketergantungan | Persen | 39,58 | 43,24 | 39,54 | 45,12 | 39,42 | < |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 93,25 | 93,65 | 93,3 | 93,66 | 100,00 | > |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat | Persen | 125,5 | 128,6 | 125,5 | 126,51 | 126,51 | > |
| 1.2.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat | Persen | 117,1 | 117,35 | 117,16 | 117,97 | 117,97 | > |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 1.4.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 99,35 | 99,45 | 99,42 | 99,46 | 100 | < |
| 1.5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | | | | |
| 1.5.1 | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 105,09 | 105,9 | 105,14 | 105,90 | 105,90 | > |
| 1.5.2 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 99,33 | 99,49 | 99,38 | 99,5 | 99,53 | < |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | |
| 1.6.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | < |
| 1.6.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 0,3 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | < |
| 1.7 | Angka Kelulusan | | | | | | | |
| 1.7.1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 1.7.2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 1.8 | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | | | |
| 1.8.1 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 72,61 | 100 | 72,83 | 100 | 100 | > |
| 1.8.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 1.9 | Fasilitas Pendidikan | | | | | | | |
| 1.9.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 90,55 | 94,25 | 90,67 | 94,45 | 95,50 | > |
| 1.9.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | Persen | 85,11 | 94 | 85,54 | 95,65 | 95,80 | > |
| 1.9.3 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Rasio | 1:34 | 1:40 | 1:33 | 1:42 | 1:36 | < |
| 1.9.4 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio | 1:23 | 1:40 | 1:33 | 1:48 | 1:36 | < |
| **2** | **KESEHATAN** | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | persen | 1,57 | 0,22 | 1,47 | 0,25 | 0,18 | > |
| 2.2 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | persen | 98,43 | 0,78 | 98,53 | 0,75 | 0,82 | > |
| 2.3 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | persen | 1,57 | 0,24 | 1,47 | 0,25 | 0,19 | > |
| 2.4 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup | persen | 1,42 | 0,23 | 1,32 | 0,20 | 0,17 | > |
| 2.5 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Wanita Usia Subur | persen | 14 | 0,11 | 13 | 0,13 | 0,10 | > |
| 2.6 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk | Rasio | 0,0467 | 0,0445 | 0,0467 | 0,0406 | 0,0467 | < |
| 2.7 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk | Rasio | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,022 | < |
| 2.8 | Rasio dokter per persatuan penduduk | Rasio | 0,075 | 0,005 | 0,078 | 0,011 | 0,088 | < |
| 2.9 | Rasio tenaga Para Medis persatuan penduduk | Rasio | 1,7 | 0,39 | 1,74 | 0,048 | 2,22 | < |
| 2.10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 50 | 91,62 | 60 | 34,55 | 90 | < |
| 2.11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan | Persen | 85 | 95,18 | 85 | 38,76 | 95 | < |
| 2.12 | Cakupan Desa/Kelurahan (UCI) | Persen | 91 | 86,36 | 92 | 28,36 | 95 | < |
| 2.13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.14 | Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 95 | 94,8 | 95,5 | 81,31 | 97 | < |
| 2.15 | Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk | Persen | >2 | 0,00001 | >2 | 0,0011 | >2 | < |
| 2.16 | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Persen | 80 | 57,32 | 85 | 48,05 | 100 | < |
| 2.17 | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 85 | 100 | 85 | 67,81 | 90 | < |
| 2.18 | Tingkat Prevelensi Tuberkulosis | Persen | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,21 | 0,007 | < |
| 2.19 | Tingkat Kematian karena Tuberkulosis | Persen | 2 | 0,0031 | 2 | 0,01 | 1 | > |
| 2.20 | Proporsi Jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 90 | 56,24 | 90 | 67,81 | 95 | < |
| 2.21 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 85 | 58,62 | 85 | 70,80 | 90 | < |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 2.22 | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.23 | Penderita diare yang ditangani | Persen | 100 | 65,04 | 100 | 50,85 | 100 | < |
| 2.24 | Angka kejadian malaria | Persen | <1 | 0 | <1 | 0 | <1 | > |
| 2.25 | Tingkat kematian akibat malaria | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 2.28 | Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi | Persen | 0,05 | 0,0067 | 0,05 | 0,01 | 0,007 | > |
| 2.29 | Prporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persen | 1,5 | 1,16 | 1,5 | NA | 1,5 | < |
| 2.30 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 100 | 3,05 | 100 | 4,20 | 3,60 | < |
| 2.31 | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 65 | 88,93 | 70 | 85,70 | 100 | > |
| 2.32 | Cakupan puskesmas | Persen | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 266,7 | = |
| 2.33 | Cakupan pembantu puskesmas | Persen | 17,5 | 19,7 | 17,5 | 19,4 | 19,4 | > |
| 2.34 | Cakupan kunjungan ibu K4 | Persen | 75 | 85,79 | 80 | 76,67 | 95 | < |
| 2.35 | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 85 | 90,82 | 85 | 85,97 | 95 | < |
| 2.36 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 60 | 45,06 | 65 | 29,41 | 80 | < |
| 2.37 | cakupan pelayanan anak balita | Persen | 65 | 71,01 | 70 | 54,41 | 85 | < |
| 2.38 | cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.39 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD | Persen | 90 | 100 | 90 | 11,20 | 90 | < |
| 2.40 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin | Persen | 83,12 | 119,722 | 100 | 136,56 | 100 | > |
| 2.41 | Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 | > |
| 2.42 | Cakupan desa/kelurahan (UCI)mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.43 | Presentase Rumah Tangga ber-PHBS | Persen | 70 | 79,11 | 75 | 84,85 | 90 | < |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 3.1 | Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 3.1.1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 67 | 65,5 | 70 | 65,85 | 79 | < |
| 3.1.2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 0,04 | 0,032 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | < |
| 3.1.3 | Presentase drainase dalam kondidsi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 57 | 57 | 60 | 66 | 72 | < |
| 3.1.4 | Presentase irigasi kota dalam kondidsi baik | Persen | 91 | 91 | 93 | 90,43 | 99 | < |
| 3.1.5 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 25 | 26 | 27 | 29,16 | 33 | > |
| **3.2** | **PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 3.2.1 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan cita satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan | Persen | 47 | 47 | 45 | 47 | 39 | > |
| 3.2.2 | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 55 | 51 | 56 | 51 | 59 | < |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| **4** | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0,970 | 0,867 | 0,972 | 0,871 | 0,978 | > |
| 4.2 | Rasio permukiman layak huni | Rasio | 0,950 | 0,992 | 0,955 | 0,955 | 0,970 | < |
| 4.3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 97 | 86,70 | 97,2 | 66,32 | 97,8 | < |
| 4.4 | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 95 | 99,19 | 95,5 | 93,18 | 97 | < |
| 4.5 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 7 | 6,82 | 6,5 | 6,50 | 5 | > |
| 4.6 | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | Persen | 2,01 | 1,44 | 2 | 2,00 | 1,07 | < |
| 4.7 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 3 | 13,3 | 2,8 | 2,80 | 2,2 | < |
| 4.8 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 73 | 79,27 | 73,45 | 69,33 | 79,31 | < |
| 4.9 | Presentase penduduk berakses air bersih | Persen | 54 | 38,95 | 54,5 | 56,14 | 65 | > |
| 4.10 | Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk | Rasio | 1000 | 1.048,09 | 1000 | 1.037,56 | 1000 | < |
| **5** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarat (LINMAS) | Persen | 67,07 | 42 | 74,08 | 42 | 51,04 | < |
| 5.2 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 33,33 | 72,16 | 50,5 | 72,16 | 96,04 | < |
| 5.3 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 68,52 | 97,43 | 75,93 | 99,76 | 100 | > |
| **6** | **SOSIAL** | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social | Persen | 47,9 | 62,70 | 53,5 | 63,31 | 65,14 | < |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 22,4 | 63,33 | 27 | 64,18 | 66,73 | > |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan dasar | Persen | 59,4 | 62,53 | 61,2 | 63,06 | 64,65 | < |
| 6.4 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | = |
| 6.5 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | = |
| 6.6 | persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 7,6 | 45,82 | 10,5 | 31,19 | 34,04 | > |
| **Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **1.** | **TENAGA KERJA** | | | | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun | Persen | 2,8 | 6,45 | 2,7 | 6,15 | 3,10 | < |
| 1.2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama | Persen | 100 | 83,33 | 100 | 100 | 100,00 | = |
| 1.3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 5,05 | 8,82 | 5,25 | 7,35 | 5,85 | > |
| 1.4 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | Persen | 100 | 33,61 | 100 | 86,55 | 89,5 | < |
| 1.5 | Sasaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 100 | 92 | 100 | 0 | 100 | < |
| 1.6 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | = |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 1.7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| **2** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 23 | 34,51 | 23 | 13,09 | 19 | < |
| 2.2 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 77 | 32,73 | 77 | 34,50 | 40 | < |
| 2.3 | Rasio KDRT | Persen | 0,75 | 0,56 | 0,72 | 0,0047 | 0,0035 | > |
| 2.4 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | Persen | 2 | 1,56 | 2 | 0,75 | 0,72 | > |
| 2.5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 47,79 | 48,68 | 47,79 | 45,94 | 66 | < |
| 2.6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persen | 90 | 94 | 95 | 100 | 100 | = |
| 2.8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | Persen | 85 | 80 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.9 | Cakupan penegakan hukum dari tingkatmpenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.10 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 2.11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 70 | 60 | 75 | 100 | 85 | = |
| 2.12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 | < |
| 2.13 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Persen | 52 | 94,75 | 55 | 98 | 100 | > |
| 2.14 | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian | Org | 21.366 | 22.380 | 21.375 | 27,530 | 30 | > |
| **3** | **PANGAN** | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan pangan utama | Persen | 78 | 71,72 | 80 | 77,24 | 86 | < |
| 3.2 | Ketersediaan energi dan protein perkapita | kkal / % | 2.247;72 | 2.420 ; 141,1 | 3.247;73 | 2.598 ; 154,08 | 2.756; 158,75 | < |
| 3.3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 20 | 66,67 | 40 | 85 | 100 | < |
| **4** | **PERTANAHAN** | | | | | | | |
| 4.1 | Penyelesaian tanah negara | Persen | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | < |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 4.2 | Penyelesaian izin lokasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| **5** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | |
| | KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| 5.1 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Ada/ Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Ada | < |
| 5.2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Ada/ Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Ada | < |
| 5.3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 5.4 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | Indeks/ Point | 53 | 51,05 | 51 | 43,33 | 71,00 | > |
| 5.5 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | Indeks/ Point | 65 | 67,2 | 67,5 | 72,46 | 48,00 | > |
| 5.6 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan | Indeks/ Point | 37 | 29,7 | 37 | 39,71 | 39,00 | > |
| 5.7 | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 60 | 55,58 | 65 | 61,05 | 80 | < |
| 5.8 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | Persen | 60 | 4 | 75 | 6,1 | 27 | < |
| 5.9 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 60 | 55,58 | 63 | 61,60 | 80 | < |
| **6** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk | Rasio | 0,98 | 0,99 | 0,985 | 0,99 | 1,00 | < |
| 6.2 | Rasio Bayi berakte kelahiran (0-2) | Rasio | 0,88 | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | = |
| 6.3 | Rasio Pasangan berakte nikah | Rasio | 0,67 | 0,44 | 0,69 | 0,32 | 0,35 | < |
| 6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala Kab/Kota | ada/tidak ada | Ada | Ada | ada | ada | ada | = |
| 6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | sudah/ belum | sudah | Sudah | sudah | sudah | sudah | = |
| 6.6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP) | Persen | 98 | 98,75 | 98,5 | 99,2 | 100 | < |
| 6.7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran (bagi yg baru lahir) | Persen | 89 | 93 | 89,5 | 92 | 91 | > |
| **7** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | |
| 7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 74 | 100 | 74 | 100 | 100 | > |
| 7.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 74 | 100 | 74 | 100 | 100 | > |
| 7.3 | Persentase LPM aktif | Persen | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | > |
| 7.4 | Persentase LPM Berprestasi | Persen | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | < |
| 7.5 | Persentase PKK aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 7.6 | Persentase Posyandu aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 7.7 | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat | Persen | 5,7 | 5,70 | 5,75 | 64,18 | 90 | > |
| 7.8 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 5,7 | 5,70 | 5,75 | 9,30 | 25 | > |
| **8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,08 | 1,49 | 1,06 | 4,42 | 4,00 | < |
| 8.2 | Total Fertility Rate (TFR) | Persen | 2,47 | 2,34 | 2,34 | 2,37 | 2,31 | < |
| 8.3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 14,8 | 48 | 22,2 | 48 | 48 | > |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 8.4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 22,22 | 33,33 | 24,22 | 33,33 | 33,33 | > |
| 8.5 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Persen | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | < |
| 8.6 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 2,47 | 2,34 | 2,34 | 2,47 | 2,10 | < |
| 8.7 | Ratio Akseptor KB | Persen | 70 | 80,14 | 72 | 73,59 | 75,00 | < |
| 8.8 | Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | Persen | 70 | 80,14 | 72 | 73,59 | 75,00 | < |
| 8.9 | Angka kelahiran remaja(perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | Persen | 1 | 1 | 1 | 32,50 | 29 | < |
| 8.10 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | Persen | 29,68 | 32,28 | 29,48 | 32,28 | 29,50 | < |
| 8.11 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 16 | 11,57 | 15,8 | 16,50 | 13,0 | < |
| 8.12 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 61 | 72,47 | 62 | 15,8 | 16,9 | < |
| 8.13 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 1,5 | 2,62 | 1,4 | 1,31 | 1,0 | > |
| 8.14 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 81 | 85,24 | 82 | 83,89 | 85 | < |
| 8.15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 80 | 83,98 | 81 | 90,38 | 93 | > |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 78 | 85,75 | 79 | 84,54 | 87 | > |
| 8.17 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 8.18 | Cakupan Remaja dalam Pusat informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | Persen | 56,72 | 38 | 40 | 38 | 46 | < |
| 8.19 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 0 | 80 | 66,6 | 100 | 100 | = |
| 8.20 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 79 | 88,98 | 80 | 86,55 | 89 | > |
| 8.21 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 8.22 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 72 | 100 | 75 | 100 | 100 | = |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 8.23 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 65 | 91,43 | 68 | 91,43 | 92,30 | > |
| 8.24 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | = |
| 8.25 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 81 | 100 | 82 | 100 | 100 | > |
| 8.26 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 65 | 78,85 | 70 | 78,85 | 81 | < |
| 8.27 | Rata-rata usia kawin pertama Wanita | Persen | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | = |
| 8.28 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | Persen | 70 | 95,36 | 75 | 21,64 | 23,50 | < |
| **9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 453.762 | 450.592 | 493.015 | 410.763 | 675.820 | < |
| 9.2 | Rasio ijin trayek | Rasio | 0,082 | 0,3 | 0,089 | 0,002 | 0,112 | < |
| 9.3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 7.380 | 4.036 | 7.980 | 5.450 | 9.702 | < |
| 9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | = |
| 9.5 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 6,66 | 94,40 | 5,92 | 97,96 | 68 | > |
| 9.6 | Pemasangan Rambu-rambu | Persen | 65 | 64,9 | 75 | 77,1 | 100 | < |
| 9.7 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,0088 | 0,73 | 0.0079 | 0,80 | 0,95 | > |
| 9.8 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | Orang | 476.450 | 450.592 | 527.526 | 410.763 | 683.958 | < |
| 9.9 | Jumlah orang melalui dermaga/terminal per tahun | Orang | 476.450 | 329.036 | 527.526 | 395.157 | 683.958 | < |
| **10** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | |
| 10.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 80 | 80 | 82 | 71,61 | 80 | < |
| 10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Rasio | 80 | 80 | 82 | 100 | 100 | > |
| 10.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | Persen | 65 | 65 | 70 | 96,75 | 95 | > |
| 10.4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Rasio | 80 | 80 | 82 | 99,11 | 100 | > |
| 10.5 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | Rasio | 40 | 40 | 45 | 29,50 | 34 | < |
| **11** | **KOPERASI USAHA, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase koperasi aktif | Persen | 49,07 | 36,17 | 49,6 | 35,42 | 37,87 | < |
| 11.4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 1,45 | 99,77 | 1,48 | 99,79 | 99,85 | > |
| **12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 991 | 1.796 | 1091 | 671 | 1391 | < |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 12.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp/Milyar | 5.550 | 3.899,08 | 5.950 | 3.143 | 6.875 | < |
| **13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | |
| 13.2 | Persentase wirausaha muda | Persen | 20 | 51,58 | 22 | 55,99 | 59 | > |
| 13.3 | Cakupan pembinaan olahraga | Persen | 45 | 57 | 50 | 57,78 | 81,25 | < |
| 14 | STATISTIK | | | | | | | |
| 14.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | ada | ada | = |
| 14.2 | Buku ”Kota Serang dalam angka” | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | ada | ada | = |
| 14.3 | Buku ”PDRB” | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | ada | ada | = |
| **15** | **PERSANDIAN** | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | Persen | 10,00 | 9,09 | 20,00 | 39,4 | 50 | < |
| **16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | |
| 16.1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 17,24 | 17,24 | 25,86 | 24,14 | 24,14 | < |
| **17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Persen | 5,6 | 0,08 | 6,6 | 0,32 | 0,098 | < |
| 17.2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | rasio | 48 | 0,34 | 48,5 | 9,56 | 0,37 | < |
| 17.3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Persen | 0,41 | 0,685 | 0,42 | 0,64 | 0,601 | > |
| 17.4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Pengunjung | 24000 | 2054,75 | 25000 | 805,83 | 2458,33 | < |
| 17.5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 5000 | 5.100 | 5.500 | 6.629 | 8.129 | < |
| 17.6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Persen | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | = |
| **18** | **KEARSIPAN** | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 45,45 | 33,33 | 57,56 | 30,30 | 100 | < |
| 18.2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 8 | 9 | 9 | 14 | 13,2 | > |
| **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | |
| **1** | **PARIWISATA** | | | | | | | |
| 1.1 | Kunjungan wisata | Orang | 3.018.144 | 12.823.611 | 3.621.772 | 19.153.821 | 21.000.000 | > |
| 1.2 | PAD sektor pariwisata | Persen | 0,03 | 16,52 | 0,04 | 12,50 | 14,50 | > |
| **2** | **PERTANIAN** | | | | | | | |
| 2.1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 5,9 | 5,49 | 6,1 | 5,53 | 7 | < |
| 2.2 | Cakupan bina kelompok petani | Kelompok | 365 | 341 | 370 | 341 | 385 | < |
| **5** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | |
| 5.1 | Capaian bina kelompok pedagang/usaha informal | persen | 2 | 21,78 | 2 | 21,78 | 27,17 | > |
| **6** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | |
| 6.1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | persen | 2 | 1,65 | 2 | 3,56 | 4,02 | < |
| **8** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | |
| 8.1 | Produksi perikanan | Ton | 3.012,15 | 5.698,87 | 3.614,22 | 4.730,78 | 6.243,64 | < |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 8.2 | Konsumsi ikan | Kg/Kapita | 28,4 | 27,98 | 28,97 | 21,76 | 30,75 | < |
| 8.3 | Cakupan bina kelompok nelayan | Kelompok | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | < |
| 8.4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | Ton | 4.669,83 | 3.521,17 | 5.603,80 | 3.096,13 | 9.683,37 | < |
| 8.5 | Nilai tukar nelayan | Persen | 101 | 102,94 | 102 | 98,8 | 105 | < |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | |
| 1,1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 1,2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 1,3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 1,4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 1,6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 1,7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| **2.1** | **KEUANGAN** | | | | | | | |
| 2.2 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | = |
| 2.3 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 20 | 35,22 | 20 | 34,06 | 20 | > |
| 2.4 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 10 | 11,25 | 10 | 9,88 | 10 | < |
| 2.5 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | Persen | 50,25 | 56,07 | 51,45 | 51,4 | 55,10 44,90 | < |
| | | | 49,75 | 43,93 | 48,55 | 48,60 | 11,20 | |
| 2.6 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 9,12 | 9,92 | 9,7 | 5,46 | Tepat Waktu | < |
| 2.10 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | = |
| **3** | **KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 67,78 | 7,3 | 77,75 | 2,27 | 74,95 | < |
| **4** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persen | 75 | 70 | 80 | 78 | 90 | < |
| 4.2 | Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persen | 75 | 50 | 80 | 70 | 80 | < |
| **5** | **PENGAWASAN** | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 56,01 | 79,07 | 56,5 | 76,97 | 90 | > |
| 5.2 | Jumlah Temuan BPK | Rekomendasi | 25 | 48 | 21 | 11 | 25 | > |
| **6** | **SEKRETARIAT DEWAN** | | | | | | | |
| 6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | 2019 | | 2020 | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | | |
| 6.2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | = |
| 6.3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | ada | Ada | = |

## 2.5 Standar Pelayanan Minimal

### 2.5.1 Bidang Pelayanan Pendidikan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Pelayanan Pendidikan dasar sepanjang tahun 2020 tidak semuanya tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Permasalahan bidang pelayanan pendidikan dasar antara lain pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih belum maksimal karena sarana dan prasarana aparatur kurang memadai, kurangnya sosialisasi pendidikan kepada masyarakat; cakupan PAUD yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, dan masih ada sarana dan prasarana SD dan SMP yang perlu diperbaiki/direhab. Capaian pelayanan bidang pendidikan dasar dapat dilihat di Tabel 2.100.

### 2.5.2 Bidang Pelayanan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Pelayanan Kesehatan sepanjang tahun 2020 belum semuanya tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Jenis pelayanan yang tercapai targetnya adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Presentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar). Permasalahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan saat ini antara lain masih ditemukannya kasus gizi buruk di Kota Serang, perpindahan tenaga medis ke luar Kota Serang, jumlah kematian Ibu yang masih ditemukan, kualitas pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan

masih rendah, masih ditemukan kasus penyakit menular dan tidak menular dan kurangnya koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan kawasan sehat. Capaian pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Tabel 2.100.

### 2.5.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Perkembangan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100. Permasalahan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tingkat kondisi jalan kota baru tercapai 65,50 persen, masih belum maksimalnya jaringan drainase skala kota yang tidak terjadi genangan. Luasan RTH belum melampaui batas target 20 persen yang tersedia karena di Kota Serang baru tercapai 3,43 persen. Ketersediaan air irigasi untuk pertanian baru tercapai 91,00 persen karena sistem irigasi yang ada bukan asset dan kewenangan penuh Pemerintah Kota Serang.

### 2.5.4 Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Perkembangan SPM Bidang perumahan rakyat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100.

Permasalahan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat adalah banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan, pemeliharaan/rehabilitasi atau peningkatan PSU di lingkungan perumahan. Rendahnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, belum maksimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik skala komunitas/kawasan/kota dan belum maksimalnya layanan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan layanan rumah layak huni akibat bencana. Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2020 mencapai 66,32 persen.

### 2.5.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Perkembangan SPM Bidang pemerintahan dalam negeri tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100.

Permasalahan yang terjadi pelayanan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran adalah kurangnya tenaga ahli pemeriksaan dan/atau penguji alat pemadam kebakaran dikarenakan ASN yang ada pada OPD Satpol PP sangat kurang jumlahnya. Disiplin, wawasan, kemampuan dan keterampilan aparatur Satpol PP dan Damkar belum memenuhi standar semestinya. Sarana dan prasarana operasional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran belum bisa mengakomodir semua kebutuhan yang ada. Peran serta masyarakat, OPD dan instansi terkait dalam penegakan Perda dan Perkada masih belum maksimal di laksanakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pencegahan bahaya kebakaran serta masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terkait Perda dan Perkada. Untuk capaian pelayanan kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD pada tahun 2020 mencapai 100 persen.

### 2.5.6 Sosial

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial mencakup pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Perkembangan SPM Bidang Sosial tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100.

Permasalahan pelayanan bidang sosial selama kurun waktu 2020 adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana sosial yang tersedia di Kota Serang yang fungsinya untuk mengakomodir masalah sosial antara lain belum memiliki kantor dinas sendiri dan belum memiliki pusat rehabilitasi sosial (rumah singgah). Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih banyak yang belum tertangani, kurang optimalnya pembinaan dan pemberdayaan bagi pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan belum maksimalnya validasi data PBI JKN APBD dan PBI APBN.

**Tabel 2.100**
**Perkembangan Caaian Kinerja SPM Kota Serang Tahun 2019-2020**

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM | SATUAN | Target SPM hingga Tahun 2023 | Capaian 2019 | Capaian 2020 | OPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | Pendidikan anak usia dini | Angka Partisipasi PAUD | % | 100 | 93,65 | 93,66 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Pendidikan dasar | APM SD/MI/sederajat | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | APM SMP/MTS/ sederajat | % | 100 | 99,45 | 99,46 | |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM | SATUAN | Target SPM hingga Tahun 2023 | Capaian 2019 | Capaian 2020 | OPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendidikan kesetaraan | Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 100 | 86 | 100 | |
| Kesehatan | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 85,80 | 74,77 | Dinas Kesehatan |
| | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 95,20 | 82,80 | |
| | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 88,93 | 85,70 | |
| | Pelayanan kesehatan balita | Prensentasi anak 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai setandar | % | 100 | 71,01 | 54,41 | |
| | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Presentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 11,20 | |
| | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Presentase WNI usia 15-59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 100 | 61,15 | 51,66 | |
| | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Presentase WNI usia 60 tahun keatas mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 100 | 93,74 | 67,18 | |
| | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 36,76 | 44,66 | |
| | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 73,87 | 77,79 | |
| | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Presentase penderita gangguan jiwa mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 77,53 | 80,28 | |
| | Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis | Presentase penderita Tuberkolosis mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 45,18 | 32,31 | |
| | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang melemahkan daya tahan tubuh | Presentase setiap orang beresiko terkena HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 100 | 99,74 | 97,12 | |
| Pekerjaan Umum | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase penduduk berakses air minum | % | 100 | 73,32 | 72,30 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM | SATUAN | Target SPM hingga Tahun 2023 | Capaian 2019 | Capaian 2020 | OPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Persentase rumah tangga berakses pengolahan air limbah | % | 100 | 80,82 | 79,27 | |
| Perumahan Rakyat | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persentase RTLH bagi korban bencana | % | 100 | - | 100 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Persentase RTLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah | % | 100 | - | - | |
| Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang mendapat layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah | % | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | % | 100 | 98,24 | 99,02 | |
| | Pelayanan informasi rawan bencana | Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| | | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| | | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | - | 100 | |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM | SATUAN | Target SPM hingga Tahun 2023 | Capaian 2019 | Capaian 2020 | OPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban Bencana | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB | % | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| | Pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | % | 100 | 94,49 | 100 | BPBD |
| | | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase pemadaman, penyelamatan dan evakuasi perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan | % | 100 | 94,49 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan OPD pemadam kebakaran dan peyelamatan | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondidi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | |
| Sosial | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Presentase (%) penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 100 | 10,69 | 11,38 | Dinas Sosial |
| | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Presentase (%) penyandang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 100 | 8,91 | 4,56 | |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR SPM | SATUAN | Target SPM hingga Tahun 2023 | Capaian 2019 | Capaian 2020 | OPD penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Presentase (%) penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 100 | 100 | 50,78 | |
| | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Presentase (%) penyandang gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 100 | 32,74 | 77,52 | |
| | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Presentasi (%) Korban Bencana Alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tenggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | |

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung salah satunya pada kapasitas keuangan daerah beserta kebijakan pengelolaannya. Tinggi rendahnya kapasitas keuangan daerah bahkan secara langsung akan berkorelasi dengan daya dukung sektor keuangan ini terhadap penyelenggaraan semua urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Apalagi bila di sisi lain juga didukung oleh politik anggaran yang tepat dan relevan dengan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh daerah, serta tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien. Dalam konteks perencanaan keuangan, deskripsi tentang tingkat kemampuan keuangan daerah sebagaimana direpresentasi antara lain oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana yang sangat penting untuk dianalisis dalam rangka memetakan kinerja keuangan daerah di masa lalu guna diproyeksikan untuk kepentingan perencanaan kebijakan keuangan di masa depan.

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan Kota Serang pada Tahun 2014-2018. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah. Kerangka pengelolaan keuangan Kota Serang secara garis besar meliputi penganggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. secara lengkap kinerja keuangan Kota Serang pada Tahun 2014-2018 tersaji sebagai berikut :

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

**1) Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

**Tabel 3.1**
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**
**Kota Serang Tahun 2014 – 2018**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | |
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.024.512.302.967** | **1.105.658.800.589** | **1.132.266.273.590** | **1.231.344.645.550** | **1.242.437.572.372,00** | 4,99 |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **97.827.597.434** | **111.062.806.774** | **126.900.900.019** | **232.458.208.409** | **164.218.548.654,00** | 20,40 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 67.029.484.443 | 76.019.640.712 | 91.461.208.222 | 117.703.375.555 | 128.677.842.933,00 | 17,94 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 8.594.266.348 | 8.792.207.127 | 10.051.354.548 | 8.561.723.485 | 8.560.072.708,00 | 0,45 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | | |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 22.203.846.643 | 26.250.958.935 | 25.388.337.249 | 106.193.109.369 | 26.980.633.013,00 | 64,66 |
| **1.2.** | **Dana Perimbangan** | **648.709.803.905** | **670.172.308.659** | **825.491.157.313** | **877.330.483.239** | **855.909.344.041,00** | 7,58 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 42.347.665.905 | 37.335.752.659 | 56.900.405.362 | 74.592.964.884 | 72.332.263.569,00 | 17,16 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 564.282.698.000 | 584.907.276.000 | 647.985.703.000 | 636.602.678.000 | 636.602.678.000,00 | 3,17 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 42.079.440.000 | 47.929.280.000 | 120.605.048.951 | 166.134.840.355 | 146.974.402.472,00 | 47,94 |
| **1.3.** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **277.974.901.628** | **324.423.685.156** | **179.874.216.258** | **121.555.953.902** | **222.309.679.677,00** | 5,65 |
| 1.3.1 | Hibah | - | - | - | - | 75.165.697.009,00 | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 91.760.677.628 | 109.312.920.531 | 117.879.356.758 | 121.555.953.902 | 123.143.982.668,00 | 7,85 |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 132.989.772.000 | 139.260.370.000 | - | - | - | 4,72 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 53.224.452.000 | 75.850.394.625 | 61.994.859.500 | - | 24.000.000.000,00 | (12,35) |
| **2** | **Belanja** | **949.970.142.088** | **1.061.917.792.736** | **1.129.841.327.429** | **1.330.488.751.791** | **1.331.112.249.924,00** | 9,00 |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **484.739.167.740** | **509.140.717.134** | **555.587.702.548** | **531.032.474.147** | **546.947.071.829,00** | 3,18 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 468.837.435.780 | 494.804.652.506 | 526.119.875.980 | 465.729.708.093 | 510.057.184.273,00 | 2,48 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 14.714.692.200 | 12.559.561.500 | 26.975.800.000 | 60.614.775.370 | 31.674.932.980,00 | 44,27 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 348.820.000 | 930.000.000 | 1.476.000.000 | 2.615.218.000 | 3.951.700.000,00 | 88,40 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 816.219.760 | 846.503.128 | 1.016.026.568 | 1.152.152.684 | 1.152.152.684,00 | 9,28 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 22.000.000 | | | 920.620.000 | 111.101.892,00 | (93,97) |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **465.230.974.348** | **552.777.075.602** | **574.253.624.881** | **799.456.277.644** | **680.924.640.829,00** | 11,77 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 59.925.243.734 | 68.558.602.426 | 44.766.916.149 | 45.264.626.341 | 45.553.461.042,00 | (4,64) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 253.996.563.819 | 300.308.085.417 | 359.653.282.250 | 420.677.516.032 | 431.082.095.316,00 | 14,36 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 151.309.166.795 | 183.910.387.759 | 169.833.426.482 | 333.514.135.271 | 204.289.084.471,00 | 17,88 |
| **3** | **Pembiayaan** | **64.321.024.772** | **138.863.185.651** | **182.604.193.504** | **185.029.139.665** | **85.885.031.424,00** | 23,78 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 64.398.385.047 | 138.863.185.651 | 182.604.193.504 | 185.029.139.665 | 85.885.031.424,00 | 23,72 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 77.360.275 | - | - | - | - | - |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019*

**2) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran**

**Tabel 3.2**
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**
**Kota Serang Tahun 2014 – 2018**

| No | Uraian | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) | Rupiah | (%) | Rupiah | (%) | Rupiah | (%) | Rupiah | (%) |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **484.739.167.740** | **100** | **508.982.112.134** | **100** | **555.587.702.548** | **100** | **531.032.474.147** | **100** | **584.042.134.555** | **100** |
| 1 | Belanja Pegawai | 468.837.435.780 | 96,72 | 494.646.047.506 | 97,18 | 526.119.875.980 | 94,70 | 465.729.708.093 | 87,70 | 544.736.155.674 | 93,27 |
| 2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Hibah | 14.714.692.200 | 3,04 | 12.559.561.500 | 2,47 | 26.975.800.000 | 4,86 | 60.614.775.370 | 11,41 | 32.306.636.197 | 5,53 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 348.820.000 | 0,07 | 930.000.000 | 0,18 | 1.476.000.000 | 0,27 | 2.615.218.000 | 0,49 | 4.231.700.000 | 0,72 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 816.219.760 | 0,17 | 846.503.128 | 0,17 | 1.016.026.568 | 0,18 | 1.152.152.684 | 0,22 | 1.152.152.684 | 0,20 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 22.000.000 | 0,00 | - | - | - | - | 920.620.000 | 0,17 | 1.615.490.000 | 0,28 |
| **B** | **Belanja Langsung** | **465.230.974.348** | **100** | **552.935.680.602** | **100** | **574.253.624.881** | **100** | **799.582.037.663** | **100** | **747.070.115.369** | **100** |
| 1 | Belanja Pegawai | 59.925.243.734 | 12,88 | 68.726.032.426 | 12,43 | 46.126.516.149 | 8,03 | 45.302.892.840 | 5,67 | 53.802.203.536 | 7,20 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 253.996.563.819 | 54,60 | 300.299.260.417 | 54,31 | 358.293.682.250 | 62,39 | 420.688.110.394 | 52,61 | 470.096.242.581 | 62,93 |
| 3 | Belanja Modal | 151.309.166.795 | 32,52 | 183.910.387.759 | 33,26 | 169.833.426.482 | 29,57 | 333.591.034.429 | 41,72 | 223.171.669.252 | 29,87 |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019*

### 3.1.2 Neraca Daerah

**Tabel 3.3**
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah**
**Kota Serang Tahun 2014 – 2018**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| **1.** | **ASET** | | | | | | |
| **1.1.** | **ASET LANCAR** | **248.323.266.743,62** | **234.971.945.788,30** | **249.199.014.087,53** | **147.381.265.604,85** | **162.274.809.990,01** | **(7,52)** |
| 1.1.1. | Kas | 138.869.789.455,00 | 182.612.231.990,00 | 187.539.503.873,00 | 85.960.801.615,00 | 100.464.152.867,00 | (0,77) |
| 1.1.2. | Piutang | 100.854.350.877,64 | 38.566.220.195,47 | 36.768.130.260,44 | 49.115.890.905,64 | 49.118.625.444,80 | (8,21) |
| 1.1.3. | Persediaan | 8.599.126.410,98 | 13.793.493.602,83 | 24.891.379.954,09 | 12.304.573.084,21 | 12.692.031.678,21 | 23,36 |
| | | | | | | | |
| **1.2.** | **ASET TETAP** | **1.704.600.866.295,41** | **2.140.895.560.905,35** | **2.284.759.588.883,27** | **2.015.033.137.680,97** | **2.280.922.134.578,04** | **8,43** |
| 1.2.1. | Tanah | 569.149.229.604,00 | 1.098.483.415.676,50 | 1.106.596.284.690,50 | 868.836.570.987,50 | 1.056.688.519.267,50 | 23,47 |
| 1.2.2. | Peralatan dan mesin | 198.938.248.346,06 | 243.130.488.419,41 | 260.091.464.706,41 | 299.617.844.768,94 | 326.067.066.027,43 | 13,30 |
| 1.2.3. | Gedung dan bangunan | 531.404.763.461,65 | 627.091.446.493,75 | 669.217.988.973,75 | 684.050.543.256,75 | 691.351.897.320,71 | 7,00 |
| 1.2.4. | Jalan, irigasi, dan jaringan | 372.941.072.280,70 | 473.967.261.490,27 | 550.165.761.544,20 | 663.574.778.832,63 | 811.562.387.541,90 | 21,52 |
| 1.2.5. | Aset tetap lainnya | 26.416.941.907,00 | 27.241.635.427,26 | 29.585.976.535,26 | 29.907.413.916,45 | 17.063.526.847,97 | (7,53) |
| 1.2.6. | Konstruksi dalam pengerjaan | 5.750.610.696,00 | - | 37.971.818.215,00 | 19.135.284.367,00 | 13.502.495.200,00 | 160,42 |
| 1.2.7 | Akumulasi Penyusutan | - | (329.018.686.601,84) | (368.869.705.781,85) | (550.089.298.448,30) | (635.313.757.627,47) | 25,58 |
| | | | | | | | |
| **1.3.** | **ASET LAINNYA** | **29.822.356.321,50** | **38.307.470.800,41** | **45.567.226.275,43** | **45.853.804.817,02** | **83.069.812.496** | **32,30** |
| 1.3.1. | Tagihan penjualan angsuran | - | - | - | - | - | |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.3.2. | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | 1.375.019.821,50 | 1.947.472.844,41 | 1.106.715.997,36 | 1.106.715.997,36 | 1.110.129.411,36 | (0,31) |
| 1.3.3. | Kemitraan dengan pihak ketiga | 16.714.100.000,00 | 16.714.100.000,00 | 16.714.100.000,00 | 16.714.100.000,00 | 16.714.100.000,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Aset tak berwujud | 1.958.368.719,00 | 1.449.398.655,00 | 5.393.995.337,00 | 3.935.653.227,60 | 2.722.316.882,60 | 47,07 |
| 1.3.5. | Aset lain-lain | 9.774.867.781,00 | 18.196.499.301,00 | 22.352.414.941,07 | 24.097.335.592,06 | 62.523.266.202,40 | 69,07 |
| | **JUMLAH ASET DAERAH** | **1.982.746.489.360,53** | **2.414.174.977.494,06** | **2.579.525.829.246,23** | **2.208.268.208.102,84** | **2.526.266.757.064** | **7,15** |
| | | | | | | | |
| **2.** | **KEWAJIBAN** | **1.882.306.094,00** | **3.736.526.910,00** | **10.004.175.236,00** | **10.375.266.992,00** | **13.055.063.765,00** | **73,95** |
| **2.1.** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **1.882.306.094,00** | **3.736.526.910,00** | **10.004.175.236,00** | **10.375.266.992,00** | **13.055.063.765,00** | **73,95** |
| 2.1.1. | Utang perhitungan pihak ketiga | 6.603.804,00 | 8.037.308,00 | 10.004.175.236,00 | 75.770.191,00 | 25.563.594,00 | 31.056,98 |
| 2.1.2. | Uang muka dari kas daerah | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3. | Pendapatan diterima dimuka | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4. | Utang jangka pendek lainnya | - | 1.178,00 | - | 10.299.496.801,00 | 5.020.167.977,00 | 437.160.230,02 |
| 2.1.5. | Utang retensi | 1.875.702.290,00 | 3.728.488.424,00 | - | - | 8.009.332.194,00 | 37,86 |
| | | | | | | | |
| **3.** | **EKUITAS DANA** | **1.980.864.183.266,53** | **2.410.438.450.584,06** | **2.569.521.654.010,43** | **2.198.559.418.584,36** | **2.513.211.693.299,00** | **7,04** |
| **3.1.** | **EKUITAS DANA LANCAR** | **1.980.864.183.266,53** | **2.410.438.450.584,06** | **2.569.521.654.010,43** | **2.198.559.418.584,36** | **2.513.211.693.299,00** | **7,04** |
| 3.1.1. | SILPA | 1.980.864.183.266,53 | 2.410.438.450.584,06 | 2.569.521.654.010,43 | 2.198.559.418.584,36 | 2.513.211.693.299,00 | 7,04 |
| 3.1.2. | Cadangan piutang | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3. | Cadangan persediaan | - | - | - | - | - | |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 3.1.4. | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek | - | - | - | - | - | |
| 3.1.5. | Pendapatan yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| **3.2.** | **EKUITAS DANA INVESTASI** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam aset tetap | - | - | - | - | - | |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam aset lainnya | - | - | - | - | - | |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **1.982.746.489.360,53** | **2.414.174.977.494,06** | **2.579.525.829.246,43** | **2.208.934.685.576,36** | **2.526.266.757.064,00** | **7,15** |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019*

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

**Tabel 3.4**
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Serang**

| NO | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1 | TA 2014 | 602.428.212.207 | 950.047.502.363 | 63,41 |
| 2 | TA 2015 | 647.722.821.195 | 1.061.917.792.736 | 61,00 |
| 3 | TA 2016 | 665.786.151.650 | 1.129.841.327.429 | 58,93 |
| 4 | TA 2017 | 637.248.122.057 | 1.330.488.751.791 | 47,90 |
| 5 | TA 2018 | 680.591.549.065 | 1.331.112.249.924 | 51,13 |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2020*

### 3.2.2 Analisa Pembiayaan

**Tabel 3.5**
**Defisit Riil Anggaran Kota Serang**

| NO | Uraian | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah | 1.024.512.302.967 | 1.105.658.800.589 | 1.132.266.273.590 | 1.231.344.645.550 | 1.245.227.218.500 |
| | Dikurangi realisasi: | | | | | |
| 2. | Belanja Daerah | 949.970.142.088 | 1.061.917.792.736 | 1.129.841.327.429 | 1.330.614.511.810 | 1.331.112.249.924 |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 77.360.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Surplus/Defisit riil** | **74.464.800.604** | **43.741.007.853** | **2.424.946.161** | **(99.269.866.260)** | **(85.885.031.424)** |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2020*

**Tabel 3.6**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Serang**

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 86.48 | 0.00 | 5,726.44 | (0.00) | (212.61) |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | | | | | |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | | | | | |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | | |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | | | | | |

**Tabel 3.7**
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Serang**

| No | Uraian | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) dari Silpa | Rupiah | (%) dari Silpa | Rupiah | (%) dari Silpa | Rupiah | (%) dari Silpa | Rupiah | (%) dari Silpa |
| 1. | Jumlah SiLPA | 64.398.385.047 | 100,00 | 138.863.185.651 | 100,00 | 182.604.193.504,00 | 100,00 | 185.029.137.665 | 100,00 | 85.872.729.559,00 | 100,00 |
| 2. | Pelampauan penerimaan PAD | 7.542.613.891 | 11,71 | 16.687.394.767 | 12,02 | 17.513.187.934,00 | 09,59 | 11.761.784.372 | 6,36 | 20.781.721.726,00 | 24,20 |
| 3. | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | (15.385.672.875) | (23,89) | 716.246.434 | 0,52 | (20.508.466.341,00) | (11,23) | 13.614.681.662 | 7,36 | (25.620.414.912,00) | (29,84) |
| 4. | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 5.177.496.787 | 8,04 | (13.930.464.948) | (10,03) | 6.914.847.699,00 | 03,79 | - | 0,00 | - | 00,00 |
| 5. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 61.578.437.698 | 95,62 | 90.185.237.048 | 64,95 | 190.666.944.212,00 | 104,42 | 159.652.671.631 | 86,29 | 90.711.422.745,00 | 105,63 |
| 6. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 5.485.509.546 | 8,52 | - | 0,00 | - | | - | 0,00 | - | 00,00 |
| | Sisa Belanja Dana Penyesuaian | | 0,00 | 34.442.788.857 | 24,80 | | | | 0,00 | | 00,00 |
| 7. | Sisa Belanja DAK | | 0,00 | 10.761.983.493 | 7,75 | (11.982.320.000,00) | (06,56) | | 0,00 | | 00,00 |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019*

## 3.3 Kerangka Pendanaan

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam penyusunan kerangka pendanaan APBD akan mengacu pada regulasi yang mengatur penyusunan anggaran. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023 pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana berikut :

**Tabel 3.8**
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**
**Kota Serang Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.206.821.193.661** | **1.244.388.505.290** | **1.287.473.027.473** | **1.329.909.315.215** | **1.373.867.709.898** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **172.138.881.051** | **180.726958.069** | **189.182.160.344** | **198.045.594.093** | **207.337.307.673** |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 136.000.000.000 | 142.781.132.965 | 149.920.189.613 | 157.416.199.094 | 165.287.009.049 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 14.000.000.000 | 14.700.000.000 | 15.435.000.000 | 16.206.750.000 | 17.017.087.500 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 22.138.881.051 | 23.245.825.104 | 23.826.970.731 | 24.422.644.999 | 25.033.211.124 |
| **1.2.** | **Dana Perimbangan** | **919.608.608.000** | **931.326.786.920** | **952.722.630.797** | **975.086.730.593** | **998.465.468.378** |
| 1.2.1. | Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak | 79.079.241.000 | 79.079.241.000 | 79.079.241.000 | 79.079.241.000 | 79.079.241.000 |
| 1.2.2. | Dana alokasi umum | 674.620.421.000 | 683.020.421.000 | 701.031.722.378 | 719.943.588.826 | 739.801.048.596 |
| 1.2.3. | Dana alokasi khusus | 165.908.946.000 | 169.227.124.920 | 172.611.667.418 | 176.063.900.767 | 179.585.178.782 |
| **1.3.** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **115.073.704.610** | **132.334.760.301** | **145.568.236.331** | **156.776.990.529** | **168.064.933.847** |
| 1.3.1 | Hibah | - | - | - | - | - |

| No. | Uraian | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Dana darurat | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 115.073.704.610 | 132.334.760.301 | 145.568.236.331 | 156.776.990.529 | 168.064.933.847 |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | - | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | - | - | - | - | - |
| **2** | **BELANJA** | **1.261.283.860.786** | **1.285.472.985.383** | **1.329.640.067.494** | **1.375.831.576.869** | **1.424.144.136.699** |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **627.612.638.273** | **642.736.492.691** | **664.820.033.747** | **687.915.788.435** | **712.072.068.350** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 596.670.285.589 | 629.884.340.007 | 651.967.881.063 | 675.063.635.751 | 699.219.915.666 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 25.585.200.000 | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.205.000.000 | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.152.152.684 | 1.152.152.684 | 1.152.152.684 | 1.152.152.684 | 1.152.152.684 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **633.671.222.513** | **642.736.492.691** | **664.820.033.747** | **687.915.788.435** | **712.072.068.350** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 35.214.228.121 | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 423.290.610.582 | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 175.166.383.810 | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **54.462.667.125** | **41.084.480.093** | **42.167.040.021** | **45.922.261.654** | **50.276.426.801** |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 54.462.667.125 | 41.084.480.093 | 42.167.040.021 | 45.922.261.654 | 50.276.426.801 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | - |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019*

Seiring dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020, berikut adalah target dan realisasi APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**
**Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**
**Kota Serang Tahun 2019 – 2020**

| No. | Uraian | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.331.495.033.986** | **1.342.262.284.840** | **100,81** | **1.277.357.350.541** | **1.265.462.070.409** | **99,07** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **178.224.903.079** | **190.029.710.255** | **106,62** | **166.140.732.845** | **180.263.229.327** | **108,50** |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 134.530.000.000 | 143.984.654.737 | 107,03 | 125.403.000.000 | 139.176.728.788 | 110,98 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 14.000.000.000 | 13.545.505.333 | 96,75 | 13.453.500.000 | 15.346.858.105 | 114,07 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 29.694.903.079 | 32.499.550.185 | 109,44 | 27.284.232.845 | 25.739.642.434 | 94,34 |
| **1.2.** | **Dana Perimbangan** | **920.667.708.000** | **894.254.943.746** | **97,13** | **861.770.549.204** | **847.837.265.668** | **98,38** |
| 1.2.1. | Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak | 79.079.241.000 | 63.147.049.592 | 79,85 | 88.648.002.220 | 77.794.442.052 | 87,76 |
| 1.2.2. | Dana alokasi umum | 674.620.421.000 | 674.620.421.000 | 100,00 | 618.641.127.000 | 613.720.963.000 | 99,20 |
| 1.2.3. | Dana alokasi khusus | 166.968.046.000 | 156.487.473.154 | 93,72 | 154.481.419.984 | 156.321.860.616 | 101,19 |
| **1.3.** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **232.602.422.907** | **257.977.630.839** | **110,91** | **249.446.068.492** | **237.361.575.414** | **95,16** |
| 1.3.1 | Hibah | 76.173.200.000 | 76.015.245.452 | 99,79 | 87.733.990.000 | 84.926.884.000 | 96,80 |
| 1.3.2 | Dana darurat | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 116.429.222.907 | 141.962.385.387 | 121,93 | 84.820.461.492 | 75.543.074.414 | 89,06 |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | - | - | - | 31.891.617.000 | 31.891.617.000 | - |

| No. | Uraian | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 100,00 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 100,00 |
| **2** | **BELANJA** | **1.431.933.623.259** | **1.335.416.109.082** | **93,26** | **1.384.644.172.872** | **1.321.812.072.156** | **95,46** |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **629.009.184.585** | **582.739.486.928** | **92,64** | **672.950.092.966** | **636.258.512.587** | **94,55** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 596.623.958.901 | 551.561.146.629 | 92,45 | 557.267.390.142 | 532.329.633.120 | 95,52 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 28.028.073.000 | 27.911.607.275 | 99,58 | 19.801.287.984 | 17.604.055.555 | 88,90 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.205.000.000 | 2.085.000.000 | 94,56 | 2.300.000.000 | 1.725.000.000 | 75,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.152.152.684 | 1.152.152.684 | 100,00 | - | - | - |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000 | 29.580.340 | 2,96 | 93.581.414.840 | 84.599.823.912 | 90,40 |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **802.924.438.674** | **752.676.622.154** | **93,74** | **711.694.079.906** | **685.553.559.569** | **96,33** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 47.954.360.683 | 45.698.110.965 | 95,30 | 43.335.628.426 | 41.120.148.729 | 94,89 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 483.817.344.653 | 454.136.117.592 | 93,87 | 483.701.023.481 | 465.909.784.510 | 96,32 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 271.152.733.338 | 252.842.393.597 | 93,25 | 184.657.427.999 | 178.523.626.330 | 96,68 |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(100.438.589.273)** | **6.846.175.758** | | **(107.286.822.331)** | **(56.350.001.747)** | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **100.438.589.273** | **100.440.646.573** | **100,00** | **107.286.822.331** | **107.286.822.331** | **100,00** |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 100.438.589.273 | 100.440.646.573 | 100,00 | 107.286.822.331 | 107.286.822.331 | 100,00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | - | - |
| | **SILPA** | **-** | **107.286.822.331** | | **-** | **50.936.820.584** | |

*Sumber: BPKAD Kota Serang, 2020*

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2021-2023 pada dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.10. Pada Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2021-2023 telah memuat alokasi dana cadangan untuk mendukung tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Serang pada Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**Tabel 3.10**
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**
**Kota Serang Tahun 2021 – 2023**

| NO | URAIAN | PROYEKSI APBD 2021 | PROYEKSI APBD 2022 | PROYEKSI APBD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Pendapatan Daerah** | **1.453.115.014.287** | **1.423.756.533.974** | **1.446.319.034.074** |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 219.251.281.900 | 227.664.291.400 | 250.226.791.500 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 143.125.000.000 | 161.155.090.000 | 183.716.802.600 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 27.388.700.000 | 20.826.654.500 | 20.827.442.000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | - | - |
| 1.1.4 | lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 48.737.581.900 | 45.682.546.900 | 45.682.546.900 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.150.461.032.387** | **1.112.689.542.574** | **1.112.689.542.574** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 922.529.552.000 | 949.139.728.417 | 949.139.728.417 |
| 1.2.2 | Transfer antar daerah | 227.931.480.387 | 163.549.814.157 | 163.549.814.157 |
| 1.2.2.1 | Pendapatan - Bagi Hasil | 187.931.480.387 | 113.549.814.157 | 113.549.814.157 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 40.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| **1.3** | **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** | **83.402.700.000** | **83.402.700.000** | **83.402.700.000** |
| 1.3.1 | Hibah | 83.402.700.000 | 83.402.700.000 | 83.402.700.000 |
| **2.** | **Belanja Daerah** | **1.496.753.461.562** | **1.407.506.533.974** | **1.430.069.034.074** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **-** | **-** | **-** |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
| **2.3** | **Belanja Tidak Tertuga** | **-** | **-** | **-** |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | - | - | - |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.496.753.461.562** | **1.407.506.533.974** | **1.430.069.034.074** |

| NO | URAIAN | PROYEKSI APBD 2021 | PROYEKSI APBD 2022 | PROYEKSI APBD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(43.638.447.275)** | **16.250.000.000** | **16.250.000.000** |
| **3.** | **Pembiayaan** | **58.638.447.275** | **16.250.000.000** | **16.250.000.000** |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **51.138.447.275** | **-** | **-** |
| 3.1.1 | SiLPA ( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 51.138.447.275 | | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **51.138.447.275** | **-** | **-** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **7.500.000.000** | **16.250.000.000** | **16.250.000.000** |
| 3.2.3 | Pembentukan - Dana Cadangan | 7.500.000.000 | 16.250.000.000 | 16.250.000.000 |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **7.500.000.000** | **16.250.000.000** | **16.250.000.000** |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **43.638.447.275** | **(16.250.000.000)** | **(16.250.000.000)** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA ( SILPA)** | **-** | **-** | **-** |

*Sumber : BPKAD Kota Serang, 2021*

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan penguatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan target pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2018, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk Tahun 2021, sebagaimana mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah terbagi menjadi 3 komponen yaitu : Pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer) dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.10.

Dalam penyusunan kerangka pendanaan APBD akan mengacu pada regulasi yang mengatur penyusunan anggaran pada setiap tahunnya, berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa lalu, serta mempertimbangkan variabel ekonomi daerah sebagaimana mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Melihat kondisi yang terjadi yaitu pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) pada Tahun 2020 yang berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan baik aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi, maka Pemerintah Kota Serang perlu mempertimbangkan beberapa kondisi yang kemungkinan masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 terutama proses pemulihan dari dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19, diantaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan penurunan pendapatan daerah. Hal ini akhirnya akan mempengaruhi pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai pendanaan terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya untuk pengalokasian pendanaaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun maka diperlukan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil

keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan.

### 3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran dikelompok 3 (tiga) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Prioritas I,** merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Prioritas II**, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. **Prioritas III,** Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan belanja dana kelurahan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

### 3.3.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro regional dan nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki Kota Serang serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kota Serang adalah dari dana transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Serang untuk melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital
2. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak dan peran serta masyarakat / sektor swasta
4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah
5. Meningkatkan penggalian sumber sumber pendapatan daerah melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga
6. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah terutama Perangkat Daerah penghasil, diantaranya memantapkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah

7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemeritah Propinsi, khususnya yang berkaitan dengan dana transfer
8. Kebijakan diversifikasi layanan publik yang menghasilkan pendapatan
9. Dalam rangka penanganan dampak ekonomi maka dikeluarkan kebijakan pemberian penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan perpanjangan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### 3.3.5 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang, sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Serang serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian berorientasi hasil (*outcome oriented*) dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atau menggunakan prinsip *money follow program priority*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*).
2. Diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat tetap dan mengikat (Gaji ASN, TPP, operasional kantor);
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

5. Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
6. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis provinsi/nasional (PEN, peningkatan KESRA, peningkatan sistem pelayanan Kesehatan dan pembangunan infrastruktur);
7. Belanja yang bersifat perintah (*mandatory spending dan earmarking*)

### 3.3.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah yang mengupayakan adanya anggaran berimbang maka penempatan SiLPA tahun sebelumnya dijadikan sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Serang pada Tahun 2024 maka dialokasikan pembentukan dana cadangan mulai Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan Pilkada Kota Serang Tahun 2024.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kebijakan penganggaran yang mengupayakan adanya anggaran berimbang maka penempatan SiLPA tahun sebelumnya dijadikan sebagai alat untuk menutup deficit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitive karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
3. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

### 3.3.7 Alokasi Anggaran

**Tabel 3.11**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Serang**
**Tahun 2019-2020**

| No | Uraian | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Total Pendapatan | 1.342.262.284.840 | 1.265.462.070.409 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| 3 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 100.440.646.573 | 107.286.822.331 |
| | Total Penerimaan | 1.442.702.931.413 | 1.372.748.892.740 |
| | Dikurangi : | | |
| 4 | Belanja Tidak Langsung | 582.739.486.928 | 636.258.512.587 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - |
| | Total Pengeluaran | 582.739.486.928 | 636.258.512.587 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 859.963.444.485 | 736.490.380.153 |

*Sumber : BPKAD Kota Serang, 2021*

**Tabel 3.12**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Serang**
**Tahun 2021-2023**

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Total Pendapatan | 1.453.115.014.287 | 1.423.756.533.974 | 1.446.319.034.074 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 51.138.447.275 | - | - |
| | Total Penerimaan | 1.504.253.461.562 | 1.423.756.533.974 | 1.446.319.034.074 |
| | Dikurangi : | | | |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 659.685.256.710 | 632.327.341.000 | 648.135.524.525 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 7.500.000.000 | 16.250.000.000 | 16.250.000.000 |
| | Total Pengeluaran | 667.185.256.710 | 648.577.341.000 | 664.385.524.525 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 837.068.204.852 | 775.179.192.974 | 781.933.509.549 |

*Sumber : BPKAD Kota Serang, 2021*

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD, karena menjadi dasar utama pada perumusan arah pembangunan jangka menengah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan maka dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kota Serang perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Banten.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Serang.

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalankinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan, maka dapat teridentifikasi rumusan permasalahan pokok pembangunan Kota Serang, yaitu : belum optimalnya kualitas sumber daya manusia; belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah; belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang; belum optimalnya inovasi daerah dan rendahnya daya saing perekonomian daerah; dan belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Selain permasalahan pokok tersebut, terdapat permasalahan lainnya yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi memiliki efek berantai pada sektor lainnya terutama perekonomian.

Adapun rumusan permasalahan pokok pembangunan Kota Serang adalah sebagai berikut:

**1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia Kota Serang salah satunya tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan (tergambar dari Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (tergambar dari Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Sekolah), dan dimensi ekonomi (Pengeluaran Perkapita/Kemampuan Daya Beli). Walaupun setiap tahun nilai IPM Kota Serang terus meningkat dimana Tahun 2016 sebesar 71,09, meningkat menjadi 72,16 pada Tahun 2020, namun capaian tersebut masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten atau bahkan lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Banten pada Tahun 2020 yang sebesar 72,45.

Dari sisi pertumbuhan, laju pertumbuhan IPM Kota Serang setiap tahunnya belum optimal bahkan cenderung lebih rendah dari laju pertumbuhan IPM Nasional dan Provinsi Banten, walaupun pengecualian laju pertumbuhan IPM Kota Serang Tahun 2020 yang sebesar 0,08 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan IPM Nasional yang sebesar 0,03 persen dan laju pertumbuhan IPM

Provinsi Banten yang sebesar 0,01 persen. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Kota Serang pada tahun 2020 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan Provinsi Banten.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia Kota Serang adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, yaitu :
   1) Cakupan pendidikan anak usia dini, dimana Angka Partisipasi PAUD Tahun 2020 sebesar 93,66 persen.
   2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, dimana capaian untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 12,78 Tahun (Tahun 2020), Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,76 persen (Tahun 2020), APM SMP sederajat Tahun 2020 sebesar 99,46 persen.
   3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar, diantaranya gedung SD/MI berkondisi baik sebesar 94,45 persen dan gedung SMP/MTs berkondisi baik sebesar 95,65 persen pada Tahun 2020, serta jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:42 dan untuk RGM sekolah menengah sebesar 1:48 (standar 1:32).

b. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yaitu :
   1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020 sebesar 68,00 tahun, dibawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 69,96 tahun
   2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
   3) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
   4) Masih ditemukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk (stunting) dan kasus penyakit menular, yaitu pada Tahun 2019 masih ditemukan jumlah kasus AKI sebanyak 23 kasus dan Tahun 2020 menurun yaitu sebanyak 17 kasus, AKB pada Tahun 2019 sebanyak 29 kasus (0,22 per 1000 kelahiran hidup) sedangkan tahun 2020 sebanyak 31 Kasus ( 0,25 per 1000 kelahiran hidup), jumlah kasus gizi buruk pada Tahun 2020 sebanyak 106 kasus atau 0,16 persen, kasus stunting ditemukan sebanyak 2.958 kasus dan cakupan Linakes (fasilitas kesehatan) sebesar 82,80 persen pada Tahun 2020.
   5) Masih belum idealnya jumlah tenaga dokter dan paramedik, yaitu rasio medis (dokter dan dokter gigi) per 1000 penduduk sebesar 0,011 dan

rasio paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 0,048 pada Tahun 2020.

6) Terjadinya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat Kota Serang dikarenakan penyebaran COVID-19 yang begitu tinggi dan berpotensi pada kualitas kesehatan masyarakat.

c. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang tergambar dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang yang masih tinggi yaitu sebesar 1,49 persen pada Tahun 2019 dan meningkat sebesar 4,42 persen pada Tahun 2020, sementara LPP Nasional pada Tahun 2020 sebesar 1,25 persen dan LPP Banten sebesar 1,10 persen. Selain itu, dirasakan masih belum optimalnya layanan dan cakupan kepesertaan KB yang tercermin dari cakupan peserta KB aktif sebesar 73,59 persen pada Tahun 2020. Meskipun memberikan dampak positif, pertumbuhan penduduk juga memberikan dampak yang negatif dalam berbagai aspek yang nantinya akan memiliki pengaruh satu sama lain, diantaranya pengaruh terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Belum optimalnya cakupan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tergambar dari masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.

e. Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan yang disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya pembinaan serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

f. Belum opitimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan implementasi seni dan budaya di masyarakat.

**2. Belum Optimalnya Kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Sebagai sebuah kota yang berusia sangat muda, maka kebutuhan akan infrastruktur

wilayah guna memenuhi fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis menjadi permasalahan.

Sebagai daerah otonom yang masih berusia relatif muda, penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas merupakan permasalahan dan tantangan tersendiri, apalagi mengingat eksistensi politik Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten yang mewadahi seluruh ekspektasi publik terhadap paripurnanya fungsi Kota Serang sebagai sebuah kota dan sekaligus ibukota. Belum paripurnanya fasilitasi infrastruktur wilayah di Kota Serang tentu tidak terjadi karena sebab tunggal, melainkan terkait pula dengan perjalanan historisnya sejak sebelum menjadi daerah otonom pada tahun 2007.

Dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas, dengan proporsi PAD yang hanya sebesar kisaran 14-15 persen dari total pendapatan daerah, menggambarkan kapasitas keuangan daerah yang sebagian besar masih sangat bergantung pada dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Permasalahan lainnya adalah belum tuntasnya urusan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, sehingga kebijakan belanja dan pembiayaan sebagian masih harus dialokasikan guna menunjang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah tercermin dari beberapa kondisi, yaitu :

a. Ketersediaan dan kondisi jalan yang kurang memadai bagi terselenggaranya fungsi kota yang optimal. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 65,85 persen atau 137,074 km, jalan dalam kondisi sedang sebesar 26,32 persen atau 54,785 km, jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 7,82 persen atau 16,3 km sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sudah tidak ada. Jembatan dalam kondisi baik sebesar 79 persen, diiringi dengan problem kemacetan dan genangan air di beberapa titik ruas jalan, serta kondisi drainase yang kurang berfungsi dengan baik merupakan penyebab utama kerusakan jalan di samping tonase angkutan barang yang seringkali tidak terkendali.
b. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan yang kurang memadai, tergambar dari minimnya ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), belum optimalnya fungsi keberadaan halte dan rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, dan pengolaan perparkiran dan terminal.
c. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang tergambar dari masih adanya kawasan kumuh sekitar 6,50 persen dari luas

wilayah Kota Serang, rumah tangga bersanitasi sebesar 69,33 persen, rumah tangga berakses air bersih sebesar 56,14 persen pada Tahun 2020.

d. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur penunjang Smart City yang belum optimal dan memadai dalam mendukung pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

**3. Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang**

Makin kompleksnya kebutuhan dan dinamika masyarakat kota dihadapkan pada sejumlah dilema dalam pemanfaatan ruang di Kota Serang, yaitu dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di satu sisi, dan kebutuhan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di sisi lainnya. Masalah ini telah banyak dialami oleh berbagai daerah di Indonesia di masa lalu, sehingga belajar dari pengalaman berbagai daerah tersebut tampaknya menjadi keniscayaan guna mengantisipasi masalah laten yang sama di masa depan. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang di Kota Serang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya penataan ruang, dikarenakan oleh belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan.

b. Pengelolaan persampahan yang belum terpadu dan sistematis, hal ini tercermin dari cakupan penanganan sampah sebesar 55,58 persen pada Tahun 2019 dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 61,6 persen dari total volume sampah, sementara volume timbulan sampah semakin banyak, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sedikit, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan dan keterbatasan umur teknis TPA Cilowong terus menurun.

**4. Belum Optimalnya Inovasi dan rendahnya daya saing perekonomian daerah**

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro, mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu permasalahan yang menghambat percepatan kemajuan Kota Serang adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain

itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing sebagai faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Serang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Secara makro, selama kurun waktu 2016-2019 perekonomian Kota Serang terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Banten. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Serang sebesar 6,20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen dan Provinsi Banten sebesar 5,53 persen.

Namun demikian akibat dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi (Q to Q) dari triwulan pertama hingga triwulan kedua Tahun 2020 baik Kota Serang, Propinsi Banten maupun Nasional terkontraksi sangat dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang Tahun 2020 terkontraksi hingga minus 6,67 persen, Provinsi Banten terkontraksi minus 8,50 persen sedangkan Nasional terkontraksi minus 5,32 persen. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit membaik di triwulan ketiga di Kota Serang (3,83 persen) dan Propinsi Banten (4,55 persen) namun belum terlalu baik di level Nasional (minus 3,49 persen). Oleh karena itu maka masih perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Walaupun sama-sama mengalami kontraksi namun pertumbuhan ekonomi Kota Serang cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Banten. Perekonomian Kota Serang mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan Propinsi Banten maupun Nasional. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Serang sebesar minus 1,29 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,07 persen dan Provinsi Banten sebesar minus 3,38 persen.

Kemiskinan dan pengangguran tampaknya masih akan menjadi pekerjaan rumah yang harus dientaskan mengingat penetrasi perekonomian nasional dan regional yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat telah menyebabkan tekanan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Meski cenderung turun setiap tahunnya, yaitu angka kemiskinan dari 5,58 persen pada Tahun 2016 menjadi 5,28 persen pada Tahun 2019, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dari 8,87 persen pada Tahun 2016 menjadi 8,08 persen

pada Tahun 2019. Namun di Tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 6,06 persen dan pengangguran sebesar 9,26 persen. Masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tema yang harus mendapatkan prioritas untuk dientaskan. Oleh karena itu, penanganan dan antisipasi terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan secara sistemik dan terpadu, dengan mengedepankan pendekatan lintas sektoral yang lebih komprehensif.

Salah satu permasalahan yang menghambat percepatan kemajuan perekonomian di Kota Serang adalah masih rendahnya daya saing perekonomian daerah sehingga kurang memiliki daya tarik investasi pada skala besar, terutama investasi asing. Investasi di Kota Serang 99,89 persen didominasi oleh PMDN dengan sektor utama pada pengembangan perumahan dan/real estate, serta dengan kapasitas rata-rata kurang lebih Rp.4,111 trilyun per tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Problem rendahnya daya saing juga dihadapi pada produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi produk unggulan daerah, sehingga kapasitas produksi maupun omzetnya kurang berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat. Demikian pula dengan struktur perekonomian daerah yang hingga tahun 2019 ditopang oleh sektor perdagangan eceran dan perbengkelan, yang menggambarkan kapasitas ekonomi daerah yang masih berorientasi ke dalam.

Belum optimalnya inovasi daerah dan rendahnya daya saing perekonomian daerah di Kota Serang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masih adanya ketimpangan dan kemiskinan, dikarenakan belum optimalnya cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan, serta penanganan dan pemberdayaan sosial.
b. Tingginya tingkat pengangguran, dikarenakan rendahnya ketersediaan lapangan kerja, rendahnya minat kewirausahaan masyarakat, rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, dan belum optimalnya pembinaan hubungan industrial.
c. Rendahnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dan UMKM, disebabkan oleh rendahnya koperasi sehat, terbatasnya akses permodalandan pemasaran, rendahnya daya saing produk IKM.
d. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan serta pengendalian stabilitas harga dan pasokan barang, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar, serta belum optimalnya pembinaan pedagang dan PKL.

e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah, disebabkan oleh ketergantungan ketersediaan pangan utama dari daerah sekitar yaitu sebesar 77,24 persen.
f. Belum optimalnya pendapatan dan daya saing petani dan nelayan, disebabkan oleh belum optimalnya jumlah dan daya saing produksi pertanian, belum optimalnya pembinaan terhadap petani dan nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.
g. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan obyek dan destinasi wisata, infrastruktur penunjang wisata, dan promosi obyek dan destinasi wisata.
h. Belum optimalnya BUMD untuk peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD.
i. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan daerah disebabkan minimnya jumlah peneliti, belum optimalnya tata laksana kelitbangan daerah, belum optimalnya alokasi anggaran untuk kelitbangan, dan belum optimalnya kerjasama penelitian untuk pembangunan.

**5. Belum optimalnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan**

Dalam upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lingkungan pemerintahan perlu memperhatikan faktor atau aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa merupakan isu pembangunan daerah yang masih akan menjadi tantangan di masa yang akan datang, tidak hanya dalam konteks lokal namun juga secara nasional. Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Serang. Mencermati kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Kota Serang yang belum optimal, faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN, serta masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang pada Tahun 2020 untuk keempat kalinya berstatus “Wajar Tanpa Pengecualian”. Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti

akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, namun demikian pengelolaan tata pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah :

a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan oleh belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, layanan e-goverment, pengelolaan arsip perangkat daerah
b. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, implementasi SPIP dan kapabilitas APIP, sistem manajemen SDM aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
c. Belum optimalnya pelayanan publik, disebabkan oleh belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SPM, sarana prasarana pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur
d. Masih adanya gangguan keindahan, ketentraman dan ketertiban (K3) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menjaga keindahan, ketertiban dan ketentraman.

## 4.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu strategis dari beberapa penelaahan, diantaranya isu internasional, nasional, dan regional, serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang kemungkinan akan dihadapi sampai dengan Tahun 2023.

### 4.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing.

Isu strategis yang pertama adalah terjadinya pandemi COVID-19. Sejak awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, tercatat sebanyak 222 negara terpapar, 75.704.857 orang terkonfirmasi positif COVID-19, Jumlah yang sembuh adalah 54.593.276 orang dan meninggal sebanyak 1.690.061orang (sumber: www.COVID19.go.id dan worldmeters.info). Sehingga isu sentralnya adalah pengendalian dampak pandemi, terutama agenda pemulihan ekonomi dunia. Sejauh ini baru negara Republik Rakyat Tiongkok yang telah berhasil melakukan pemulihan ekonomi, dengan capaian pertumbuhan hingga 18,3 persen pada kuartal pertama tahun 2021 (bisnis.com [16/04/2021]). Sementara negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika pada umumnya masih bergelut dengan ancaman pandemi yang belum dapat tertanggulangi. Varian baru yang ditemukan pertama kali di Inggris, dan varian Afrika setelahnya, temuan mutasi virus lainnya secara sporadis di berbagai negara, serta serangan pandemi gelombang ketiga di di sejumlah negara dan yang terdahsyat terjadi India, memunculkan kekhawatiran baru bahwa pandemi dan pengendalian dampaknya masih akan menyita perhatian dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Isu strategis internasional yang lain mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Sebagai kota yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Serang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/MDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

**1. Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global. Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September Tahun 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan

penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Selanjutnya SDGs diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dengan pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia yangjauh lebih baik pada tahun 2030. Tujuh belas tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7) Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10) Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11) Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14) Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;

15) Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

**2. Ancaman Krisis Ekonomi Global**

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kota Serang yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

**3. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)**

Era globalisasi pembangunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan. Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor pelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

**4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Perubahan besar dalam kehidupan umat manusia yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, yang trend perkembangannya berfokus pada pengembangan biotechnology, nano-technology, renewable energy, automation, internet of thing, big data, dan artificial intelligent; sehingga menndorong terjadinya industrial revolution 4.0 dan fenomena super smart society 5.0. Dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, pemanfaatannya yang sangat massif di hampir seluruh sektor, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul termasuk didalamnya adalah implementasi e-government.

### 4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dapat terlihat pada penelaahan isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024. Isu strategis nasional pada konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Pemerintah Kota Serang perlu antisipatif dan mempersiapkan sejumlah peluang yang terdapat dalam RPJMN tersebut guna dapat dioptimalkan keuntungannya bagi masyarakat Kota Serang. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat kegiatan strategis jangka menengah nasional yang berlokasi di Kota Serang dan atau terkait dengan eksistensi Kota Serang (tabel 4.1). Agenda nasional ini tentu akan dikontekstualisasi dengan kebutuhan daerah sehingga memiliki nilai guna bagi masyarakat Kota Serang.

**Tabel 4.1**

**Program RPJMN 2020-2024 di Kota Serang**

| No | Proyek Prioritas Nasional | Indikator | Program K/L | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan) | Jumlah pusat pengembangan keahlian | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Kemennaker |
| 2. | Jalan Tol Non Trans Jawa | Panjang jalan tol Serang-Panimbang yang dibangun | | KPBU |
| 3. | SPALD-T Skala Permukiman | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR) |
| 4. | SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Kementerian PUPR |
| 5. | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) | Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Kementerian PUPR, KPBU, APBD |
| 6. | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) | Jumlah TPST yang terbangun (unit) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Kementerian PUPR |
| 7. | Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) | Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | DAK, Kementerian PUPR, APBD |

Adapun beberapa isu strategis nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Disamping isu strategis nasiomal tersebut di atas, upaya pemulihan ekonomi menjadi agenda utama seluruh negara termasuk Indonesia, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, serta beragam masalah sosial lainnya, seperti: meningkatnya angka kelahiran, maraknya beragam jenis pekerjaan terburuk, meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya pernikahan usia dini dan meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kriminalitas, dan lain-lain. Ancaman seperti ini menjadi semakin nyata dan menakutkan di negara-negara berkembang, dan apalagi di negara-negara terbelakang. Karenanya agenda pemulihan ekonomi terus diinisiasi guna menstimuli pertumbuhan ekonomi dunia yang sepanjang tahun 2020 mengalami penetrasi sangat dalam hingga menyentuh minus 4,2 persen (cnbcindonesia.com [02/12/2020]). LPE Indonesia pada tahun 2020 tercatat terkontraksi hingga minus 2,07 persen, demikian pula dengan LPE Provinsi Banten yang mencapai minus 3,83 persen, serta LPE Kota Serang yang turun hingga minus 1,29 persen (BPS, 2021).

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Ekonomi Nasional (PEN), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional bagi Pemerintah Daerah, merupakan beberapa kebijakan nasional yang diinisiasi guna menstimuli pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian pula dengan sejumlah kebijakan lain yang berbentuk jaminan sosial dan sejenisnya guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kelompok rentan secara ekonomi.

### 4.2.3 Isu Strategis Provinsi Banten

Berdasarkan hasil analisa berbagai isu strategis lingkup global, nasional maupun regional sebagimana diuraikan sebelumnya, perumusan isu strategis di Provinsi Banten di kelompokkan dalam lima aspek yakni:

1. Isu strategis kesenjangan wilayah
2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)
3. Isu strategis Kemiskinan dan Pengangguran
4. Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan
5. Isu Strategis Kebencanaan

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Visi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”. Untuk mewujudkan Visi Provinsi

Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima Misi pembangunan daerah dan prioritas unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) :
   a. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Bugdeting;
   b. Reformasi Birokrasi;
   c. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dengan predikat BB);
   d. Reformasi Tata Kelola Keuangan (predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah);
   e. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
   f. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
   g. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui keselaran pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kab/Kota.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur :
   a. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
   b. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
   c. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
   d. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
   e. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
   f. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
   g. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
   h. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
   i. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
   j. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
   k. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mepertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
   l. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
   m. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas:
   a. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;
   b. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;
   c. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
   d. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
   e. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
   f. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas:
   a. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
   b. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
   c. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi :
   a. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
   b. Pengendalian Inflasi Daerah;
   c. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
   d. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
   e. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi.

Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut berdasarkan penelaahan isu strategis pembangunan Provinsi Banten, yaitu :

1. Kesenjangan wilayah (ketimpangan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, infrastruktur)

2. Daya saing daerah (sumber daya alam dan sumber daya manusia)
3. Kemiskinan dan pengangguran
4. Tata kelola pemerintahan
5. Kebencanaan

Adapun yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Serang pada Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Pelayanan publik yang berkualitas;
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
7. Penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta pengendalian bencana alam;
9. Revitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta UKM dan Koperasi guna mengentaskan kemiskinan;
10. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
11. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan masalah sosial lainnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta iklim sosial dan politik yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan daerah;
12. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 disebutkan pula arah kebijakan tematik berupa pembangunan Kota Metropolitan Serang melalui :

1. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Infrastruktur keterkaitan antar kota metropolitan Serang dalam sistem perkotaan
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
5. Pengembangan kota cerdas dan hijau secara berkelanjutan
6. Peningkatan kapasitas pengelolaan kota.

### 4.2.4 Isu Strategis RPJPD Kota Serang

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Serang sebagaimana tercantum pada penelaahan isu strategis RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025, yaitu :

1. Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

   Salah satu potensi pembangunan dan sekaligus menjadi faktor strategis adalah adanya pemerintahan (dalam arti luas) yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah Kota Serang, kedepan dituntut untuk dapat membangun dan menciptakan kondisi ideal ini melalui institusi pemerintahan yang didukung dengan aparatur yang profesional dan bebas KKN, sistem/standar prosedur penyelesaian tugas yang tertata dengan baik, dan dilengkapi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama hendaknya senantiasa mewarnai segala aktivitasnya, sehingga dapat menciptakan suasana kehidupan yang kondusif yang merupakan modal dasar bagi terciptanya ketertiban dan keamanan, serta menjamin berlangsungnya kegiatan pembangunan kota secara optimal.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

   Kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat tercermin dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonominya. Dalam kaitan tersebut pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Kota Serang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan pembangunan ekonomi. Hal Ini seiring dengan salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Manusia indonesia yang berkualitas memiliki 3 (tiga) ciri pokok, yaitu: (1) sehat dan berumur panjang, (2) cerdas, kreatif, terampil, terdidik, dan bertaqwa pada Tuhan YME, serta (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

3. Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

   Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten dan letaknya berada pada jalur strategis pergerakan ekonomi antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta ketersediaan pelayanan transportasi baik darat, laut dan juga udara, menjadikan kota Serang memiliki posisi nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kota Serang. Hal ini menjadikan keunggulan komparatif bagi kegiatan pemasaran yang menunjang kegiatan perdagangan dan jasa. Keunggulan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal tanpa dibarengi dengan usaha-usaha peningkatan keunggulan kompetitif.

Keberadaan keunggulan ini akan menjadi pondasi utama untuk membangun ekonomi yang berdaya saing tinggi. Jika kedua keunggulan ini dapat dibangun, maka berbagai peluang ekonomi yang ada dapat dikelola dan berproduksi secara maksimal.

4. Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

   Pengembangan wilayah merupakan dimensi pembangunan yang berorientasi pada upaya untuk menciptakan integrasi atau keterkaitan ruang dan fungsi yang kuat antar kawasan sehingga mampu memberdayakan secara optimal potensi yang dimilikinya sekaligus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kawasan. Dalam kaitan tersebut diperlukan adanya suatu sistem penataan ruang yang konsisten mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian pemanfaatannya. Disamping itu, dukungan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana dasar wilayah yang memadai guna pengembangan kawasan dan wilayah mutlak diperlukan.

   Sementara itu, seiring dengan kaidah pembangunan berkelanjutan maka pengelolaan sumberdaya alam harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan yang ramah lingkungan (*sustainable development*) menjadi keharusan bagi setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam.

### 4.2.5 Isu Strategis Penelaahan RTRW

Isu strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri dari penelaahan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Banten dan RTRW Kota Serang.

**1. Penelaahan RTRW Nasional**

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRW Nasional meliputi tujuan nasional pemanfaatan ruang, pola dan struktur ruang wilayah nasional, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, serta kawasan strategis nasional.

Fungsi Wilayah Kota Serang diarahkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan dan mendukung potensi investasi sebagai PKN. Kriteria yang ditentukan dalam RTRW Nasional untuk PKN adalah:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

Arahan Kebijakan Nasional terkait Pengembangan Kota Serang, diantaranya adalah Rencana pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang yang sebagian trase jalannya akan melewati Kota Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

**2. Penelaahan RTRW Provinsi Banten**

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada *trickle down effect* pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
b. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.
c. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalance growth*) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar

wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.

d. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
e. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.
f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.
g. Adanya Kebijakan Nasional di Wilayah Provinsi Banten dalam rangka percepatan pembangunan.
h. Dinamika Pembangunan yang berpengaruh sangat signifikan bagi pemanfaatan ruang yang ada di wilayah provinsi Banten.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Banten untuk Kota Serang (sebagaimana tercantum pada Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022), sebagai berikut :

a. Pengembangan Wilayah Serang Utara Terpadu
b. Dibangunnya bendungan Sindangheula untuk mengairi kawasan industri.
c. Mempertahankan keberadaan situs Banten Lama
d. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### 3. Penelaahan RTRW Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040, Rencana struktur ruang wilayah Kota Serang meliputi pusat kegiatan di wilayah dan sistem jaringan prasarana. Pusat kegiatan di wilayah meliputi:

a. Pusat Pelayanan meliputi kawasan pusat Kota, yaitu Kecamatan Serang dengan lingkup wilayah pelayanan kecamatan serang dan kecamatan cipocok jaya dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan fungsi sekunder perumahan serta pariwisata buatan.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
   1) Sub Pusat di Kelurahan Kasemen, yang melayani Kecamatan Kasemen, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perdagangan dan jasa, industri, serta fungsi sekunder perumahan;
   2) Sub Pusat di Kelurahan Taktakan, yang melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air, agribisnis dan fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa dan militer;
   3) Sub Pusat di Kelurahan Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan, perdagangan dan jasa, industri; dan
   4) Sub Pusat di Kelurahan Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan fungsi sekunder pariwisata buatan.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
   1) Wilayah Kecamatan Kasemen berada di Kelurahan Kasunyatan;
   2) Kecamatan Curug berada di Kelurahan Kemanisan;
   3) Kecamatan Walantaka berada di Kelurahan Nyapah;
   4) Kecamatan Taktakan berada di Kelurahan Cilowong;
   5) Kecamatan Cipocok Jaya berada di Kelurahan Gelam; dan
   6) Kecamatan Serang berada di Kelurahan Kaligandu.

Sedangkan, sistem jaringan prasarana, meliputi Sistem jaringan transportasi, Sistem jaringan energi, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air, dan Sistem infrastruktur perkotaan.

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut.

a. sistem jaringan transportasi darat yang akan dikembangkan di Kota yaitu jaringan jalan yang meliputi;
   1) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota, meliputi
      a. Pengembangan jalan arteri primer, meliputi;
         1) Jalan Raya Serang (Cilegon);
         2) Jalan Raya Cilegon (Serang);
         3) Jalan Letnan Jidun (Serang);
         4) Jalan TB. Suwandi (Serang);
         5) Jalan Abdul Hadi (Serang);
         6) Jalan KH. Abdul Fatah Hasan (Serang);

7) Jalan Sudirman (Serang); dan
8) Jalan Raya Serang (Tangerang).

b. Pengembangan Jalan Tol
1) Jalan tol Merak-Serang-Tangerang-Jakarta; dan
2) Jalan tol Serang - Panimbang yang melewati Kelurahan Pabuaran dan Kelurahan Pangampelan di Kecamatan Walantaka.

c. Pengembangan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) Jalan Raya Serang (Pandeglang)

2) Pengembangan jaringan jalan provinsi, meliputi jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2);
a. Jalan Pakupatan-Palima;
b. Jalan Ciruas –Petir;
c. Jalan Lopang –Banten Lama;
d. Jalan akses pelabuhan karangantu;
e. Jalan Trip Jamaksari;
f. Jalan Ayip Usman;
g. Jalan A.Yani;
h. Jalan Veteran;
i. Jalan KH. Sam'un;
j. Jalan Mayor Safe'i;
k. Jalan Raya Cilegon;
l. Jalan Tb. A Khatib;
m. Jalan Yusuf Martadilaga;
n. Jalan Sempu- Dukuh Kawung;
o. Jalan Simpang Taktakan-Gunung Sari;
p. Jalan Baru Exit Tol Boru – Cikeusal;
q. Jalan Baru Banten Lama – Tonjong;
r. Jalan Terate- Banten Lama; dan
s. Jalan Banten Lama Pontang.

3) Pengembangan jaringan jalan kota yang menjadi kewenangan kota, yaitu jalan sekunder di dalam kota, meliputi:
a. Pengembangan jalan Arteri Sekunder, meliputi:
1) Jalan Diponegoro; dan
2) Jalan Mayor Safe'i .

b. Pengembangan jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
1) Jalan Bhayangkara;
2) Jalan Miabon – Cidadap;

3) Jalan KH. Sochari;
4) Jalan A. Latif;
5) Jalan Sama'un Bakri;
6) Jalan Ciwaru Raya;
7) Jalan Pasar Rawu - Trip Jamaksari ;
8) Jalan Ki. Mas Jong;
9) Jalan Hasanudin;
10) Jalan Heo Tarnaya;
11) Jalan Kaligandu – Terondol;
12) Jalan Terondol – Priyayi;
13) Jalan Pakupatan – Kaligandu;
14) Ruas Jalan Kalodran – Jengkol;
15) Ruas Jalan Bendung – Mesjid Priyayi;
16) Ruas Jalan Mesjid Priyayi – Kasemen;
17) Ruas Jalan Keganteran – Taman;
18) Ruas Jalan Taman – Umbul Tengah;
19) Ruas Jalan Umbul Tengah – Soyog;
20) Ruas Jalan Soyog – Cilowong;
21) Ruas Jalan Cilowong – Sayar;
22) Ruas Jalan Sayar – Pabuaran;
23) Ruas Jalan Palima – Andemoi – Curug;
24) Ruas Jalan Curug – Cisangku;
25) Ruas Jalan Ciwiru – Lipatik; dan
26) Ruas Jalan Lipatik – Kalodran.

c. Pengembangan jalan Lokal Sekunder, meliputi:
1) Jalan Pakupatan-Bendung;
2) Jalan Kemang Cipocok;
3) Jalan Karundang-Dalung;
4) Jalan Cigintung Dalung;
5) Jalan Tembong-Kepuh;
6) Jalan Pakel-Babakan;
7) Jalan Ciracas-Cibarang;

8) Jalan Kubil;
9) Jalan Ciloang-Kelebut;
10) Jalan Cipocok-Karundang;
11) Jalan Sumurputat-Pulojajar;
12) Jalan Ciracas-Dalung;
13) Jalan Sayabulu-Dalung;
14) Jalan Susukan-Turus;
15) Jalan Nancang-Pamupukan;
16) Jalan Cilaku-Jeranak;
17) Jalan Celincing-Pule;
18) Jalan Cigintung-Sayar;
19) Jalan Cilowong-Sayar;
20) Jalan Taktakan-Cokopsulanjana;
21) Jalan Rancatales-Taktakan;
22) Jalan Taman-Taktakan;
23) Jalan Cadika-Sayar;
24) Jalan Ciracas-Cigintung;
25) Jalan Cadika-Kamlaka;
26) Jalan Cilowong-Gedeg;
27) Jalan Kuranji-Sepang;
28) Jalan Kamalaka-Panggungjati;
29) Jalan Gedeg-Panggungjati;
30) Jalan Jakung-Gedeg;
31) Jalan Taman Keganteran;
32) Jalan Trumbu-Sawahluhur;
33) Jalan Priyayi-Trumbu;
34) Jalan Kasemen-Priyayi;
35) Jalan Priyayi-Bendung;
36) Jalan Cobomo-Trumbu;
37) Jalan Kasemen-Warungjaud;
38) Jalan Kasemen-Margasana;
39) Jalan Kroya-Pamengkang;

40) Jalan Kasemen-Tasikardi;
41) Jalan Cibening-Cibomo;
42) Jalan Kemanisan-Tinggar;
43) Jalan Cipete-Nyapah;
44) Jalan Curug-Cisangku;
45) Jalan Curug-Sukawana;
46) Jalan Kalodran-Jengkol;
47) Jalan Ciwandan-Cibomo;
48) Jalan Ampel-Nambo;
49) Jalan Nyapah-Gandul;
50) Jalan Nyapah-Silebu;
51) Jalan Tegalkembang-Bendung;
52) Jalan Pipitan-Sait Bendung;
53) Jalan Cidadap-Walantaka;
54) Jalan Silebu Ampel;
55) Jalan Warudoyong-Silebu;
56) Jalan Maulana Yusuf;
57) Jalan Tirtayasa; dan
58) Jalan Sudirman – Bogeg.

d. Rencana pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi :
   1) Pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu Karangantu – Pulau Tunda, Karangantu – Pulau Panjang;
   2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu di Kecamatan Kasemen;
   3) Pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan penyeberangan kelas III di Kecamatan Kasemen; dan
   4) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
e. Rencana pengembangan jaringan transportasi darat lainnya di Kota, meliputi:
   1) Pengembangan interchange jalan tol di Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya;

2) Pengembangan Jalan Kolektor sekunder berupa jalan lingkar Kota meliputi Kalodran – Jengkol, Bendung – Mesjid Priyayi, Mesjid Priyayi – Kasemen, Keganteran – Taman, Taman – Umbul Tengah, Umbul Tengah – Soyog, Soyog – Cilowong, Cilowong – Sayar, Sayar – Pabuaran, Palima – Andemoi – Curug, Curug – Cisangku, Ciwiru – Lipatik, Lipatik – Kalodran;
3) Pembangunan jalan baru untuk mendukung konektivitas keruangan dan perkembangan wilayah Provinsi Banten melalui pembangunan:
   a) Jalan Baru Exit Tol Boru-Cikeusal;
   b) Jalan Baru Palima Baros;
   c) Jalan Baru Lingkar Luar Selatan Serang;
   d) Jalan Baru Lingkar Dalam Selatan Serang;
   e) Jalan Baru Lingkar Luar Utara Serang; dan
   f) Jalan Baru Banten Lama – Tonjong.
4) Pengembangan Jalan Gerbang Tol Serang Timur – KP3B;
5) Pengembangan simpang sebidang dan tidak sebidang dalam kota;
6) Rencana pembangunan dan/atau pengembangan jalan prospektif kota;dan
7) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi darat lainnya di Kota untuk mendukung konektivitas lokal maupun regional sebagai berikut :
   a) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Cipocok Jaya;
   b) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Curug;
   c) Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan, Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka;
   d) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota Lintas Serang – sepanjang jalan tol – Balaraja;
   e) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Penumpang Serang di Kecamatan Serang;
   f) Pengembangan angkutan lintas kota Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung– Serpong – Tanah Abang; dan

g) Peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung.

b. Sistem jaringan transportasi darat yang akan dikembangkan di Kota yaitu jaringan jalan yang meliputi;
   1) rencana pengembangan Pelabuhan Karangantu di Kecamatan Kasemen sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul; dan
   2) rencana pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir.
c. Arahan pengembangan jaringan jalan terdiri atas prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, serta prasarana terminal penumpang jalan.
d. Arahan pengembangan jaringan jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas selatan, jalan lintas/tembus kabupaten, dan jalan lingkar kota dan perkotaan.
e. Arahan pengembangan sistem angkutan umum massal meliputi:
   1) Pengembangan transportasi massal berupa kereta api lintas Ciseparang (Cilegon-Serang-Pandeglang-Rangkasbitung);
   2) Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
   3) Rencana pengembangan sistem angkutan massal berbasis Bus Rapid Transit; dan
   4) Rencana pengembangan kawasan berorientasi transit di Kota.

Sistem jaringan energi meliputi pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

a. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi rencana pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan lainnya.
b. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
   1) perencanaan pengembangan Gardu Induk di Kecamatan Serang;
   2) rehabilitasi Jaringan Transmisi listrik Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Serang;
   3) pengembangan jaringan SUTET yang melewati Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Serang;

4) pengembangan jaringan SUTT yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan CipocokJaya, Kecamatan Serang;
5) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah yang melewati Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, dan Kecamatan Kasemen;
6) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang;
7) pengembangan jaringan SUTTAS dan Saluran Udara dan atau Kabel Arus Searah yang melewati Kecamatan Taktakan;
8) pengembangan sistem distribusi 20KV pada daerah yang belum mendapatkan aliran listrik; dan
9) penetapan daerah yang belum mendapatkan aliran listrik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

c. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
1) pengembangan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani PKN Serang;
2) pengembangan sarana dan prasarana migas di jalur Cilegon-Serang-Tangerang; dan
3) pengembangan Energi Alternatif bagi masyarakat Kota melalui pendistribusian gas melalui perpipaan.

d. Arahan pengelolaan sumberdaya energi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi rencana jaringan tetap dan bergerak seluler.

a. Jaringan tetap berupa jaringan tetap yang menggunakan sistem kabel diarahkan mengikuti jaringan jalan di seluruh wilayah
b. Jaringan bergerak seluler berupa menara base transceiver station, diarahkan untuk melayani seluruh Kecamatan.
c. Pengembangan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi meliputi:
1) pengembangan sistem kabel, seluler, dan satelit;
2) rencana pembangunan dan/atau pengembangan pusat kendali kota/command center;
3) rencana penempatan kamera pengintai/cctv di seluruh kecamatan dalam pemantauan kegiatan umum masyarakat;
4) rencana pembangunan sistem jaringan tetap berupa seratoptik dengan kabupaten/kota yang berbatasan;

5) rencana pengembangan transmisi penyiaran; dan
6) penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler untuk keterpaduan penggunaan tower bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi harus dialokasikan pada suatu titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan irigasi.

a. Sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder mencakup seluruh kecamatan
b. Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota di Kota meliputi:
   1) rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan embung, kolam retensi, dan penataan drainase di Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Kasemen;
   2) rencana pembangunan sistem jaringan sumber daya air dari bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang; dan
   3) penetapan zona peruntukan DAS berdasarkan tipologi sungai.
c. Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air kota meliputi :
   1) pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku dari Danau Ciwaka, Sungai Cibanten dan sungai-sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) pengembangan rencana pemeliharaan Cekungan Air Tanah Serang-Tangerang; dan
   3) penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung.
d. Pengelolaan sistem jaringan irigasi meliputi:
   1) Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cibanten;
   2) Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Ciwaka Bawah;
   3) Penangangan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cikarang Udik.

Sistem infrastruktur perkotaan meliputi:

a. Sistem penyediaan air minum

1) Sistem penyediaan air minum merupakan sistem pelayanan meliputi pengembangan sumber daya air permukaan dan sumber air tanah yang dikembangkan dengan penyediaan air minum melalui sistem perpipaan di seluruh Kecamatan.
2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a) Pemanfaatan dan pengelolaan air kapasitas air minum dari pihak lain;
   b) pemanfaatan dan pengelolaan air dari danau ciwaka atau waduk pangampelan;
   c) pemanfaatan sumber air baku dari air permukaan di sungai Cibanten;
   d) pengembangan sumber air tanah untuk air minum dengan melakukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, serta pencegahan pencemaran pada cekungan air tanah;
   e) pengembangan dan peningkatan reservoir air di seluruh kecamatan;
   f) pengembangan dan peningkatan bangunan pengolah air minum di seluruh kecamatan;
   g) pengembangan terminal air untuk kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan;dan
   h) pengembangan pemanfaatan pengolahan air hujan.

b. Sistem pengelolaan air limbah sistem pembuangan air limbah rumah tangga di seluruh Kecamatan, meliputi:
   1) pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan;
   2) penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan tangki septik/septic tank individu pada setiap rumah;
   3) pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
   4) pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun nondomestik;
   5) peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah; dan
   6) pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan perdagangan dan jasa.

c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi:

1) penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kecamatan Taktakan;
2) pembangunan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis dilaksanakan dengan teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan peraturan perundangan;
3) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun setiap kawasan atau kegiatan industri harus memiliki lembaga internal yang bertanggung jawab atas pengelolaannya dan bertanggung jawab terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota; dan

d. Sistem jaringan persampahan kota;
   1) Sistem jaringan persampahan Kota meliputi:
      a) pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan TPS di seluruh Kecamatan; dan
      b) pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan TPA Cilowong di Kecamatan Taktakan.
   2) Prasarana persampahan yang digunakan lintas wilayah administratif berupa TPA terpadu dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah di Bojong Menteng, Kabupaten Serang.
   3) Arahan pengembangan prasarana persampahan dilakukan melalui kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah.
   4) Upaya lainnya dalam pengelolaan persampahan di Kota dilakukan sebagai berikut :
      a) Memanfaatkan teknik - teknik yang lebih berwawasan lingkungan
      b) berdasarkan konsep daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan anorganik dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun yang akan dikembangkan;
      c) mengembangkan fasilitas pengolahan sampah pada TPS untuk mengurangi tumpukan;
      d) mengembangkan pola pelayanan angkutan sampah;
      e) merehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, pada TPS, Container, truk dan TPA;
      f) meningkatkan teknologi pengolahan sampah pada TPA Cilowong dari open dumping menjadi sanitary landfill, sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah; dan
      g) mengembangkan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuce, Recycle.

a. Sistem jaringan evakuasi bencana;
   1) Sistem jaringan evakuasi bencana meliputi Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
   2) Jalur evakuasi bencana berupa penyediaan rambu arahan jalur evakuasi dan pengembangan prasarana jalan yang menjadi jalur evakuasi.
   3) Penyediaan rambu arahan jalur evakuasi bencana meliputi:
      a) Sepanjang Jalan Banten Lama - Pontang;
      b) Jalan lingkungan di kawasan utara kota;
      c) Jalan simpang taktakan gunung sari; dan
      d) Jalan lingkungan di kecamatan taktakan.
   4) Penyediaan ruang evakuasi bencana berupa ruang terbuka dan fasilitas sosial lainnya di seluruh Kecamatan.

b. sistem drainase.
   1) Sistem jaringan drainase meliputi pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase Kota.
   2) Sistem jaringan drainase sebagaimana terdiri atas:
      a) pembangunan dan pemeliharaan jaringan primer di sepanjang jalan arteri;
      b) pembangunan dan pemeliharaan jaringan sekunder di sepanjang jalan kolektor;dan
      c) pembangunan dan pemeliharaan jaringan tersier di sepanjang jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.

c. sistem jaringan pejalan kaki.
   1) Sistem jaringan pejalan terdiri atas penataan dan pemeliharaan jalur pejalan kaki di sepanjang jalur jalan arteri primer dan jalur kolektor di Kota.
   2) Penataan dan pemeliharaan jalur pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan berikut:
      a) melengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang meliputi kursi, lampu, tempat sampah, dan papan informasi sesuai kebutuhan;
      b) memperhatikan aspek keterhubungan, yaitu jalur yang menerus atau tidak terputus;
      c) memperhatikan penanaman vegetasi pelindung dan peneduh;
      d) merencanakan penyediaan spot keran siap minum pada jalur pejalan kaki;
      e) memperhatikan kenyamanan bagi pengguna terhadap kondisi cuaca/shelter ;

f) memperhatikan aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan fisik; dan
g) memperhatikan aspek estetika agar pengguna dapat dapat menikmati jalur pejalan kaki.

Sementara isu strategis pemanfaatan pola ruang di Kota Serang, diantaranya adalah :

a. Adanya kawasan Serang Utara terpadu
b. rencana pengembangan Pelabuhan Karangantu di Kecamatan Kasemen sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul
c. Adanya penambahan lahan kawasan Cagar Alam Pulau Dua menjadi 34 Ha berdasarkan SK 2217/Menlhk-PTKL/KUH/PLA.2/4/2017
d. Kawasan Cagar Budaya Banten Lama ke dalam kawasan strategis provinsi
e. Perubahan Kawasan Peruntukkan Industri Kota Serang
f. Kebijakan Strategis Provinsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
g. Pembangunan Terminal Tipe B
h. Pengembangan dan Pembangunan Terminal Tipe C
i. Kawasan Strategis Kota Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
j. Program Strategis Nasional Tol Serang Panimbang

### 4.2.6 Isu Strategis Penelaahan KLHS

Kota Serang mengalami perubahan fungsi, dari sebelumnya sebagai pusat kabupaten menjadi ibukota provinsi. Perubahan tersebut menyebabkan dampak terhadap laju perkembangan wilayah Kota Serang di masa depan. Kondisi daya dukung dan daya tampung eksisting Kota Serang bersebagai berikut:

1. Daya dukung lahan

   Kota Serang masih dapat memenuhi kebutuhan luas ideal permukiman untuk penduduk. Lahan di semua kecamatan juga masih mampu mendukung ketersediaan lahan untuk permukiman

2. Daya dukung pangan

   Nilai daya dukung pangan Kota Serang sebesar 7,147 sehingga masih mampu memenuhi kebutuhannya. Kecamatan Kasemen dan Walantaka merupakan kecamatan yang mempunyai daya dukung pangan baik yaitu nilai daya dukung pangan lebih dari 1 sedangkan kecamatan lainnya sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan.

Banyak factor diluar kendali Pemerintah Kota Serang yang dapat mempengaruhi produksi, seperti : perubahan iklim, cuaca dan harga pasar lahan.

Diperlukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditi beras dan kebijakan insentif pemanfaatan ruang pertanian tanaman pangan agar tidak beralih fungsi.

3. Daya dukung udara

   Luas eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 8.085 hektar lebih besar daripada luas RTH Ideal yaitu 543 hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya dukung udara di Kota Serang masih surplus.

4. Daya dukung air

   Kota Serang dilewati oleh 3 sungai dan termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten. Penelitian Baherem (2014) menunjukkan bahwa Sungai Cibanten dalam keadaan tercemar berat. Kapasitas asimilasi (memulihkan diri secara alami) sungai tersebut sudah berkurang akibat pencemaran.

   Pengelolaan sungai-sungai tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian pada masa yang akan datang akibat meningkatnya beban cemar yang masuk baik dari kegiatan industri maupun rumah tangga.

5. Pengelolaan persampahan

   Timbulan sampah pada tahun 2017 sebesar 3.333 $m^3$/hari dan diproyeksikan pada tahun 2030 sebesar 3.948,44 $m^3$/hari. Kondisi ini tentu potensial memburuk jika status Kota Serang menjadi kota metropolitan ibu kota propinsi membawa dampak meningkatnya aktivitas pembangunan dan aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif. Perlu penambahan data kondisi eksisting Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Cilowong dan timbulan sampah untuk menidentifikasi daya tampung.

### 4.2.7 Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Geostrategis dan demografi Kota Serang

   Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam

peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar. Kota Serang memiliki daya tarik alamiah yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah di masa mendatang. Sebagai pusat aglomerasi bagi daerah sekitarnya, Kota Serang saat ini berkembang sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa bagi produk-produk dan komoditas yang dihasilkan kawasan *hinterland*.

2. Kota Metropolitan Serang

   Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan. Disamping itu didukung oleh beberapa proyek strategis Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang, diantaranya Sport Centre, Kampus Terpadu Untirta, dan pengembangan Danau Ciwaka

3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat

   Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan baik perekonomian maupun pendidikan dan kesehatan.

4. Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

   Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Namun demikian hal tersebut akan memiliki tantangan yang besar akibat atau dampak pandemi COVID-19 dalam upaya pemulihan perekonomian.

   Agenda pemulihan ekonomi daerah merupakan agenda utama nasional yang harus didukung oleh daerah melalui implementasi Program Ekonomi Nasional yang relevan dengan Kota Serang. Pemulihan ekonomi dimaksud dilakukan dalam rangka mengembalikan kapasitas perekonomian daerah

yang memungkinkan Kota Serang dan masyarakatnya untuk dapat kembali hidup “normal” secara ekonomi.

Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu daya saing pariwisata Kota Serang adalah eksistensi Kawasan Cagar Budaya Keraton Surosowan Kesultanan Banten secara faktual memiliki potensi sebagai obyek dan destinasi wisata yang tinggi. Karenanya pengembangan dan pengelolaannya yang dilakukan secara profesional sebagai sebuah industri pariwisata, akan sangat menjanjikan di masa depan, tidak hanya bagi kepentingan pemerintah daerah namun juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

5. Infrastruktur wilayah

   Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

   Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah. Salah satu diantara mitigasi bencana adalah mitigasi bencana non alam berupa pandemic COVID-19.

7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

   Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih, dengan memfokuskan pada agenda: penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai standar, pembangunan Smart City, penyederhanaan birokrasi, fungsionalisasi aparatur sipil negara, penyelesaian peralihan aset daeah secara progresif, pembangunan Pusat Pemerintahan Kota, peningkatan Indeks Kepuasan

Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kierja pemerintah, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

# BAB V
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 5.1 VISI

Visi pada dasarnya dapat dimaknai sebagai rumusan umum mengenai kondisi atau keadaan yang diinginkan dapat terwujud pada suatu waktu tertentu di masa depan. Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan karena merupakan perwujudan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018-2023, disamping karena masih sesuai dengan kondisi eksisting yang dihadapi oleh Kota Serang saat ini serta hasil evaluasi terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini maupun potensial terjadi di masa depan, yang kemudian diharmonisasikan dengan sejumlah regulasi terkait, seperti: dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJPD Kota Serang.

Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 yang telah ditetapkan adalah :

**"TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG SMART 2025"**

Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2025 adalah :

**Pendidikan** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten (Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan skala Provinsi Banten).

**Jasa** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan jasa di Provinsi Banten (Jasa Keuangan/Perbankan, Pemerintahan Umum, Pariwisata, Kemaritiman skala Provinsi Banten).

**Perdagangan** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan di Provinsi Banten (Perdagangan grosir skala Provinsi Banten).

**Sejahtera** : Kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan), kebutuhan batiniah (agama dan budaya), dan hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum).

**Maju** : Kondisi Kota Serang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (sehat dan cerdas), tingkat perekonomian daerah dan masyarakat yang sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia.

**Adil** : Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat Kota Serang dalam aspek kehidupan.

**Religius** : Kondisi Kota Serang yang dijiwai oleh norma agama dan nilai budaya sebagai landasan spritual dan moral dalam kehidupan bermasayarakat sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

**Tertib** : Kondisi lingkungan Kota Serang yang asri, serasi, lestari, tentram dan tertib.

RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Serang untuk Tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025, maka visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota **Peradaban** dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;

6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota ***Berdaya,*** mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota ***Berbudaya,*** mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembangan yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

**"Aje Kendor Membangun Serang"**

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari :

Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan warga Kota Serangsehingga terwujud kepemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya

bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang ber**DAya** saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.

Kota Serang yang ber**Budaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek *(self-help)* secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional.

Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 diharmonisasikan dengan sejumlah regulasi terkait, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJPD Kota Serang.Adapun visi masing masing dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Visi Antar Dokumen Perencanaan**

| DOKUMEN PERENCANAAN | VISI |
|---|---|
| RPJPN 2005-2025 | *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur* |
| RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 | *Banten Mandiri, Maju, SejahteraBerlandaskan Iman dan Taqwa* |
| RPJPD Kota Serang 2008-2025 | *Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025* |
| RPJMN 2020-2024 | *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong* |
| Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 | *Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah* |
| Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 | *Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya* |

## 5.2 MISI

Untuk mewujudkan visi **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) **Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan,** dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
2) **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan,** dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
3) **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

4) **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,** dengan menghadirkan kepemerintahanyang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Adapun keterkaitan misi masing masing dokumen perencanaan dari Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang dengan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Gambar 5.1**
**Keterkaitan Misi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023**

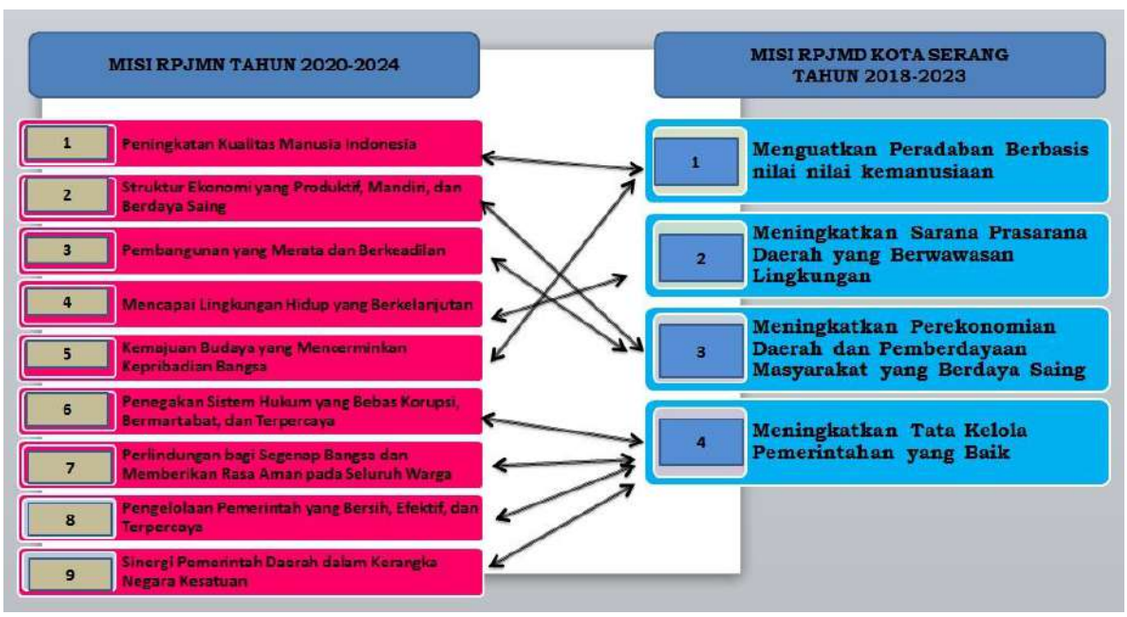


**Gambar 5.2**
**Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023**

**Gambar 5.3**
**Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023**

Pembangunan Kota Serang harus selaras dengan pembangunan Provinsi Banten, sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, Kota Serang perlu melakukan penataatan kota sekaligus melakukan perecepatan pelaksanaan pembangunan. Implementasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pembangunan di Kota Serang antara lain melakukan intervensi program dan pendanaan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah Kota Serang. Adapun dukungan program dan pendanaan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya :

1. Penataaan Wisata Ziarah Banten Lama
2. Penataan kawasan perkotaan, antara lain pembangunan pendesterian, median jalan, simpang sebidang, drainase perkotaan
3. Bantuan keuangan yang bersifar *spesifk grand* yang difokuskan untuk pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur
4. Penyediaan anggaran Biaya Operasional Sekolah Siswa SMA dan SMK.

Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Serang yang berdampak kepada tingginya tingkat kemacetan, intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang dilakukan melalui pembangunan dan pelebaran jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

## 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai misi pembangunan Kota Serang pada jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut.Tujuan

dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan, sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategik yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas yang selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunanderajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 melanda berbagai daerah di Indonesia, juga terjadi di Kota Serang. Target-target pembangunan Tahun 2020 pada umumnya akan sulit tercapai. Menyikapi kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Serang melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang

sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kota Serang ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indicator makro nasional dan kemampuan Kota Serang dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Kota Serang berdasarkan publikasi BPS.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD mengalami penyesuaian berupa target capaian kinerja per tahun dan penggunaan beberapa indikator makro sebagai indikator tujuan dan/atau sasaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan indikator makro tersebut tepat digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan/atau sasaran. Selain itu, dilakukan juga penambahan indikator Indeks Gini sebagai indikator kinerja dari tujuan terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan pada Misi 3.

Rumusan tujuan dan sasaran dari perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

## Tabel 5.2
## Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Serang

**VISI : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA**

| Tujuan Daerah | | | Sasaran Daerah | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja | | Target Kinerja | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | Uraian | | Indikator | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sebelum | Setelah |
| **MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya | Indek Pembangunan Manusia | | | | Poin | 71,68 | 72,10 | 72,16 | 72,52 | 72,81 | 73,09 | 73,92 | 73,09 |
| | | | 1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,62 | 8,67 | 8,76 | 8,81 | 8,86 | 8,91 | 8,68 | 8,91 |
| | | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,65 | 12,77 | 12,78 | 12,86 | 12,92 | 12,98 | 12,77 | 12,98 |
| | | | 1.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | 67,58 | 67,83 | 68,00 | 68,17 | 68,34 | 68,51 | 68,75 | 68,51 |
| **MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah | Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI) | | | | Poin | NA | 57,71 | 61,87 | 63,50 | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | 2.1.1 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah | Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah | % | 68,80 | 67,55 | 70,09 | 72,21 | 74,83 | 77,14 | 83,00 | 77,14 |
| 2.2 | Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan | Indeks kualitas lingkungan hidup | | | | Poin | 47,35 | 47,35 | 54,34 | 47,63 | 47,68 | 47,79 | 51,30 | 47,79 |
| | | | 2.2.1 | Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Ketersediaan RTH | % | 1,52 | 2,98 | 3,43 | 3,45 | 3,50 | 4,05 | 2,05 | 4,05 |
| | | | | | Jumlah Penanganan Timbunan Sampah | % | 51,92 | 55,58 | 61,6 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 |
| | | | 2.2.2 | Menurunnya risiko bencana dan | Indeks Risiko Bencana | Poin | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 |

| Tujuan Daerah | | | Sasaran Daerah | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja | | Target Kinerja | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | | Indikator | Uraian | | Indikator | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sebelum | Setelah |
| | | | | meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | | | | | | | | | | |
| **MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | | % | 6,59 | 6,20 | -1,29 | 5 | 5,25 | 5,5 | 6,91 | 5,5 |
| | | | 3.1.1 | Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat | Tingkat inflasi daerah | % | 3.78 | 3,06 | 1,91 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| | | | | | Indeks daya beli | Poin | 78,76 | 79,12 | 78,65 | 79,08 | 79,54 | 79,98 | 83,61 | 79,98 |
| | | | | | PDRB per kapita | Juta Rp | 42,76 | 45,89 | 45,17 | 46,99 | 49,14 | 51,67 | 52,50 | 51,67 |
| | | | | | Angka Kemiskinan | % | 5,36 | 5,28 | 6,06 | 5,96 | 5,86 | 5,76 | 4,86 | 5,76 |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 8,16 | 8,08 | 9,26 | 9,16 | 9,06 | 8,96 | 7,93 | 8,96 |
| | | | | | Indeks Gini | Poin | 0,351 | 0,342 | 0,352 | 0,350 | 0,348 | 0,346 | NA | 0,346 |
| **MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi | Indeks Reformasi Birokrasi Daerah | | | | Poin | 56,23 | 59,14 | 58,30 | 60,50 | 61,00 | 61,50 | 80,00 | 61,50 |
| | | | 4.1.1 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) | Poin | 72,00 | 77,80 | 77,74 | 78,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | Nilai LPPD Kota | Poin | 3.2346 | 3.4365 | 3.4426 | 3.4500 | 3.4550 | 3.4600 | Sangat Tinggi | 3.4600 |
| | | | | | Hasil Evaluasi AKIP | Poin | 52,31 | 54,64 | 55,33 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | BB | 63,00 |
| | | | | | Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Kategori | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

# BAB VI
# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD melalui pendekatan yang komprehensif. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## 6.1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada setiap sasaran perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**
**Kota Serang Tahun 2018-2023**

**VISI : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA**

| TUJUAN DAERAH | | SASARAN DAERAH | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN** | | | | | |
| 1.1 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya | 1.1.1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 1.1.1.1 | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan |
| | | | | 1.1.1.2 | Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat |
| | | | | 1.1.1.3 | Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal |
| | | 1.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1.1.2.1 | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| | | | | 1.1.2.2 | Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | | 1.1.2.3 | Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga |

| TUJUAN DAERAH | | SASARAN DAERAH | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN** | | | | | |
| 2.1 | Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah | 2.1.1 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah | 2.1.1.1 | Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrasturktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik |
| 2.2 | Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan | 2.2.1 | Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 2.2.1.1 | Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau |
| | | 2.2.2 | Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | 2.2.2.1 | Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana |
| **MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING** | | | | | |
| 3.1 | Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah | 3.1.1 | Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat | 3.1.1.1 | Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat |
| | | | | 3.1.1.2 | Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah |
| **MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK** | | | | | |
| 4.1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi | 4.1.1 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 4.1.1.1 | Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan |
| | | | | 4.1.1.2 | Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik |

## 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah

3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

Atas dasar tersebut dirumuskan tahapan dan tema pembangunan pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 6.2**

**Tahapan dan Tema RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023**

| TAHAPAN | TEMA RPJMD | TEMA PERUBAHAN RPJMD |
|---|---|---|
| Tahun 2019 (Konsolidasi dan Sinergitas) | Pemantapan sinergitas pembangunan melalui penguatan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur menuju Kota Serang sebagai kota peradaban | Pemantapan sinergitas pembangunan melalui penguatan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur menuju Kota Serang sebagai kota peradaban |
| Tahun 2020 (Kualitas Pembangunan) | Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban | Peningkatan kualitas pembangunan melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur serta pengembangan potensi daerah |
| Tahun 2021 (Akselerasi) | Peningkatan akselerasi pembangunan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban | Percepatan Pembangunan menuju pemulihan sosial, ekonomi dan peningkatan daya saing daerah |
| Tahun 2022 (Daya Saing Daerah) | Peningkatan daya saing daerah menuju Kota Serang sebagai kota peradaban | Peningkatan daya saing menuju percepatan pemulihan ekonomi |
| Tahun 2023 (Kesejahteraan) | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban |

Adapun arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.3**

**Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang**

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1.1.1.1.1 | Penyediaan prasarana dan sarana siswa dan pendidik, metodelogi, dan kualitas kelembagaan pada pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan | Penyediaan prasarana dan sarana siswa dan pendidik, metodelogi, dan kualitas kelembagaan pada pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan | Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan, pengembangan kurikulum, kompetensi pendidik dan ketenagapendidikan | Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan, pengembangan kurikulum, kompetensi pendidik dan ketenagapendidikan; pengendalian perijinan Pendidikan; pengembangan bahasa dan sastra | Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan, pengembangan kurikulum, kompetensi pendidik dan ketenagapendidikan; pengendalian perijinan Pendidikan; pengembangan bahasa dan sastra |
| 1.1.1.1.2 | Pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, Perpustakaan tingkat kecamatan dan kelurahan | Penyediaan data base informasi perpustakaan; Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi; Pembinaan SDM perpustakaan pada perpustakaan yang dibina | Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan melalui peningkatan akses, mutu dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan | Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan melalui peningkatan akses, mutu dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan; pelestarian koleksi dan naskah kuno | Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan melalui peningkatan akses, mutu dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan; pelestarian koleksi dan naskah kuno |
| 1.1.1.2.1 | Pembinaan wirausaha muda dan organisasi kepemudaan yang berdaya dan mandiri serta berprestasi dan berdaya saing | Pembinaan wirausaha muda dan organisasi kepemudaan yang berdaya dan mandiri serta berprestasi dan berdaya saing | Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui pembinaan dan Pengembangan Pemuda | Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui pembinaan dan Pengembangan Pemuda | Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui pembinaan dan Pengembangan Pemuda |
| 1.1.1.2.2 | Pembinaan cabang olahraga dalam upaya peningkatan prestasi | Pemenuhan sarana dan prasarana olah raga | Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan melalui pembinaan olah raga berprestasi dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga | Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan melalui pembinaan olah raga berprestasi dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga | Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan melalui pembinaan olah raga berprestasi dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1.1.1.3.1 | Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, benda, Situs serta Kawasan Cagar Budaya dan museum; Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya lokal; Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana kepada kelompok seni | Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, benda, Situs serta Kawasan Cagar Budaya dan museum; Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya lokal; Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana kepada kelompok seni | Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah; Penyelenggaraan dan partisipasi pada event dan festival budaya daerah; Peningkatan implementasi kesadaran dan menghargai seni budaya daerah agar mampu bersaing di berbagai event | Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah; Penyelenggaraan dan partisipasi pada event dan festival budaya daerah; Peningkatan implementasi kesadaran dan menghargai seni budaya daerah agar mampu bersaing di berbagai event; Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah | Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah; Penyelenggaraan dan partisipasi pada event dan festival budaya daerah; Peningkatan implementasi seni budaya daerah; Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah; |
| 1.1.2.1.1 | Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, dan penguatan jaminan dan pembiayaan kesehatan | Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, dan penguatan jaminan dan pembiayaan kesehatan | Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, penguatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan, serta pembentukan RSU dan puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) | Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, penguatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah (BLUD) | Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, penguatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan, serta Penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah (BLUD) |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1.1.2.2.1 | Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan | Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan |
| 1.1.2.3.1 | Pembentukan peserta KB aktif dan penyelenggaraan PUS; Penggerakan penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader KB; Promosi Komunikasi Informasi, advokasi dan Edukasi Keluarga Berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Pembentukan peserta KB aktif dan penyelenggaraan PUS; Penggerakan penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader KB; Promosi Komunikasi Informasi, advokasi dan Edukasi Keluarga Berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Pembinaan Keluarga Berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan keluarga; dan Pengendalian penduduk | Pembinaan Keluarga Berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan keluarga; dan Pengendalian penduduk | Pembinaan Keluarga Berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan keluarga; dan Pengendalian penduduk |
| 2.1.1.1.1 | Pembangunan fasilitas umum, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air | Pembangunan fasilitas umum, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air | Pembangunan fasilitas umum, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air | Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air | Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 2.1.1.1.2 | Penataan dan penyediaan infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi komunikasi dan infrastruktur data centre; dan transformasi infrastruktur IT era digital | Penataan dan penyediaan infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi komunikasi dan infrastruktur data centre; dan transformasi infrastruktur IT era digital | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik; peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government dan transformasi infrastruktur IT era digital | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik; peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government dan transformasi infrastruktur IT era digital | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik; peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government dan transformasi infrastruktur IT era digital |
| 2.1.1.1.3 | Penanganan dan pemanfaatan areal pemakaman sebagai ruang terbuka hijau; Peningkatan RTH dengan menyediakan ruang fasilitas umum; Penanganan rumah tidak layak huni; Peningkatan penataan rumah tangga bersanitasi; penataan dan pembangunan jalan lingkungan | Peningkatan RTH dngan Menyediakan ruang fasilitas umum; penanganan rumah tidak layak huni; peningkatan penataan rumah tangga bersanitasi dan akses air; penataan dan pembangunan jalan lingkungan | Penataan dan pengembangan perumahan, Kawasan permukiman, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Penataan dan pengembangan perumahan, Kawasan permukiman, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Penataan dan pengembangan perumahan, Kawasan permukiman, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni |
| 2.1.1.1.4 | Pembangunan dan pengawasan ruas Jalan; penegasan ulang marka jalan, perbaikan lampu penerangan jalan, pemasangan rambu-rambu, pengelolaan area perparkiran | Penataan dan pengendalian Potensi Titik kemacetan, manajemen dan Rekayasa lalu lintas dan angkutan, untuk meminimalisir simpul-simpul kemacetan | Pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan; peningkatan sarana dan prasaran perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan pelayaran | Peningkatan sarana dan prasaran perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan Terminal type C; pengelolaan pelayaran | Peningkatan sarana dan prasaran perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan Terminal type C; pengelolaan pelayaran |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 2.2.1.1.1 | Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; pengelolaan dan penanganan sampah dalam rangka Pengurangan Timbulan Sampah; pengelolaan pencemaran; pengelolaan kawasan konservasi | Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; pengelolaan dan penanganan sampah dalam rangka Pengurangan Timbulan Sampah; pengelolaan pencemaran; pengelolaan kawasan konservasi | Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pengelolaan RTH; Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; dan pegelolaan persampahan | Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pengelolaan RTH; Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; dan pegelolaan persampahan | Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pengelolaan RTH; Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; dan pegelolaan persampahan |
| 2.2.2.1.1 | Pengelolaan dan penanganan wilayah bencana, Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, penguatan unit-unit sosial kebencanaan di masyarakat; Pembentukan Kelurahan tangguh bencana, Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana didaerah | Pengelolaan dan penanganan wilayah bencana, Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, penguatan unit-unit sosial kebencanaan di masyarakat; Pembentukan Kelurahan tangguh bencana,Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana didaerah | Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tanggap darurat dan logistik bencana penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi; pencegahan, penanganan dan penanggulangan kebakaran | Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tanggap darurat dan logistik bencana penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi; pencegahan, penanganan dan penanggulangan kebakaran | Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tanggap darurat dan logistik bencana penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi; pencegahan, penanganan dan penanggulangan kebakaran |
| 3.1.1.1.1 | Penyediaan kebijakan dan pembinaan potensi usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat, pengurangan ketimpangan perekonomian daerah dan pengendalian inflasi dalam upaya meningkatkan daya saing | Penyediaan kebijakan dan pembinaan potensi usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat, pengurangan ketimpangan perekonomian daerah dan pengendalian inflasi dalam upaya meningkatkan daya saing | Penyediaan kebijakan dan pembinaan potensi usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat, pengurangan ketimpangan perekonomian daerah dan pengendalian inflasi dalam upaya meningkatkan daya saing | Penyediaan kebijakan dan pembinaan potensi usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat, pengurangan ketimpangan perekonomian daerah dan pengendalian inflasi dalam upaya meningkatkan daya saing | Penyediaan kebijakan dan pembinaan potensi usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat, pengurangan ketimpangan perekonomian daerah dan pengendalian inflasi dalam upaya meningkatkan daya saing |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 3.1.1.1.2 | Penataan pendataan dan pembinaan koperasi; pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil | Pembinaan dan pengembangan kemitraan koperasi; pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil; promosi produk usaha mikro kecil | Peningkatan kelembagaan, pengembangan usaha, fasilitasi dan kemitraan koperasi; pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan usaha mikro melalui pembinaan kreativitas, pemberdayaan dan promosi | Peningkatan kelembagaan, pengembangan usaha, fasilitasi dan kemitraan koperasi; pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan usaha mikro melalui pembinaan kreativitas, pemberdayaan dan promosi | Peningkatan kelembagaan, pengembangan usaha, fasilitasi dan kemitraan koperasi; pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan usaha mikro melalui pembinaan kreativitas, pemberdayaan dan promosi |
| 3.1.1.1.3 | Penataan dan pembinaan perdagangan; Mengurangi mata rantai distribusi; Penataan dan pengelolaan pasar | Penataan dan pembinaan perdagangan; Mengurangi mata rantai distribusi; Penataan dan pengelolaan pasar | Peningkatan Kontribusi kinerja perdagangan Ekspor; pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar; dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting | Peningkatan Kontribusi kinerja perdagangan Ekspor; pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar; dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting | Peningkatan Kontribusi kinerja perdagangan Ekspor; pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar; dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting |
| 3.1.1.1.4 | Penataan dan peningkatan jumlah Industri Kecil yang dibina; Penerapan Standar Produksi IKM yang berdaya saing | Penataan dan peningkatan wilayah prioritas jaringan kluster Industri Kecil yang memiliki potensi kontribusi sumber daya local | Pertumbuhan IKM melalui pengembangan produksi dan pendampingan untuk mencapai kualifikasi standar produksi dan mutu produk | Pertumbuhan IKM melalui pengembangan produksi dan pendampingan untuk mencapai kualifikasi standar produksi dan mutu produk | Pentaan dan peningkatankerjasama promosi dan kemitraan; mutual relationship; Pengembangan teknologi dan inovasi idustri kecil |
| 3.1.1.1.5 | Perbaikan infrastruktur pertanian;Penetapan permanen kawasan pertanian; kelembaggan, permodalan, penyuluhan pemanfaatan teknologi modern agribisnis pertanian | Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan | Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan | Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan | Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 3.1.1.1.6 | Pengembangan dan penataan destinasi/objek wisata; Pembentukan destinasi wisata baru; Pengembangan promosi pariwisata | Pengembangan destinasi/ objek baru, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; pengembangan promosi pariwisata; pembinaan dan pembentukan desa wisata | Pengembangan dan penataan destinasi/objek wisata; Pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata; Pembangunan sarana, jaringan informasi pariwisata; pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan dan penataan destinasi/objek wisata; Pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata; Pembangunan sarana, jaringan informasi pariwisata; pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan dan penataan destinasi/objek wisata; Pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata; Pembangunan sarana, jaringan informasi pariwisata; pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif |
| 3.1.1.1.7 | Pengkajian potensi, hambatan dan solusi kemudahan penanaman modal; peningkaan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal | Pengkajian potensi, hambatan dan solusi kemudahan penanaman modal; peningkaan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal | Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkaan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal | Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkaan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal | Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkaan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal |
| 3.1.1.1.8 | Pemberdayaan bagi fakir miskin; Penataan dan pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Pelayanan pembinaan anak terlantar, Layanan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma , layanan pembinaan Lansia, eks penyandang penyakit sosial | Pemberdayaan bagi fakir miskin; Penataan dan pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Pelayanan pembinaan anak terlantar, Layanan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma , layanan pembinaan Lansia, eks penyandang penyakit social | Peningkatan pelayanan dasar sosial dan perlindungan sosial yang komprehensif melalui peningkatan akses pelayanan, Penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas PSKS dan peningkatan Akses pemeliharaan TMPN | Peningkatan pelayanan dasar sosial dan perlindungan sosial yang komprehensif melalui peningkatan akses pelayanan, Penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas PSKS dan peningkatan Akses pemeliharaan TMPN | Peningkatan pelayanan dasar sosial dan perlindungan sosial yang komprehensif melalui peningkatan akses pelayanan, Penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas PSKS dan peningkatan Akses pemeliharaan TMPN |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 3.1.1.1.9 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi |
| 3.1.1.2.1 | Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragaman konsumsi pangan; peningkatan keamanan pangan | Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragaman konsumsi pangan; peningkatan keamanan pangan | Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragaman konsumsi pangan; peningkatan keamanan pangan | Peningkatan Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragamman konsumsi pangan; peningkatan keamanan pangan | Peningkatan Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragaman konsumsi pangan;peningkatan keamanan pangan |
| 4.1.1.1.1 | Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi sakip dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur | Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi sakip dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur | Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi sakip dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur | Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi sakip dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur | Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi sakip dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4.1.1.1.2 | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa |
| 4.1.1.1.3 | Pengawasan dan pengendalian pengamanan komunikasi dan informatika; Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; peningkatan pelayanan informasi | Pengawasan dan pengendalian pengamanan komunikasi dan informatika; Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; peningkatan pelayanan informasi | Pengawasan dan pengendalian pengamanan komunikasi dan informatika; Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; peningkatan pelayanan informasi | Pengawasan dan pengendalian pengamanan komunikasi dan informatika; Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; peningkatan pelayanan informasi | Pengawasan dan pengendalian pengamanan komunikasi dan informatika; Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; peningkatan pelayanan informasi |
| 4.1.1.1.4 | Peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik yang terintegrasi melalui kerjasama dengan instansi terkait | Peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik yang terintegrasi melalui kerjasama dengan instansi terkait | Peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik yang terintegrasi melalui kerjasama dengan instansi terkait | Peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik yang terintegrasi melalui kerjasama dengan instansi terkait | Peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik yang terintegrasi melalui kerjasama dengan instansi terkait |
| 4.1.1.1.5 | Peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil | Peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil | Peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil | Peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil | Peningkatan pelayanan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4.1.1.1.6 | Peningkatan pelayanan perizinan melalui implementasi inovasi dan teknologi informasi; Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai NSPK dan Pelayanan Perizinan berstandar Internasional | Peningkatan pelayanan perizinan melalui implementasi inovasi dan teknologi informasi; Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai NSPK dan Pelayanan Perizinan berstandar Internasional | Peningkatan pelayanan perizinan melalui implementasi inovasi dan teknologi informasi; Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai NSPK dan Pelayanan Perizinan berstandar Internasional | Peningkatan pelayanan perizinan melalui implementasi inovasi dan teknologi informasi; Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai NSPK dan Pelayanan Perizinan berstandar Internasional | Peningkatan pelayanan perizinan melalui implementasi inovasi dan teknologi informasi; Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai NSPK dan Pelayanan Perizinan berstandar Internasional |
| 4.1.1.1.7 | Peningkatan Publikasi kegiatan DPRD; Penyusunan rencana kerja dan pelaporan DPRD yang berkualitas; pengelolaan persidangan dan risalah rapat; Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler | Peningkatan Publikasi kegiatan DPRD; Penyusunan rencana kerja dan pelaporan DPRD yang berkualitas; pengelolaan persidangan dan risalah rapat; Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler | Peningkatan Publikasi kegiatan DPRD; Penyusunan rencana kerja dan pelaporan DPRD yang berkualitas; pengelolaan persidangan dan risalah rapat; Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler | Peningkatan Publikasi kegiatan DPRD; Penyusunan rencana kerja dan pelaporan DPRD yang berkualitas; pengelolaan persidangan dan risalah rapat; Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler | Peningkatan Publikasi kegiatan DPRD; Penyusunan rencana kerja dan pelaporan DPRD yang berkualitas; pengelolaan persidangan dan risalah rapat; Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler |
| 4.1.1.1.8 | Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai; Penanganan terhadap kasus disiplin; Pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian; pengembangan sumder daya apartur melalui pendidikan dan pelatihan | Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai; Penanganan terhadap kasus disiplin; Pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian; pengembangan sumder daya apartur melalui pendidikan dan pelatihan | Pengembangan aparatur melalui Pembinaan pegawai, penempatan dan kemahiran kerja aparatur; peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan penyediaan data dan informasi; Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepegawaian | Pengembangan aparatur melalui Pembinaan pegawai, penempatan dan kemahiran kerja aparatur; peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan penyediaan data dan informasi; Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepegawaian | Pengembangan aparatur melalui Pembinaan pegawai, penempatan dan kemahiran kerja aparatur; peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan penyediaan data dan informasi; Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepegawaian |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4.1.1.1.9 | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal secara berkala; Peningkatan kompetensi APIP; Penetapan regulasi dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal secara berkala; Peningkatan kompetensi APIP; penetapan regulasi dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal secara berkala; Peningkatan kompetensi APIP; penetapan regulasi dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal secara berkala; Peningkatan kompetensi APIP; penetapan regulasi dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal secara berkala; Peningkatan kompetensi APIP; penetapan regulasi dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan |
| 4.1.1.1.10 | Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan; Peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah | Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan; Peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah | Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan | Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan | Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan |
| 4.1.1.1.11 | Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi | Peningkatan kerjasama Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4.1.1.1.12 | Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak | Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak | Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak | Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak | Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak |
| 4.1.1.1.13 | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS | Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS |
| 4.1.1.1.14 | Pembinaan dan pengelolaan kearsipan perangkat daerah; Pengelolaan pubikasi dan komunikasi pemanfaatan arsip; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan dan penerapan teknologi informasi | Pembinaan dan pengelolaan kearsipan perangkat daerah; Pengelolaan pubikasi dan komunikasi pemanfaatan arsip; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan dan penerapan teknologi informasi | Pembinaan dan pengelolaan kearsipan; pengelolaan pubikasi dan komunikasi pemanfaatan arsip; perlindungan dan penyelamatan arsip; penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan dan penerapan teknologi informasi | Pembinaan dan pengelolaan kearsipan; pengelolaan pubikasi dan komunikasi pemanfaatan arsip; perlindungan dan penyelamatan arsip; penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan dan penerapan teknologi informasi | Pembinaan dan pengelolaan kearsipan; pengelolaan pubikasi dan komunikasi pemanfaatan arsip; perlindungan dan penyelamatan arsip; penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan dan penerapan teknologi informasi |

| NOMOR | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fokus mempersiapkan proses | Fokus menguatkan proses | Fokus mengoptimalkan kinerja | Fokus mengoptimalkan pencapaian kinerja | Fokus pencapaian kinerja |
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 4.1.1.1.15 | Penyelesaian konflik sosial, penyakit sosial pekat, mendorong partisipasi pemilih, membangun kesadaran berbangsa dalam meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara | Penyelesaian konflik sosial, penyakit sosial pekat, mendorong partisipasi pemilih, membangun kesadaran berbangsa dalam meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara | Pengembangan wawasan kebangsaan melalui penguatan ideologi dan karakter bangsa, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik masyarakat serta peningkatan pengawasan dan penanganan konflik. | Pengembangan wawasan kebangsaan melalui penguatan ideologi dan karakter bangsa, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik masyarakat serta peningkatan pengawasan dan penanganan konflik. | Pengembangan wawasan kebangsaan melalui penguatan ideologi dan karakter bangsa, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik masyarakat serta peningkatan pengawasan dan penanganan konflik. |
| 4.1.1.2.1 | Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan | Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan | Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan | Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan | Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan |

### 6.2.1 Arah Kebijakan Pembentukan BUMD

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

Pembentukan BUMD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dimana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD :

*Pertama*, *alasan ekonomis*, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services)* dan mencari keuntungan (*provit motive).*

*Kedua*, *alasan strategis*, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

*Ketiga, alasan budget,* yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

*Keempat, alasan politis,* yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Karateristik BUMD meliputi:

a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah
b. Badan usaha dimiliki oleh :
    1) 1 (satu) Pemerintah Daerah
    2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
    3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
    4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah.
c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan akitivitas tersebut antara lain adalah:

a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Keunggulan komparatif berupa ketersediaan potensi sumber daya alam maupun wilayah yang sangat strategis yang dimiliki Kota Serang, pembangunan BUMD

merupakan suatu peluang untuk bisa direalisasikan. Lahirnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan acuan yang lebih jelas agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional dan menerapkan *prinsip Good Corporate Governance* (GCC) sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD atau pun pelayanan publik sehingga dapat selaras dengan perwujudan visi misi Walikota.

**Tabel 6.4**
**Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**
**Kota Serang Tahun 2021-2023**

| ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM/KEGIATAN |
|---|---|
| Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban yang berdaya dan berbudaya, antara lain:<br>1. Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah;<br>2. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah;<br>3. Optimalisasi asset milik daerah dalam menciptakan nilai tambah, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);<br>4. Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua melalui penguatan kelembagaan PDAB menjadi Perumda Air Minum;<br>5. Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembentukan BUMD Agribisnis ;<br>6. Peningkatan aksesbilitas pelaku UMKM terhadap lembaga perbankan melalui pembentukan BUMD keuangan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah;<br>7. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan sumber daya alam;<br>8. Peningkatan kualitas kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) agar tercipta legal standing yang kuat;<br>9. Penyertaan/Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tujuan mempertahankan eksistensi maupun expansi usaha. | **Program: Perekonomian dan Pembangunan**;<br>***Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;***<br>*Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*<br>1. Tahun 2020: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang PDAB menjadi Perumda Air Minum;<br>2. Tahun 2021:<br>- Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah;<br>- Raperda Pendirian Perseroan Daerah BUMD Agribisnis;<br>3. Tahun 2022 : Penyusunan Raperda Pendirian Perusahaan Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<br>4. Peraturan dan Keputusan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan BUMD yang baik (*Good Corporate).* |

Pembentukan BUMD harus disertai dengan rencana penyertaan modal, sesuai dengan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Dan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa salah satu pelaksaanaan kekuasaan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah kebijakan BUMD terkait penyertaan modal dan pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Selain ketentuan perundang-undangan dimaksud, pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 juga mengatur bahwa penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pendirian BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada BUMD dan jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Adapun maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan permodalan BUMD agar dapat melaksanakan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan produktivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

## 6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahsebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapaisasaran RPJMD. Dalam rangka percepatan pembangunan untuk mengatasi beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Serang, maka dirumuskan program pembangunan yang bersifat mendesak dan unggulan Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Mendesak, yaitu :
   a. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)

Program penataan PKL dilakukan sebagai bagian dari penataan Kota Serang yang diharapkan dapat menggerakan perekonomian masyarakat dan daerah. Program penataan PKL dilakukan melalui peningkatan fungsi pasar, pembangunan tempat kuliner tematik dan penataan PKL.

b. Pengurangan Kemacetan dan peningkatan disiplin berlalu lintas

Program pengurangan kemacetan dan peningkatan disiplin berlalu lintas ditujukan dalam upaya menanggulangi kemacetan di Kota Serang melalui pengadaan marka jalan kota, manajemen rekayasa lalu lintas area pendidikan dan pengadaan rambu lalu lintas di beberapa lokasi ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

c. Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air

Program peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air ditujukan dalam upaya mengurangi dampak persampahan dan genangan air terhadap kesehatan, lingkungan, estetika kota, dan mengurangi kemacetan dalam kerangka penataan Kota Serang.

Program peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan, dilakukan melalui upaya meningkatkan kinerja pengumpulan dan pengangkutan sampah, yaitu optimalisasi TPA Cilowong, peningkatan sarpras persampahan dan pembentukan bank sampah.

Sedangkan dalam upaya pengurangan spot genangan air, dilakukan melalui peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase permukiman dan perkotaan dan merancang drainase makro Kota Serang.

d. Penegakan Perda K3 (ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) secara konsisten

Program penegakan K3 merupakan bagian perwujudan dari pengaturan terhadap kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Penegakan Perda K3 harus mengedepankan keadilan sehingga perlu ada inovasi program atau kegiatan yang humanis tapi tetap tegas. Program penegakan K3 di Kota Serang diarahkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*building capacity*) (diantaranya penguatan sekretariat PPNS serta pendidikan dan pelatihan PPNS) serta komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

e. Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi Covid-19

Program pencegahan penyebaran dan penegakan dampak pandemi Covid-19 merupakan bagian dari upaya menekan angka penyebaran Covid-19 dan penanganan terdampak dari penyebaran Covid-19 di

Kota Serang, melalui penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Adapun rumusan pelaksanaan Program Mendesak Kota Serang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.5**
**Rumusan Pelaksanaan Program Mendesak Tahun 2019-2023**

| Program Mendesak | Realisasi Fokus Pelaksanaan | | Rencana Indikasi/Fokus Pelaksanaan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) | Relokasi Pedagang Pasar Rau (dari bawah keatas), Relokasi PKL stadion ke pasar kepandean | Penataan Pasar Kepandean, Relokasi PKL Rau (pindah ke dalam), Relokasi PKL Taman Sari ke Serang Plaza | Pembangunan Wisata Kuliner Tematik Kota Serang "Pujagalana" | Pembangunan Pasar Induk Teritih | Penguatan dan Pengelolaan Pasar Induk Kota Serang di Teritih |
| | | | | Pembangunan Kios kuliner KPW Banten Lama | Penguatan dan Pengelolaan Kios Kuliner KPW Banten Lama |
| | Kerjasama Pengaturan PKL, Penertiban dan Patroli Pencegahan PKL, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pemantauan PKL | Pemiliharaan Penataan PKL melalui Patroli, Pengamanan dan Penertiban PKL, Penyediaan Sarana dan Prasarana Patroli serta Penguatan Kerjasama dengan TNI, Pori dan Instansi terkait | Penguatan kerjasama penataan PKL dan penguatan kesadaran PKL untuk tertib dan patuh terhadap peraturan | Optimalisasi Pencegahan dan Penataan PKL | Optimalisasi Pencegahan dan Penataan PKL |
| Pengurangan Kemacetan dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas | Pengadaan Marka Jalan Kota | Pengadaan Marka Jalan Kota | Pengadaan Marka Jalan Kota | Pengadaan Marka Jalan Kota | Pengadaan Marka Jalan Kota |
| | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas area Pendidikan | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas area Pendidikan | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas area Pendidikan | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas area Pendidikan | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas area Pendidikan |
| | Pengadaan rambu lalu lintas | Pengadaan rambu lalu lintas | Pengadaan rambu lalu lintas | Pengadaan rambu lalu lintas | Pengadaan rambu lalu lintas |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persampahan Dan Pengurangan Spot Genangan Air | Optimalisasi TPA Cilowong | Optimalisasi TPA Cilowong | Optimalisasi TPA Cilowong | Optimalisasi TPA Cilowong | Optimalisasi TPA Cilowong |
| | Peningkatan sarpras persampahan | Peningkatan sarpras persampahan | Peningkatan sarpras persampahan | Peningkatan sarpras persampahan | Peningkatan sarpras persampahan |
| | Pembentukan Bank Sampah | Pembentukan Bank Sampah | Pembentukan Bank Sampah | Pembentukan Bank Sampah | Pembentukan Bank Sampah |
| | peningkatan dan pemeliharaan drainase Jalan Kota | peningkatan dan pemeliharaan drainase Jalan Kota | peningkatan dan pemeliharaan drainase Jalan Kota | peningkatan dan pemeliharaan drainase Jalan Kota | peningkatan dan pemeliharaan drainase Jalan Kota |
| Penegakan Perda K3 (ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Secara Konsisten | Fasilitasi PPNS, Kerjasama, Penyuluhan/Sosialisasi dan Penindakan Penegakan Perda K3 | Penguatan Fasilitasi PPNS, Kerjasama dan Penindakan Penegakan Perda K3 | Peningkatan penguatan Fasilitasi PPNS, Kerjasama, dan Penindakan Penegakan Perda K3 | Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda K3 | Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda K3 |
| Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi Covid-19 | | Penanganan Kesehatan (pengadaan APD, alat kesehatan, fasilitasi kesehatan, dan surveilans epidemiologi) | Penanganan Kesehatan (pengadaan APD, alat kesehatan, fasilitasi kesehatan, surveilans epidemiologi dan vaksinasi) | Penanganan Kesehatan (pengadaan APD, alat kesehatan, fasilitasi kesehatan, surveilans epidemiologi dan vaksinasi) | Penanganan Kesehatan (pengadaan APD, alat kesehatan, fasilitasi kesehatan, dan surveilans epidemiologi) |
| | | Penanganan Dampak Ekonomi (bantuan/stimulus UMKM, dan stok pangan) | Penanganan Dampak Ekonomi (bantuan/stimulus UMKM, dan stok pangan) | Penanganan Dampak Ekonomi (bantuan/stimulus UMKM, dan stok pangan) | Penanganan Dampak Ekonomi (bantuan/stimulus UMKM, dan stok pangan) |
| | | Penyediaan jaring pengaman sosial (bufferstock dan bantuan KK miskin) | Penyediaan jaring pengaman sosial (bufferstock dan bantuan KK miskin) | Penyediaan jaring pengaman sosial (bufferstock dan bantuan KK miskin) | Penyediaan jaring pengaman sosial (bufferstock dan bantuan KK miskin) |

2. Program Unggulan, yaitu :

a. Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan

Ruang terbuka diharapkan dapat memberi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ruang terbuka juga sebagai tempat interaksi antar warga, maupun dengan alam yang mempunyai efek rekreasi di tengah kesibukan warga sekaligus membangun peradaban warga.

Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir RPJMD yang didahului dengan kegiatan penentuan lokasi, penyusunan studi kelayakan pembangunan alun-alun/RTH di seluruh kecamatan, penyediaan lahan dan penyusunan Detail Engineering Desaign (DED).

b. Pembangunan kampung/kelurahan tematik

Program Kampung Tematik di setiap kecamatan lingkup Pemerintah Kota Serang bertujuan untuk membangun trademark atau karakteristik lingkungan melalui peningkatan potensi-potensi lokal yang dimiliki dengan memperhatikan manfaat dan dampak terhadap masyarakat berupa :

1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat
2) Peningkatan kondisi lingkungan melalui perbaikan kondisi sarana dan prasarana lingkungan
3) Peningkatan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Adapun indikasi program dan kegiatan diarahkan pada pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung terutama aksessibilitas ke kampung tematik, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun rencana lokasi kampung tematik yang akan dikembangkan sampai akhir periode RPJMD adalah :

- Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari
- Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai Kampung Industri Kue Kering
- Kampung Sukawana Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang sebagai Kampung Konveksi
- Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai kampung wisata
- Kampung Banten Kelurahan Banten sebagai kampung wisata religi
- Pesisir Kelurahan Banten, Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai kampung ekowisata mangrove

- Kampung Pancalaksana Kelurahan Pancalaksana sebagai kampung pengrajin tas dompet
- Kampung Ampel Kelurahan Ampel sebagai Kampung ekowisata Situ Ciwaka
- Kampung Taktakan Keurahan Taktakan sebagai kampung pengrajin perak dan emas
- Kampung Cikulur Jelawe Kelurahan Serang sebagai Kampung Binahong

Selain kampung tematik tersebut di atas, dikembangkan pula kampung resik lan aman berupa kampung bertema kampung bersih dan aman yang dilakukan bertahap untuk keseluruhan RT di seluruh Kota Serang.

c. Pembangunan Mesjid Agung sebagai land mark Kota Serang

Mesjid Agung Kota Serang diarahkan sebagai pusat syiar Islam sekaligus sebagai Land Mark Kota Serang. Berdasarkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak serta telah Pemerintah Kota Serang telah menerima penyerahan Masjid At-Tsaurah maka telah ditentukan bahwa Mesjid At-Tsaurah menjadi Mesjid Agung Kota Serang. Dengan demikian seluruh penataan/revitalisasi dan pembangunan Masjid At-Tsaurah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang yang akan dilakukan secara bertahap sampai Tahun 2023.

d. Pengembangan Serang Smart City

Pengembangan Serang Smart City diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dan fasilitas kota serta meningkatkan manajemen tata kelola pemerintah dengan memberikan kemudahan dan kecepatan jangkauan pemberian pelayanan kepada warga dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan Serang Smart City dilaksanakan melalui indikasi program dan kegiatan berupa penyediaan/pembangunan, penyempurnaan dan integrasi aplikasi e-government, serta membangun *smart society*, *smart economy* dan *smart environment.*

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata

Pariwisata menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Potensi Pariwisata Kota Serang yang dapat dikembangkan antara lain wisata cagar alam, wisata budaya, wisata ziarah (religi), wisata buatan dan wisata kuliner. Adapun indikasi program dan kegiatan diarahkan pada pembangunan infrastruktur aksesibiltas destinasi

wisata, penataan destinasi wisata, pengembangan daya tarik wisata dan promosi wisata.

f. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)

Mall Pelayanan Publik berfungsi sebagai tempat berlangsungan kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman. Tujuan kehadiran Mall Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepaan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapat pelayanan. Sealain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Serang. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, pendayagunaan, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan.

Adapun realisasi fokus pelaksanaan 2019-2020 dan rencana fokus pelaksanaan tahun 2021-2023 Program Unggulan Kota Serang pada setiap tahunya adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.6**
**Rumusan Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2019-2023**

| Program Unggulan | Realisasi Fokus Pelaksanaan | | Rencana Indikasi/Fokus Pelaksanaan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membangun alun-alun/ Ruang Publik di setiap Kecamatan | | Pembangunan RTH di Kecamatan Walantaka (Tahap I) | Pembangunan RTH di Kecamatan Walantaka (Tahap II), Kecamatan Taktakan, Kecamatan Serang (Taman Sari) | Pembangunan RTH di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug | Pembangunan RTH di Kecamatan Kasemen |
| Pembangunan kampung tematik | Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari : Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata; DED Parkir Terminal Kendaraan KPW | Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari : Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan Jalan Poros Akses Kampung Karangjaya | Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari : Pelaksanaan event pariwisata; Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (pokdarwis) | Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari : Pelaksanaan event wisata; Pengembangan budidaya ikan; Peningkatan SDM pelaku Pariwisata | Kampung Karangjaya Kelurahan Banten (Pancer) sebagai Kampung Wisata Bahari : Pelaksanaan event wisata; Pengembangan kompetisi pelaku pariwisata |
| | Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai kampung Industri Kue Kering: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai kampung Industri Kue Kering: Good Manufacturing Practice; Sertifikasi halal; Pembangunan jalan Akses | Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai kampung Industri Kue Kering: Sertifikasi Halal dan HAKI | Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai kampung Industri Kue Kering: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Magelaran Cilik Kelurahan Mesjid Priyayi sebagai kampung Industri Kue Kering: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata |
| | | Kampung Sukawana Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang sebagai Kampung | Kampung Sukawana Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang sebagai Kampung Konveksi : Sertifikasi HAKI | Kampung Sukawana Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang sebagai Kampung Konveksi : Peningkatan | Kampung Sukawana Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang sebagai Kampung Konveksi : Peningkatan kapasitas SDM |

| Program Unggulan | Realisasi Fokus Pelaksanaan | | Rencana Indikasi/Fokus Pelaksanaan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Konveksi : Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | | kapasitas SDM pelaku pariwisata | pelaku pariwisata |
| | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Pembangunan Gapura | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata |
| | Kampung Banten Kelurahan Banten sebagai Kampung Wisata Religi : Pelatihan Homestay, Pemandu Wisata Budaya dan Heritage & Kuliner | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Pembangunan Akses jalan, Pelatihan Pariwisata Berkelanjutan bagi Pokdarwis, Genpi, Kang Nong dan Pelaku Pariwisata Lainnya | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Pelatihan/ Bimtek Tata Kelola Destinasi bagi 11 Pokdarwis | Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Peningkatan SDM Pariwisata | Kampung Banten Kampung Karodangan Kelurahan Sepang sebagai Kampung Wisata: Pengembangan City Tour Kota Serang "Banten Heritage" |
| | | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Pelatihan Pariwisata Berkelanjutan bagi Pokdarwis, Genpi, Kang Nong dan Pelaku Pariwisata Lainnya. | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Pelatihan/ Bimtek Tata Kelola Destinasi bagi 11 Pokdarwis | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Peningkatan SDM Pariwisata | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Pengembangan City Tour Kota Serang "Banten Heritage" |
| | | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Pembangunan Sentra IKM Berbasis Ikan di Margaluyu | Kampung Pesisir Kelurahan Banten , Margaluyu dan Sawah Luhur sebagai Kampung Ekowisata Mangrove: Pembangunan Sentra IKM Berbasis Ikan di Margaluyu | | |
| | | Kampung Pancalaksana Kelurahan Pancalaksana sebagai kampung Pengrajin Tas dan Dompet : Peningkatan Jalan Poros Akses | | Kampung Pancalaksana Kelurahan Pancalaksana sebagai kampung Pengrajin Tas dan Dompet : Sertifikasi HAKI | Kampung Pancalaksana Kelurahan Pancalaksana sebagai kampung Pengrajin Tas dan Dompet : Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata |
| | Kampung Ampel Kelurahan Pengampelan sebagai Kampung Ekowisata Situ Ciwaka: Rintisan Kampung Wisata Pipitan Kreatif, Kelurahan Pipitan Festifal Situ Ciwaka | Kampung Ampel Kelurahan Pengampelan sebagai Kampung Ekowisata Situ Ciwaka: Pembangunan Akses Jalan, Pembangunan Gapura Kampung Wisata Situ Ciwaka | Kampung Ampel Kelurahan Pengampelan sebagai Kampung Ekowisata Situ Ciwaka: Pembangunan Gapura di 4 (Empat) Titik Kampung Wista Kota Serang | Kampung Ampel Kelurahan Pengampelan sebagai Kampung Ekowisata Situ Ciwaka: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Kampung Ampel Kelurahan Pengampelan sebagai Kampung Ekowisata Situ Ciwaka: Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata |
| | | | | Kampung Taktakan Kelurahan Taktakan sebagai kampung pengrajin Emas dan Perak : Sertifikasi Halal dan HAKI | Kampung Taktakan Kelurahan Taktakan sebagai kampung pengrajin Emas dan Perak : Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata |
| | | | | Kampung Cikulur Jelawe Kelurahan Serang sebagai Kampung Binahong: Benih atau bibit | Kampung Cikulur Jelawe Kelurahan Serang sebagai Kampung Binahong: Benih atau bibit |

| Program Unggulan | Realisasi Fokus Pelaksanaan | | Rencana Indikasi/Fokus Pelaksanaan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | Tanaman) | Tanaman) |
| | | Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman) | Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman) | Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman) |
| Pembangunan Mesjid Agung | Penyerahan status pengelolaan Masjid Ats-Tsauroh dari pihak pengurus Yayasan kepada Pemkot Serang | Penataan Landscape dan DED Mesjid Agung At-Tsauroh Kota Serang | Pembangunan Landscape Mesjid Agung At-Tsauroh Kota Serang ,bongkar islamik center, & Rehab | Pemb. Mesjid Agung At-Tsauroh Kota Serang (lanjutan) | Pemb. Mesjid Agung At-Tsauroh Kota Serang (lanjutan) |
| Pengembangan Serang Smart City | Pembangunan VoIP System Kota Serang | Pembangunan Video Call & Confrence System | Data Center Collocation (Perpanjang) | Pengembangan TIK dan E-Gov | Pengembangan TIK dan E-Gov |
| | Data Center Collocation (Perpanjang) | Data Center Collocation (Perpanjang) | Maintenance Data Center | Infrastruktur Smart city | Infrastruktur Smart city |
| | | Penyusunan Data base Tenaga Kerja - pengembangan fitur apliksi sistem informasi pasar kerja (SIMPAKER) dan sosialisasi | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online; Pengembangan fitur aplikasi ketenaga kerjaan dan sinkronisasi server melalui Kominfo Kota Serang | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;pengembangan fitur aplikasi ketenagakerjaan dan sinkronisasi aplikasi dengan Pemerintah Kota Serang dan Provininsi Banten | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online; Sosialisasi dan sinkronisasi aplikasi ketenagakerjaan dengan kemenaker |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata | Pengembangan KPW Banten Lama: penguatan sarana dan prasarana | Pengembangan KPW Banten Lama: penguatan sarana dan prasarana | Pengembangan KPW Banten Lama: penguatan sarana dan prasarana | Pengembangan KPW Banten Lama: penguatan sarana dan prasarana | Pengembangan KPW Banten Lama: penguatan sarana dan prasarana |
| | | Peningkatan Jalan Poros Akses Kampung Karangjaya, Kelurahan Banten (Pancer), Kampung Wisata Baru | DED Map/ Peta Wisata | Pembuatan Map/ Peta Wisata | Pengadaan Sarpras (Hologram Pariwisata Kota Serang) di TIC |
| | | Peningkatan Jalan Poros Akses Kampung Pancalaksana, Kelurahan Pancalaksana (Kampung Pengrajin Tas Dompet) | Pembuatan Gapura Wisata | Pembuatan MCK di Kampung Wisata / Destinasi Wisata | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Pariwisata |
| Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Mall Pelayanan Publik | | | Penyusunan dokumen Feasibility Study (FS) Mall Pelayanan Publik (MPP) | Penyusunan dokumen Detail Enginering Design (DED) Mall Pelayanan Publik (MPP) | Pembangunan Fisik Mall Pelayanan Publik (MPP) |

3. Program Pemanfaatan Pola Ruang dan Struktur Ruang

Program pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Serang Wilayah Tahun 2020-2040 untuk periode Tahun 2018-2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.7**
**Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Serang**

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan | | |
| | | 1.1. Perwujudan Sistem PPK | Pusat Pelayanan Kota |
| | | 1.2. Perwujudan Sistem SPK | Sub Pusat Pelayanan Kota |
| | | 1.3. Perwujudan Sistem PL | Pusat Lingkungan |
| | | 1.4. Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Pelayanan Kota | Pusat Pelayanan Kota |
| | | 1.5. Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Sub Pusat Pelayanan | Sub Pusat Pelayanan Kota |
| | | 1.6. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota | Pusat Pelayanan Kota |
| 2 | Perwujudan Sistem Jaringan transportasi | | |
| | | 2.1. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota | Kota Serang |
| | | 2.2. Pengembangan dan Peningkatan jaringan jalan provinsi | Kota Serang |
| | | 2.3. Pengembangan dan Peningkatan jaringan jalan kota yang menjadi kewenangan kota, yaitu jalan sekunder di dalam kota | Kota Serang |
| | | 2.4. Rencana pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan | |
| | | a. Pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu Karangantu – Pulau Tunda, Karangantu – Pulau Panjang; | Karangantu – Pulau Tunda, Karangantu – Pulau Panjang |
| | | b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu | Kecamatan Kasemen |
| | | c. Pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan penyeberangan kelas III | Kecamatan Kasemen |
| | | d. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan | Kecamatan Kasemen |
| | | 2.5. Rencana pengembangan jaringan transportasi darat di Kota | |
| | | a. Pengembangan | Kecamatan Cipocok |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | interchange jalan tol | Jaya |
| | | b. Jalan Kolektor Sekunder Berupa Jalan Lingkar Kota | Kalodran – Jengkol, Bendung – Mesjid Priyayi, Mesjid Priyayi – Kasemen, Keganteran – Taman, Taman – Umbul Tengah, Umbul Tengah – Soyog, Soyog – Cilowong, Cilowong – Sayar, Sayar – Pabuaran, Palima – Andemoi – Curug, Curug – Cisangku, Ciwiru – Lipatik, Lipatik – Kalodran. |
| | | c. Pembangunan jalan baru untuk mendukung konektivitas keruangan dan perkembangan wilayah Provinsi Banten | Jalan Baru Exit Tol Boru-Cikeusal, Jalan Baru Palima Baros, Jalan Baru Lingkar Luar Selatan Serang, Jalan Baru Lingkar Dalam Selatan Serang, Jalan Baru Lingkar Luar Utara Serang |
| | | d. Pengembangan Jalan Gerbang Tol Serang Timur – KP3B | Kecamatan Cipocok, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug |
| | | e. Pengembangan simpang sebidang dan tidak sebidang dalam kota | Kota Serang |
| | | f. Rencana pembangunan dan/atau pengembangan jalan prospektif kota | Kota Serang |
| | | g. Pengembangan jaringan prasarana transportasi darat lainnya di Kota untuk mendukung konektivitas lokal maupun regional | Kota Serang |
| | | 2.6. Rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kota | |
| | | a. rencana pengembangan Pelabuhan Karangantu di Kecamatan Kasemen sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional | Kecamatan Kasemen |
| | | b. rencana pengembangan Pelabuhan Karangantu di Kecamatan Kasemen sebagai Pelabuhan Pengumpul | Kecamatan Kasemen |
| | | c. rencana pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani | Kecamatan Kasemen |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | pulaupulau kecil dan terisolir. | |
| | | 2.7. Arahan pengembangan jaringan transportasi di Kota | |
| | | a. pengembangan jaringan jalan terdiri atas prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, serta prasarana terminal penumpang jalan | Kota Serang |
| | | b. pengembangan jaringan jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas selatan, jalan lintas/tembus kabupaten, dan jalan lingkar kota dan perkotaan | Kota Serang |
| | | c. pengembangan sistem angkutan umum massal Pengembangan transportasi massal berupa kereta api lintas Ciseparang (Cilegon-Serang Pandeglang Rangkasbitung | Kota Serang |
| | | d. Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang | Kota Serang |
| | | e. Rencana pengembangan sistem angkutan massal berbasis BRT | Kota Serang |
| | | f. Rencana pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di Kota | Kota Serang |
| 3. | Perwujudan Sistem Jaringan Energi | | |
| | | 3.1. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | Kota Serang |
| | | 3.2. Pengembangan jaringan infrastruktur pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | Kota Serang |
| | | 3.3. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | Kota Serang |
| 4. | Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi | | |
| | | 4.1. Pengembangan sistem kabel, seluler, dan satelit | |
| | | 4.2. Rencana pembangunan dan/atau pengembangan pusat kendali kota (command center) | Kota Serang |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | 4.3. Rencana penempatan kamera (CCTV) di seluruh Kota dalam pemantauan kegiatan umum masyarakat | Kota Serang |
| | | 4.4. Rencana pembangunan serat optic dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota | Kota Serang |
| | | 4.5. Rencana pengembangan transmisi penyiaran | Kota Serang |
| | | 4.6. Penataan dan pengendalian menara base transceiver station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama | Kota Serang |
| 5. | Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air | | |
| | | a. Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota di Kota | |
| | | a. Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan embung, kolam retensi, dan penataan drainase | Kota Serang |
| | | b. Rencana pembangunan sistem jaringan sumber daya air dari Bendungan Sindangheula | Kota Serang |
| | | c. Penetapan zona peruntukan DAS berdasarkan tipologi sungai | Kota Serang |
| | | b. Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air dan irigasi kota | |
| | | a. Pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku dari Danau Ciwaka, Sungai Cibanten dan sungai - sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan | Danau Ciwaka, Sungai Cibanten, dan sungai lainnya |
| | | b. pengembangan rencana pemeliharaan Cekungan Air Tanah Serang - Tangerang | Cekungan Air Tanah Serang -Tangerang |
| | | c. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung | Kota Serang |
| | | d. Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cibanten | Daerah Irigasi Cibanten |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | e. Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Ciwaka Bawah | Daerah Irigasi Ciwaka Bawah |
| | | f. Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cibanten Cikarang Udik | Daerah Irigasi Cibanten Cikarang Udik |
| 6. | Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan | | |
| | | a. Sistem Penyediaan Air Minum | Kota Serang |
| | | a. pengembangan sumber daya air permukaan dan sumber air tanah yang dikembangkan dengan penyediaan air minum melalui sistem perpipaan | Kota Serang |
| | | b. Pemanfaatan dan pengelolaan air kapasitas air minum dari pihak lain | Kota Serang |
| | | c. Pemanfaatan dan pengelolaan air dari Danau Ciwaka atau Waduk Pengampelan | Kota Serang |
| | | d. Pemanfaatan sumber air baku dari air permukaan di Sungai Cibanten | Kota Serang |
| | | e. Pengembangan sumber air tanah untuk air minum dengan melakukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, serta pencegahan pencemaran pada Cekungan Air Tanah (CAT) | Kota Serang |
| | | f. Pengembangan dan peningkatan reservoir air | Kota Serang |
| | | g. Pengembangan dan peningkatan bangunan pengolah air minum | Kota Serang |
| | | h. Pengembangan terminal air untuk kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan | Kota Serang |
| | | i. Pengembangan pemanfaatan pengolahan air hujan | Kota Serang |
| | | b. Sistem Pengelolaan Air Limbah | |
| | | a. pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan | Kota Serang |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan | |
| | | b. Penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan septic tank individu pada setiap rumah | Kota Serang |
| | | c. Pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi | Kota Serang |
| | | d. Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non domestik | Kota Serang |
| | | e. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah | Kota Serang |
| | | f. Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kegiatan perdagangan dan jasa | Kota Serang |
| | | c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Kota Serang |
| | | a. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) | Kota Serang |
| | | b. pembangunan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk limbah medis dilaksanakan dengan teknologi dan metode pemrosesan | Kota Serang |
| | | c. setiap kawasan atau kegiatan industri harus memiliki lembaga internal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan | Kota Serang |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | B3 | |
| | | d. pemberian denda atau sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran bahan berbahaya dan beracun(B3) pada badan ai | Kota Serang |
| | | d. Sistem Jaringan Persampahan kota | |
| | | a. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan TPS dan TPA | Kota Serang |
| | | b. Upaya lain dalam pengelolaan persampahan di Kota | Kota Serang |
| | | c. Memanfaatkan teknik - teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan anorganik dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun yang akan dikembangkan | Kota Serang |
| | | d. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah pada TPS untuk mengurangi tumpukan | Kota Serang |
| | | e. Pengembangan Pola Pelayanan Angkutan Sampah | Kota Serang |
| | | f. Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, seperti TPS, Container, truk dan TPA | Kota Serang |
| | | g. Peningkatan teknologi pengolahan sampah pada TPA Cilowong dari open dumping menjadi sanitary landfill, sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah | TPA Cilowong |
| | | h. Pengembangan Tempat Pembungan Sampah Reduce, Reuce, Recycle (TPS3R) | Kota Serang |
| | | e. Sistem jaringan evakuasi bencana | |

| No. | Rencana Struktur Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | a. Penyediaan rambu arahan jalur evakuasi dan pengembangan prasarana jalan | a.Sepanjang Jalan Banten Lama - Pontang; b.Jalan lingkungan di kawasan utara kota; c.Jalan simpang taktakan gunung sari; d. Jalan lingkungan di kecamatan taktakan |
| | | b. Ruang Evakuasi bencana banjir dan tsunami diarahkan untuk menuju jalur evakuasi yang menuju daerah yang lebih tinggi | Seluruh kecamatan |
| | | c. Ruang evakuasi bencana gempa | Stadion Maulana Yusuf, Alun -alun Barat dan Timur, dan lahan -lahan kosong |
| | | f. Sistem drainase | Kota Serang |
| | | a. pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase Kota | Kota Serang |
| | | b. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase primer di sepanjang jalan arteri | Kota Serang |
| | | c. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor | Kota Serang |
| | | d. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase tersier di sepanjang jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan | Kota Serang |
| | | g. Sistem Jaringan Pejalan Kaki | |
| | | Penataan dan Pemeliharaan jalur pejalan kaki | Kota Serang |

**Tabel 6.8**
**Indikasi Program Pemanfaatan Pola Ruang Kota Serang**

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung | | |
| | | 1.1. Percepatan rehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami penurunan kualitas tegakan serta degradasi lahannya | Kota Serang |
| | | 1.2. penambahan kawasan lindung baru yang termasuk dalam kawasan perlindungan bawahan | Kota Serang |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | 1.3. pengendalian jenis tegakan untuk kawasan dengan fungsi perlindungan bawahan disesuaikan dengan karakter tanah dan analisa potensi ekonomi di masing-masing wilayah | Kota Serang |
| 2 | Perlindungan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | |
| | | 2.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | |
| | | a. Kawasan resapan air | Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug, serta seluruh wilayah Kota |
| | | b. rehabilitasi kawasan resapan air yang telah mengalami degradasi dengan penghijauan | Kota Serang |
| | | c. pengembangan resapan air untuk fungsi hutan | Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Cipocok Jaya |
| | | d. pengembangan rimba kota yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan | Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya. Kecamatan Taktakan |
| | | 2.2. Kawasan Perlindungan Setempat | |
| | | 2.2.1 Sempadan pantai | |
| | | a. melestarikan hutan mangrove maupun non mangrove sebagai pembentuk ekosistem dan berkembangbiak nya berbagai biota laut | Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur |
| | | b. mengembangkan sempadan pantai RTH dan/atau RTNH lainnya yang beracuan pada perairan | Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur |
| | | c. Membangun tanggul pantai | Kecamatan Kasemen |
| | | 2.2.2. Sempadan sungai | |
| | | a. Sungai menjadi muka dari orientasi bangunan | Sungai Cibanten, Kali Pembuangan banten, Ciwatu, Ciwaka, Cilaku, Cikadueun, Cigeplak, Kali Kubang, Kali Ciwatek, Kali Ciracas, Cikentang, dan Cirengas |
| | | b. Penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai yang telah terbangun secara tidak tertata | |
| | | c. Peningkatan nilai ruang visual kawasan sempadan sungai sesuai dengan struktur ruang kota | |
| | | d. Penetapan dan pengoptimalan kawasan sempadan sungai sebagai RTH dan RTNH | |
| | | 2.3. Kawasan konservasi | |
| | | a. Peningkatan fungsi cagar alam sebagai suaka marga satwa | Kecamatan Kasemen dan Walantaka |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | b. Pengelolaan kawasan cagar alam dengan perlindungan Pulau Dua, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen APBN /APB D Kementerian KLHK pada kekayaan alam dan isinya, meliputi pemeliharaan, penelitian, pendidikan, wisata, rehabilitasi kawasan, dan pengamanan segala aset | Sub-Sub Pusat Pelayanan Kota |
| | | 2.4. Kawasan rawan bencana | |
| | | a. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami | sepanjang pantai di bagian utara Kota |
| | | b. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi | Kota Serang |
| | | c. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Banjir | Kecamatan Cipocokjaya, Kecamatan Serang, dan Kecamatan Kasemen |
| | | d. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Kecamatan Taktakan, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Kasemen |
| | | e. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung | Kota Serang |
| | | f. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan | Kota Serang |
| | | g. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gagal Teknologi | Kota Serang |
| | | h. Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah | Kecamatan Taktakan |
| | | 2.5. Kawasan Cagar Budaya | |
| | | a. Pelestarian Gedung dan/atau lingkungan Cagar Budaya | a.Masjid Agung Banten Lama; b. Keraton Surosowan; c. Keraton Kaibon; d. Vihara Avalokittesvara; dan e. Benteng Speelwijk |
| | | b. Pengembangan kawasan cagar budaya untuk pariwisata dan ilmu pengetahuan | Kawasan Banten Lama |
| | | 2.6. RTH Kota | |
| | | a. Pengembangan RTH taman dan rimba Kota di seluruh kecamatan | Kota Serang |
| | | b. Penambahan RTH dari | Kota Serang |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Kawasan Industri dalam Bentuk Kerjasama di kecamatan Walantaka dan Kecamatan kasemen | |
| | | c. Penyediaan RTH Privat sampai dengan 10% di seluruh kecamatan | Kota Serang |
| | | d. Penambahan RTH dari Intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan yang termasuk ke dalam fungsi RTH di seluruh kecamatan | Kota Serang |
| | | e. Penambahan RTH dari Pembangunan dan pengembangan taman -taman skala lingkungan, kelurahan, kecamatan, hingga kota | Kota Serang |
| | | f. Penambahan RTH dari Penyediaan dan Pengembangan Hutan Rimba Kota | Kota Serang |
| | | g. Pengembangan ekowisata pada RTH di Kecamatan Kasemen | Kota Serang |
| | | h. Penambahan RTH dari Asset Kepemilikan Pemda yang tersebar di seluruh Kecamatan | Kota Serang |
| 3. | Kawasan pertanian | | |
| | | 3.1. Kawasan tanaman pangan | |
| | | Pengembangan hutan produksi tetap | Kecamatan Taktakan |
| | | 3.2. Kawasan pertanian | |
| | | a. Pengembangan sawah irigasi teknis | Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka |
| | | b. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) | Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka |
| | | c. Pengembangan kawasan lahan pertanian terpadu | Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka |
| 4. | Kawasan peruntukan industry | | |
| | | 4.1. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri | Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka |
| | | 4.2. Pengembangan sentra industri kecil menengah | Kota Serang |
| | | 4.3.Perwujudan industri kecil dan menengah | Kota Serang |
| | | 4.4. Buffering zone kawasan industi yang berbatasan dengan kawasan permukiman | Kota Serang |
| | | 4.5 Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan industri | Kota Serang |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 5. | Kawasan pariwisata | | |
| | | a. Perwujudan kawasan desa pariwisata | Kota Serang |
| | | b. Pengembangan kawasan pariwisata religi | Kecamatan Kasemen |
| | | c. pengembangan kawasan pariwisata alam | Kota Serang |
| | | d. Pelestarian gedung sejarah | Kota Serang |
| | | e. Promosi kegiatan pariwisata | Kota Serang |
| | | f. Pengembangan sarana wisata dalam kota (Wisata anak dan Wisata kuliner) | Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya |
| | | g. Pengembangan pariwisata koridor utara dengan melestarikan perairan pantai dengan memperkaya tanaman bakau/mangrove untuk mencegah abrasi mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut | Kota Serang |
| 6. | Kawasan Permukiman | | |
| | | 6.1. Kawasan perumahan | |
| | | a. Perwujudan kawasan perumahan berkelanjutan | Kota Serang |
| | | b. Pengembangan cluster perumahan | Kota Serang |
| | | c. Pengembangan kawasan perumahan vertikal | Kota Serang |
| | | d. Pembangunan dan pengembangan perumahan berbasis komunitas dan partisipatif | Kota Serang |
| | | e. Peningkatan kualitas permukiman kumuh | Kota Serang |
| | | 6.2. Kawasan perdagangan dan jasa | |
| | | a. Pengembangan Pusat Perdagangan Regional | Kecamatan SerangKecamatan Walantaka |
| | | b. Pengembangan Pusat Perdagangan Kota | Royal, Kelurahan Kota Baru, Jl. Juhdi, Jl. Veteran, Jl. Jend. Sudirman |
| | | c. Pengembangan Pusat Perdagangan lainnya | Kota Serang |
| | | d. Pengembangan kawasan perdagangan modern | Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug |
| | | 6.3 Kawasan perkantoran | |
| | | a. Pengembangan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota | Kecamatan Cipocok Jaya |
| | | b. Pengembangan dan penataan Perkantoran | Kota Serang |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | bersifat jasa, perdagangan, sosial, dan sebagainya | |
| | | c. Pengembangan dan penataan Perkantoran bersifat jasa, perdagangan, sosial, dan sebagainya | Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug |
| | | d. kawasan fungsi campuran | kelurahan panancangan kecamatan cipocok jaya |
| | | e. kawasan perkantoran yang bercampur dengan kawasan perdagangan, jasa dan fasilitas umum dan sosial | Kota Serang |
| | | 6.4. Kawasan Pendidikan | |
| | | Perwujudan Kawasan Pendidikan | Kota Serang |
| | | 6.5. kawasan transportasi | |
| | | a. Pengembangan kawasan transportasi pelabuhan | Kecamatan Kasemen |
| | | b. pengembangan pelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan wilayah | Kota Serang |
| | | 6.6. Ruang Terbuka Non Hijau | |
| | | Perwujudan RTNH | Kota Serang |
| 7 | Kawasan pertahanan dan keamanan | | |
| | | 7.1. Pengembangan Kawasan Markas Kopassus Grup I | Kecamatan Taktakan |
| | | 7.2 Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya | Kota Serang |
| 8. | Perwujudan Kawasan Strategis Kota | | |
| | | 8.1. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kota Serang | |
| | | a. Penetapan dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kota : Kawasan Perdagangan Pusat Kota | Kecamatan Serang |
| | | b. Penetapan dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kota : Kawasan Pelabuhan Karangantu | Kecamatan Kasemen |
| | | c. Penetapan dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kota : kawasan cepat tumbuh | Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug |
| | | d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | Kota Serang |

| No. | Rencana Pola Ruang | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Kota | |
| | | 8.2. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya | |
| | | Penetapan dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Kota : Kawasan Banten Lama | Kawasan Banten Lama |
| | | 8.3. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup | |
| | | Penetapan dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota : Kawasan Cagar Alam Pulau Dua | Kawasan Cagar Alam Pulau Dua |

4. Program Pembangunan Daerah Untuk Mencapai Sasaran Daerah

Adapun keseluruhan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 tercantum pada tabel berikut.

# Tabel 6.9
# Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Serang

## ViSI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya | Indek Pembangunan Manusia | | | | | | Poin | 71.68 | 72,1 | 238.405.516.482 | 72,16 | 213.699.435.650 | 72,52 | 356.798.703.508 | 72,81 | 275.239.469.848 | 73,09 | 280.080.787.533 | 73,92 | 596.462.523.079 | 73,09 | 1.364.223.913.020 | Sekretaris Daerah |
| | | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | | | | Tahun | 8,62 | 8,67 | 138.522.754.544 | 8,76 | 132.796.698.833 | 8,81 | 163.000.462.226 | 8,86 | 145.019.859.000 | 8,91 | 148.129.127.000 | 8,68 | 416.204.464.378 | 8,91 | 727.468.901.603 | Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Harapan Lama Sekolah | | | | Tahun | 12,65 | 12,77 | | 12,78 | | 12,86 | | 12,92 | | 12,98 | | 12,77 | | 12,98 | | |
| | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 138.522.754.544 | | 132.796.698.833 | | 163.000.462.226 | | 145.019.859.000 | | 148.129.127.000 | | 416.204.464.378 | | 727.468.901.603 | |
| | | | | 1 01 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat | % | 100 | 100 | 131.777.496.544 | 100 | 126.734.270.833 | 100 | 156.421.466.786 | 100 | 128.701.786.581 | 100 | 130.674.477.339 | 100 | 365.518.551.378 | 100 | 674.309.498.083 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat | % | 99,28 | 99,45 | | 99,46 | | 99,49 | | 99,56 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | Angka Partisipasi PAUD | % | 93,20 | 93,65 | | 93,66 | | 100 | | 100 | | 100 | | 93 | | 100 | | |
| | | | | | | Angka Partisipasi Kesetaraan/Pendidikan Non Formal | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 1 01 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | % | 100,00 | 100,00 | 148.240.000 | - | - | 100 | 85.700.000 | 100 | 1.494.000.000 | 100 | 1.643.400.000 | 100 | 915.765.000 | 100 | 3.371.340.000 | |
| | | | | 1 01 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Capaian rata-rata kompetensi guru | % | 45,70 | 70,00 | 6.597.018.000 | 75,00 | 6.062.428.000 | 77,25 | 6.493.295.440 | 80 | 13.585.472.419 | 83 | 14.510.719.661 | 100 | 49.770.148.000 | 83 | 47.248.933.520 | |
| | | | | 1 01 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 450.000.000 | 100 | 472.500.000 | - | - | 100 | 922.500.000 | |
| | | | | 1 01 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 788.600.000 | 100 | 828.030.000 | - | - | 100 | 1.616.630.000 | |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | | | | Tahun | 67,58 | 67,83 | 99.882.761.938 | 68,00 | 80.902.736.817 | 68,17 | 193.798.241.282 | 68,34 | 130.219.610.848 | 68,51 | 131.951.660.533 | 68,75 | 180.258.058.701 | 68,51 | 636.755.011.417 | Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 95.212.439.446 | | 77.325.819.276 | | 188.849.547.733 | | 124.107.259.848 | | 128.909.243.613 | | 172.538.258.668 | | 614.404.309.915 | |
| | | | | 1 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rasio tenaga para medis persatuan penduduk | Rasio | 0,48 | 0,39 | 280.000.000 | 0,46 | 109.928.700 | 0,47 | 6.783.265.213 | 0,48 | 5.005.000.000 | 0,49 | 5.005.000.000 | 2,22 | 389.928.700 | 0,49 | 17.183.193.913 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 0,073 | 0,05 | | 0,10 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,13 | | 0,088 | | 0,13 | | |
| | | | | 1 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan | % | - | - | - | 90,91 | 278.500.000 | 70 | 352.466.000 | 72 | 383.375.000 | 74 | 383.375.000 | 74 | 278.500.000 | 74 | 1.397.716.000 | |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Proporsi UKBM aktif | % | 66,67 | 66,67 | 307.422.000 | 66,67 | 55.125.000 | 68 | 228.439.500 | 70 | 286.458.750 | 72 | 286.458.750 | 72 | 362.547.000 | 72 | 1.163.904.000 | |
| | | | | 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi | % | 100 | 100 | 94.625.017.446 | 100 | 76.882.265.576 | 100 | 181.485.377.020 | 100 | 118.432.426.098 | 100 | 123.234.409.863 | 100 | 171.507.282.968 | 100 | 594.659.496.002 | |
| | | | | | | | | Persentase rata-rata pencapaian SPM Bidang Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentasi Ketersediaan Obat Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | Cakupan Penyediaan Mutu Pelayanan Medis, Keselamatan Pasien dan Kepuasan Pasien RSUD | % | - | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | **4.670.322.492** | | **3.576.917.541** | | **4.948.693.549** | | **6.112.351.000** | | **3.042.416.920** | | **7.719.800.033** | | **22.350.701.502** | |
| | | | | 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan data keluarga yang akurat | % | 75,00 | 80 | 434.458.000 | 82 | 173.694.111 | 83,0 | 95.195.239 | 85 | 800.000.000 | 87 | 400.000.000 | 87 | 608.152.111 | 87 | 1.903.347.350 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan Promosi KIE-KB | % | 6,00 | 68 | 3.898.875.492 | 70 | 3.116.743.430 | 75,00 | 3.811.022.310 | 80 | 4.165.121.840 | 85 | 2.398.348.420 | 85 | 6.488.178.922 | 85 | 17.390.111.492 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | | | Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB | % | 60,00 | 67 | | 70 | | 73,00 | | 75 | | 80 | | 80 | | 80 | | |
| | | | | | | | | Capaian PPM peserta KB | % | 62,00 | 66 | | 67 | | 68,00 | | 69 | | 70 | | 70 | | 70 | | |
| | | | | 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif | % | 62,00 | 72 | 336.989.000 | 75 | 286.480.000 | 76 | 1.042.476.000 | 78 | 1.147.229.160 | 80 | 244.068.500 | 75 | 623.469.000 | 80 | 3.057.242.660 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **SUB JUMLAH** | | | | | | | | | | | | **238.405.516.482** | | **213.699.435.650** | | **356.798.703.508** | | **275.239.469.848** | | **280.080.787.533** | | **596.462.523.079** | | **1.364.223.913.020** | |
| **MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah** | **Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI)** | | | | | | | | **Poin** | **NA** | **57,71** | **159.538.577.901** | **61,87** | **105.915.545.526** | **63,50** | **144.406.281.011** | **66,00** | **171.253.314.945** | **70,00** | **181.240.729.656** | **70,00** | **837.346.011.881** | **70,00** | **762.354.449.039** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah | Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah | | | | | | **%** | **68,80** | **67,55** | **159.538.577.901** | **70,09** | **105.915.545.526** | **72,21** | **144.406.281.011** | **74,83** | **171.253.314.945** | **77,14** | **181.240.729.656** | **83,00** | **837.346.011.881** | **77,14** | **762.354.449.039** | **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **102.638.661.694** | | **68.125.259.570** | | **94.239.365.069** | | **106.772.895.195** | | **112.017.549.000** | | **533.767.683.544** | | **483.793.730.528** | |
| | | | | 1 | 03 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | - | 80 | 2.375.000.000 | 83 | 1.915.002.000 | 86 | 2.619.928.173 | 89 | 3.740.300.400 | 92 | 4.214.330.440 | 92 | 17.282.629.840 | 92 | 14.864.561.013 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 1 | 03 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Cakupan Layanan Air Bersih | % | 37,52 | 38,95 | 4.488.354.120 | 39,01 | 577.059.700 | 39,26 | 2.335.311.000 | 39,57 | 510.000.000 | 39,86 | 1.726.130.000 | 71,00 | 9.525.714.820 | 39,86 | 9.636.854.820 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 1 | 03 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Presentase Rumah Tangga Bersanitasi | % | 72,60 | 79,27 | 2.989.974.510 | 79,28 | 830.642.300 | 79,29 | 4.249.481.000 | 79,30 | 3.100.080.650 | 79,31 | 3.310.088.715 | 75,00 | 14.480.267.175 | 79,31 | 14.480.267.175 | |
| | | | | 1 | 03 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Prosentase Saluran Drainase/Goron-gorong dalam kondisi baik | % | - | 57 | 2.979.562.793 | 60 | 8.805.005.600 | 63 | 7.195.778.190 | 69 | 5.245.000.000 | 72 | 5.659.500.000 | 72 | 31.083.503.881 | 72 | 29.884.846.583 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 1 | 03 | 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung pemeintah dalam kondisi baik | % | - | 50 | 12.032.403.850 | 55 | 9.736.668.950 | 60 | 19.380.499.070 | 65 | 28.631.269.112 | 70 | 23.345.359.000 | 70 | 124.441.352.850 | 70 | 93.126.199.982 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 1 03 9 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Presentase Penataan Bangunan Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik | % | - | 50 | 973.434.000 | 55 | 1.049.526.000 | 60 | 4.799.555.000 | 65 | 20.457.000.000 | 70 | 21.552.700.000 | 70 | 31.907.200.000 | 70 | 48.832.215.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 1 03 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Presentase Jalan dalam Kondisi Baik | % | - | 67 | 75.649.932.422 | 70 | 44.408.301.570 | 73 | 51.997.385.955 | 76 | 43.013.765.033 | 79 | 50.097.212.845 | 79 | 297.118.539.286 | 79 | 265.166.597.825 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | % | - | 70 | | 73 | | 76 | | 79 | | 82 | | 82 | | 82 | | |
| | | | | 1 03 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Capaian Pembinaan Jasa Kontruksi | % | - | 70 | 200.000.000 | 75 | 288.000.000 | 80 | 373.510.000 | 85 | 348.480.000 | 90 | 383.328.000 | 90 | 1.536.608.000 | 90 | 1.593.318.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 1 03 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pemanfaatan ruang | % | 50 | 50 | 950.000.000 | 100 | 515.053.450 | 100 | 1.287.916.681 | 100 | 1.727.000.000 | 100 | 1.728.900.000 | 100 | 6.391.867.693 | 100 | 6.208.870.131 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang | % | 55 | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 59 | | 59 | | |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **38.019.715.709** | | **22.590.249.252** | | **29.347.176.561** | | **40.900.261.000** | | **42.558.777.000** | | **198.786.118.741** | | **173.416.179.522** | |
| | | | | 01 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Cakupan hunian terhadap daya tampung rusunawa | % | - | - | 13.530.390.016 | - | 926.276.695 | 52,08 | 1.608.864.063 | 62,50 | 2.857.000.000 | 72,92 | 3.200.000.000 | 0,80 | 12.814.146.195 | 72,92 | 22.122.530.774 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | Presentase rumah yang diperbaiki akibat bencana | % | - | - | | - | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 89,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 01 04 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh | % | 3,12 | 13,30 | 11.915.237.677 | 13,28 | 13.717.574.135 | 13,25 | 14.607.101.950 | 13,20 | 10.838.900.000 | 13,20 | 12.696.437.900 | 2,20 | 108.223.415.472 | 13,20 | 63.775.251.662 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | Presentase panjang jalan lingkungan permukiman kondisi baik | % | 39,52 | 40,48 | | 40,50 | | 40,75 | | 41,00 | | 41,25 | | 44,21 | | 41,25 | | |
| | | | | | | Presentase panjang drainasse lingkungan kondisi baik | % | 67,63 | 67,70 | | 67,90 | | 70,10 | | 70,30 | | 70,50 | | 13,20 | | 70,50 | | |
| | | | | 01 04 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rtlh di luar kawasan kumuh | % | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12.061.361.000 | 12 | 10.303.562.100 | - | - | 12 | 22.364.923.100 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | 01 04 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Presentase psu yang diserahkan | % | 19,49 | 24,62 | 12.574.088.016 | 28,72 | 7.946.398.422 | 30,35 | 13.131.210.548 | 32,84 | 15.143.000.000 | 35,23 | 16.358.777.000 | 36,00 | 77.748.557.074 | 35,23 | 65.153.473.986 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **518.448.000** | | **1.023.962.000** | | **3.842.110.000** | | **1.601.500.000** | | **1.705.597.000** | | **4.826.900.000** | | **8.691.617.000** | |
| | | | | 2 10 04 | PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN | Presentase fasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah | % | - | - | | - | - | 100,00 | 95.035.000 | 100,00 | 181.500.000 | 100,00 | 216.199.000 | | - | 100,00 | 492.734.000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 2 10 08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Presentase peningkatan pengelolaan tanah kosong | % | - | - | | - | - | 33,30 | 196.671.000 | 33,30 | 165.000.000 | 33,30 | 182.349.500 | | - | 33,30 | 544.020.500 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 02 10 09 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Presentase peningkatan penggunaan tanah negara | % | - | 40 | 518.448.000 | 50 | 1.023.962.000 | 100,00 | 3.550.404.000 | 100,00 | 805.000.000 | 100,00 | 822.349.500 | 100,00 | 4.826.900.000 | 100,00 | 6.720.163.500 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | 2 10 10 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase pengelolaan tanah negara yang dimanfaaatkan | % | - | - | | - | | 0,00 | - | 100,00 | 450.000.000 | 100,00 | 484.699.000 | | | 100,00 | 934.699.000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA** | | | | | | **3.036.977.854** | | **2.392.665.542** | | **4.315.801.750** | | **4.418.658.750** | | **5.958.806.656** | | **5.429.643.396** | | **20.122.910.552** | |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 2 | 16 | 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase OPD yang mengimplementasikan Layanan E-Governent | % | 70 | 100 | 3.036.977.854 | 100 | 2.392.665.542 | 100 | 4.315.801.750 | 100 | 4.418.658.750 | 100 | 5.958.806.656 | 100 | 5.429.643.396 | 100 | 20.122.910.552 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | **15.324.774.644** | | **11.783.409.162** | | **12.661.827.631** | | **17.560.000.000** | | **19.000.000.000** | | **94.535.666.200** | | **76.330.011.437** | |
| | | | | 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Cakupak kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor | % | 60 | 60 | 14.719.641.269 | 65 | 11.741.502.662 | **68** | 12.577.039.440 | 70 | 17.439.000.000 | 72 | 18.849.000.000 | 75 | 93.602.086.200 | 72 | 75.326.183.371 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan | **%** | **65** | **50** | | **65** | 68 | | **70** | | **75** | | **75** | | **75** | | |
| | | | | | | | | Capaian Pengendalian Potensi Titik Kemacetan | **%** | **60** | **62** | | **64** | 66 | | **68** | | **70** | | **78** | | **70** | | |
| | | | | | | | | Capaian Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kondisi Baik | % | **75** | **60** | | **62** | 65 | | **68** | | **70** | | **70** | | **70** | | |
| | | | | 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Capaian Pembangunan Kepelabuhan Penumpang Lokal | % | 60 | 60 | 605.133.375 | 61 | 41.906.500 | 62 | 84.788.191 | 63 | 121.000.000 | 64 | 151.000.000 | 60 | 933.580.000 | 64 | 1.003.828.066 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | Capaian penyelenggaraan ASDP | % | 60 | 60 | | 61 | 62 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | |
| **Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan** | **Indeks kualitas lingkungan hidup** | | | | | | | | **Poin** | **47,35** | **47,35** | **42.407.763.568** | **54,34** | **50.705.332.090** | **47,63** | **66.836.841.219** | **47,68** | **53.216.472.405** | **47,79** | **57.386.593.589** | **51,3** | **283.398.395.707** | **47,79** | **270.553.002.871** | **Sekretaris Daerah** |
| | | Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Penanganan Timbunan Sampah | | | | | | **%** | **51,92** | **55,58** | **33.396.515.907** | **61,6** | **31.515.443.925** | **70** | **50.077.677.682** | **75** | **34.009.691.216** | **80** | **37.781.172.000** | **75** | **184.533.271.100** | **80** | **186.780.500.730** | **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **33.396.515.907** | | **31.515.443.925** | | **50.077.677.682** | | **34.009.691.216** | | **37.781.172.000** | | **184.533.271.100** | | **186.780.500.730** | |
| | | | | 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah | % | 20,00 | 20,00 | 287.349.000 | 40,00 | 272.995.176 | 60,00 | 575.966.500 | 80,00 | 135.800.816 | 100,00 | 142.807.500 | 100,00 | 1.092.500.000 | 100,00 | 1.414.918.992 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | % | 65,25 | 66,37 | 1.413.258.000 | 75,00 | 1.695.000.981 | 70,00 | 813.818.970 | 70,00 | 988.122.000 | 72,00 | 1.094.775.000 | 85,00 | 3.260.000.000 | 72,00 | 6.004.974.951 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Capaian Pengendalian Limbah B3 | % | 20,00 | 20,00 | 98.012.981 | 0,00 | - | 24,00 | 114.620.292 | 26,00 | 89.020.000 | 27,00 | 99.525.000 | 27,00 | 605.000.000 | 27,00 | 401.178.273 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Capaian Penaatan Lingkungan | % | 20,00 | 20,00 | 149.075.000 | 40,00 | 25.000.000 | - | - | 80,00 | 66.765.000 | 100,00 | 79.620.000 | 100,00 | 662.500.000 | 100,00 | 320.460.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian Pengurangan Sampah | % | 2,00 | 4,00 | 545.811.060 | 6,10 | 28.250.000 | 24,00 | 129.948.564 | 26,00 | 267.060.000 | 27,00 | **258.765.000** | 72,00 | 3.340.000.000 | 27,00 | 1.229.834.624 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup | % | 20,00 | 20,00 | 173.539.800 | 40,00 | 15.413.000 | 60,00 | 150.419.328 | 80,00 | 142.432.000 | 100,00 | 139.335.000 | 100,00 | 1.017.500.000 | 100,00 | 621.139.128 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Capaian Penanganan Sampah | % | 50,00 | 51,92 | 30.729.470.066 | 61,62 | 29.478.784.768 | 74,00 | 48.292.904.028 | 73,00 | 32.320.491.400 | 72,00 | 35.966.344.500 | 72,00 | 174.555.771.100 | 72,00 | 176.787.994.762 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Ketersediaan RTH | | | | | | **%** | **1,2** | **2,98** | **5.354.014.975** | **3,43** | **15.557.824.812** | **3,45** | **11.960.642.665** | **3,5** | **12.007.636.289** | **4,05** | **11.813.668.855** | **2,05** | **70.717.186.773** | **4,05** | **56.693.787.596** | **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **5.354.014.975** | | **15.557.824.812** | | **11.960.642.665** | | **12.007.636.289** | | **11.813.668.855** | | **70.717.186.773** | | **56.693.787.596** | |
| | | | | 2 11 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI/KEHATI | Realisasi RuangTerbuka Hijau yang Terpelihara | % | 1,50 | 9,63 | 5.354.014.975 | 9,64 | 15.557.824.812 | 3,45 | 11.960.642.665 | 1,70 | 12.007.636.289 | 1,80 | 11.813.668.855 | 1,66 | 70.717.186.773 | 1,80 | 56.693.787.596 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | Indeks Risiko Bencana | | | | **Poin** | **150** | **140** | **3.657.232.686** | **130** | **3.632.063.353** | **120** | **4.798.520.872** | **110** | **7.199.144.900** | **100** | **7.791.752.734** | **100** | **28.147.937.834** | **100** | **27.078.714.545** | **Sekretaris Daerah** |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | **3.657.232.686** | | **3.632.063.353** | | **4.798.520.872** | | **7.199.144.900** | | **7.791.752.734** | | **28.147.937.834** | | **27.078.714.545** | |
| | | | | 1 05 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Prosentase penanganan darurat bencana | % | 72,16 | 72,16 | 1.330.053.100 | 72,16 | 1.371.180.000 | 100,00 | 1.914.986.822 | 100,00 | 2.200.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | 100 | 9.490.731.922 | 100,00 | 9.316.219.922 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | Persentase Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | |
| | | | | | | Capaian tingkat resiko bencana | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | |
| | | | | 1 05 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | % | 100 | 100 | 2.327.179.586 | 100 | 2.260.883.353 | 79,38 | 2.883.534.050 | 87,31 | 4.999.144.900 | 96,04 | 5.291.752.734 | 100 | 18.657.205.912 | 96,04 | 17.762.494.623 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| **SUB JUMLAH** | | | | | | | | | | **201.946.341.469** | | **156.620.877.616** | | **211.243.122.230** | | **224.469.787.350** | | **238.627.323.245** | | **1.120.744.407.588** | | **1.032.907.451.910** | |
| MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | | **%** | 6,59 | 6,2 | **30.637.600.255** | -1,29 | **22.561.986.850** | 5,00 | **25.046.969.040** | **5,25** | **47.943.413.700** | **5,5** | **49.884.342.125** | **6,91** | **162.587.928.389** | **5,5** | **176.074.311.970** | **Sekretaris Daerah** |
| | | Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat | Tingkat inflasi daerah | | | | % | 3.78 | 3,06 | **30.637.600.255** | 1,91 | **22.561.986.850** | 3-5 | **25.046.969.040** | 3-5 | **47.943.413.700** | 3-5 | **49.884.342.125** | 3-5 | **162.587.928.389** | 3-5 | **176.074.311.970** | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| | | | Indeks daya beli | | | | Poin | 78,76 | 79,12 | | 78,65 | | 79,08 | | 79,54 | | 79,98 | | 83,61 | | 79,98 | | |
| | | | PDRB per kapita | | | | Juta Rp | 42,76 | 45,89 | | 45,17 | | 46,99 | | 49,14 | | 51,67 | | 52,5 | | 51,67 | | |
| | | | Angka Kemiskinan | | | | % | 5,36 | 5,28 | | 6,06 | | 5,96 | | 5,86 | | 5,76 | | 4,86 | | 5,76 | | |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | % | 8,16 | 8,08 | | 9,26 | | 9,16 | | 9,06 | | 8,96 | | 7,93 | | 8,96 | | |
| | | | Indeks Gini | | | | Poin | NA | 0,342 | | 0,352 | | 0,35 | | 0,348 | | 0,346 | | NA | | 0,346 | | |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **628.119.000** | | **397.094.300** | | **1.031.836.332** | | **2.153.000.000** | | **1.281.195.000** | | **7.829.478.850** | | **5.491.244.632** | |
| | | | | 2 17 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI | Capaian koperasi yang aktif | % | 48,53 | 36,17 | 99.798.000 | 35,42 | 11.000.000 | 36,24 | 80.000.000 | 37,06 | 88.000.000 | 37,87 | 96.800.000 | 53,87 | 581.125.000 | 37,87 | 375.598.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 2 17 5 | PROGRAM DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang dibina | % | 48,00 | 56,00 | 288.295.000 | 43,60 | 49.834.000 | 57,22 | 401.681.332 | 59,59 | 567.271.500 | 62,67 | 581.893.650 | 25,53 | 2.094.721.100 | 62,67 | 1.888.975.482 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 2 17 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi Yang Berdaya | % | 10,00 | 12,00 | 73.120.000 | - | - | | | 42 | 182.500.000 | 60 | 90.750.000 | - | 840.765.000 | 60 | 346.370.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 2 17 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN | Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha | % | 1,03 | 1,46 | 72.192.000 | 1,85 | 187.855.300 | 2,19 | 285.905.000 | 2,49 | 524.553.500 | 2,75 | 192.008.850 | 0,79 | 2.820.567.750 | 2,75 | 1.262.514.650 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN |
| | | | | 2 | 17 | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha mikro yang dibina | % | 7,48 | 7,53 | 94.714.000 | 7,54 | 148.405.000 | 7,59 | 264.250.000 | 7,60 | 790.675.000 | 7,64 | 319.742.500 | 7,54 | 1.492.300.000 | 7,64 | 1.617.786.500 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | **7.306.236.074** | | **3.352.498.300** | | **4.108.671.305** | | **8.350.000.000** | | **9.000.000.000** | | **48.828.759.680** | | **32.117.405.679** | |
| | | | | 3 | 30 | 2 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Distributor Bahan Berbahaya Terdaftar | % | 100,00 | 20,00 | 20.000.000 | 40 | 32.530.000 | | - | 80,00 | 35.783.000 | 100 | 39.361.300 | - | 52.530.000 | 100 | 127.674.300 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional | % | 22,22 | 33,33 | 5.472.171.000 | 50,00 | 2.375.150.940 | 60,00 | 2.981.081.635 | 70,00 | 5.457.297.558 | 80,00 | 6.246.907.735 | 100,00 | 35.335.273.720 | 80,00 | 22.532.608.868 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 3 | 30 | 4 | PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Barang Pokok dan barang penting | % | 25,00 | 25,00 | 1.228.937.600 | 25 | 685.798.360 | 25 | 367.032.920 | 30 | 1.088.804.212 | 30 | 988.804.212 | 56,39 | 1.914.735.960 | 30 | 4.359.377.304 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 3 | 30 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Capaian Pembinaan Potensi Ekspor | Perusahaan | 1,00 | 1 | 304.158.500 | 1 | 116.130.000 | 1 | 516.567.750 | 1 | 1.454.454.080 | 1 | 1.379.899.488 | 2 | 10.355.200.000 | 5 | 3.771.209.818 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | 3 | 30 | 6 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Capaian penyelesaian sengketa konsumen | % | 100,00 | 100,00 | 280.968.974 | 100 | 142.889.000 | 100 | 243.989.000 | 100 | 313.661.150 | 100 | 345.027.265 | 100 | 1.171.020.000 | 100 | 1.326.535.389 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | **443.506.000** | | **6.113.777.480** | | **475.612.060** | | **1.000.000.000** | | **1.065.000.000** | | **6.557.283.480** | | **9.097.895.540** | |
| | | | | 3 | 31 | 2 | PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM | % | - | 2,48 | 443.506.000 | 3,47 | 6.113.777.480 | 4,46 | 475.612.060 | 5,45 | 1.000.000.000 | 6,44 | 1.065.000.000 | 6,44 | 6.557.283.480 | 6,44 | 9.097.895.540 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | **1.025.790.000** | | **578.127.000** | | **1.593.040.111** | | **2.031.500.000** | | **2.078.347.000** | | **5.850.395.346** | | **7.306.804.111** | |
| | | | | 2 | 09 | 2 | PROGRAM PENGOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Capaian Penguatan Cadangan Pangan | % | 20,87 | 24,49 | 145.960.000 | 29,07 | 247.400.000 | 34,88 | 576.220.000 | 42,29 | 248.250.000 | 51,77 | 273.075.000 | 51,77 | 501.000.000 | 51,77 | 1.490.905.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | 2 | 09 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian Skor PPH Konsumsi | % | 81,90 | 83,54 | 726.825.000 | 85,21 | 234.937.000 | 86,91 | 899.048.111 | 88,65 | 1.319.048.000 | 90,42 | 1.294.649.800 | 90,42 | 3.705.529.673 | 90,42 | 4.474.507.911 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | 2 | 09 | 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Capaian penanganan lokasi rentan atau rawan pangan (SKPG) | % | 10 | 15 | 112.415.000 | 15 | 93.790.000 | 20 | 86.322.000 | 20 | 372.452.000 | 20 | 409.697.200 | 20 | 1.600.865.673 | 20 | 1.074.676.200 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | 2 | 09 | 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Capaian pengelolaan keamanan pangan segar | % | 20 | 73,67 | 40.590.000 | 68,50 | 2.000.000 | 69,00 | 31.450.000 | 69,05 | 91.750.000 | 70,00 | 100.925.000 | 20 | 43.000.000 | 70,00 | 266.715.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **551.206.000** | | **361.452.100** | | **1.048.699.624** | | **875.000.000** | | **852.000.000** | | **5.860.740.000** | | **3.688.357.724** | |
| | | | | 3 | 25 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 10 | 10 | 97.100.000 | 10 | 154.483.100 | 10 | 761.375.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 1.986.207.500 | 50 | 1.352.958.100 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 3 25 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya | % | 10 | 10 | 208.600.000 | 10 | 141.381.000 | 10 | 200.824.624 | 10 | 375.000.000 | 10 | 352.000.000 | 10 | 2.348.257.500 | 50 | 1.277.805.624 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | 3 25 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan | % | 20 | 20 | 245.506.000 | 20 | 65.588.000 | 10 | 86.500.000 | 20 | 330.000.000 | 20 | 330.000.000 | 20 | 1.526.275.000 | 100 | 1.057.594.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **3.360.567.981** | | **1.642.502.200** | | **3.457.314.543** | | **2.945.000.000** | | **3.035.250.000** | | **23.778.853.706** | | **14.440.634.724** | |
| | | | | 3 27 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Capaian Produktivitas Padi | Ton/ Ha | 5,36 | 5,49 | 1.002.113.776 | 5,53 | 670.728.200 | 6,30 | 988.498.283 | 6,10 | 1.193.220.000 | 6,22 | 1.200.000.000 | 7,0 | 8.054.416.206 | 6,22 | 5.054.560.259 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) | % | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | | |
| | | | | | | Capaian Peningkatan Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) | Kg | 139.518 | 152.400 | | 142.322 | | 143.745 | | 145.183 | | 146.634 | | 148.085 | | 146.634 | | |
| | | | | 3 27 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Capaian Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan (padi) | Ton | 60.375 | 80.041 | 1.709.515.482 | 63.979 | 581.694.000 | 86.823 | 1.756.020.000 | 93,386 | 290.000.000 | 95,253 | 290.000.000 | 69.839 | 9.422.390.000 | 95,253 | 4.627.229.482 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | Capaian hasil produksi pertanian tamanan Hortikultura (cabe) | ton | - | 3 | | 2,41 | | 3 | | 3,1 | | 3,3 | | - | | 3,3 | | |
| | | | | 3 27 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Capaian penanganan kasus penyakit hewan | % | 100 | 100 | 403.560.223 | 100 | 246.213.500 | 100 | 354.790.378 | 100 | 646.780.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 3.347.010.440 | 100 | 2.351.344.101 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | Presentase peningkatan produksi hasil olahan peternakan | % | 1 | 1,04 | | 4,88 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 9 | | |
| | | | | | | Capaian produksi hasil olahan peternakan | Kg | 448 | 469 | | 223.010 | | 225.240 | | 227.492 | | 229.767 | | 471 | | 229.767 | | |
| | | | | 3 27 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Presentase Penanggulangan Bencana Pertanian | % | 20 | 20 | 245.378.500 | 5 | 117.706.500 | 5 | 173.640.000 | 5 | 265.000.000 | 5 | 280.000.000 | 5 | 2.722.987.000 | 40 | 1.081.725.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | 3 27 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Pertanian Terbina | % | - | - | | 6 | 26.160.000 | 25 | 184.365.882 | 25 | 550.000.000 | 25 | 565.250.000 | 10 | 232.050.060 | 25 | 1.325.775.882 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **2.809.342.900** | | **1.631.152.500** | | **1.142.234.750** | | **9.003.305.000** | | **10.859.782.000** | | **9.393.764.150** | | **25.445.817.150** | |
| | | | | 3 26 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB) | % | 33 | 33 | 954.160.000 | 34 | 739.792.000 | 35 | 715.986.750 | 50 | 3.008.147.000 | 60 | 3.775.410.000 | 35 | 4.823.924.750 | 60 | 9.193.495.750 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | 3 26 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata | % | 100 | 100 | 937.508.700 | 100 | 434.215.000 | 100 | 244.155.000 | 100 | 771.853.000 | 100 | 901.372.000 | 100 | 2.122.926.700 | 100 | 3.289.103.700 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | 3 26 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Prosentase Wirausaha Ekraf Yang Difasilitasi Sampai Memiliki HKI | % | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4.703.305.000 | 70 | 5.613.000.000 | - | - | 70 | 10.316.305.000 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | 3 26 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Usaha Baru Ekraf | Usaha | 50 | 50 | 917.674.200 | 50 | 457.145.500 | 50 | 182.093.000 | 100 | 520.000.000 | 150 | 570.000.000 | 50 | 2.446.912.700 | 450 | 2.646.912.700 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **890.742.700** | | **945.161.500** | | **974.784.189** | | **1.405.508.000** | | **1.560.791.800** | | **5.381.916.000** | | **5.776.988.189** | |
| | | | | 2 18 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN | Capaian Pengembangan Kawasan Investasi | Zona/Lokasi | 3 | 2 | 307.562.500 | 2 | 488.393.500 | 1 | 199.175.000 | 2 | 440.000.000 | 2 | 487.476.900 | 10 | 2.228.361.500 | 9 | 1.922.607.900 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERPADU SATU PINTU |
| | | | | 2 | 18 | 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Realisasi PMDN/PMA | Investor | 75 | 814 | 346.360.000 | 671 | 304.193.000 | 1.191 | 170.993.172 | 1.291 | 510.000.000 | 1.391 | 563.550.000 | 1.391 | 1.779.907.000 | 1.391 | 1.895.096.172 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | 2 | 18 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Capaian Kualitas dan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalan Rangka Pelaksanakan Kegiatan Penanaman Modal | % | - | 20 | 236.820.200 | 50 | 152.575.000 | 70 | 604.616.017 | 80 | 455.508.000 | 100 | 509.764.900 | 70 | 1.373.647.500 | 100 | 1.959.284.117 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | **5.452.817.500** | | **1.434.380.000** | | **1.383.617.192** | | **3.900.000.000** | | **3.358.220.775** | | **6.887.197.500** | | **15.529.035.467** | |
| | | | | 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Capaian LPM Kategori Aktif | % | 100 | 100 | 5.452.817.500 | 100 | 1.434.380.000 | 100 | 1.383.617.192 | 100 | 3.900.000.000 | 100 | 3.358.220.775 | | 6.887.197.500 | 100 | 15.529.035.467 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | **5.755.050.600** | | **5.090.876.020** | | **8.027.794.000** | | **10.960.100.700** | | **11.276.255.550** | | **24.039.557.627** | | **41.110.076.870** | |
| | | | | 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Realisasi PSKS yang mendapat pembinaan | % | 90 | 100 | 160.375.000 | 100 | 134.560.000 | 100 | 268.345.000 | 100 | 294.020.000 | 100 | 294.020.000 | 90 | 876.500.176 | 100 | 1.151.320.000 | DINAS SOSIAL |
| | | | | 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 1.471.783.600 | 100 | 1.205.619.400 | 100 | 648.750.500 | 100 | 2.436.217.700 | 100 | 2.436.217.700 | 100 | 5.383.209.818 | 100 | 8.198.588.900 | DINAS SOSIAL |
| | | | | 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Realisasi jaminan sosial daerah terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani | % | 100 | 100 | 3.796.035.000 | 100 | 3.430.164.000 | 90 | 3.038.656.500 | 90 | 7.222.263.000 | 90 | 7.248.417.850 | 100 | 12.052.815.611 | 90 | 24.735.536.350 | DINAS SOSIAL |
| | | | | 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Realisasi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial yang ditangani | % | 100 | 100 | 296.900.000 | 100 | 287.374.820 | 90 | 4.037.832.000 | 90 | 919.600.000 | 90 | 1.209.600.000 | 100 | 5.541.707.208 | 90 | 6.751.306.820 | DINAS SOSIAL |
| | | | | 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Realisasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % | 100 | 100 | 29.957.000 | 100 | 33.157.800 | 100 | 34.210.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 185.324.814 | 100 | 273.324.800 | DINAS SOSIAL |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | **2.414.221.500** | | **1.014.965.450** | | **1.803.364.934** | | **5.320.000.000** | | **5.517.500.000** | | **18.179.982.050** | | **16.070.051.884** | |
| | | | | 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | % | 50 | 61,45 | 1.072.701.500 | 65 | 538.201.600 | 66 | 824.731.500 | 68 | 2.978.851.000 | 70 | 2.989.351.000 | 70 | 6.987.202.000 | 70 | 8.403.836.600 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Capaian Pencari kerja yang ditempatkan | % | 4,17 | 8,82 | 772.970.000 | 7,35 | 252.378.600 | 7,5 | 740.403.434 | 7,5 | 1.582.680.000 | 7,52 | 1.676.680.000 | 5,33 | 5.551.130.000 | 7,75 | 5.025.112.034 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan | % | 30 | 30 | 568.550.000 | 35 | 224.385.250 | 40 | 238.230.000 | 45 | 758.469.000 | 50 | 851.469.000 | 50 | 5.641.650.050 | 50 | 2.641.103.250 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| **SUB JUMLAH** | | | | | | | | | | | | **30.637.600.255** | | **22.561.986.850** | | **25.046.969.040** | | **47.943.413.700** | | **49.884.342.125** | | **162.587.928.389** | | **176.074.311.970** | |
| MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi | Indeks Reformasi Birokrasi Daerah | | | | | | | | Poin | 56,23 | 59,14 | **845.032.609.563** | 58,30 | **914.454.712.848** | 60,50 | **917.174.548.157** | 61,00 | **983.699.129.503** | 61,50 | **1.018.705.163.489** | 80,00 | **2.263.744.209.643** | 61,50 | **4.689.569.339.387** | **Sekretaris Daerah** |
| | | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan | Indeks kepuasan masyarakat (SKM) | | | | | | poin | 72,00 | 77,80 | **845.032.609.563** | 77,74 | **914.454.712.848** | 78,00 | **917.174.548.157** | 79,00 | **983.699.129.503** | 81,00 | **1.018.705.163.489** | 81,00 | **2.263.744.209.643** | 81,00 | **4.689.569.339.387** | **Asisten Administrasi Umum** |
| | | | Nilai LPPD Kota | | | | | | poin | 32.346 | 34.365 | | 34.426 | | 34.500 | | 34.550 | | 34.600 | | Sangat Tinggi | | 34.600 | | **Asisten Administrasi Umum** |
| | | | Hasil Evaluasi AKIP | | | | | | Poin | 52,31 | 54,64 | | 55,33 | | 61,00 | | 62,00 | | 63,00 | | BB | | 63,00 | | **Asisten Administrasi Umum** |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | pemerintahan daerah | Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | | | | Kategori | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | Asisten Administrasi Umum |
| | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **19.026.381.125** | | **18.699.316.541** | | **19.058.148.918** | | **20.735.000.000** | | **22.082.775.000** | | **29.905.237.160** | | **99.601.621.584** | |
| | | | | 4 01 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan | % | 100,00 | 100,00 | 17.875.879.467 | 100 | 17.080.292.947 | 100 | 16.273.286.746 | 100 | 17.587.269.128 | 100 | 18.287.250.125 | 100 | 27.135.711.908 | 100 | 87.103.978.413 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | 4 01 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian | % | 100,00 | 100,00 | 1.150.501.658 | 100 | 1.619.023.594 | 100 | 2.784.862.172 | 100 | 3.147.730.872 | 100 | 3.795.524.875 | 100 | 2.769.525.252 | 100 | 12.497.643.171 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH** | | | | | | **693.137.539.457** | | **745.358.814.400** | | **766.845.331.018** | | **807.759.899.209** | | **832.537.176.657** | | **1.331.115.062.253** | | **3.856.141.936.569** | |
| | | | | x 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | % | 100,00 | 100,00 | 693.137.539.457 | 100,00 | 745.358.814.400 | 100,00 | 766.845.331.018 | 100,00 | 807.759.899.209 | 100,00 | 832.537.176.657 | 100,00 | 1.331.115.062.253 | 100,00 | 3.856.141.936.569 | SELURUH OPD KOTA SERANG |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA** | | | | | | **1.609.490.577** | | **3.340.824.000** | | **1.961.284.000** | | **2.081.341.250** | | **2.625.446.902** | | **4.950.314.577** | | **11.618.386.729** | |
| | | | | 2 16 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Capaian Penyebarluasan Informasi Publik | % | 78 | 100 | 1.609.490.577 | 100 | 3.340.824.000 | 100 | 1.961.284.000 | 100 | 2.081.341.250 | 100 | 2.625.446.902 | 100 | 4.950.314.577 | 100 | 11.618.386.729 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **588.157.432** | | **494.950.000** | | **527.567.000** | | **650.000.000** | | **920.311.134** | | **1.083.107.432** | | **3.180.985.566** | |
| | | | | 2 20 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase OPD yang Menyelenggarakan Kegiatan Statistik Sektoral | % | - | 60 | 588.157.432 | 70 | 494.950.000 | 75 | 527.567.000 | 80 | 650.000.000 | 85 | 920.311.134 | 70 | 1.083.107.432 | 85 | 3.180.985.566 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **139.854.357** | | **113.570.000** | | **42.160.000** | | **140.000.000** | | **158.488.825** | | **253.424.357** | | **594.073.182** | |
| | | | | 2 21 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Capaian Pengamanan Informasi Satu Pintu | % | - | 10 | 139.854.357 | 20 | 113.570.000 | 30 | 42.160.000 | 40 | 140.000.000 | 50 | 158.488.825 | 50 | 253.424.357 | 50 | 594.073.182 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **2.010.512.091** | | **912.804.500** | | **1.875.913.000** | | **4.195.110.000** | | **4.467.792.000** | | **18.929.145.750** | | **13.462.131.591** | |
| | | | | 2 12 2 | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | % | 61,00 | 63,00 | 357.952.473 | 66,00 | 148.361.000 | 99,00 | 296.540.000 | 99,50 | 755.119.800 | 99,80 | 804.202.560 | 72,00 | 3.663.060.000 | 99,80 | 2.362.175.833 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | 2 12 3 | Program pencatatan sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | % | 33,75 | 30,00 | 300.000.000 | 32,00 | 150.000.000 | 43,00 | 352.000.000 | 44,00 | 1.048.777.500 | 45,00 | 1.161.625.920 | 55,00 | 3.883.883.000 | 45,00 | 3.012.403.420 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | 2 12 4 | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan | % | 6,67 | 6,67 | 1.003.111.500 | 13,33 | 484.901.000 | 60,00 | 999.624.000 | 61,00 | 2.055.603.900 | 62,00 | 2.144.540.160 | 33,33 | 8.909.637.750 | 62,00 | 6.687.780.560 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | 2 12 5 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase informasi data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia | % | 100,00 | 100,00 | 349.448.118 | 100,00 | 129.542.500 | 100,00 | 227.749.000 | 100,00 | 335.608.800 | 100,00 | 357.423.360 | 100,00 | 2.472.565.000 | 100,00 | 1.399.771.778 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **434.114.244** | | **821.247.931** | | **882.435.305** | | **1.217.462.000** | | **1.339.208.200** | | **5.302.009.900** | | **4.694.467.680** | |
| | | | | 2 18 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | % | 75,55 | 100,00 | 100.749.000 | 100,00 | 314.888.000 | 100,00 | 457.435.570 | 100,00 | 635.000.000 | 100,00 | 698.500.000 | 100,00 | 2.707.342.400 | 100,00 | 2.206.572.570 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | 2 18 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Terintegrasi | Ijin | 100,00 | 65,00 | 333.365.244 | 86,00 | 506.359.931 | 108,00 | 424.999.735 | 130,00 | 582.462.000 | 152,00 | 640.708.200 | 109,00 | 2.594.667.500 | 152,00 | 2.487.895.110 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **524.537.000** | | **1.259.876.000** | | **599.631.755** | | **2.407.482.430** | | **1.761.265.540** | | **1.118.578.000** | | **6.552.792.725** | |
| | | | | 2 24 2 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase pengelolaan arsip statis dan dinamis | % | 70 | 70 | 149.224.000 | 85 | 391.590.000 | 90 | 260.541.500 | 95 | 1.809.400.750 | 100 | 1.206.464.740 | 85 | 921.462.000 | 100 | 3.817.220.990 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | 2 24 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN | Capaian arsip yang terselamatkan | % | - | 30 | 375.313.000 | 35 | 868.286.000 | 45 | 339.090.255 | 60 | 598.081.680 | 80 | 554.800.800 | 35 | 197.116.000 | 80 | 2.735.571.735 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | ARSIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **40.463.379.764** | | **40.440.815.090** | | **48.022.003.000** | | **49.471.821.300** | | **51.000.000.000** | | **291.135.060.922** | | **229.398.019.154** | |
| | | | | 4 02 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | % | 100,00 | 100,00 | 40.463.379.764 | 100,00 | 40.440.815.090 | 100,00 | 48.022.003.000 | 100,00 | 49.471.821.300 | 100,00 | 51.000.000.000 | 100,00 | 291.135.060.922 | 100,00 | 229.398.019.154 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **2.177.226.618** | | **2.060.402.760** | | **3.411.989.674** | | **3.369.500.000** | | **3.588.517.000** | | **4.237.629.378** | | **14.607.636.052** | |
| | | | | 5 3 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian | % | 85 | 84 | 2.177.226.618 | 85 | 2.060.402.760 | 86 | 3.411.989.674 | 87 | 3.369.500.000 | 88 | 3.588.517.000 | 85 | 4.237.629.378 | 88 | 14.607.636.052 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **3.685.345.100** | | **1.168.383.500** | | **2.646.664.000** | | **2.785.000.000** | | **2.966.025.000** | | **4.853.728.600** | | **13.251.417.600** | |
| | | | | 5 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Capaian Pengembangan kompetensi dan pendidikan dan pelatihan aparatur | % | 60 | 65 | 3.685.345.100 | 70 | 1.168.383.500 | 75 | 2.646.664.000 | 80 | 2.785.000.000 | 85 | 2.966.025.000 | 70 | 4.853.728.600 | 85 | 13.251.417.600 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **6.821.055.500** | | **3.796.668.970** | | **3.077.345.250** | | **4.400.000.000** | | **4.686.000.000** | | **43.245.910.000** | | **22.781.069.720** | |
| | | | | 6 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | - | 91,67 | 4.434.635.700 | 95,00 | 3.479.272.470 | 90,00 | 2.300.379.250 | 90,00 | 3.055.000.000 | 100,00 | 3.241.000.000 | 60 | 32.309.210.000 | 100 | 16.510.287.420 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti | % | 81,65 | 78,52 | | 76,97 | | 90,00 | | 90,00 | | 100,00 | | 60 | | 100 | | |
| | | | | 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT | % | - | - | 2.386.419.800 | - | 317.396.500 | 100 | 776.966.000 | 100 | 1.345.000.000 | 100 | 1.445.000.000 | - | 10.936.700.000 | 100 | 6.270.782.300 | INSPEKTORAT |
| | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | **8.154.748.897** | | **6.284.016.944** | | **5.484.614.900** | | **8.309.000.000** | | **8.409.000.000** | | **44.710.138.744** | | **36.641.380.741** | |
| | | | | 5 01 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase Keselarasan dokumen perenanaan pembangunan daerah | % | 90 | 100 | 3.391.599.261 | 100 | 2.688.769.544 | 100 | 1.650.991.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 17.053.625.000 | 100 | 12.331.359.805 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | Presentase Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran | % | 95 | 95 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | - | | 98 | | |
| | | | | 5 01 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 85 | 85 | 4.763.149.636 | 85 | 3.595.247.400 | 95 | 3.833.623.900 | 95 | 6.009.000.000 | 100 | 6.109.000.000 | 100 | 27.656.513.744 | 100 | 24.310.020.936 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang perekonomian dan SDA | % | 85 | 85 | | 85 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang Infrastruktur dan kewilyahan | % | 85 | 85 | | 85 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **3.685.345.100** | | **1.168.383.500** | | **2.646.664.000** | | **2.785.000.000** | | **2.966.025.000** | | **4.853.728.600** | | **13.251.417.600** | |
| | | | | 5 4 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Capaian Pengembangan kompetensi dan pendidikan dan pelatihan aparatur | % | 60 | 65 | 3.685.345.100 | 70 | 1.168.383.500 | 75 | 2.646.664.000 | 80 | 2.785.000.000 | 85 | 2.966.025.000 | 70 | 4.853.728.600 | 85 | 13.251.417.600 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | **KEUANGAN** | | | | | | **15.793.363.767** | | **9.106.128.690** | | **10.967.584.750** | | **16.372.000.000** | | **20.811.291.550** | | **69.274.481.800** | | **73.050.368.757** | |
| | | | | 5 02 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Ketepatan waktu penganggaran | % | 100 | 100 | 8.128.072.488 | 100 | 4.716.441.639 | 100 | 4.568.052.250 | 100 | 5.482.000.000 | 100 | 7.405.200.000 | 100 | 42.974.481.800 | 100 | 30.299.766.377 | BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | | Capaian Sistem Pengelolaan Keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kesesuaian pelaporan dengan astandar akuntansi pemerintahan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD | % | 20 | 20 | 3.651.262.503 | 20 | 1.448.043.816 | 20 | 2.008.472.000 | 90 | 2.690.000.000 | 95 | 5.206.091.550 | 95 | 18.100.000.000 | 95 | 15.003.869.869 | BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | 5 | 02 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | 100 | 100 | 4.014.028.776 | 100 | 2.941.643.235 | 8,00 | 4.391.060.500 | 12,50 | 8.200.000.000 | 13,00 | 8.200.000.000 | 13,00 | 8.200.000.000 | 13,00 | 27.746.732.511 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **2.327.179.586** | | **2.260.883.353** | | **2.883.534.050** | | **4.999.144.900** | | **5.291.752.734** | | **18.657.205.912** | | **17.762.494.623** | |
| | | | | 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | % | 100 | 100 | 2.327.179.586 | 100 | 2.260.883.353 | 79,38 | 2.883.534.050 | 87,31 | 4.999.144.900 | 96,04 | 5.291.752.734 | 100 | 18.657.205.912 | 96,04 | 17.762.494.623 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **41.776.561.264** | | **75.245.602.173** | | **42.760.999.713** | | **44.971.368.414** | | **45.585.837.947** | | **380.589.541.759** | | **250.340.369.511** | |
| | | | | | | | **KECAMATAN SERANG** | | | | | **8.680.458.315** | | **15.897.029.162** | | **10.809.204.268** | | **11.127.250.172** | | **11.175.936.607** | | **56.369.530.844** | | **57.689.878.524** | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 70,00 | 70,00 | 243.974.000 | 75,00 | 282.532.000 | 80,00 | 261.366.907 | 85,00 | 567.503.598 | 90,00 | 600.591.375 | 80,00 | 1.729.912.400 | 90,00 | 1.955.967.880 | KECAMATAN SERANG |
| | | | | 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kelurahan Sangat Berkembang | % | 70,00 | 70,00 | 8.258.384.315 | 70,00 | 15.512.162.162 | 70,00 | 9.515.046.361 | 80,00 | 10.268.798.636 | 90,00 | 10.219.031.500 | 90,00 | 53.087.062.682 | 90,00 | 53.773.422.974 | KECAMATAN SERANG |
| | | | | 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | - | - | - | - | - | 100,00 | 978.576.000 | 100,00 | - | 100,00 | 55.000.000 | 100,00 | - | 100,00 | 1.033.576.000 | KECAMATAN SERANG |
| | | | | 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 70,00 | 70,00 | 178.100.000 | 70,00 | 102.335.000 | 70,00 | 54.215.000 | 70,00 | 290.947.938 | 70,00 | 301.313.732 | 70,00 | 1.552.555.762 | 70,00 | 926.911.670 | KECAMATAN SERANG |
| | | | | | | | **KECAMATAN CIPOCOK JAYA** | | | | | **6.341.171.100** | | **9.024.846.735** | | **6.237.967.985** | | **6.951.559.730** | | **6.538.500.000** | | **36.030.722.836** | | **35.094.045.550** | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 90,00 | 90,00 | 623.048.000 | 90 | 264.216.000 | 90 | 139.873.230 | 90 | 387.536.250 | 90 | 1.990.045.000 | 90 | 3.821.257.886 | 90 | 3.404.718.480 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| | | | | 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kelurahan Sangat Berkembang | % | 70,00 | 70,00 | 5.339.783.100 | 70 | 8.571.002.520 | 80 | 5.096.994.755 | 90 | 5.918.573.480 | 100 | 1.757.955.000 | 100 | 25.587.314.950 | 100 | 26.684.308.855 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| | | | | 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | - | - | - | - | | 70 | 955.000.000 | 70 | - | 80 | 990.000.000 | 70 | - | 80 | 1.945.000.000 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| | | | | 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 75,00 | 80,00 | 378.340.000 | 80 | 189.628.215 | 85 | 46.100.000 | 85 | 645.450.000 | 90 | 1.800.500.000 | 90 | 6.622.150.000 | 90 | 3.060.018.215 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | **KECAMATAN KASEMEN** | | | | | **6.259.362.000** | | **10.844.915.759** | | **6.621.199.937** | | **6.933.393.145** | | **7.014.425.641** | | **49.625.505.425** | | **37.673.296.482** | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 70,00 | 72,29 | 281.809.000 | 73,86 | 380.272.000 | 75 | 183.524.667 | 80 | 200.000.000 | 85 | 202.000.000 | 70 | 3.886.284.700 | 85 | 1.247.605.667 | KECAMATAN KASEMEN |
| | | | | 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 20,00 | 10,00 | 5.656.043.000 | 20 | 10.157.428.759 | 30 | 5.507.918.070 | 40 | 6.320.855.000 | 50 | 6.386.063.550 | 20 | 43.857.209.727 | 50 | 34.028.308.379 | KECAMATAN KASEMEN |
| | | | | 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | - | - | - | | - | 100 | 889.807.200 | 100 | 200.000.000 | 100 | 204.000.000 | | - | 100 | 1.293.807.200 | KECAMATAN KASEMEN |
| | | | | 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 70,00 | 70,00 | 321.510.000 | 70 | 307.215.000 | 70 | 39.950.000 | 70 | 212.538.145 | 70 | 222.362.091 | 70 | 1.882.010.998 | 70 | 1.103.575.236 | KECAMATAN KASEMEN |
| | | | | | | | **KECAMATAN TAKTAKAN** | | | | | **7.129.366.672** | | **13.516.443.529** | | **7.033.532.977** | | **7.869.545.000** | | **7.734.466.150** | | **155.388.667.064** | | **43.283.354.328** | |
| | | | | 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 100 | 100 | 336.575.000 | 100 | 12.711.742.178 | 100 | 199.535.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 77.179.395.085 | 100 | 13.557.852.178 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | | | 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | persentase kategori kelurahan berkembang | % | 100 | 100 | 281.100.000 | 100 | 115.374.091 | 100 | 5.622.217.697 | 100 | 7.319.545.000 | 100 | 7.074.466.150 | 100 | 1.439.259.891 | 100 | 20.412.702.938 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | | | 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | 100 | 100 | 6.496.761.672 | 100 | 668.527.260 | 100 | 1.133.950.280 | 100 | 100.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 74.365.260.088 | 100 | 8.549.239.212 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | | | 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 50 | 57 | 14.930.000 | 64 | 20.800.000 | 71 | 77.830.000 | 86 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 2.404.752.000 | 100 | 763.560.000 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | | | | | | **KECAMATAN WALANTAKA** | | | | | **7.546.975.586** | | **15.083.444.384** | | **7.143.268.460** | | **7.091.000.000** | | **7.607.258.750** | | **20.868.301.442** | | **44.471.947.180** | |
| | | | | 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | - | 70,00 | 119.462.429 | 80,00 | 144.550.000 | 80 | 141.050.000 | 85 | 151.000.000 | 85 | 155.000.000 | 80 | 264.012.429 | 85 | 711.062.429 | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | | | 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | persentase kategori kelurahan berkembang | % | 7,14 | 7,14 | 7.090.938.157 | 14,3 | 14.020.972.371 | 50 | 5.276.722.175 | 55 | 6.410.000.000 | 60 | 6.914.000.000 | 7,14 | 19.349.792.000 | 60 | 39.712.632.703 | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | | | 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | - | 70,00 | 48.000.000 | 70 | 100.000.000 | 70 | 1.460.000.000 | 75 | 60.000.000 | 80 | 65.000.000 | 70 | 148.000.000 | 80 | 1.733.000.000 | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | | | 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 75,00 | 80,00 | 288.575.000 | 80 | 817.922.013 | 80 | 265.496.285 | 85 | 470.000.000 | 90 | 473.258.750 | 70 | 1.106.497.013 | 90 | 2.315.252.048 | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | | | | | | **KECAMATAN CURUG** | | | | | **5.819.227.591** | | **10.878.922.604** | | **4.915.826.086** | | **4.998.620.367** | | **5.515.250.799** | | **62.306.814.148** | | **32.127.847.447** | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan | % | 85 | 85 | 296.690.000 | 90 | 115.374.091 | 90 | 96.710.000 | 95 | 241.100.000 | 100 | 96.710.000 | 100 | 1.402.349.891 | 100 | 846.584.091 | KECAMATAN CURUG |

| Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Program | | | | | Satuan | Kondisi Awal | Capaian Kinerja dan Pendanaan | | | | Taget Kinerja dan Pendanaan | | | | | | KINERJA AKHIR RPJMD (2023) | | | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | Kode Rekening | | | Nama Program | Indikator Program | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | PELAYANAN PUBLIK | Pelayanan Publik sesuai SOP/SP/Ketentuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase kategori kelurahan berkembang | % | 50 | 50 | 5.216.324.591 | 50 | 10.541.198.513 | 50 | 3.933.957.126 | 80 | 4.317.520.367 | 90 | 4.002.284.799 | 100 | 53.208.860.867 | 90 | 28.011.285.396 | KECAMATAN CURUG |
| | | | | 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | 90 | 90 | 14.930.000 | 90 | 20.800.000 | 90 | 705.992.960 | 100 | 60.000.000 | 90 | 1.060.000.000 | 90 | 4.931.220.000 | 90 | 1.861.722.960 | KECAMATAN CURUG |
| | | | | 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 90 | 90 | 291.283.000 | 90 | 201.550.000 | 90 | 179.166.000 | 90 | 380.000.000 | 90 | 356.256.000 | 90 | 2.764.383.390 | 90 | 1.408.255.000 | KECAMATAN CURUG |
| | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | **2.677.817.684** | | **1.922.024.496** | | **3.480.677.824** | | **7.050.000.000** | | **7.508.250.000** | | **9.529.904.500** | | **22.638.770.004** | |
| | | | | 8 | 01 | 2 | PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Capaian harmonisasi antar lembaga | % | 100 | 85 | 271.340.000 | 90 | 97.490.000 | 95 | 929.500.050 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.800.000.000 | 100 | 1.928.085.000 | 100 | 4.698.330.050 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | 8 | 01 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BUDAYA POLITIK | Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat | % | 100 | 85 | 1.815.607.684 | 90 | 1.571.974.496 | 95 | 2.127.697.774 | 100 | 2.600.000.000 | 100 | 2.600.000.000 | 100 | 2.469.575.000 | 100 | 10.715.279.954 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | 8 | 01 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100 | 85,00 | 103.250.000 | 90 | 79.180.000 | 95 | - | 100 | 350.000.000 | 100 | 558.000.000 | 100 | 1.066.575.000 | 100 | 1.090.430.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | 8 | 01 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | % | - | 85 | 192.820.000 | 100 | 78.860.000 | 95 | 108.735.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 450.250.000 | 100 | 1.317.605.000 | 100 | 1.230.665.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | 8 | 01 | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK | Capaian Pengendalian Potensi Konflik | % | 100 | 85 | 294.800.000 | 90 | 94.520.000 | 95 | 314.745.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.748.064.500 | 100 | 4.904.065.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **SUB JUMLAH** | | | | | | | | | | | | **845.032.609.563** | | **914.454.712.848** | | **917.174.548.157** | | **983.699.129.503** | | **1.018.705.163.489** | | **2.263.744.209.643** | | **4.689.569.339.387** | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | | | **1.316.022.067.769** | | **1.307.337.012.964** | | **1.510.263.342.935** | | **1.531.351.800.400** | | **1.587.297.616.392** | | **4.143.539.068.699** | | **7.262.775.016.287** | |

## Tabel 6.10
## Keselarasan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| MISI 1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENCE) | MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis nologi informasi | Indeks Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indeks kepuasan masyarakat (SKM);<br>Nilai LPPD Kota;<br>Hasil Evaluasi AKIP;<br>Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); | Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian |
| | | | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Capaian penataan administrasi pemerintahan, Kesra dan legislasi Hukum |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan |
| | | | | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Capaian Penyebarluasan Informasi Publik |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase OPD yang Menyelenggarakan Kegiatan Statistik Sektoral |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Capaian Pengamanan Informasi Satu Pintu |
| | | | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan |
| | | | | | | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase informasi data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia |
| | | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Terintegrasi |
| | | | | | | Program Pengelolaan Arsip | Persentase pengelolaan arsip statis dan dinamis |
| | | | | | | | Capaian Pembinaan SDM Pengelola Arsip |
| | | | | | | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Tingkat pengelolaan arsip statis dan dinamis |
| | | | | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | | | | | Program Kepegawaian Daerah | Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Capaian Pengembangan Kompetensi dan pendidikan dan pelatihan Aparatur |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti |
| | | | | | | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti |
| | | | | | | | Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani |
| | | | | | | | Persentase nilai akuntabilitas kinerja OPD minimal kategori B |
| | | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT |
| | | | | | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan OPD terhadap perencanaan dokumen perencanaan daerah |
| | | | | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | capaian kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia |
| | | | | | | | capaian kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA |
| | | | | | | | capaian kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan |
| | | | | | | Program Penelitian Dan Pengembangan | Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan kebijakan inovasi daerah |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan waktu penganggaran |
| | | | | | | | Capaian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | Persentase Kesesuaian pelaporan dengan astandar akuntansi pemerintahan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| | | | | | | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah |
| | | | | | Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai SOP/SP/Ketentuan |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan Kelurahan Sangat Berkembang |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | pelayanan publik | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Capaian Penanganan K3 |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan |
| | | | | | | Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Capaian harmonisasi antar lembaga |
| | | | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Budaya Politik | Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| | | | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik | Capaian Pengendalian Potensi Konflik |
| MISI 2. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR | MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | | | | |
| | Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah | Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI) | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah | Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah | Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrasturktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Capaian pemeliharaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya |
| | | | | | | | Capaian saluran irigasi yang ditangani |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan Layanan Air Bersih |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Presentase Rumah Tangga Bersanitasi |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Capaian saluran drainase yang ditangani |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Capaian pembangunan dan Pemeliharaan gedung pemerintah dan fasilitas umum |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Capaian pembangunan dan Pemeliharaan gedung pemerintah dan fasilitas umum |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Capaian pembangunan jalan dan Jembatan |
| | | | | | | | Capaian Pembangunan Talud/ Bronjong |
| | | | | | | | Presentase pemeliharaan jalan dan Jembatan |
| | | | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Capaian Pembinaan Jasa Kontruksi |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pemanfaatan ruang |
| | | | | | | | Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang |
| | | | | | | Program Pengembangan Perumahan | Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa |
| | | | | | | | Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana |
| | | | | | | Program Kawasan Permukiman | Presentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni |
| | | | | | | | Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik |
| | | | | | | | Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik |
| | | | | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Penanganan RTLH Diluar Kawasan Kumuh |
| | | | | | | | Persentase Penanganan PSU Di Luar Kawasan Kumuh |
| | | | | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1000 Penduduk |
| | | | | | | | Presentase PSU Yang Diserahkan |
| | | | | | | | Capaian Areal Pemakaman Dikelola Dan Dimanfaatkan Sebagai Ruang Terbuka Hijau |
| | | | | | | Program Aplikasi Informatika | Persentase OPD yang Mengimplementasikan Layanan E-Governent |
| | | | | | | Program Pengendalian Operasional Dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) | Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan |
| | | | | | | | Cakupan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor |
| | | | | | | | Capaian Pengendalian Potensi Titik Kemacetan |
| | | | | | | | Capaian Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kondisi Baik |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pelayaran | Capaian Pembangunan Kepelabuhan Penumpang Lokal |
| | | | | | | Program Penyelesaian Tanah Sengketa Garapan | Presentase Fasilitasi Konflik Sengketa Tanah |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Peningkatan Pemanfaatan Tanah Kosong |
| | | | | | | Program Penatagunaan Tanah | Capaian Penatagunaan Pertanahan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah |
| | Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan | Indeks kualitas lingkungan hidup | Meningkatnya pngelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Penanganan Timbunan Sampah | Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah |
| | | | | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Cakupan Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
| | | | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Capaian Pengendalian Limbah B3 |
| | | | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Capaian Penaatan Lingkungan |
| | | | | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Capaian Pengurangan Sampah |
| | | | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Cakupan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Capaian Penanganan Sampah |
| | | | | Ketersediaan RTH | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Kehati | Cakupan Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara dan Terbangun |
| | | | Mengurangi risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | Indeks Risiko Bencana | Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran |
| | | | | | | Program Penanggulangan Bencana | Prosentase penanganan darurat bencana |
| MISI 3. MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS | MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN | | | | | | |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya | Indek Pembangunan Manusia | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat |
| | | | | | | | Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat |
| | | | | | | | Angka kelulusan siswa SD |
| | | | | | | | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Sederajat |
| | | | | | | | Angka partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat |
| | | | | | | | Angka Kelulusan SMP |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | | Angka Partisipasi PAUD |
| | | | | | | | Angka Partisipasi Kesetaraan/Pendidikan Non Formal |
| | | | | | | Program Pengembangan Kurikulum | Presentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal |
| | | | | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Capaian rata-rata kompetensi guru PAUD/Kesetaraan |
| | | | | | | | Capaian rata-rata kompetensi guru Pendidikan Dasar |
| | | | | | | | Capaian Tenaga Kebudayaan yang berkualifikasi S-1 |
| | | | | | | | Capaian Kinerja Guru TK |
| | | | | | | | Capaian Kinerja Guru Pendidikan Dasar |
| | | | | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Presentase Pengendalian Perizinan Pendidikan |
| | | | | | | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Presentase Pengembangan Bahasa dan Sastra |
| | | | | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Capaian Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (terhadap populasi yg dilayani) |
| | | | | | | | Persentase perpustakaan yang dibina |
| | | | | | | | Capaian koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah |
| | | | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Prosentase Pelestarian Bahan Perpustakaan (BP) dan Naskah Kuno |
| | | | | | Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Capaian pembinaan klub olahraga |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang dalam Kepramukaan |
| | | | | | Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Event budaya daerah setiap tahun |
| | | | | | | | Persentase Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah |
| | | | | | | | Persentase grup kesenian dan kebudayaan daerah yang dibina |
| | | | | | | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Benda Bersejarah yang dilestarikan |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan |
| MISI 4. MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS | Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya | Indek Pembangunan Manusia | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pelayanan kesehatan ibu hamil |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu bersalin |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan balita |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus |
| | | | | | | | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis |
| | | | | | | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang melemahkan daya tahan tubuh |
| | | | | | | | Presentasi desa/kelurahan yang mempunyai sistem kewaspadaan dalam penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah untuk pengurangan risiko krisis |
| | | | | | | | Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) |
| | | | | | | | Persentase Puskesmas Mampu PONED |
| | | | | | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | | | | | | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin |
| | | | | | | | Capaian pelayanan rumah sakit kategori Madya |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rasio tenaga Para Medis persatuan penduduk |
| | | | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan desa siaga aktif |
| | | | | | | | Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS |
| | | | | | Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan |
| | | | | | | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak |
| | | | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak |
| | | | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak |
| | | | | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak |
| | | | | | Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga | Program Pengendalian Penduduk | Cakupan data keluarga yang akurat |
| | | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan Promosi KIE-KB |
| | | | | | | | Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB |
| | | | | | | | Capaian PPM peserta KB |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif |
| MISI 5. MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING | | | | | | |
| | Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat | Tingkat inflasi daerah; Indeks daya beli; PDRB per kapita; Angka Kemiskinan; Tingkat Pengangguran Terbuka; | Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Capaian koperasi yang aktif |
| | | | | | | Program Dan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang dibina |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Yang Berdaya |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | Indeks Gini; | masyarakat | Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha |
| | | | | | | Program Pengembangan Umkm | Persentase Usaha mikro yang dibina |
| | | | | | | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Distributor Bahan Berbahaya Terdaftar |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional |
| | | | | | | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Presentase stabilitas harga barang |
| | | | | | | Program Pengembangan Ekspor | Capaian Pembinaan Potensi Ekspor |
| | | | | | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Capaian Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| | | | | | | Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM |
| | | | | | Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah | Program Pengolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Capaian Penguatan Cadangan Pangan |
| | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Capaian Skor PPH Konsumsi |
| | | | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Capaian penanganan lokasi rentan atau rawan pangan (SKPG) |
| | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Capaian pengelolaan keamanan pangan segar |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi perikanan kelompok nelayan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Presentase peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil olahan perikanan |
| | | | | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktivitas padi |
| | | | | | | | Capaian Peningkatan Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) |
| | | | | | | | Capaian Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) |
| | | | | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Capaian Produksi padi |
| | | | | | | Program Pengendalian Kesehatan | Capaian penanganan kasus penyakit hewan |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Presentase peningkatan produksi hasil olahan peternakan |
| | | | | | | | Capaian produksi hasil olahan peternakan |
| | | | | | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Capaian teknologi pasca panen tanaman perkebunan |
| | | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Capaian peningkatan Produksi tanaman perkebunan |
| | | | | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB) |
| | | | | | | Program Pemasaran Pariwisata | Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata |
| | | | | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Prosentase Wirausaha Ekraf Yang Difasilitasi Sampai Memiliki HKI |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Usaha Baru Ekraf |
| | | | | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Capaian Pengembangan Kawasan Investasi |
| | | | | | | Program Promosi Penanaman Modal | Capaian Kerjasama Investasi |
| | | | | | | | Realisasi Penambahan Invesor PMDN/PMA |
| | | | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Capaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM ONLINE) Untuk Menyajikan Perkembangan Realisasi Investasi |
| | | | | | | | Capaian Kualitas dan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalan Rangka Pelaksanakan Kegiatan Penanaman Modal |
| | | | | | | | Capaian Pemeriksaan Terhadap Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat | Capaian LPM Kategori Aktif |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Sosial | Realisasi PSKS yang mendapat pembinaan |
| | | | | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani |
| | | | | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Realisasi jaminan sosial daerah terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |

| MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 | MISI KOTA SERANG TAHUN 2018-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan Daerah | | Sasaran Daerah | | Strategi | Program | |
| | Uraian | Indikator | Uraian | Indikator | | Uraian | Indikator |
| | | | | | | | yang ditangani |
| | | | | | | Program Penanganan Bencana | Realisasi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial yang ditangani |
| | | | | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Realisasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |
| | | | | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Capaian Pencari kerja yang ditempatkan |
| | | | | | | Program Hubungan Industrial | Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan |
| | | | | | | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Capaian Transmigran Yang Ditempatkan |
| | | | | | | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Capaian Transmigran Yang Dibina |

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Serang menyusun program sebagaimana dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pendanaan program disusun berdasarkan proyeksi dan indikasi kebutuhan dan hasil evaluasi atas hasil pelaksanaan program beberapa tahun sebelumnya.

Indikasi program serta pagu indikatif program pembangunan pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Serang, APBD Provinsi Banten dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional dan daerah. Terjadi koreksi terhadap sasaran ekonomi yang menurun cukup tajam di Tahun 2020 dan diperkirakan tetap berpengaruh pada tahun 2021 hingga 2023, serta berakibat terhadap alokasi dana transfer daerah yang berkurang secara signifikan. Pada masa pandemi ini dengan adanya prediksi penurunan kemampuan anggaran daerah, perangkat daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam upaya pencapaiannya.

Kerangka pendanaan program pembangunan untuk lima tahun kedepan perlu memperhatikan proyeksi kapasitas rill keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhan selama 5 (lima) tahun.

**Tabel 7.1**

**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang**
**Tahun 2019-2020 (Perda Nomor 3 Tahun 2019)**

| NO | URAIAN | APBD 2019 | APBD 2020 | APBD 2021 | APBD 2022 | APBD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| **2** | **BELANJA** | **1,261,283,860,786** | **1.285.472.985.383** | **1.329.640.067.494** | **1.375.831.576.869** | **1.424.144.136.699** |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **627,612,638,273** | **642.736.492.691** | **664.820.033.747** | **687.915.788.435** | **712.072.068.350** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 596,670,285,589 | 629.884.340.007 | 651.967.881.063 | 675.063.635.751 | 699.219.915.666 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 25,585,200,000 | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- | 9.700.000.000- |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2,205,000,000 | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 1,152,152,684 | 1,152,152,684 | 1,152,152,684 | 1,152,152,684 | 1,152,152,684 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **633,671,222,513** | **642.736.492.691** | **664.820.033.747** | **687.915.788.435** | **712.072.068.350** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 35,214,228,121 | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 423,290,610,582 | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 175,166,383,810 | | | | |

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019

**Tabel 7.2**
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2021-2023**

| NO | URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Belanja** | **1.496.753.461.562** | **1.407.506.533.974** | **1.430.069.034.074** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **1.194.011.763.550** | **1.122.764.835.962** | **1.140.827.336.062** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 659.685.256.710 | 632.327.341.000 | 645.315.917.800 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 519.599.068.840 | 475.910.056.962 | 480.983.980.262 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 10.904.338.000 | 10.704.338.000 | 10.704.338.000 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.823.100.000 | 3.823.100.000 | 3.823.100.000 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **300.741.698.012** | **282.741.698.012** | **287.241.698.012** |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **-** | **-** | **-** |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.496.753.461.562** | **1.407.506.533.974** | **1.430.069.034.074** |

*Sumber: BPKAD & Bappeda Kota Serang, 2021*

Rekapitulasi capaian program pada setiap urusan yang dilengkapi dengan penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.3 berikut :

**Tabel 7.3**

**Capaian Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020 Menurut Urusan Pemerintah**

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | | **380.142.848.139** | | **317.580.085.187** | | **702.733.821.226** | |
| **11** | **01** | | **URUSAN PENDIDIKAN** | | | | | | **128.862.854.544** | | **122.783.431.196** | | **251.646.285.740** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| 11 | 01 | 11 | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | 1 | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | % | 93,20 | 93,25 | 6.710.796.762 | 93,75 | 6.329.846.850 | 93,75 | 13.040.643.612 | |
| | | | | 2 | Angka partisipasi murni (APM) PAUD | % | 89,52 | 89,54 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Angka Melek Huruf (AMH) | % | 99,94 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa | % | 50,00 | 52,00 | | 66,00 | | 66,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian standar mutu PAUD | % | 12,00 | 14,00 | | 69,00 | | 69,00 | | |
| | | | | 6 | Persentase PAUD Holistik Integratif | % | NA | 23,53 | | 33,00 | | 33,00 | | |
| 11 | 01 | 12 | ProgramPendidikan Sekolah Dasar | 1 | Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat | % | 134,85 | 128,6 | 69.618.896.694 | 126,51 | 68.986.743.054 | 126,51 | 138.605.639.748 | |
| | | | | 2 | Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Angka kelulusan siswa SD | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa | % | 52 | 65,00 | | 56,00 | | 56,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian standar mutu | % | 42 | 55,00 | | 46,00 | | 46,00 | | |
| | | | | 6 | Rasio Jml Murid/Kelas | rasio | 41/1 | 40:1 | | 39:1 | | 39:1 | | |
| | | | | 7 | Rasio Jumlah Guru dan Murid | rasio | 1/35 | 1:39 | | 1:33 | | 1:33 | | |
| 11 | 01 | 13 | Program Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) | 1 | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Sederajat | % | 117,04 | 117,35 | 45.936.143.088 | 117,97 | 41.404.413.292 | 117,97 | 87.340.556.380 | |
| | | | | 2 | Angka partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat | % | 99,28 | 99,45 | | 99,46 | | 99,46 | | |
| | | | | 3 | Angka Kelulusan SMP | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa | % | 50 | 75,00 | | 76,00 | | 76,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian Standar Mutu SMP | % | 50 | 65,00 | | 66,00 | | 66,00 | | |
| | | | | 6 | Rasio Jml Murid/Kelas | rasio | 20/1 | 40/1 | | 39/1 | | 39/1 | | |
| | | | | 7 | Rasio Jumlah Guru dan Murid SMP | rasio | 1/21 | 1:39 | | 1/39 | | 1/39 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 01 | 14 | Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 | Capaian rata-rata kompetensi guru PAUD | % | NA | 65,00 | 6.597.018.000 | 66,00 | 6.062.428.000 | 66,00 | 12.659.446.000 | |
| | | | | 2 | Capaian rata-rata kompetensi guru Pendidikan Dasar | % | 45,70 | 75,00 | | 76,00 | | 76,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Tenaga Kebudayaan yang berkualifikasi S-1 | % | 43,20 | 45,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Kinerja Guru TK | % | NA | 65,00 | | 67,00 | | 67,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian Kinerja Guru Pendidikan Dasar | % | NA | 65,00 | | 66,00 | | 66,00 | | |
| **11** | **02** | | **URUSAN KESEHATAN** | | | | | | **93.212.439.446** | | **76.325.819.276** | | **169.538.258.722** | **DINAS KESEHATAN** |
| 11 | 02 | 11 | Program Kesehatan Masyarakat | 1 | Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 78.97 | 85,79 | 5.550.343.940 | 74,77 | 3.998.647.151 | 74,77 | 9.548.991.091 | |
| | | | | 2 | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | % | 93.74 | 95,18 | | 82,80 | | 82,80 | | |
| | | | | 3 | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 90,58 | 88,93 | | 85,70 | | 85,70 | | |
| | | | | 4 | Cakupan pelayanan kesehatan balita | % | 76,17 | 71,01 | | 54,41 | | 54,41 | | |
| | | | | 5 | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | % | 99 | 100 | | 11,20 | | 11,20 | | |
| | | | | 6 | Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | % | 30 | 43,01 | | 67,18 | | 67,18 | | |
| | | | | 7 | Prevalensi balita gizi Kurang | % | 2.08 | 2,71 | | 3,08 | | 3,08 | | |
| | | | | 8 | Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM | % | 18 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| 11 | 02 | 12 | Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | % | NA | 71,10 | 2.982.551.615 | 51,66 | 2.593.922.235 | 51,66 | 5.576.473.850 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | % | NA | 57,18 | | 44,66 | | 44,66 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | % | NA | 66,99 | | 77,79 | | 77,79 | | |
| | | | | 4 | Cakupan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat | % | NA | 60,25 | | 80,28 | | 80,28 | | |
| | | | | 5 | Cakupan Pelayanan Kessehatan Orang Terduga Tuberkulosis | % | NA | 45,18 | | 32,33 | | 32,33 | | |
| | | | | 6 | Cakupan pelayanan Kesehatan dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), | % | NA | 89,26 | | 97,12 | | 97,12 | | |
| | | | | 7 | Presentasi desa/kelurahan yang mempunyai sistem kewaspadaan dalam penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah untuk pengurangan risiko krisis | % | NA | 50,00 | | 50 | | 50 | | |
| 11 | 02 | 13 | Program Pelayanan Kesehatan | 1 | rasio rumah sakit per satuan penduduk | % | 0,015 | 0,017 | 14.359.995.215 | 0,017 | 7.760.006.810 | 0,017 | 22.120.002.025 | |
| | | | | 2 | cakupan puskesmas | % | 266,7 | 266,60 | | 266,7 | | 266,7 | | |
| | | | | 3 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk | Rasio | 0.0467 | 0,209 | | 0,047 | | 0,047 | | |
| | | | | 4 | cakupan puskesmas pembantu | % | 20,90 | 19,70 | | 17,5 | | 17,5 | | |
| | | | | 5 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar kategori Utama | % | NA | 1,00 | | 18,75 | | 18,75 | | |
| | | | | 6 | Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 7 | Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED | % | 37,5 | 37,50 | | 37,5 | | 37,5 | | |
| | | | | 8 | Persentasi Ketersediaan Obat Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 9 | Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 10 | Persentasi Ketersediaan Alat Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 11 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan | % | 83,12 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 11 | 02 | 14 | Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan | 1 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | % | 75 | 80,00 | 42.664.292.018 | 85,00 | 47.065.871.541 | 85,00 | 89.730.163.559 | |
| | | | | 2 | Cakupan desa siaga aktif | % | 80 | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS | % | 45 | 79,11 | | 84,85 | | 84,85 | | |
| | | | | 4 | Rasio tenaga Para Medis persatuan penduduk | % | 1,44 | 0,039 | | 1,74 | | 1,74 | | |
| | | | | 5 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | % | 100 | 3,05 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin | % | 100 | 119,72 | | 100 | | 100 | | |
| 11 | 02 | 15 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang | 1 | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Operasional RSUD | % | NA | 64,00 | 27.655.256.658 | 20,00 | 14.907.371.539 | 20,00 | 42.562.628.197 | |
| | | | | 2 | Capaian pelayanan rumah sakit kategori Madya | % | NA | 37,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Ketersediaan Sarana Penunjang Pelayanan Medis RSUD | % | NA | 50,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 4 | Cakupan Penyediaan Mutu Pelayanan Medis, Keselamatan Pasien dan Kepuasan Pasien RSUD | % | NA | 14,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| **11** | **03** | | **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **102.638.661.694** | | **68.125.259.570** | | **170.763.921.264** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| 11 | 03 | 11 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 1 | Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan | % | 60 | 67,00 | 64.006.500.524 | 70,00 | 36.143.964.570 | 70,00 | 100.150.465.094 | |
| | | | | 2 | Capaian pembangunan talud/bronjong | % | 45 | 50,00 | | 53,00 | | 53,00 | | |
| | | | | 3 | Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan | % | 67 | 70,00 | | 73,00 | | 73,00 | | |
| 11 | 03 | 12 | Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan | 1 | Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan | 5 | 67 | 100 | 6.218.163.000 | 88,00 | 8.264.337.000 | 88,00 | 14.482.500.000 | |
| 11 | 03 | 13 | Program Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan | 1 | Persentase pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan | % | 90 | 100 | 1.213.225.100 | 0 | 1.517.447.800 | 0 | 2.730.672.900 | |
| 11 | 03 | 14 | Program peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas Umum | 1 | Capaian pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah serta fasilitas umum | % | 45 | 50,00 | 24.583.216.900 | 55,00 | 10.130.156.850 | 55,00 | 34.713.373.750 | |
| 11 | 03 | 15 | Program pembinaan Jasa konstruksi | 1 | Capaian Pembinaan Jasa Konstruksi | % | 50 | 70,00 | 185.793.000 | 0 | 3.650.000 | 0 | 189.443.000 | |
| 11 | 03 | 16 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 1 | Capaian Saluran Drainase yang ditangani | % | 55 | 70,00 | 2.058.152.870 | 60,00 | 8.805.005.600 | 60,00 | 10.863.158.470 | |
| 11 | 03 | 17 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya | 1 | Capaian pemeliharaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya | % | 75 | 80,00 | 1.456.852.100 | 83,00 | 1.915.002.000 | 83,00 | 3.371.854.100 | |
| | | | | 2 | Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik | % | 76 | 91,00 | | 93,00 | | 93,00 | | |
| 11 | 03 | 18 | Program Pengendalian Banjir | 1 | Capaian area genangan dan potensi banjir yang ditangani | % | 23 | 40,00 | 1.791.695.300 | 25,00 | 830.642.300 | 25,00 | 2.622.337.600 | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 03 | 19 | Program Penataan Ruang | 1 | Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan pemanfaatan ruang | % | 50 | 50,00 | 1.125.062.900 | 100 | 515.053.450 | 100 | 1.640.116.350 | |
| | | | | 2 | Presentase ketaatan terhadap rencana tata ruang | % | 55 | 55,00 | | 56,00 | | 56,00 | | |
| **11** | **04** | | **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | **43.327.709.955** | | **38.148.074.064** | | **81.475.784.019** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** |
| 11 | 04 | 11 | Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan | 1 | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1000 Penduduk | Rasio | 3,58 | 1.048,09 | 13.530.390.016 | 1027 | 13.838.781.222 | 1027 | 27.369.171.238 | |
| | | | | 2 | Capaian Areal Pemakaman Dikelola Dan Dimanfaatkan Sebagai Ruang Terbuka Hijau | % | 16,69 | 0,4 | | 5,18 | | 5,18 | | |
| | | | | 3 | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | % | 3,12 | 2,03 | | 2,87 | | 2,87 | | |
| | | | | 4 | Persentase Perumahan Yang Diserahkan | % | 20 | 23,58 | | 27,86 | | 27,86 | | |
| | | | | 5 | Persentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana | % | NA | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 | Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa | % | NA | NA | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 11 | 04 | 12 | Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman | 1 | Cakupan layanan air bersih | % | 56,05 | 39,01 | 29.797.319.939 | 56,00 | 24.309.292.842 | 56,00 | 54.106.612.781 | |
| | | | | 2 | Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi | % | 72,6 | 79,27 | | 69,33 | | 69,33 | | |
| | | | | 3 | Presentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik | % | 39,52 | 77,99 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 4 | Persentasi Drainase lingkungan kondisi baik | % | 67,63 | 67,71 | | 68,00 | | 68,00 | | |
| | | | | 5 | Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara | % | 1,5 | 9,63 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| **11** | **05** | | **URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **8.431.131.900** | | **8.831.625.061** | | **22.273.644.861** | |
| | | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **7.101.078.800** | | **7.460.445.061** | | **14.561.523.861** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |
| 11 | 05 | 11 | Program Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | Persentase penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 97,90 | 98,24 | 4.451.235.000 | 95,00 | 4.834.294.708 | 95,00 | 9.285.529.708 | |
| | | | | 2 | Cakupan Patroli dalam wilayah kota serang | % | 80 | 100 | | 92,00 | | 92,00 | | |
| 11 | 05 | 12 | Program penegakan produk hukum daerah | 1 | Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah | % | 91,38 | 97,43 | 234.210.000 | 99,76 | 129.970.000 | 99,76 | 364.180.000 | |
| | | | | 2 | Capaian pembinaan PPNS perangkat daerah kategori baik | % | 22,22 | 60,00 | | 100 | | 100 | | |
| 11 | 05 | 13 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 1 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | % | 72,16 | 72,16 | 1.976.918.800 | 72,64 | 2.260.883.353 | 72,64 | 4.237.802.153 | |
| | | | | 2 | Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | % | 93,55 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | % | 54,55 | 54,55 | | 55,00 | | 55,00 | | |
| 11 | 05 | 14 | Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur | 1 | Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat | % | 31,05 | 42,00 | 438.715.000 | 42,00 | 235.297.000 | 42,00 | 674.012.000 | |
| | | | | 2 | Persentase Pos Siskamling | % | 33,13 | 33,00 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 3 | Capaian Ketrampilan Aparatur Satpol PP kategori baik | % | 77,78 | 78,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **1.330.053.100** | | **1.371.180.000** | | **7.712.121.000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| 11 | 05 | 17 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 1 | Prosentase capaian tingkat risiko bencana | % | 100 | 25,00 | 458.255.000 | 20,00 | 423.866.000 | 20,00 | 882.121.000 | |
| | | | | 2 | Prosentase Kelurahan Tangguh Bencana | Kelurahan | - | 18,00 | | 4 | | 4 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 05 | 18 | Program Darurat Bencana | 1 | Cakupan Penanganan Daerah Bencana | % | 100 | 100 | 818.643.100 | 20,00 | 919.914.000 | 20,00 | 5.490.000.000 | |
| | | | | 2 | Prosentase penanganan darurat bencana | % | 100 | 100 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 3 | Respon cepat darurat bencana 24 jam | % | 100 | 24,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 11 | 05 | 19 | Program Pemulihan Pasca Bencana | 1 | Prosentasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana | % | 100 | 30,00 | 53.155.000 | 100 | 27.400.000 | 100 | 1.340.000.000 | |
| **11** | **06** | | **URUSAN SOSIAL** | | | | | | **3.670.050.600** | | **3.365.876.020** | | **7.035.926.620** | **DINAS SOSIAL** |
| 11 | 06 | 11 | Program Penanganan Fakir Miskin | 1 | Realisasi fakir miskin yang dilayani terhadap total fakir miskin | % | 85 | 100 | 727.200.000 | 100 | 732.954.000 | 100 | 1.460.154.000 | |
| | | | | 2 | Realisasi Rumah tidak layak huni yang ditangani terhadap total RTLH | % | 6,8 | 7,00 | | 6,33 | | 6,33 | | |
| 11 | 06 | 12 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 | Realisasi perlindungan sosial korban bencana yang ditangani | % | 100 | 100 | 945.467.000 | 100 | 808.934.820 | 100 | 1.754.401.820 | |
| | | | | 2 | Realisasi jaminan sosial (Pusat, provinsi, kota) terhadap total fakir miskin | % | 68 | 100 | | 75,57 | | 75,57 | | |
| | | | | 3 | Realisasi jaminan sosial daerah terhadap fakir miskin yang ditangani | % | 9 | 100 | | 41,3 | | 41,3 | | |
| 11 | 06 | 13 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 1 | Realisasi PSKS yang mendapat pembinaan terhadap total PSKS | % | 90 | 50,00 | 525.600.000 | 100 | 509.301.000 | 100 | 1.034.901.000 | |
| | | | | 2 | Realisasi PSKS yang telah mengimplementasikan hasil pembinaan terhadap PSKS yang telah dibina | % | 45 | 96,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Cakupan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan | % | 100 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |
| 11 | 06 | 14 | Program Rehabilitasi Sosial | 1 | Cakupan layanan pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial | % | 75 | 100 | 1.471.783.600 | 75,00 | 1.314.686.200 | 75,00 | 2.786.469.800 | |
| | | | | 2 | cakupan layanan pembinaan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma | % | 39,65 | 100 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | | | 3 | cakupan layanan pembinaan Lansia | % | NA | 100 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| | | | | 4 | cakupan layanan pembinaan eks penyandang penyakit sosial | % | 58 | 100 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| | | | | 5 | Cakupan Layanan Korban Eksploitasi, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak | % | 76 | 100 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| | | | **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | **83.349.040.120** | | **74.320.938.438** | | **167.711.237.802** | |
| **12** | **01** | | **URUSAN TENAGA KERJA** | | | | | | **2.414.221.500** | | **1.014.965.450** | | **14.699.914.694** | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** |
| 12 | 01 | 11 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 | Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | % | NA | 61,45 | 1.072.701.500 | 65 | 538.201.600 | 65 | 6.451.161.694 | |
| 12 | 01 | 12 | Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1 | Capaian Penyelesaian Masalah Pencari Kerja | % | 4,17 | 8,82 | 772.970.000 | 7,35 | 252.378.600 | 7,35 | 4.950.563.000 | |
| 12 | 01 | 13 | Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 1 | Capaian Hubungan Industrial Yang Sesuai Aturan Ketenagakerjaan | % | NA | 40,32 | 568.550.000 | 30,00 | 224.385.250 | 30,00 | 3.298.190.000 | |
| **12** | **02** | | **URUSAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **1.819.253.675** | | **967.742.850** | | **1.557.528.025** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| 12 | 02 | 11 | Program Pemberdayaan Perempuan | 1 | Persentase Organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan | % | 10 | 10,00 | 821.186.700 | 30,00 | 408.281.800 | 30,00 | | |
| 12 | 02 | 12 | Program Perlindungan Perempuan dan | 1 | Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak | % | 75 | 80,00 | 998.066.975 | 86,00 | 559.461.050 | 86,00 | 1.557.528.025 | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Anak | 2 | Cakupan Pelayanan perlindungan Hak perempuan | % | 60 | 70,00 | | 62,00 | | 62,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kota Layak Anak | % | 68 | 80,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Cakupan Penanganan kekerasan perempuan dan anak | % | 75 | 80,00 | | 86,00 | | 86,00 | | |
| **12** | **03** | | **URUSAN PANGAN** | | | | | | **1.025.790.000** | | **578.127.000** | | **1.603.917.000** | **DINAS PERTANIAN** |
| 12 | 03 | 11 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 1 | Capaian penanganan lokasi rentan atau rawan pangan (SKPG) | % | 10 | 15,00 | 1.025.790.000 | 15,00 | 578.127.000 | 15,00 | 1.603.917.000 | Kepala Bidang Pangan |
| | | | | 2 | Capaian penguatan cadangan pangan | % | 20,87 | 24,49 | | 29,07 | | 29,07 | | |
| | | | | 3 | Capaian pengelolaan keamanan pangan segar | % | 10 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Skor PPH Konsumsi | % | 81,90 | 84,00 | | 85,21 | | 85,21 | | |
| **12** | **04** | | **URUSAN PERTANAHAN** | | | | | | **518.448.000** | | **1.023.962.000** | | **1.542.410.000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |
| 12 | 04 | 11 | Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan | 1 | Capaian fasilitasi administrasi pertanahan | % | 30 | 40,00 | 518.448.000 | 50 | 1.023.962.000 | 50 | 1.542.410.000 | |
| | | | | 2 | Presentase konflik tanah yang terselesaikan | % | 100 | 65,00 | | 100 | | 100 | | |
| 12 | 05 | | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 33.445.892.907 | | 31.515.443.925 | | 64.961.336.832 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 12 | 05 | 11 | Program Penataan dan Pena'atan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 | Capaian penyelenggaraan sistem informasi Lingkungan Hidup daerah | % | 20 | 20,00 | 668.034.300 | 0 | 387.268.000 | 0 | 1.055.302.300 | |
| | | | | 2 | Cakupan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup | % | 20 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 12 | 05 | 12 | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 | Cakupan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | % | 80 | 66,37 | 1.404.564.500 | 46,37 | 1.721.371.500 | 46,37 | 3.125.936.000 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pemulihan Kerrusakan Lingkungan | % | 10 | 0 | | 0,097 | | 0,097 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Pemeliharaan Lingkungan Hidup | % | 10 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 12 | 05 | 13 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1 | Capaian pengendalian Limbah B3 | | 20 | 22,00 | 31.373.294.107 | 0 | 29.406.804.425 | 0 | 60.780.098.532 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengurangan Sampah | % | 50 | 4,00 | | 6,10 | | 6,10 | | |
| **12** | **06** | | **URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **3.102.753.591** | | **2.917.561.500** | | **6.020.315.091** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| 12 | 06 | 11 | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 97,4 | 98,75 | 357.952.473 | 98,00 | 148.361.000 | 98,00 | 506.313.473 | |
| | | | | 2 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | % | 82,2 | 94,09 | | 84,00 | | 84,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 4 | 14,08 | | 14,00 | | 14,00 | | |
| | | 12 | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | 1 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk | % | 34 | 42,00 | 300.000.000 | 40,00 | 150.000.000 | 40,00 | 450.000.000 | |
| | | | | 2 | Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan | % | 65 | 76,00 | | 69,00 | | 69,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | % | 36 | 37,00 | | 38,00 | | 38,00 | | |
| 12 | 06 | 13 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 | Capaian Pembinaan SDM Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi | % | 100 | 100 | 950.759.618 | 100 | 477.232.500 | 100 | 1.427.992.118 | |
| | | | | 2 | Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | % | NA | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Capaian Pembersihan data kependudukan | % | NA | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 12 | 06 | 14 | Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan | 1 | Persentase OPD/Instansi Yang menjalin Perjanjian Kerjasama | % | 100 | 7,00 | 1.494.041.500 | 40,00 | 2.141.968.000 | 40,00 | 3.636.009.500 | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 2 | Persentase Inovasi Pelayanan | % | 100 | 7,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 3 | Persentase OPD/Instansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | % | 0 | 7,00 | | 31,00 | | 31,00 | | |
| **12** | **07** | | **URUSAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | | | | **5.327.317.500** | | **1.314.380.000** | | **6.641.697.500** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| 12 | 07 | 11 | Program Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Cakupan TTG yang dimanfaatkan | % | 10 | 10,00 | 5.327.317.500 | 30,00 | 1.314.380.000 | 30,00 | 6.641.697.500 | |
| | | | | 2 | Capaian LPM Kategori Aktif | % | 10 | 10,00 | | 30,00 | | 30,00 | | |
| **12** | **08** | | **URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DA KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **4.670.322.492** | | **3.576.917.541** | | **8.247.240.033** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| 12 | 8 | 11 | Program Pengendalian Penduduk | 1 | Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB | % | 62 | 48,00 | 3.024.217.250 | 67,00 | 1.980.710.800 | 67,00 | 5.004.928.050 | |
| | | | | 2 | Keluarga Aktif dalam Kelompok Kegiatan KB | % | 80 | 81,40 | | 83,00 | | 83,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Promosi KIE-KB | % | 60 | 68,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | | | | 4 | Jumlah PPKBD yang ada disetiap kelurahan | % | 60 | 67,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | | | | 5 | Cakupan Data Keluarga yang Akurat | % | 75 | 80,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| 12 | 08 | 12 | Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga | 1 | Capaian PPM peserta KB | % | 62 | 66,00 | 1.646.105.242 | 67,00 | 1.596.206.741 | 67,00 | 3.242.311.983 | |
| | | | | 2 | Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif | % | 62 | 72,00 | | 74,00 | | 74,00 | | |
| **12** | **09** | | **URUSAN PERHUBUNGAN** | | | | | | **14.142.910.164** | | **11.783.409.162** | | **25.926.319.326** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| 12 | 09 | 11 | Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) | 1 | Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan | % | 60 | 63,00 | 5.296.750.700 | 65,00 | 4.726.671.000 | 65,00 | 10.023.421.700 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengendalian Potensi Titik Kemacetan | % | 60 | 64,00 | | 65,00 | | 65,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kapasitas SDM Perhubungan | % | 62 | 65,00 | | 62,00 | | 62,00 | | |
| 12 | 09 | 12 | Program Peningkatan Angkutan Darat | 1 | Capaian Angkutan Penumpang Kondisi Baik | % | 75 | *75,00* | 198.262.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 211.462.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Implementasi Andalalin | % | 67 | *68,00* | | 68,00 | | 68,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Perencanaan Pengembangan Angkutan Umum | % | 70 | 72,00 | | 0 | | 0 | | |
| 12 | 09 | 13 | Program Perhubungan Laut | 1 | Capaian Pembangunan Kepelabuhan Penumpang Lokal | % | 60 | 60,00 | 605.133.375 | 0 | 41.906.500 | 0 | 647.039.875 | |
| | | | | 2 | Capaian Keselamatan Pelayaran Laut | % | 70 | 70,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Penyelenggaraan ASDP | % | 60 | 60,00 | | 0 | | 0 | | |
| 12 | 09 | 14 | Program Teknis Sarana dan Prasarana | 1 | Capaian study norma kebijakan, standar dan prosedur Kepala Bidang perhubungan | % | 70 | *70,00* | 8.042.764.089 | 0 | 7.001.631.662 | 0 | 15.044.395.751 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengelolaan Terminal Type C dalam Kondisi Baik | % | 60 | *60,00* | | 63,00 | | 63,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | % | 65 | 60,00 | | 65,00 | | 65,00 | | |
| | | | | 4 | Cakupan Layanan Parkir | % | 65 | 68,00 | | 64,00 | | 64,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 5 | Capaian Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum | % | 63 | 66,00 | | 72,00 | | 72,00 | | |
| | | | | 6 | Capaian Sarana dan Prasarana Tehnik Perhubungan | % | 60 | 60,00 | | 0 | | 0 | | |
| **12** | **10** | | **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **4.646.468.431** | | **5.733.489.542** | | **10.379.957.973** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |
| 12 | 10 | 11 | Program Komunikasi & Informatika | 1 | Capaian penyediaan infrastruktur dan layanan TIK | % | 70 | 80,00 | 1.496.218.052 | 82,00 | 2.392.065.542 | 82,00 | 3.888.283.594 | |
| 12 | 10 | 12 | Program Layanan E-Government | 1 | Capaian implementasi aplikasi E-Government Perangkat Daerah | % | 78 | 80,00 | 1.540.759.802 | 82,00 | 1.122.018.000 | 82,00 | 2.662.777.802 | |
| | | | | 2 | Capaian pembinaan SDM dalam Kepala Bidang komunikasi dan informasi | % | 78 | 80,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| 12 | 10 | 13 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | 1 | Capaian distribusi informasi publik melalui media informasi | Aplikasi | 55 | 80,00 | 1.609.490.577 | 82,00 | 2.219.406.000 | 82,00 | 3.828.896.577 | |
| | | | | 2 | Capaian pembinaan kemitraan komunikasi publik | % | 78 | 80,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Keterbukaan Informasi Publik | % | 78 | 80,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| **12** | **11** | | **URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **943.161.500** | | **407.254.300** | | **1.350.415.800** | **DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| 12 | 11 | 11 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 1 | Persentase koperasi yang dibina | % | 18,67 | 20,00 | 472.097.000 | 21,80 | 60.834.000 | 21,80 | 532.931.000 | |
| | | | | 2 | Capaian koperasi yang aktif | % | 48,53 | 36,17 | | 35,42 | | 35,42 | | |
| 12 | 11 | 12 | Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM | 1 | Persentase Usaha mikro yang dibina | % | NA | 14,30 | 471.064.500 | 0,99 | 346.420.300 | 0,99 | 817.484.800 | |
| | | | | 2 | Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha | % | NA | 10,52 | | 0,79 | | 0,79 | | |
| **12** | **12** | | **URUSAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **1.360.885.344** | | **1.766.409.431** | | **3.127.294.775** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** |
| 12 | 12 | 11 | Program Peningkatan Daya Saing Peneneman Modal | 1 | Realisasi Penambahan Investor PMDN dan PMA | Investor | 891 | 814 | 539.525.000 | 671 | 562.643.000 | 671 | 1.102.168.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengembangan Kawasan Investasi | Zona / Lokasi | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kerjasama Investasi | PK | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 12 | 12 | 12 | Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal | 1 | Capaian Pengendalian Penanaman Modal (Lahan dan Bangunan) | % | 30 | 30,00 | 236.819.600 | 50,00 | 152.575.000 | 50,00 | 389.394.600 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan | % | 20 | 30,00 | | 42,00 | | 42,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | % | 70 | 7,00 | | 4,00 | | 4,00 | | |
| 12 | 12 | 13 | Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | 1 | Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online terintegrasi OSS | Ijin | 53 | 85,00 | 512.482.744 | 86,00 | 508.359.931 | 86,00 | 1.020.842.675 | |
| 12 | 12 | 14 | Program Peningkatan Pelayanan Perijinan | 1 | Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | % | 77,50 | 79,99 | 36.029.000 | 82,00 | 277.060.500 | 82,00 | 313.089.500 | |
| 12 | 12 | 15 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1 | Capaian Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Inovasi | 1 | 0 | 36.029.000 | 0 | 265.771.000 | 0 | 301.800.000 | |
| | | | | 2 | Regulasi Kebijakan Investasi dan Pelayanan Perijinan | Rancangan Peraturan | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| **12** | **13** | | **URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | **4.093.288.000** | | **7.533.511.237** | | **11.626.799.237** | **DINAS PERIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 11 | Program Kepemudaan | 1 | Capaian OKP Mandiri | % | 30 | 40,00 | 1.814.968.000 | 0 | 152.410.000 | 0 | 1.967.378.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Prestasi Propinsi Pemuda Pelopor | % | 60 | 65,00 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 3 | Persentase pemuda yang terbina | % | 2 | 3,00 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 4 | Capaian wirausaha muda | % | 18 | 20,00 | | 0 | | 0 | | |
| 12 | 13 | 12 | Program Keolahragaan | 1 | Cakupan pembinaan atet muda | % | 4 | 20,00 | 2.278.320.000 | 30,00 | 7.381.101.237 | 30,00 | 9.659.421.237 | |
| | | | | 2 | Capaian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah | % | 40 | 50,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | | | 3 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | % | 10 | 30,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian pembinaan Organisasi Olahraga | % | 4 | 10,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian pemasyarakatan olah raga | % | 16 | 20,00 | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | | | | 6 | Capaian pemenuhan sarana prasarana olah raga | % | 30 | 40,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| **12** | **14** | | **URUSAN STATISTIK** | | | | | | **588.157.432** | | **494.950.000** | | **1.083.107.432** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |
| 12 | 14 | 11 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 1 | Capaian informasi pembangunan daerah | % | 78 | 80,00 | 588.157.432 | 82,00 | 494.950.000 | 82,00 | 1.083.107.432 | |
| **12** | **15** | | **URUSAN PERSANDIAN** | | | | | | **139.854.357** | | **113.570.000** | | **253.424.357** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |
| 12 | 15 | 11 | Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi dan Persandian | 1 | Capaian Pengamanan Informasi Satu Pintu | % | NA | 10,00 | 139.854.357 | 20 | 113.570.000 | 20 | 253.424.357 | |
| **12** | **16** | | **URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **3.492.986.659** | | **747.022.500** | | **4.240.009.159** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| 12 | 16 | 11 | Program Kebudayaan | 1 | Meningkatnya kualitas Pelestarian budaya dan kesenian | % | 17,24 | 85,00 | 3.492.986.659 | 85,00 | 747.022.500 | 85,00 | 4.240.009.159 | |
| | | | | 2 | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 100 | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | |
| | | | | 3 | Persentase grup kesenian yang dibina | unit | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Realisasi gedung kesenian | % | 100 | 100 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 5 | Persentase Event budaya daerah setiap tahun | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 | Persentase Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah | % | 75 | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| **12** | **17** | | **URUSAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **1.092.791.568** | | **1.591.978.000** | | **2.684.769.568** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| 12 | 17 | 11 | Program Perpustakaan | 1 | Rasio Jumlah perpustakaan yang di bina | % | 70 | 66,00 | 1.092.791.568 | 66,00 | 1.591.978.000 | 66,00 | 2.684.769.568 | |
| | | | | 2 | Capaian kunjungan perpustakaan | % | 17,16 | 3,00 | | 2,68 | | 2,68 | | |
| | | | | 3 | Capaian koleksi judul buku yang tersedia | % | 89 | 23,00 | | 17,5 | | 17,5 | | |
| **12** | **18** | | **URUSAN KEARSIPAN** | | | | | | **524.537.000** | | **1.240.244.000** | | **1.764.781.000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| 12 | 18 | 11 | Program Kearsipan | 1 | Tingkat pengelolaan arsip statis dan dinamis | % | 0 | 2,68 | 524.537.000 | 0 | 1.240.244.000 | 0 | 1.764.781.000 | |
| | | | | 2 | Prosentase pengelolaan arsip statis dan dinamis | % | 0 | 0 | | 2,68 | | 2,68 | | |
| | | | | 3 | Capaian pembinaan SDM Pengelola arsip | % | 70 | 22,8 | | 22,80 | | 22,80 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | **14.478.014.455** | | **13.284.034.080** | | **27.762.048.535** | |
| **20** | **01** | | **URUSAN KELAUTAN PRIKANAN** | | | | | | **551.206.000** | | **361.452.100** | | **912.658.100** | **DINAS PERTANIAN** |
| 20 | 01 | 11 | Program Pengembangan Produksi dan Pemasaran hasil perikanan | 1 | Persentase Peningkatan Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 10 | 10,00 | 551.206.000 | 8,00 | 361.452.100 | 8,00 | 912.658.100 | |
| | | | | 2 | Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya | % | 20 | 10,00 | | 5,00 | | 5,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian volume pemasaran hasil olahan perikanan | % | 20 | 20,00 | | 16,00 | | 16,00 | | |
| **20** | **02** | | **URUSAN PARIWISATA** | | | | | | **2.809.342.900** | | **1.631.152.500** | | **4.440.495.400** | **DINAS PERIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** |
| 20 | 02 | 11 | Program Promosi pariwisata | 1 | Capaian kerjasama pariwisata | % | 100 | 100 | 1.448.112.900 | 100 | 739.792.000 | 100 | 2.187.904.900 | |
| | | | | 2 | Capaian pengembangan atraksi pariwisata | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Capaian pengembangan ekonomi kreatif pariwisata | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 20 | 02 | 12 | Program pengembangan destinasi pariwisata | 1 | Capaian pengembangan Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) (%) | % | 33 | 33 | 1.361.230.000 | 34,00 | 891.360.500 | 34,00 | 2.252.590.500 | |
| | | | | 2 | Capaian destinasi/objek pariwisata kategori Baik menurut sapta pesona wisata (%) | % | 33 | 33,00 | | 34,00 | | 34,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian pengembangan destinasi/ objek baru pariwisata (%) | % | 100 | 50,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Capaian pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata (%) | % | 33 | 33,00 | | 34,00 | | 34,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian pembinaan Sumber Daya Pariwisata (%) | % | 33 | 33,00 | | 34,00 | | 34,00 | | |
| | | | | 6 | Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan tentang Kuliner | % | NA | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 7 | Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan dalam Sumber Daya Manusia Kepariwisataan tentang Home Stay | % | NA | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 8 | Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mengenai Wisata Warisan Budaya | % | NA | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 9 | Tersedianya sarana pendukung promosi kepariwisataan | % | NA | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| **20** | **03** | | **URUSAN PERTANIAN** | | | | | | **3.360.567.981** | | **1.727.152.200** | | **5.087.720.181** | **DINAS PERTANIAN** |
| 20 | 03 | 11 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian | 1 | Capaian Produksi padi | Ton | 60.375 | 80.253 | 1.480.214.863 | 96.539 | 984.735.950 | 96.539 | 2.464.950.813 | |
| | | | | 2 | Produktivitas padi | Ton/ Ha | 5,8 | 5,49 | | 5,47 | | 5,47 | | |
| | | | | 3 | Produktivitas Jagung | Ton/ Ha | 3,2 | 3,40 | | 4,3 | | 4,3 | | |
| | | | | 4 | Capaian Produksi Hortikultura | Ton | 15,27 | 45 | | 56,40 | | 56,40 | | |
| | | | | 5 | Produktivitas Hortikultura | Ton/ Ha | 3,40 | 25 | | 3,00 | | 3,00 | | |
| 20 | 03 | 12 | Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan | 1 | Persentase peningkatan populasi ternak | % (Ekor) | 1 (42.430) | 1 (43.412) | 1.207.209.918 | 1 (42.855) | 419.545.500 | 1 (42.855) | 1.626.755.418 | |
| | | | | 2 | Capaian produksi Daging (Sapi dan Kerbau) | % (Kg) | 1 (139.518) | 1 (152.400) | | 1 (142.322) | | 1 (142.322) | | |
| | | | | 3 | Capaian penanganan kasus penyakit hewan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Persentase peningkatan produksi hasil olahan peternakan | % (kg) | 1 (448) | 1,04 (469) | | 4,88 (223.010) | | 4,88 (223.010) | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 03 | 13 | Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 1 | Capaian peningkatan Produksi tanaman perkebunan | % | 2 | 2,63 | 673.143.200 | 4,00 | 322.870.750 | 4,00 | 996.013.950 | |
| | | | | 2 | Capaian keberhasilan tumbuh tanaman perkebunan | % | 60 | 63,00 | | 64,00 | | 64,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian teknologi pasca panen tanaman Perkebunan | % | 20 | 20,01 | | 5,00 | | 5,00 | | |
| **20** | **06** | | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | | **6.999.677.574** | | **3.254.728.300** | | **10.254.405.874** | **DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| 20 | 06 | 11 | Program perdagangan | 1 | Cakupan pembinaan perdagangan | % | NA | 18,80 | 1.529.906.574 | 26,32 | 963.963.400 | 26,32 | 2.493.869.974 | |
| | | | | 2 | Capaian pembinaan sengketa konsumen | % | NA | 50,00 | | 48,00 | | 48,00 | | |
| 20 | 06 | 12 | Program Pengelolaan Pasar | 1 | Cakupan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional | % | NA | 6,00 | 5.469.771.000 | 70,00 | 2.290.764.900 | 70,00 | 7.760.535.900 | |
| | | | | 2 | Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Pasar Tradisional | % | NA | 78,00 | | 83,30 | | 83,30 | | |
| | | | | 3 | Persentase PKL tertata | % | NA | 28,00 | | 55,30 | | 55,30 | | |
| **20** | **07** | | **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | **442.162.000** | | **6.113.777.480** | | **6.555.939.480** | **DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| 20 | 07 | 11 | Program pengembangan Industri | 1 | Capaian penerapan Standar Produksi IKM | % | NA | 16,67 | 442.162.000 | 25,00 | 6.113.777.480 | 25,00 | 6.555.939.480 | |
| | | | | 2 | Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM | % | NA | 2,45 | | 3,47 | | 3,47 | | |
| | | | | 3 | Capaian kerjasama dalam promosi produk IKM | % | NA | 10,00 | | 27,78 | | 27,78 | | |
| **20** | **08** | | **URUSAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **315.058.000** | | **195.771.500** | | **510.829.500** | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** |
| 20 | 08 | 11 | Program Penyelenggaraan Transmigrasi | 1 | Capaian Transmigran Yang Ditempatkan | % | 100 | 100 | 315.058.000 | 0 | 195.771.500 | 0 | 510.829.500 | |
| | | | | 2 | Capaian Transmigran Yang Dibina | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | **29.102.129.018** | | **17.970.876.684** | | **47.073.005.702** | |
| **30** | **01** | | **URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **8.154.748.627** | | **6.284.016.944** | | **14.438.765.571** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| 30 | 01 | 11 | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 | Capaian ketersediaan data/informasi bagi perencanaan dan monev pembangunan mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan | % | 85 | 85,00 | 2.355.152.568 | 85,00 | 1.550.013.500 | 85,00 | 3.905.166.068 | |
| | | | | 2 | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dgn perencanaan OPD mitra bidang infratruktur dan kewilayahan | % | 85 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian kinerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilyahan | % | 85 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| 30 | 01 | 12 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 1 | Capaian ketersediaan data/informasi bagi perencanaan dan monev pembangunan ekonomi | % | 85 | 85,00 | 1.095.198.142 | 85,00 | 1.211.598.400 | 85,00 | 2.306.796.542 | |
| | | | | 2 | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah (RKPD) dgn perencanaan OPD (Renja OPD) Mitra Bidang ekonomi dan SDA | % | 85 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | 3 | Tingkat pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah Mitra Bidang ekonomi dan SDA | % | 85 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| 30 | 01 | 13 | Program perencanaan pembangunan daerah | 1 | Capaian keterisian data/informasi bagi perencanaan dan monev pembangunan daerah | % | 50 | 45,00 | 3.391.599.261 | 50,00 | 2.688.769.544 | 50,00 | 6.080.368.805 | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 2 | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah (RKPD) dan perencanaan OPD (Renja OPD) | % | 90 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Tingkat pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah | % | 85 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| 30 | 01 | 14 | Program perencanaan sosial dan budaya | 1 | Capaian ketesediaan data/informasi bagi perencanaan dan monev pembangunan Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 85 | 85,00 | 1.312.798.656 | 86,00 | 833.635.500 | 86,00 | 2.146.434.156 | |
| | | | | 2 | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dgn perencanaan OPD mitra pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 85 | 85,00 | | 86,00 | | 86,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian kinerja perangkat daerah mitra Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 85 | 85,00 | | 86,00 | | 86,00 | | |
| **30** | **02** | | **URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **1.944.789.483** | | **701.977.500** | | **2.646.766.983** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| 30 | 02 | 11 | Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK | 1 | Capaian implementasi hasil litbang untuk perangkat daerah | % | 70 | 70,00 | 1.944.789.483 | 80,00 | 701.977.500 | 80,00 | 2.646.766.983 | |
| | | | | 2 | Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 60 | 50,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| **30** | **03** | | **URUSAN KEUANGAN** | | | | | | **11.899.929.225** | | **7.462.567.380** | | **19.362.496.605** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| 30 | 03 | 11 | Program Penyusunan APBD | 1 | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 2.418.318.794 | 100 | 1.531.801.084 | 100 | 3.950.119.878 | |
| | | | | 2 | Capaian Dukungan Kebijakan Penyusunan APBD | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Persentase kepatuhan PD terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah | % | 80 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| 30 | 03 | 12 | Program Penatausahaan APBD | 1 | Capaian Penerbitan SPD | Dok | 276 | 334 | 886.641.491 | 276 | 984.010.509 | 276 | 1.870.652.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Penerbitan SP2D | Dok | 14.000 | 18.095 | | 14.000 | | 14.000 | | |
| 30 | 03 | 13 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | % | 20 | 20,00 | 3.407.469.003 | 20,00 | 1.246.248.816 | 20,00 | 4.653.717.819 | |
| | | | | 2 | Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah | % | 20 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | % | 20 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 30 | 03 | 14 | Program Akuntansi | 1 | Persentase Kesesuaian Pelaporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan | % | 95 | 100 | 1.440.043.200 | 100 | 954.381.230 | 100 | 2.394.424.430 | |
| 30 | 03 | 15 | Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP | 1 | Capaian Pendapatan Non PBB dan BPHTB | % | 106 | 100 | 1.658.453.497 | 100 | 1.127.510.500 | 100 | 2.785.963.997 | |
| 30 | 03 | 16 | Program Pendapatan Pajak Daerah | 1 | Capaian Pendapatan PBB dan BPHTB | % | 112 | 103 | 2.089.003.240 | 90,00 | 1.618.615.241 | 90,00 | 3.707.618.481 | |
| | | | | 2 | Capaian Pengendalian Objek dan Subjek Pajak | % | 20 | 103 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Capaian PAD Bukan Pajak | % | 20 | 98,09 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| **30** | **04** | | **URUSAN KEPEGAWAIAN** | | | | | | **5.911.571.718** | | **3.228.786.260** | | **9.140.357.978** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| 30 | 04 | 11 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | 1 | Capaian pengembangan Sumber Daya Aparatur | % | 85 | 82,00 | 1.346.858.634 | 89,00 | 1.055.203.000 | 89,00 | 2.402.061.634 | |
| | | | | 2 | Capaian pembinaan dan penanganan disiplin pegawai | % | 90 | 90,00 | | 93,00 | | 93,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian assestment aparatur | % | 85 | 80,00 | | 89,00 | | 89,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | 04 | 12 | Program Administrasi Kepegawaian | 1 | Capaian Pengembangan Administrasi Kepegawaian | % | 50 | 55,00 | 752.067.984 | 65,00 | 982.899.760 | 65,00 | 1.734.967.744 | |
| | | | | 2 | Capaian Implementasi e-SKP | % | 85 | 60,00 | | 89,00 | | 89,00 | | |
| 30 | 04 | 13 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 | Capaian implementasi hasil Diklat yang dievaluasi | % | 50 | 55,00 | 3.812.645.100 | 70,00 | 1.190.683.500 | 70,00 | 5.003.328.600 | |
| | | | | 2 | Tingkat kelulusan Diklat | % | 98 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **30** | **05** | | **URUSAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | **1.191.089.965** | | **293.528.600** | | **1.484.618.565** | **BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** |
| 30 | 05 | 11 | Program Pembinaan dan Pengadaan Barang/Jasa | 1 | Cakupan pelaksanaan Lelang Pengadaan | % | 100 | 90,76 | 560.688.500 | 100 | 44.308.600 | 100 | 604.997.100 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pelaksanaan Non Lelang | % | 100 | 0 | | 100 | | 100 | | |
| 30 | 05 | 12 | Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barand/Jasa Pemerintah | 1 | Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan | % | 100 | 100 | 630.401.465 | 100 | 249.220.000 | 100 | 879.621.465 | |
| | | | | 2 | Capaian mitigasi Hukum pengadaan barang dan jasa | % | 5 | 9,23 | | 5,00 | | 5,00 | | |
| | | | **PENDUKUNG URUSAN** | | | | | | **65.580.701.424** | | **62.754.000.001** | | **128.334.701.425** | |
| **40** | | | **PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **65.580.701.424** | | **62.754.000.001** | **0** | **128.334.701.425** | |
| | | | **DPRD** | | | | | | **40.463.379.764** | | **40.440.815.090** | | **80.904.194.854** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** |
| 40 | 02 | 11 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 1 | Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD | % | 90 | 85,00 | 40.463.379.764 | 90,00 | 40.440.815.090 | 90,00 | 80.904.194.854 | |
| | | | | 2 | Capaian kinerja persidangan dan Risalah | % | 90 | 87,00 | | 92,00 | | 92,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian pembahasan Perda yang ditangani | % | 90 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | **PENGAWASAN** | | | | | | **7.281.630.500** | | **3.862.353.970** | | **11.143.984.470** | **INSPEKTORAT** |
| 40 | 01 | 12 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1 | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan | % | 55,42 | 100 | 7.281.630.500 | 76,97 | 3.862.353.970 | 76,97 | 11.143.984.470 | |
| | | | | 2 | Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Persentase hasil evaluasi LKjIP OPD dengan nilai B | % | 9 | 100 | | 66,67 | | 66,67 | | |
| | | | | 4 | Maturitas SPIP Perangkat Daerah | % | 60 | 100 | | 3,00 | | 3,00 | | |
| | | | | 5 | Capaian Kompetensi APIP | % | 100 | 100 | | 79,17 | | 79,17 | | |
| | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **17.835.691.160** | | **18.450.830.941** | | **36.286.522.101** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| 40 | 01 | 13 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 1 | Capaian Penataan Wilayah administratif kecamatan dan Kelurahan | % | 100 | 50,00 | 153.665.000 | 100 | 68.316.000 | 100 | 221.981.000 | |
| 40 | 01 | 14 | Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum | 1 | Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | % | 100 | 95,00 | 675.584.800 | 100 | 514.364.000 | 100 | 1.189.948.800 | |
| 40 | 01 | 15 | Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan | 1 | Capaian Kecamatan dan Kelurahan Kateori Berkembang | % | 100 | 100 | 631.879.000 | 100 | 601.399.000 | 100 | 1.233.278.000 | |
| 40 | 01 | 17 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah.Wakil Kepala Daerah | 1 | Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemrintah Daerah dan Instansi Vertikal | % | 100 | 100 | 4.474.820.880 | 100 | 5.614.904.000 | 100 | 10.089.724.880 | |
| | | | | 2 | Capaian Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Hari Besar Nasional | % | NA | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 40 | 01 | 18 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Jumlah Perda dan Perwalkot Yang di syahkan | Dok | 38 | 72,40 | 2.630.024.000 | 73,61 | 2.482.913.000 | 73,61 | 5.112.937.000 | |
| | | | | 2 | Jumlah Penanganan Kepwalkot, | Dok | 227 | 72,40 | | 73,61 | | 73,61 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 3 | Jumlah Sosialisasi Perundang-Undangan | Dok | 10 | 72,40 | | 73,61 | | 73,61 | | |
| 40 | 01 | 19 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1 | Jumlah OPD yang telah menerapkan Anjab, ABK dan Evjab | OPD | 6 | 100 | 265.343.000 | 6,00 | 269.600.000 | 6,00 | 534.943.000 | |
| 40 | 01 | 20 | Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik | OPD | 2 OPD | 86,00 | 1.691.941.892 | 45,29 | 2.144.857.012 | 45,29 | 3.836.798.904 | |
| | | | | 2 | Capaian OPD yang telah melaksanakan Tupoksi sesuai kewenangan | % | 60 | 86,49 | | 45,29 | | 45,29 | | |
| | | | | 3 | Capaian nilai LKjIP pada komponen pelaporan dan evaluasi | Bobot | 9,29 | 86,49 | | 52,25 | | 52,25 | | |
| 40 | 01 | 21 | Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah | 1 | Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian | % | 100 | 80,00 | 557.805.390 | 75,00 | 598.529.800 | 75,00 | 1.156.335.190 | |
| | | | | 2 | Persentase Pemantauan dan Pem binaan dunia usaha sumber daya alam dan pertanian | % | 100 | 80,00 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| 40 | 01 | 22 | Program Pengendalian Pembangunan | 1 | Capaian Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah | % | 100 | 84,61 | 430.348.230 | 100 | 346.403.200 | 100 | 776.751.430 | |
| 40 | 01 | 23 | Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan | 1 | Capaian Pembinaan Kerohanian Apartur dan Masyarakat | % | 100 | 90,00 | 5.878.626.368 | 84,62 | 5.394.553.537 | 84,62 | 11.273.179.905 | |
| | | | | 2 | Capaian Fasilitasi keagamaan | % | 100 | 90,00 | | 84,62 | | 84,62 | | |
| | | | | 3 | Capaian Pembinaan Kemasyarakatan | % | 100 | 85,00 | | 84,62 | | 84,62 | | |
| 40 | 01 | 24 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1 | Capaian Impelementasi Kerjasama Daerah | % | 100 | 69,23 | 445.652.600 | 85,71 | 414.991.392 | 85,71 | 860.643.992 | |
| | | | | 2 | Capaian Invplementasi Ivestatsi Daerah | % | 100 | 69,23 | | 85,71 | | 85,71 | | |
| | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **1.525.665.000** | | **663.430.000** | | **2.189.095.000** | **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | | | **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **1.525.665.000** | | **663.430.000** | | **2.189.095.000** | **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| 40 | 01 | 25 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan | 1 | Capaian harmonisasi antar lembaga | % | 100 | 85,00 | 758.960.000 | 85,00 | 270.870.000 | 85,00 | 1.029.830.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian pengendalian potensi konflik | % | 100 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| 40 | 01 | 25 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 1 | Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat | % | 100 | 85,00 | 766.705.000 | 81,00 | 392.560.000 | 81,00 | 1.159.265.000 | |
| | | | **KEWILAYAHAN** | | | | | | **40.759.648.364** | | **74.996.576.757** | | **115.756.225.121** | |
| | | | **KECAMATAN SERANG** | | | | | | **8.680.458.315** | | **15.897.029.162** | | **24.577.487.477** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu | % | 70 | 85,00 | 183.204.000 | 85,00 | 282.532.000 | 85,00 | 465.736.000 | |
| | | | | 2 | Capaian realisasi distribusi SPPT | % | 60 | 95,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian jalan gang/kelurahan (sebagai Infrastruktur Kecamatan) dalam kondisi baik | % | 65 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Penanganan K3 | % | 65 | 70,00 | | 0 | | 0 | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan | % | 60 | 55,00 | 397.180.000 | 60,00 | 102.335.000 | 60,00 | 499.515.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Kelurahan Sehat | % | 70 | 55,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kelurahan Ramah Anak | % | 60 | 75,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 4 | Cakupan Kampung Tematik | % | 60 | 55,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 5 | Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir | % | 60 | 50,00 | | 100 | | 100 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 70 | 65,00 | 3.917.400.000 | 100 | 7.734.136.399 | 100 | 11.651.536.399 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 70 | 60,00 | 514.102.000 | 70,00 | 470.407.100 | 70,00 | 984.509.100 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | % | NA | 65,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| 50 | 01 | 15 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | 1 | Capaian pembangunan Sarana dan prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 70 | 68,00 | 3.668.572.315 | 100 | 4.184.646.113 | 100 | 7.853.218.428 | |
| 50 | 01 | 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Kelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai target/rencana | % | 0 | 0 | - | 60,00 | 3.122.972.550 | 60,00 | 3.122.972.550 | |
| | | | **KECAMATAN CIPOCOK JAYA** | | | | | | **5.658.390.000** | | **8.711.312.435** | | **14.369.702.435** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu | % | 90 | 90,00 | 623.048.000 | 80,00 | 264.216.000 | 80,00 | 887.264.000 | |
| | | | | 2 | Capaian realisasi distribusi SPPT | % | 60 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 3 | capaian jalan gang /kelurahan (sebagai infrastruktur kecamatan) dalam kondisi baik | % | 60 | 60,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian pengamanan K3 | % | 60 | 60,00 | | 100 | | 60 | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan | % | 60 | 60,00 | 378.340.000 | 70,00 | 189.628.215 | 70,00 | 567.968.215 | |
| | | | | 2 | Capaian kelurahan sehat | % | 60 | 60,00 | | 35,00 | | 35,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kelurahan Ramah Anak | % | 60 | 60,00 | | 35,00 | | 35,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Kampung tematik | % | NA | 0 | | 35,00 | | 35,00 | | |
| | | | | 5 | Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir | % | 40 | 40,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 70 | 75,00 | 1.862.360.000 | 68,00 | 4.274.452.000 | 68,00 | 6.136.812.000 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 60 | 60,00 | 459.029.000 | 80,00 | 683.125.400 | 80,00 | 1.142.154.400 | |
| | | | | 2 | Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan | % | 60 | 60,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| 50 | 01 | 15 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | 1 | Capaian pembangunan sarana prasarana infrastruktur kelurahan sesuai target/rencana | % | 70 | 73,00 | 2.335.613.000 | 80,00 | 2.301.939.800 | 80,00 | 4.637.552.800 | |
| 50 | 01 | 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai target/rencana | % | - | - | - | 20,00 | 997.951.020 | 20,00 | 997.951.020 | |
| | | | **KECAMATAN KASEMEN** | | | | | | **6.259.362.000** | | **10.844.915.759** | | **17.104.277.759** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu | % | 80 | 85,00 | 403.018.000 | 73,86 | 305.752.000 | 73,86 | 708.770.000 | |
| | | | | 2 | Capaian realisasi distribusi SPPT | % | 60 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian sebagai Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik | % | 60 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Penanganan K3 | % | 60 | 100 | | 0 | | 0 | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan | % | 60 | 60,00 | 543.160.000 | 60,00 | 429.320.000 | 60,00 | 972.480.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Kelurahan Sehat | % | 10 | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 3 | Capaian Kelurahan Ramah Anak | % | 20 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Kampung tematik | % | 20 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | | | 5 | Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 90 | 100 | 1.730.900.000 | 100 | 4.097.455.000 | 100 | 5.828.355.000 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 60 | 70,00 | 873.905.000 | 70,00 | 875.097.500 | 70,00 | 1.749.002.500 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | % | 60 | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| 50 | 01 | 15 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 60 | 99,77 | 2.708.379.000 | 100 | 2.848.373.734 | 100 | 5.556.752.734 | |
| 50 | 01 | 16 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai target/rencana | % | 30 | 0 | - | 60,00 | 2.288.917.525 | 60,00 | 2.288.917.525 | |
| | | | **KECAMATAN TAKTAKAN** | | | | | | **6.795.234.872** | | **13.580.949.094** | | **20.376.183.966** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu | % | 90 | 70,00 | 445.665.000 | 70,00 | 102.100.000 | 70,00 | 547.765.000 | |
| | | | | 2 | Capaian realisasi distribusi SPPT | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Capaian Jalan Gang/Kelurahan (sebagai infrastruktur Kecamatan) dalam kondii baik | % | 60 | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Penanganan K3 | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | Cakupan Pembinan sosial kemasyarakatan kecamatan | % | 60 | 100 | 342.069.000 | 100 | 202.205.909 | 100 | 544.274.909 | |
| | | | | 2 | Capaian Penanggulangan masalah sosial | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 | Capaian kelurahan Sehat | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 | Capaian kelurahan Ramah anak | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 5 | Capaian pembinaan mayarakat tingkat kecamatan | % | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 | Capaian Kampung tematik | % | NA | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 7 | Realisasi Pengajuan usulan musrembang tingkat kecamatan yang dikomodir | % | 40 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 70 | 75,00 | 1.957.305.000 | 100 | 4.629.920.887 | 100 | 6.587.225.887 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 60 | 60,00 | 504.318.000 | 75,00 | 535.188.065 | 75,00 | 1.039.506.065 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | % | 60 | 60,00 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| 50 | 01 | 15 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | 1 | Capaian Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 70 | 73,00 | 3.545.877.872 | 70,00 | 3.999.871.800 | 70,00 | 7.545.749.672 | |
| 50 | 01 | 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kkelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai target/rencana | % | 0 | 0 | - | 70,00 | 4.111.662.433 | 70,00 | 4.111.662.433 | |
| | | | **KECAMATAN WALANTAKA** | | | | | | **7.546.975.586** | | **15.083.447.703** | | **22.630.423.289** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu | % | 70 | 85,00 | 446.097.600 | 80,00 | 400.513.000 | 80,00 | 846.610.600 | |
| | | | | 2 | Capaian realisasi distribusi SPPT | % | 90 | 85,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian sebagai Infrastruktur Kecamatan dalam | % | 20 | 85,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |

| KODE | | | Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | kondisi baik | | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | Cakupan pembinaan masyarakat tingkat kecamatan | % | 60 | 65,00 | 372.607.100 | 40,00 | 252.454.200 | 40,00 | 625.061.300 | |
| | | | | 2 | Capaian Kelurahan Sehat | % | 80 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kelurahan Ramah Anak | % | 50 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Kampung tematik | % | 50 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | | | | 5 | Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir | % | 100 | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 100 | 60,00 | 1.800.930.000 | 68,00 | 4.473.888.000 | 68,00 | 6.274.818.000 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 100 | 50,00 | 1.193.416.000 | 60,00 | 921.768.500 | 60,00 | 2.115.184.500 | |
| | | | | 2 | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | % | 100 | 50,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| 50 | 01 | 15 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 0 | 60,00 | 3.733.924.886 | 65,00 | 4.413.682.653 | 65,00 | 8.147.607.539 | |
| 50 | 01 | 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana | % | 0 | 0 | - | 40,00 | 4.621.141.350 | 40,00 | 4.621.141.350 | |
| | | | **KECAMATAN CURUG** | | | | | | **5.819.227.591** | | **10.878.922.604** | | **16.698.150.195** | |
| 50 | 01 | 11 | Program Pemerintahan Umum Kecamatan | 1 | Cakupan Pelayanan PATEN Tepat Waktu | % | 60 | 80,00 | 628.746.000 | 88 | 161.812.000 | 88 | 790.558.000 | |
| | | | | 2 | Capaian Jalan gang / Kelurahan (sebagai infrastruktur Kecamatan ) dalam Kondisi Baik | % | 90 | 80,00 | | 80 | | 80 | | |
| | | | | 3 | Capaian Penanganan K3 | % | 90 | 70,00 | | 80 | | 80 | | |
| | | | | 4 | Capaian Realisasi distribusi SPPT | % | 60 | 70,00 | | 100 | | 100 | | |
| 50 | 01 | 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | 1 | Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan | % | 60 | 70,00 | 321.649.536 | 82,00 | 414.946.000 | 82,00 | 736.595.536 | |
| | | | | 2 | Capaian penanggulangan Masalah sosial | % | 70 | 70,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 3 | Capaian Kelurahan Sehat | % | 50 | 70,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 4 | Capaian Kelurahan Ramah Anak | % | 50 | 70,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 5 | Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan | % | 65 | 70,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 6 | Capaian Kampung tematik | % | 60 | 85,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | | | | 7 | Realisasi Pengajuan Usulan Musrenbang Tingkat kecamatan yang diakomodir | % | 70 | 60,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| 50 | 01 | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam kegiatan Pembangunan | % | 70 | 100 | 1.333.177.000 | 20,00 | 2.525.861.925 | 20,00 | 3.859.038.925 | |
| 50 | 01 | 14 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T) | 1 | Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan | % | 40 | 75,00 | 345.695.000 | 80,00 | 375.738.781 | 80,00 | 721.433.781 | |
| 50 | 01 | 15 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan ( DAU-T) | 1 | Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan sesuai Target / remcana | % | 30 | 90,00 | 3.189.960.055 | 82,00 | 3.451.146.285 | 82,00 | 6.641.106.340 | |
| 50 | 01 | 16 | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 | Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai target/rencana | % | - | - | - | 82,00 | 3.949.417.613 | 82,00 | 3.949.417.613 | |

# Tabel 7.4
# Capaian Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020 (Non Urusan)

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | **26.487.402.866** | | **5.175.434.969** | | **31.662.837.835** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | *11* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 5.967.432.766 | 100 | 3.884.325.114 | 100 | 9.851.757.880 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 376.905.000 | 100 | 311.760.000 | 100 | 688.665.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 20.143.065.100 | 100 | 979.349.855 | 100 | 21.122.414.955 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | **4.099.489.694** | | **3.033.324.305** | | **7.132.813.999** | DINAS KESEHATAN |
| | | *11* | *02* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 20,00 | 0 | 3.682.385.294 | 20,00 | 2.757.924.205 | 20,00 | 6.440.309.499 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 20,00 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 20,00 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *11* | *02* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 96.173.000 | 100 | 49.183.600 | 100 | 145.356.600 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *02* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 320.931.400 | 100 | 226.216.500 | 100 | 547.147.900 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | **3.698.643.380** | | **3.296.197.436** | | **6.994.840.816** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | *11* | *03* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 3.142.996.780 | 100 | 2.973.132.236 | 100 | 6.116.129.016 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *03* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 44.025.600 | 100 | 47.032.200 | 100 | 91.057.800 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *03* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 511.621.000 | 100 | 276.033.000 | 100 | 787.654.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKINA | | | | | | | | | | **3.042.432.037** | | **4.086.970.645** | | **7.129.402.682** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | *11* | *04* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 80,00 | 80,00 | 2.511.418.037 | 80,00 | 3.675.352.845 | 80,00 | 6.186.770.882 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *04* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 248.844.000 | 100 | 84.132.800 | 100 | 332.976.800 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 75,00 | 75,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | *11* | *04* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 282.170.000 | 100 | 327.485.000 | 100 | 609.655.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | **2.255.800.000** | | **1.910.091.500** | | **4.165.891.500** | SATUAN POLISI PAMONG |
| | | *11* | *05* | *001* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | NA | 70,00 | 1.937.452.300 | 70,00 | 1.724.250.800 | 70,00 | 3.661.703.100 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 99,40 | 100 | | 98,00 | | 98,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 97,00 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *05* | *002* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 25.807.000 | 100 | 23.462.000 | 100 | 49.269.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11* | *05* | *003* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 292.540.700 | 100 | 162.378.700 | 100 | 454.919.400 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | **1.097.871.233** | | **1.596.996.700** | | **2.694.867.933** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | *11* | *05* | *.01* | Program Pelayanan dan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 906.201.233 | 100 | 1.441.871.700 | 100 | 2.348.072.933 | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 2 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11 05 02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 24.120.000 | 100 | 10.830.000 | 100 | 34.950.000 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11 05 03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 167.550.000 | 100 | 144.295.000 | 100 | 311.845.000 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 7 | DINAS SOSIAL | | | | | | | **2.403.197.666** | | **3.368.746.207** | | **5.771.943.873** | DINAS SOSIAL |
| | | *11 05 01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 2.065.874.666 | 100 | 3.063.265.207 | 100 | 5.129.139.873 | |
| | | | | 2 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11 05 02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 45.070.000 | 100 | 44.160.000 | 100 | 89.230.000 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *11 05 03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 292.253.000 | 100 | 261.321.000 | 100 | 553.574.000 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | **1.415.161.994** | | **1.399.576.568** | | **2.938.848.562** | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | *12 01 01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.173.487.694 | 100 | 1.228.883.468 | 100 | 2.402.371.162 | |
| | | | | 2 Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12 01 02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan K\euangan | % | 100 | 100 | 21.400.000 | 100 | 4.490.000 | 100 | 150.000.000 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12 01 03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 220.274.300 | 100 | 166.203.100 | 100 | 386.477.400 | |
| | | | | 2 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | **1.428.197.409** | | **1.069.120.809** | | **2.497.318.218** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | *12* | *02* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.149.543.809 | 100 | 904.344.409 | 100 | 2.053.888.218 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *02* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 19.660.000 | 100 | 13.575.000 | 100 | 33.235.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *02* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 258.993.600 | 100 | 151.201.400 | 100 | 410.195.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | **2.161.305.099** | | **1.539.336.664** | | **3.700.641.763** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | *12* | *05* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.790.005.999 | 80,00 | 1.395.441.664 | 80,00 | 3.185.447.663 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *05* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 26.669.500 | 100 | 17.490.000 | 100 | 44.159.500 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 85 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *02* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 344.629.600 | 100 | 126.405.000 | 100 | 471.034.600 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 85 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | **7.801.006.387** | | **4.188.290.526** | | **11.989.296.913** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | *12* | *06* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 0 | 85,00 | 6.592.407.187 | 88,00 | 3.324.647.526 | 88,00 | 9.917.054.713 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 83,00 | 85,00 | | 87,00 | | 87,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *06* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 39.735.000 | 100 | 19.596.000 | 100 | 59.331.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | *12* | *06* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 1.168.864.200 | 100 | 844.047.000 | 100 | 2.012.911.200 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | **3.024.970.437** | | **2.065.800.682** | | **5.090.771.119** | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | *12* | *09* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 70,00 | 77,00 | 2.853.850.437 | 70,00 | 1.954.576.682 | 70,00 | 4.808.427.119 | |
| | | | | | | 2 | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik | % | 80,00 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 85,00 | 100 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat Ketersedian Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 90,00 | 100 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | 12 | *09* | 02 | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | % | 100 | 100 | 34.290.000 | 100 | 27.576.000 | 100 | 61.866.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | 12 | *09* | 03 | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 136.830.000 | 100 | 83.648.000 | 100 | 220.478.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | **4.825.527.142** | | **2.592.397.088** | | **7.417.924.230** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | *12* | *10* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 70,00 | 75,00 | 4.318.298.142 | 80,00 | 2.315.819.088 | 80,00 | 6.634.117.230 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 80,00 | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 80,00 | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *10* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 47.198.000 | 100 | 61.666.000 | 100 | 108.864.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 75,00 | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *12* | *10* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 460.031.000 | 100 | 214.912.000 | 100 | 674.943.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 75,00 | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | **2.463.499.355** | | **1.925.010.749** | | **4.388.510.104** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | *12* | *11* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | B- | B | 1.911.864.355 | A- | 1.549.292.649 | A- | 3.461.157.004 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 65,00 | 82,54 | | 74,00 | | 74,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 90,00 | 82,54 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | `` | 100 | 82,54 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | *12* | *11* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 126.898.000 | 100 | 95.880.000 | 100 | 222.778.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *11* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 424.737.000 | 100 | 279.838.100 | 100 | 704.575.100 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 15 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | **2.146.368.808** | | **4.647.845.118** | | **13.455.300.150** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | *12* | *17* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.869.340.808 | 100 | 4.444.261.918 | 100 | 6.313.602.726 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *17* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 77.648.000 | 100 | 87.253.200 | 100 | 164.901.200 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *17* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 199.380.000 | 100 | 116.330.000 | 100 | 315.710.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 16 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | **2.028.491.670** | | **1.866.696.511** | | **3.895.188.181** | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | *12* | *13* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 70,00 | 70,00 | 1.716.701.170 | 75,00 | 1.688.310.211 | 75,00 | 3.405.011.381 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 80,00 | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *13* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 90,00 | 90,00 | 12.480.000 | 100 | 13.744.800 | 100 | 26.224.800 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | *12* | *13* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 299.310.500 | 100 | 164.641.500 | 100 | 463.952.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| 17 | DINAS PERTANIAN | | | | | | | | | | **2.524.808.136** | | **1.781.230.316** | | **4.306.038.452** | DINAS PERTANIAN |
| | | *20* | *03* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 70,00 | 70,00 | 2.101.111.136 | 75,00 | 1.547.852.116 | 75,00 | 3.648.963.252 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *20* | *03* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | - | 100 | 30.747.000 | 100 | 30.747.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *20* | *03* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 14,00 | 14,00 | 423.697.000 | 100 | 202.631.200 | 100 | 626.328.200 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 18 | DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN KOPERASI USAHA MIKRO | | | | | | | | | | **3.063.116.192** | | **1.922.411.372** | | **4.985.527.564** | DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN KOPERASI USAHA MIKRO |
| | | *12* | *11* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 75,00 | 2.739.054.192 | 100 | 1.674.834.972 | 100 | 4.413.889.164 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *11* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 29.821.800 | 100 | 44.631.800 | 100 | 74.453.600 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *12* | *11* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 294.240.200 | 100 | 202.944.600 | 100 | 497.184.800 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | **4.036.439.893** | | **3.729.570.579** | | **7.766.010.472** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | *30* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | % | 85,00 | 85,00 | 3.487.939.736 | 85,00 | 2.966.876.579 | 85,00 | 6.454.816.315 | |
| | | | | | | 2 | Presentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 85,00 | 85,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 57.049.000 | 100 | 91.568.000 | 100 | 148.617.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *05* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 491.451.157 | 100 | 671.126.000 | 100 | 1.162.577.157 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | **6.113.331.175** | | **6.705.676.488** | | **12.819.007.663** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | *30* | *03* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 4.634.905.625 | 75,00 | 5.225.281.404 | 75,00 | 9.860.187.029 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *03* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 266.943.000 | 100 | 257.594.000 | 100 | 524.537.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *03* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 1.211.482.550 | 113,24 | 1.222.801.084 | 113,24 | 2.434.283.634 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | **13.705.374.131** | | **14.304.375.474** | | **72.335.268.537** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | *30* | *04* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.916.646.370 | 100 | 2.002.477.851 | 100 | 3.919.124.221 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *04* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 57.934.300 | 100 | 23.166.600 | 100 | 81.100.900 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *04* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 333.407.000 | 100 | 145.929.800 | 100 | 479.336.800 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 22 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA | | | | | | | | | | **1.617.713.421** | | **966.710.700** | | **2.584.424.121** | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA |
| | | *30* | *05* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.494.723.421 | 60,00 | 859.329.300 | 60,00 | 2.354.052.721 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 95,00 | | 95,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *30* | *05* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 16.350.000 | 100 | 5.148.000 | 100 | 21.498.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | *30* | *05* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 106.640.000 | 100 | 102.233.400 | 100 | 208.873.400 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | **20.491.903.303** | | **21.154.777.012** | | **41.646.680.315** | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | *40* | *01* | 01 | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 19.851.275.303 | 100 | 20.620.734.907 | 100 | 40.472.010.210 | |
| | | | | | | 2 | Capaian Pelaporan Barang Setda | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur sesuai standar | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *40* | *01* | 02 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 | Capaian Laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Setda | % | 100 | 100 | 640.628.000 | 100 | 534.042.105 | 100 | 1.174.670.105 | |
| | | *40* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 703.922.000 | 100 | 424.865.000 | 100 | 1.128.787.000 | |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | **27.160.996.855** | | **18.898.932.793** | | **46.059.929.648** | SEKRETARIAT DPRD |
| | | *40* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur sesuai standar | % | 100 | 86 | 26.574.534.855 | 87,00 | 18.609.362.793 | 87,00 | 45.183.897.648 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Presentase kesesuaian pencatatan aset dengan keberadaan fisiknya | % | 100 | 100 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 90 | 100 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | *40* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Capaian Kualitas Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 85.202.000 | 92 | 56.540.000 | 91,5 | 141.742.000 | |
| | | *40* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 501.260.000 | 100 | 233.030.000 | 100 | 734.290.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 93,00 | | 93,00 | | |
| 25 | INSPEKTORAT | | | | | | | | | | **1.511.403.423** | | **2.129.345.641** | | **3.640.749.064** | INSPEKTORAT |
| | | *40* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.444.544.423 | 100 | 2.039.280.641 | 100 | 3.483.825.064 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *40* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | - | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *40* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 66.859.000 | 100 | 70.065.000 | 100 | 136.924.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 26 | KORPRI | | | | | | | | | | **254.640.000** | | **491.717.046** | | **746.357.046** | KORPRI |
| | | *40* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Capaian Kompetensi Aparatur | % | 100 | 100 | 195.472.000 | 100 | 367.230.046 | 100 | 562.702.046 | |
| | | | | | | 2 | Capaian Implementasi Teknologi PD | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Capaian Akuntabilitas Kinerja OPD (LAKjIP PD) | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *40* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 6.880.000 | 100 | 11.152.000 | 100 | 18.032.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *40* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 52.288.000 | 100 | 113.335.000 | 100 | 165.623.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 27 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | **793.342.940** | | **752.102.147** | | **1.545.445.087** | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | *40* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 90,00 | 90,00 | 704.047.940 | 90,00 | 681.477.147 | 90,00 | 1.385.525.087 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | *40* | *01* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 90,00 | 7.000.000 | 90,00 | 5.100.000 | 90,00 | 12.100.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | *40* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 90,00 | 82.295.000 | 90,00 | 65.525.000 | 90,00 | 147.820.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| 28 | KECAMATAN SERANG | | | | | | | | | | **2.452.337.658** | | **2.690.956.444** | | **5.143.294.102** | KECAMATAN SERANG |
| | | *50* | *01* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.161.893.258 | 100 | 792.613.541 | 100 | 1.954.506.799 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 40,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *5* | *02* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | - | 100 | 8.394.000 | 100 | 8.394.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | *50* | *01* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 203.124.400 | 100 | 135.293.600 | 100 | 338.418.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *50* | *01* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 100 | 70,00 | 1.087.320.000 | 70,00 | 1.754.655.303 | 70,00 | 2.841.975.303 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 100 | 30,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 29 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA | | | | | | | | | | **1.914.122.672** | | **2.489.953.966** | | **4.404.076.638** | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| | | *5* | *02* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.012.461.572 | 80,00 | 853.158.566 | 80,00 | 1.865.620.138 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *5* | *02* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 20.800.000 | 85,00 | 13.950.000 | 85,00 | 34.750.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | *5* | *02* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 198.080.000 | 55,00 | 63.300.000 | 55,00 | 261.380.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | | 55,00 | | 55,00 | | |
| | | *5* | *02* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | - | - | 682.781.100 | 75,00 | 1.559.545.400 | 75,00 | 2.242.326.500 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | - | - | | 60,00 | | 60,00 | | |
| 30 | KECAMATAN KASEMEN | | | | | | | | | | **2.226.204.420** | | **2.770.619.341** | | **4.996.823.761** | KECAMATAN KASEMEN |
| | | *5* | *03* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 100 | 1.021.238.700 | 100 | 894.939.326 | 100 | 1.916.178.026 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 40,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *5* | *03* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 20.496.200 | 100 | 4.185.000 | 100 | 24.681.200 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | *5* | *03* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 93,18 | 230.477.700 | 100 | 94.827.000 | 100 | 325.304.700 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 93,18 | | 100 | | 100 | | |
| | | *5* | *03* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 100 | 95,78 | 953.991.820 | 70,00 | 1.776.668.015 | 70,00 | 2.730.659.835 | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 100 | 30,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 31 | KECAMATAN TAKTAKAN | | | | | | | | | | **2.721.024.560** | | **4.519.394.507** | | **7.240.419.067** | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | *5* | *04* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 90,00 | 1.472.261.253 | 95,00 | 1.480.131.700 | 95,00 | 2.952.392.953 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |
| | | *5* | *04* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 27.750.000 | 100 | 24.217.000 | 100 | 51.967.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 95 | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | |
| | | *5* | *04* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 319.429.000 | 100 | 284.951.000 | 100 | 604.380.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | |
| | | *5* | *04* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 100 | 100 | 901.584.307 | 100 | 2.730.094.807 | 100 | 3.631.679.114 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 95,00 | | 95,00 | | |
| 32 | KECAMATAN WALANTAKA | | | | | | | | | | **2.256.543.532** | | **3.914.223.219** | | **6.170.766.751** | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | *5* | *05* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 75,00 | 75,00 | 922.584.289 | 80,00 | 1.029.574.301 | 80,00 | 1.952.158.590 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 80,00 | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 100 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *5* | *05* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 95,00 | 80,00 | 26.612.800 | 95,00 | 14.690.000 | 95,00 | 41.302.800 | |
| | | *5* | *05* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 95,00 | 80,00 | 219.187.000 | 55,00 | 49.910.000 | 55,00 | 269.097.000 | |
| | | *5* | *05* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 70,00 | 70,00 | 1.088.159.443 | 75,00 | 2.820.048.918 | 75,00 | 3.908.208.361 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 80,00 | 50,00 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| 33 | KECAMATAN CURUG | | | | | | | | | | **1.689.102.031** | | **2.640.438.854** | | **1.756.016.141** | KECAMATAN CURUG |
| | | *5* | *06* | *01* | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | % | 100 | 90,00 | 666.157.687 | 80,00 | 528.228.454 | 80,00 | 1.194.386.141 | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 90,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 3 | Tingkat kehadiran Aparatur | % | 100 | 90,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 90,00 | | 100 | | 100 | | |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | | | URUSAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | KINERJA AWAL RPJMD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KINERJA RPJMD S/D TAHUN 2020 | | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | 2018 | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| | | *5* | *06* | *02* | Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan | 1 | Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 27.135.000 | 100 | 57.135.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | % | 95,00 | 95,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *5* | *06* | *03* | Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | 1 | Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 100 | 245.000.000 | 100 | 259.495.000 | 100 | 504.495.000 | |
| | | | | | | 2 | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja | % | 100 | 95,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| | | *5* | *06* | *04* | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat (IKM) Tingkat Kelurahan | % | 100 | 100 | 747.944.344 | 82,00 | 1.825.580.400 | 82,00 | | |
| | | | | | | 2 | Persentase sarana dan prasarana kantor di kelurahan dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | **JUMLAH** | | | | | | | | | | **144.419.866.216** | | **114.469.495.364** | | **307.426.551.992** | |

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.5 berikut :

**Tabel 7.5**

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

**Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)**

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | **388.579.753.893** | | **314.760.528.012** | | **493.228.189.461** | | **443.057.326.742** | | **459.339.204.162** | | **1.403.354.964.791** | | **2.098.965.002.271** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | **138.522.754.544** | | **132.796.698.833** | | **163.000.462.226** | | **145.019.859.000** | | **148.129.127.000** | | **416.204.464.378** | | **727.468.901.603** | |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat | % | 100 | 100 | 131.777.496.544 | 100 | 126.734.270.833 | 100 | 156.421.466.786 | 100 | 128.701.786.581 | 100 | 130.674.477.339 | 100 | 365.518.551.378 | 100 | 674.309.498.083 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat | % | 99,28 | 99,45 | | 99,46 | | 99,49 | | 99,56 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Angka Partisipasi PAUD | % | 93,20 | 93,65 | | 93,66 | | 100 | | 100 | | 100 | | 93 | | 100 | | |
| | | | | Angka Partisipasi Kesetaraan/Pendidikan Non Formal | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | % | 100,00 | 100,00 | 148.240.000 | - | - | 100 | 85.700.000 | 100 | 1.494.000.000 | 100 | 1.643.400.000 | 100 | 915.765.000 | 100 | 3.371.340.000 | |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Capaian rata-rata kompetensi guru | % | 45,70 | 70,00 | 6.597.018.000 | 75,00 | 6.062.428.000 | 77,25 | 6.493.295.440 | 80 | 13.585.472.419 | 83 | 14.510.719.661 | 100 | 49.770.148.000 | 83 | 47.248.933.520 | |
| 1 | 01 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 450.000.000 | 100 | 472.500.000 | - | - | 100 | 922.500.000 | |
| 1 | 01 | 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 788.600.000 | 100 | 828.030.000 | - | - | 100 | 1.616.630.000 | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **95.212.439.446** | | **77.325.819.276** | | **188.849.547.733** | | **124.107.259.848** | | **128.909.243.613** | | **172.538.258.668** | | **614.404.309.915** | |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rasio tenaga para medis persatuan penduduk | Rasio | 0,48 | 0,39 | 280.000.000 | 0,46 | 109.928.700 | 0,47 | 6.783.265.213 | 0,48 | 5.005.000.000 | 0,49 | 5.005.000.000 | 2,22 | 389.928.700 | 0,49 | 17.183.193.913 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 0,073 | 0,05 | | 0,10 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,13 | | 0,088 | | 0,13 | | |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan | % | - | - | - | 90,91 | 278.500.000 | 70 | 352.466.000 | 72 | 383.375.000 | 74 | 383.375.000 | 74 | 278.500.000 | 74 | 1.397.716.000 | |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Proporsi UKBM aktif | % | 66,67 | 66,67 | 307.422.000 | 66,67 | 55.125.000 | 68 | 228.439.500 | 70 | 286.458.750 | 72 | 286.458.750 | 72 | 362.547.000 | 72 | 1.163.904.000 | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi | % | 100 | 100 | 94.625.017.446 | 100 | 76.882.265.576 | 100 | 181.485.377.020 | 100 | 118.432.426.098 | 100 | 123.234.409.863 | 100 | 171.507.282.968 | 100 | 594.659.496.002 | |
| | | | | Persentase rata-rata pencapaian SPM Bidang Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Persentasi Ketersediaan Obat Kesehatan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | Cakupan Penyediaan Mutu Pelayanan Medis, Keselamatan Pasien dan Kepuasan Pasien RSUD | % | - | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **102.638.661.694** | | **68.125.259.570** | | **94.239.365.069** | | **106.772.895.195** | | **112.017.549.000** | | **533.767.683.544** | | **483.793.730.528** | |
| 1 | 03 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | - | 80 | 2.375.000.000 | 83 | 1.915.002.000 | 86 | 2.619.928.173 | 89 | 3.740.300.400 | 92 | 4.214.330.440 | 92 | 17.282.629.840 | 92 | 14.864.561.013 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Cakupan Layanan Air Bersih | % | 37,52 | 38,95 | 4.488.354.120 | 39,01 | 577.059.700 | 39,26 | 2.335.311.000 | 39,57 | 510.000.000 | 39,86 | 1.726.130.000 | 71,00 | 9.525.714.820 | 39,86 | 9.636.854.820 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Presentase Rumah Tangga Bersanitasi | % | 72,60 | 79,27 | 2.989.974.510 | 79,28 | 830.642.300 | 79,29 | 4.249.481.000 | 79,30 | 3.100.080.650 | 79,31 | 3.310.088.715 | 75,00 | 14.480.267.175 | 79,31 | 14.480.267.175 | |
| 1 | 03 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Prosentase Saluran Drainase/Goron-gorong dalam kondisi baik | % | - | 57 | 2.979.562.793 | 60 | 8.805.005.600 | 63 | 7.195.778.190 | 69 | 5.245.000.000 | 72 | 5.659.500.000 | 72 | 31.083.503.881 | 72 | 29.884.846.583 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung pemeintah dalam kondisi baik | % | - | 50 | 12.032.403.850 | 55 | 9.736.668.950 | 60 | 19.380.499.070 | 65 | 28.631.269.112 | 70 | 23.345.359.000 | 70 | 124.441.352.850 | 70 | 93.126.199.982 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 9 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Presentase Penataan Bangunan Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik | % | - | 50 | 973.434.000 | 55 | 1.049.526.000 | 60 | 4.799.555.000 | 65 | 20.457.000.000 | 70 | 21.552.700.000 | 70 | 31.907.200.000 | 70 | 48.832.215.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Presentase Jalan dalam Kondisi Baik | % | - | 67 | 75.649.932.422 | 70 | 44.408.301.570 | 73 | 51.997.385.955 | 76 | 43.013.765.033 | 79 | 50.097.212.845 | 79 | 297.118.539.286 | 79 | 265.166.597.825 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik | % | - | 70 | | 73 | | 76 | | 79 | | 82 | 82 | | 82 | | |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Capaian Pembinaan Jasa Kontruksi | % | - | 70 | 200.000.000 | 75 | 288.000.000 | 80 | 373.510.000 | 85 | 348.480.000 | 90 | 383.328.000 | 90 | 1.536.608.000 | 90 | 1.593.318.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pemanfaatan ruang | % | 50 | 50 | 950.000.000 | 100 | 515.053.450 | 100 | 1.287.916.681 | 100 | 1.727.000.000 | 100 | 1.728.900.000 | 100 | 6.391.867.693 | 100 | 6.208.870.131 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang | % | 55 | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | 59 | | 59 | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **38.019.715.709** | | **22.590.249.252** | | **29.347.176.561** | | **40.900.261.000** | | **42.558.777.000** | | **198.786.118.741** | | **173.416.179.522** | |
| 01 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Cakupan hunian terhadap daya tampung rusunawa | % | - | - | 13.530.390.016 | - | 926.276.695 | 52,08 | 1.608.864.063 | 62,50 | 2.857.000.000 | 72,92 | 3.200.000.000 | 0,80 | 12.814.146.195 | 72,92 | 22.122.530.774 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | Presentase rumah yang diperbaiki akibat bencana | % | - | - | | - | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | 89,00 | | 40,00 | | |
| 01 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh | % | 3,12 | 13,30 | 11.915.237.677 | 13,28 | 13.717.574.135 | 13,25 | 14.607.101.950 | 13,20 | 10.838.900.000 | 13,20 | 12.696.437.900 | 2,20 | 108.223.415.472 | 13,20 | 63.775.251.662 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | Presentase panjang jalan lingkungan permukiman kondisi baik | % | 39,52 | 40,48 | | 40,50 | | 40,75 | | 41,00 | | 41,25 | 44,21 | | 41,25 | | |
| | | | | Presentase panjang drainasse lingkungan kondisi baik | % | 67,63 | 67,70 | | 67,90 | | 70,10 | | 70,30 | | 70,50 | 13,20 | | 70,50 | | |
| 01 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rtlh di luar kawasan kumuh | % | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12.061.361.000 | 12 | 10.303.562.100 | - | - | 12 | 22.364.923.100 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 01 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Presentase psu yang diserahkan | % | 19,49 | 24,62 | 12.574.088.016 | 28,72 | 7.946.398.422 | 30,35 | 13.131.210.548 | 32,84 | 15.143.000.000 | 35,23 | 16.358.777.000 | 36,00 | 77.748.557.074 | 35,23 | 65.153.473.986 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **8.431.131.900** | | **8.831.625.061** | | **9.763.843.872** | | **15.296.951.000** | | **16.448.252.000** | | **58.018.881.833** | | **58.771.803.833** | |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah | % | 91,90 | 97,43 | 4.773.899.214 | 99,76 | 5.199.561.708 | 100 | 4.965.323.000 | 100 | 8.097.806.100 | 100 | 8.656.499.266 | 100 | 29.870.943.999 | 100 | 31.693.089.288 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN | Prosentase penanganan darurat bencana | % | 72,16 | 72,16 | 1.330.053.100 | 72,16 | 1.371.180.000 | 100,00 | 1.914.986.822 | 100,00 | 2.200.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | 100 | 9.490.731.922 | 100,00 | 9.316.219.922 | BADAN PENANGGULANGAN |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | BENCANA | Persentase Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | BENCANA DAERAH |
| | | | | Capaian tingkat resiko bencana | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | % | 100 | 100 | 2.327.179.586 | 100 | 2.260.883.353 | 79,38 | 2.883.534.050 | 87,31 | 4.999.144.900 | 96,04 | 5.291.752.734 | 100 | 18.657.205.912 | 96,04 | 17.762.494.623 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | **5.755.050.600** | | **5.090.876.020** | | **8.027.794.000** | | **10.960.100.700** | | **11.276.255.550** | | **24.039.557.627** | | **41.110.076.870** | |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Realisasi PSKS yang mendapat pembinaan | % | 90 | 100 | 160.375.000 | 100 | 134.560.000 | 100 | 268.345.000 | 100 | 294.020.000 | 100 | 294.020.000 | 90 | 876.500.176 | 100 | 1.151.320.000 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 1.471.783.600 | 100 | 1.205.619.400 | 100 | 648.750.500 | 100 | 2.436.217.700 | 100 | 2.436.217.700 | 100 | 5.383.209.818 | 100 | 8.198.588.900 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Realisasi jaminan sosial daerah terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani | % | 100 | 100 | 3.796.035.000 | 100 | 3.430.164.000 | 90 | 3.038.656.500 | 90 | 7.222.263.000 | 90 | 7.248.417.850 | 100 | 12.052.815.611 | 90 | 24.735.536.350 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Realisasi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial yang ditangani | % | 100 | 100 | 296.900.000 | 100 | 287.374.820 | 90 | 4.037.832.000 | 90 | 919.600.000 | 90 | 1.209.600.000 | 100 | 5.541.707.208 | 90 | 6.751.306.820 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Realisasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % | 100 | 100 | 29.957.000 | 100 | 33.157.800 | 100 | 34.210.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 185.324.814 | 100 | 273.324.800 | DINAS SOSIAL |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | **96.392.229.575** | | **90.695.239.000** | | **128.432.855.525** | | **140.893.097.335** | | **120.493.518.607** | | **537.164.539.457** | | **576.906.940.042** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | **2.414.221.500** | | **1.014.965.450** | | **1.803.364.934** | | **5.320.000.000** | | **5.517.500.000** | | **18.179.982.050** | | **16.070.051.884** | |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | % | 50 | 61,45 | 1.072.701.500 | 65 | 538.201.600 | 66 | 824.731.500 | 68 | 2.978.851.000 | 70 | 2.989.351.000 | 70 | 6.987.202.000 | 70 | 8.403.836.600 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Capaian Pencari kerja yang ditempatkan | % | 4,17 | 8,82 | 772.970.000 | 7,35 | 252.378.600 | 7,5 | 740.403.434 | 7,5 | 1.582.680.000 | 7,52 | 1.676.680.000 | 5,33 | 5.551.130.000 | 7,75 | 5.025.112.034 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan | % | 30 | 30 | 568.550.000 | 35 | 224.385.250 | 40 | 238.230.000 | 45 | 758.469.000 | 50 | 851.469.000 | 50 | 5.641.650.050 | 50 | 2.641.103.250 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | **1.693.753.675** | | **847.742.850** | | **1.250.146.690** | | **4.013.515.000** | | **2.924.790.000** | | **2.541.496.525** | | **10.729.948.215** | |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan | % | 10 | 15 | 695.686.700 | 20 | 288.281.800 | 30 | 306.763.089 | 40 | 1.525.000.000 | 45 | 1.045.000.000 | 95 | 983.968.500 | 45 | 3.860.731.589 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | Cakupan Data Terpilah Gender dan anak | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 90 | | 100 | | |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak | % | 75 | 100 | 235.138.939 | 100 | 156.196.776 | 100 | 222.930.000 | 100 | 672.340.000 | 100 | 527.250.000 | - | 391.335.715 | 100 | 1.813.855.715 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak | % | 100 | 100 | 117.569.468 | 100 | 78.098.387 | 100 | 105.339.500 | 100 | 150.000.000 | 100 | 176.000.000 | - | 195.667.855 | 100 | 627.007.355 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak | % | 75 | 100 | 178.996.500 | 100 | 103.405.000 | 100 | 103.450.000 | - | - | | - | - | 282.401.500 | 100 | 385.851.500 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak | % | - | 100 | 348.792.600 | 100 | 143.662.500 | 100 | 146.699.601 | 100 | 305.000.000 | 100 | 171.540.000 | 100 | 492.455.100 | 100 | 1.115.694.701 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak | % | 75 | 100 | 117.569.468 | 100 | 78.098.387 | 100 | 364.964.500 | 100 | 1.361.175.000 | 100 | 1.005.000.000 | | 195.667.855 | 100 | 2.926.807.355 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | **1.025.790.000** | | **578.127.000** | | **1.593.040.111** | | **2.031.500.000** | | **2.078.347.000** | | **5.850.395.346** | | **7.306.804.111** | |
| 2 | 09 | 2 | PROGRAM PENGOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Capaian Penguatan Cadangan Pangan | % | 20,87 | 24,49 | 145.960.000 | 29,07 | 247.400.000 | 34,88 | 576.220.000 | 42,29 | 248.250.000 | 51,77 | 273.075.000 | 51,77 | 501.000.000 | 51,77 | 1.490.905.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 09 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian Skor PPH Konsumsi | % | 81,90 | 83,54 | 726.825.000 | 85,21 | 234.937.000 | 86,91 | 899.048.111 | 88,65 | 1.319.048.000 | 90,42 | 1.294.649.800 | 90,42 | 3.705.529.673 | 90,42 | 4.474.507.911 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 09 | 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Capaian penanganan lokasi rentan atau rawan pangan (SKPG) | % | 10 | 15 | 112.415.000 | 15 | 93.790.000 | 20 | 86.322.000 | 20 | 372.452.000 | 20 | 409.697.200 | 20 | 1.600.865.673 | 20 | 1.074.676.200 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 09 | 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Capaian pengelolaan keamanan pangan segar | % | 20 | 73,67 | 40.590.000 | 68,50 | 2.000.000 | 69,00 | 31.450.000 | 69,05 | 91.750.000 | 70,00 | 100.925.000 | 20 | 43.000.000 | 70,00 | 266.715.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | **518.448.000** | | **1.023.962.000** | | **3.842.110.000** | | **1.601.500.000** | | **1.705.597.000** | | **4.826.900.000** | | **8.691.617.000** | |
| 2 | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN | Presentase fasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah | % | - | - | | - | - | 100,00 | 95.035.000 | 100,00 | 181.500.000 | 100,00 | 216.199.000 | | - | 100,00 | 492.734.000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2 | 10 | 08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Presentase peningkatan pengelolaan tanah kosong | % | - | - | | - | - | 33,30 | 196.671.000 | 33,30 | 165.000.000 | 33,30 | 182.349.500 | | - | 33,30 | 544.020.500 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 02 | 10 | 09 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Presentase peningkatan penggunaan tanah negara | % | - | 40 | 518.448.000 | 50 | 1.023.962.000 | 100,00 | 3.550.404.000 | 100,00 | 805.000.000 | 100,00 | 822.349.500 | 100,00 | 4.826.900.000 | 100,00 | 6.720.163.500 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase pengelolaan tanah negara yang dimanfaaatkan | % | - | - | | - | | 0,00 | - | 100,00 | 450.000.000 | 100,00 | 484.699.000 | | | 100,00 | 934.699.000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **38.750.530.882** | | **47.073.268.737** | | **62.038.320.347** | | **46.017.327.505** | | **49.594.840.855** | | **255.250.457.873** | | **243.474.288.326** | |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah | % | 20,00 | 20,00 | 287.349.000 | 40,00 | 272.995.176 | 60,00 | 575.966.500 | 80,00 | 135.800.816 | 100,00 | 142.807.500 | 100,00 | 1.092.500.000 | 100,00 | 1.414.918.992 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | % | 65,25 | 66,37 | 1.413.258.000 | 75,00 | 1.695.000.981 | 70,00 | 813.818.970 | 70,00 | 988.122.000 | 72,00 | 1.094.775.000 | 85,00 | 3.260.000.000 | 72,00 | 6.004.974.951 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI/KEHATI | Realisasi RuangTerbuka Hijau yang Terpelihara | % | 1,50 | 9,63 | 5.354.014.975 | 9,64 | 15.557.824.812 | 3,45 | 11.960.642.665 | 1,70 | 12.007.636.289 | 1,80 | 11.813.668.855 | 1,66 | 70.717.186.773 | 1,80 | 56.693.787.596 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Capaian Pengendalian Limbah B3 | % | 20,00 | 20,00 | 98.012.981 | 0,00 | - | 24,00 | 114.620.292 | 26,00 | 89.020.000 | 27,00 | 99.525.000 | 27,00 | 605.000.000 | 27,00 | 401.178.273 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN | Capaian Penaatan Lingkungan | % | 20,00 | 20,00 | 149.075.000 | 40,00 | 25.000.000 | - | - | 80,00 | 66.765.000 | 100,00 | 79.620.000 | 100,00 | 662.500.000 | 100,00 | 320.460.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian Pengurangan Sampah | % | 2,00 | 4,00 | 545.811.060 | 6,10 | 28.250.000 | 24,00 | 129.948.564 | 26,00 | 267.060.000 | 27,00 | **258.765.000** | 72,00 | 3.340.000.000 | 27,00 | 1.229.834.624 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup | % | 20,00 | 20,00 | 173.539.800 | 40,00 | 15.413.000 | 60,00 | 150.419.328 | 80,00 | 142.432.000 | 100,00 | 139.335.000 | 100,00 | 1.017.500.000 | 100,00 | 621.139.128 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Capaian Penanganan Sampah | % | 50,00 | 51,92 | 30.729.470.066 | 61,62 | 29.478.784.768 | 74,00 | 48.292.904.028 | 73,00 | 32.320.491.400 | 72,00 | 35.966.344.500 | 72,00 | 174.555.771.100 | 72,00 | 176.787.994.762 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | **2.010.512.091** | | **912.804.500** | | **1.875.913.000** | | **4.195.110.000** | | **4.467.792.000** | | **18.929.145.750** | | **13.462.131.591** | |
| 2 | 12 | 2 | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | % | 61,00 | 63,00 | 357.952.473 | 66,00 | 148.361.000 | 99,00 | 296.540.000 | 99,50 | 755.119.800 | 99,80 | 804.202.560 | 72,00 | 3.663.060.000 | 99,80 | 2.362.175.833 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 3 | Program pencatatan sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | % | 33,75 | 30,00 | 300.000.000 | 32,00 | 150.000.000 | 43,00 | 352.000.000 | 44,00 | 1.048.777.500 | 45,00 | 1.161.625.920 | 55,00 | 3.883.883.000 | 45,00 | 3.012.403.420 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 4 | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan | % | 6,67 | 6,67 | 1.003.111.500 | 13,33 | 484.901.000 | 60,00 | 999.624.000 | 61,00 | 2.055.603.900 | 62,00 | 2.144.540.160 | 33,33 | 8.909.637.750 | 62,00 | 6.687.780.560 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 5 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase informasi data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia | % | 100,00 | 100,00 | 349.448.118 | 100,00 | 129.542.500 | 100,00 | 227.749.000 | 100,00 | 335.608.800 | 100,00 | 357.423.360 | 100,00 | 2.472.565.000 | 100,00 | 1.399.771.778 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | **5.452.817.500** | | **1.434.380.000** | | **1.383.617.192** | | **3.900.000.000** | | **3.358.220.775** | | **6.887.197.500** | | **15.529.035.467** | |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Capaian LPM Kategori Aktif | % | 100 | 100 | 5.452.817.500 | 100 | 1.434.380.000 | 100 | 1.383.617.192 | 100 | 3.900.000.000 | 100 | 3.358.220.775 | | 6.887.197.500 | 100 | 15.529.035.467 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | **4.670.322.492** | | **3.576.917.541** | | **4.948.693.549** | | **6.112.351.000** | | **3.042.416.920** | | **7.719.800.033** | | **22.350.701.502** | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan data keluarga yang akurat | % | 75,00 | 80 | 434.458.000 | 82 | 173.694.111 | 83,0 | 95.195.239 | 85 | 800.000.000 | 87 | 400.000.000 | 87 | 608.152.111 | 87 | 1.903.347.350 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan Promosi KIE-KB | % | 6,00 | 68 | 3.898.875.492 | 70 | 3.116.743.430 | 75,00 | 3.811.022.310 | 80 | 4.165.121.840 | 85 | 2.398.348.420 | 85 | 6.488.178.922 | 85 | 17.390.111.492 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB | % | 60,00 | 67 | | 70 | | 73,00 | | 75 | | 80 | | 80 | | 80 | | |
| | | | | Capaian PPM peserta KB | % | 62,00 | 66 | | 67 | | 68,00 | | 69 | | 70 | | 70 | | 70 | | |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif | % | 62,00 | 72 | 336.989.000 | 75 | 286.480.000 | 76 | 1.042.476.000 | 78 | 1.147.229.160 | 80 | 244.068.500 | 75 | 623.469.000 | 80 | 3.057.242.660 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | **15.324.774.644** | | **11.783.409.162** | | **12.661.827.631** | | **17.560.000.000** | | **19.000.000.000** | | **94.535.666.200** | | **76.330.011.437** | |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Cakupak kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor | **%** | 60 | 60 | 14.719.641.269 | 65 | 11.741.502.662 | **68** | 12.577.039.440 | 70 | 17.439.000.000 | 72 | 18.849.000.000 | 75 | 93.602.086.200 | 72 | 75.326.183.371 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan | **%** | **65** | **50** | | **65** | | 68 | | **70** | | **75** | | **75** | | **75** | | |
| | | | | Capaian Pengendalian Potensi Titik Kemacetan | % | 60 | 62 | | 64 | | 66 | | 68 | | 70 | | 78 | | 70 | | |
| | | | | Capaian Penyelenggaraan Angkutan | % | 75 | 60 | | 62 | | 65 | | 68 | | 70 | | 70 | | 70 | | |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | Penumpang Kondisi Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Capaian Pembangunan Kepelabuhan Penumpang Lokal | % | 60 | 60 | 605.133.375 | 61 | 41.906.500 | 62 | 84.788.191 | 63 | 121.000.000 | 64 | 151.000.000 | 60 | 933.580.000 | 64 | 1.003.828.066 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Capaian penyelenggaraan ASDP | % | 60 | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA** | | | | | | | | **4.646.468.431** | | **5.733.489.542** | | **6.277.085.750** | | **6.500.000.000** | | **8.584.253.558** | | **10.379.957.973** | | **31.741.297.281** | |
| 2 | 16 | 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Capaian Penyebarluasan Informasi Publik | % | 78 | 100 | 1.609.490.577 | 100 | 3.340.824.000 | 100 | 1.961.284.000 | 100 | 2.081.341.250 | 100 | 2.625.446.902 | 100 | 4.950.314.577 | 100 | 11.618.386.729 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase OPD yang mengimplementasikan Layanan E-Goverment | % | 70 | 100 | 3.036.977.854 | 100 | 2.392.665.542 | 100 | 4.315.801.750 | 100 | 4.418.658.750 | 100 | 5.958.806.656 | 100 | 5.429.643.396 | 100 | 20.122.910.552 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | **628.119.000** | | **397.094.300** | | **1.031.836.332** | | **2.153.000.000** | | **1.281.195.000** | | **7.829.478.850** | | **5.491.244.632** | |
| 2 | 17 | 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI | Capaian koperasi yang aktif | % | 48,53 | 36,17 | 99.798.000 | 35,42 | 11.000.000 | 36,24 | 80.000.000 | 37,06 | 88.000.000 | 37,87 | 96.800.000 | 53,87 | 581.125.000 | 37,87 | 375.598.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 5 | PROGRAM DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang dibina | % | 48,00 | 56,00 | 288.295.000 | 43,60 | 49.834.000 | 57,22 | 401.681.332 | 59,59 | 567.271.500 | 62,67 | 581.893.650 | 25,53 | 2.094.721.100 | 62,67 | 1.888.975.482 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi Yang Berdaya | % | 10,00 | 12,00 | 73.120.000 | - | - | | | 42 | 182.500.000 | 60 | 90.750.000 | - | 840.765.000 | 60 | 346.370.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha | % | 1,03 | 1,46 | 72.192.000 | 1,85 | 187.855.300 | 2,19 | 285.905.000 | 2,49 | 524.553.500 | 2,75 | 192.008.850 | 0,79 | 2.820.567.750 | 2,75 | 1.262.514.650 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha mikro yang dibina | % | 7,48 | 7,53 | 94.714.000 | 7,54 | 148.405.000 | 7,59 | 264.250.000 | 7,60 | 790.675.000 | 7,64 | 319.742.500 | 7,54 | 1.492.300.000 | 7,64 | 1.617.786.500 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **1.324.856.944** | | **1.766.409.431** | | **1.786.819.388** | | **2.622.970.000** | | **2.900.000.000** | | **10.683.925.900** | | **10.401.055.763** | |
| 2 | 18 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Capaian Pengembangan Kawasan Investasi | Zona/Lokasi | 3 | 2 | 307.562.500 | 2 | 488.393.500 | 1 | 199.175.000 | 2 | 440.000.000 | 2 | 487.476.900 | 10 | 2.228.361.500 | 9 | 1.922.607.900 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Realisasi PMDN/PMA | Investor | 75 | 814 | 346.360.000 | 671 | 304.193.000 | 1.191 | 170.993.172 | 1.291 | 510.000.000 | 1.391 | 563.550.000 | 1.391 | 1.779.907.000 | 1.391 | 1.895.096.172 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | % | 75,55 | 100 | 100.749.000 | 100 | 314.888.000 | 100 | 387.035.570 | 100 | 635.000.000 | 100 | 698.500.000 | 100 | 2.707.342.400 | 100 | 2.136.172.570 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Capaian Kualitas dan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalan Rangka Pelaksanakan Kegiatan Penanaman Modal | % | - | 20 | 236.820.200 | 50 | 152.575.000 | 70 | 604.616.017 | 80 | 455.508.000 | 100 | 509.764.900 | 70 | 1.373.647.500 | 100 | 1.959.284.117 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Terintegrasi | Ijin | 100 | 65 | 333.365.244 | 86 | 506.359.931 | 108 | 424.999.629 | 130 | 582.462.000 | 152 | 640.708.200 | 109 | 2.594.667.500 | 152 | 2.487.895.004 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | **12.093.288.000** | | **10.333.511.237** | | **12.748.525.431** | | **28.482.040.000** | | **7.185.000.000** | | **69.230.614.668** | | **70.842.364.668** | |
| 2 | 19 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN | Capaian Prestasi Para Pemuda Kota | % | 60 | 65 | 1.814.968.000 | 65 | 152.410.000 | 70 | 1.432.897.536 | 75 | 2.460.975.000 | 80 | 2.497.000.000 | 80 | 8.358.250.536 | 80 | 8.358.250.536 | DINAS PARIWISATA, |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Serang | | | | | | | | | | | | | | | | | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 19 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Capaian pembinaan klub olahraga | % | 53 | 54 | 10.278.320.000 | 54 | 10.181.101.237 | 55 | 11.315.627.895 | 55 | 25.721.065.000 | 55 | 4.388.000.000 | 55 | 60.872.364.132 | 55 | 61.884.114.132 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 19 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang dalam Kepramukaan | % | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 300.000.000 | 75 | 300.000.000 | - | - | 75 | 600.000.000 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | **588.157.432** | | **494.950.000** | | **527.567.000** | | **650.000.000** | | **920.311.134** | | **1.083.107.432** | | **3.180.985.566** | |
| 2 | 20 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase OPD yang Menyelenggarakan Kegiatan Statistik Sektoral | % | - | 60 | 588.157.432 | 70 | 494.950.000 | 75 | 527.567.000 | 80 | 650.000.000 | 85 | 920.311.134 | 70 | 1.083.107.432 | 85 | 3.180.985.566 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | **139.854.357** | | **113.570.000** | | **42.160.000** | | **140.000.000** | | **158.488.825** | | **253.424.357** | | 594.073.182 | |
| 2 | 21 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Capaian Pengamanan Informasi Satu Pintu | % | - | 10 | 139.854.357 | 20 | 113.570.000 | 30 | 42.160.000 | 40 | 140.000.000 | 50 | 158.488.825 | 50 | 253.424.357 | 50 | 594.073.182 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **3.492.986.059** | | **747.022.500** | | **2.665.000.000** | | **2.700.000.000** | | **2.875.500.000** | | **21.864.411.000** | | **12.480.508.559** | |
| 02 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Event budaya daerah setiap tahun | % | 100 | 100 | 2.677.612.059 | 100 | 417.202.500 | 100 | 2.028.650.000 | 100 | 2.002.000.000 | 100 | 2.137.050.000 | 100 | 16.688.596.000 | 100 | 9.262.514.559 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 02 | 22 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Benda Bersejarah yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 671.594.000 | 100 | 284.970.000 | 100 | 500.600.000 | 100 | 543.000.000 | 100 | 574.150.000 | 100 | 4.242.690.000 | 100 | 2.574.314.000 | |
| 02 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 143.780.000 | 100 | 44.850.000 | 100 | 135.750.000 | 100 | 155.000.000 | 100 | 164.300.000 | 100 | 933.125.000 | 100 | 643.680.000 | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **1.092.791.568** | | **1.603.738.750** | | **11.357.196.415** | | **4.486.301.400** | | **3.138.000.000** | | **-** | | **21.678.028.133** | |
| 2 | 23 | 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang dibina | % | - | 0,79 | 1.092.791.568 | 3,63 | 1.603.738.750 | 9,84 | 11.357.196.415 | 17,22 | 4.486.301.400 | 24,30 | 2.138.000.000 | - | - | 24,30 | 20.678.028.133 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN EARSIPAN |
| 2 | 23 | 3 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Prosentase Pelestarian Bahan Perpustakaan (BP) dan Naskah Kuno | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1.000.000.000 | - | - | 20 | 1.000.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN EARSIPAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | **524.537.000** | | **1.259.876.000** | | **599.631.755** | | **2.407.482.430** | | **1.761.265.540** | | **1.118.578.000** | | **6.552.792.725** | |
| 2 | 24 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase pengelolaan arsip statis dan dinamis | % | 70 | 70 | 149.224.000 | 85 | 391.590.000 | 90 | 260.541.500 | 95 | 1.809.400.750 | 100 | 1.206.464.740 | 85 | 921.462.000 | 100 | 3.817.220.990 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 24 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Capaian arsip yang terselamatkan | % | - | 30 | 375.313.000 | 35 | 868.286.000 | 45 | 339.090.255 | 60 | 598.081.680 | 80 | 554.800.800 | 35 | 197.116.000 | 80 | 2.735.571.735 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | **14.785.916.955** | | **13.297.154.080** | | **10.479.235.032** | | **22.673.305.000** | | **25.344.532.000** | | **97.341.082.016** | | **86.580.143.067** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **551.206.000** | | **361.452.100** | | **1.048.699.624** | | **875.000.000** | | **852.000.000** | | **5.860.740.000** | | **3.688.357.724** | |
| 3 | 25 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 10 | 10 | 97.100.000 | 10 | 154.483.100 | 10 | 761.375.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 1.986.207.500 | 50 | 1.352.958.100 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya | % | 10 | 10 | 208.600.000 | 10 | 141.381.000 | 10 | 200.824.624 | 10 | 375.000.000 | 10 | 352.000.000 | 10 | 2.348.257.500 | 50 | 1.277.805.624 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan | % | 20 | 20 | 245.506.000 | 20 | 65.588.000 | 10 | 86.500.000 | 20 | 330.000.000 | 20 | 330.000.000 | 20 | 1.526.275.000 | 100 | 1.057.594.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | **2.809.342.900** | | **1.631.152.500** | | **1.142.234.750** | | **9.003.305.000** | | **10.859.782.000** | | **9.393.764.150** | | **25.445.817.150** | |
| 3 | 26 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB) | % | 33 | 33 | 954.160.000 | 34 | 739.792.000 | 35 | 715.986.750 | 50 | 3.008.147.000 | 60 | 3.775.410.000 | 35 | 4.823.924.750 | 60 | 9.193.495.750 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3 | 26 | 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata | % | 100 | 100 | 937.508.700 | 100 | 434.215.000 | 100 | 244.155.000 | 100 | 771.853.000 | 100 | 901.372.000 | 100 | 2.122.926.700 | 100 | 3.289.103.700 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3 | 26 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI | Prosentase Wirausaha Ekraf Yang Difasilitasi Sampai Memiliki HKI | % | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4.703.305.000 | 70 | 5.613.000.000 | - | - | 70 | 10.316.305.000 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Usaha Baru Ekraf | Usaha | 50 | 50 | 917.674.200 | 50 | 457.145.500 | 50 | 182.093.000 | 100 | 520.000.000 | 150 | 570.000.000 | 50 | 2.446.912.700 | 450 | 2.646.912.700 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **3.360.567.981** | | **1.642.502.200** | | **3.457.314.543** | | **2.945.000.000** | | **3.035.250.000** | | **23.778.853.706** | | **14.440.634.724** | |
| 3 | 27 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Capaian Produktivitas Padi | Ton/ Ha | 5,36 | 5,49 | 1.002.113.776 | 5,53 | 670.728.200 | 6,30 | 988.498.283 | 6,10 | 1.193.220.000 | 6,22 | 1.200.000.000 | 7,0 | 8.054.416.206 | 6,22 | 5.054.560.259 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) | % | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | | |
| | | | | Capaian Peningkatan Produksi Daging (Sapi dan Kerbau) | Kg | 139.518 | 152.400 | | 142.322 | | 143.745 | | 145.183 | | 146.634 | | 148.085 | | 146.634 | | |
| 3 | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Capaian Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan (padi) | Ton | 60.375 | 80.041 | 1.709.515.482 | 63.979 | 581.694.000 | 86.823 | 1.756.020.000 | 93,386 | 290.000.000 | 95,253 | 290.000.000 | 69.839 | 9.422.390.000 | 95,253 | 4.627.229.482 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Capaian hasil produksi pertanian tamanan Hortikultura (cabe) | ton | - | 3 | | 2,41 | | 3 | | 3,1 | | 3,3 | | - | | 3,3 | | |
| 3 | 27 | 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Capaian penanganan kasus penyakit hewan | % | 100 | 100 | 403.560.223 | 100 | 246.213.500 | 100 | 354.790.378 | 100 | 646.780.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 3.347.010.440 | 100 | 2.351.344.101 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| | | | | Presentase peningkatan produksi hasil olahan peternakan | % | 1 | 1,04 | | 4,88 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 9 | | |
| | | | | Capaian produksi hasil olahan peternakan | Kg | 448 | 469 | | 223.010 | | 225.240 | | 227.492 | | 229.767 | | 471 | | 229.767 | | |
| 3 | 27 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Presentase Penanggulangan Bencana Pertanian | % | 20 | 20 | 245.378.500 | 5 | 117.706.500 | 5 | 173.640.000 | 5 | 265.000.000 | 5 | 280.000.000 | 5 | 2.722.987.000 | 40 | 1.081.725.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Pertanian Terbina | % | - | - | | 6 | 26.160.000 | 25 | 184.365.882 | 25 | 550.000.000 | 25 | 565.250.000 | 10 | 232.050.060 | 25 | 1.325.775.882 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | **7.306.236.074** | | **3.352.498.300** | | **4.108.671.305** | | **8.350.000.000** | | **9.000.000.000** | | **48.828.759.680** | | **32.117.405.679** | |
| 3 | 30 | 2 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Distributor Bahan Berbahaya Terdaftar | % | 100,00 | 20,00 | 20.000.000 | 40 | 32.530.000 | | - | 80,00 | 35.783.000 | 100 | 39.361.300 | - | 52.530.000 | 100 | 127.674.300 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional | % | 22,22 | 33,33 | 5.472.171.000 | 50,00 | 2.375.150.940 | 60,00 | 2.981.081.635 | 70,00 | 5.457.297.558 | 80,00 | 6.246.907.735 | 100,00 | 35.335.273.720 | 80,00 | 22.532.608.868 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 4 | PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Barang Pokok dan barang penting | % | 25,00 | 25,00 | 1.228.937.600 | 25 | 685.798.360 | 25 | 367.032.920 | 30 | 1.088.804.212 | 30 | 988.804.212 | 56,39 | 1.914.735.960 | 30 | 4.359.377.304 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Capaian Pembinaan Potensi Ekspor | Perusahaan | 1,00 | 1 | 304.158.500 | 1 | 116.130.000 | 1 | 516.567.750 | 1 | 1.454.454.080 | 1 | 1.379.899.488 | 2 | 10.355.200.000 | 5 | 3.771.209.818 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 6 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Capaian penyelesaian sengketa konsumen | % | 100,00 | 100,00 | 280.968.974 | 100 | 142.889.000 | 100 | 243.989.000 | 100 | 313.661.150 | 100 | 345.027.265 | 100 | 1.171.020.000 | 100 | 1.326.535.389 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | **443.506.000** | | **6.113.777.480** | | **475.612.060** | | **1.000.000.000** | | **1.065.000.000** | | **6.557.283.480** | | **9.097.895.540** | |
| 3 | 31 | 2 | PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM | % | - | 2,48 | 443.506.000 | 3,47 | 6.113.777.480 | 4,46 | 475.612.060 | 5,45 | 1.000.000.000 | 6,44 | 1.065.000.000 | 6,44 | 6.557.283.480 | 6,44 | 9.097.895.540 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **315.058.000** | | **195.771.500** | | **246.702.750** | | **500.000.000** | | **532.500.000** | | **2.921.681.000** | | **1.790.032.250** | |
| 3 | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Capaian Transmigran Yang Ditempatkan | % | 21,73 | 17,24 | 176.752.000 | - | 93.499.000 | 30 | 93.485.750 | 30 | 340.000.000 | 30 | 362.500.000 | 100 | 1.977.633.000 | 30 | 1.066.236.750 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3 | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Capaian Transmigran Yang Dibina | % | 50 | 57 | 138.306.000 | 43 | 102.272.500 | 75 | 153.217.000 | 75 | 160.000.000 | 75 | 170.000.000 | 100 | 944.048.000 | 75 | 723.795.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | **59.489.760.889** | | **59.140.131.631** | | **67.080.151.918** | | **70.206.821.300** | | **73.082.775.000** | | **321.040.298.082** | | **328.999.640.738** | |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **19.026.381.125** | | **18.699.316.541** | | **19.058.148.918** | | **20.735.000.000** | | **22.082.775.000** | | **29.905.237.160** | | **99.601.621.584** | |
| 4 | 01 | 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan | % | 100,00 | 100,00 | 17.875.879.467 | 100 | 17.080.292.947 | 100 | 16.273.286.746 | 100 | 17.587.269.128 | 100 | 18.287.250.125 | 100 | 27.135.711.908 | 100 | 87.103.978.413 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian | % | 100,00 | 100,00 | 1.150.501.658 | 100 | 1.619.023.594 | 100 | 2.784.862.172 | 100 | 3.147.730.872 | 100 | 3.795.524.875 | 100 | 2.769.525.252 | 100 | 12.497.643.171 | SEKRETARIAT DAERAH |
| **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | **40.463.379.764** | | **40.440.815.090** | | **48.022.003.000** | | **49.471.821.300** | | **51.000.000.000** | | **291.135.060.922** | | **229.398.019.154** | |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | % | 100,00 | 100,00 | 40.463.379.764 | 100,00 | 40.440.815.090 | 100,00 | 48.022.003.000 | 100,00 | 49.471.821.300 | 100,00 | 51.000.000.000 | 100,00 | 291.135.060.922 | 100,00 | 229.398.019.154 | SEKRETARIAT DPRD |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | **31.755.473.865** | | **19.320.909.394** | | **23.309.320.324** | | **32.635.500.000** | | **37.404.833.550** | | **133.975.978.522** | | **144.426.037.133** | |
| **PERENCANAAN** | | | | | | | | **8.154.748.897** | | **6.284.016.944** | | **5.484.614.900** | | **8.309.000.000** | | **8.409.000.000** | | **44.710.138.744** | | **36.641.380.741** | |
| 5 | 01 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase Keselarasan dokumen perenanaan pembangunan daerah | % | 90 | 100 | 3.391.599.261 | 100 | 2.688.769.544 | 100 | 1.650.991.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100 | 17.053.625.000 | 100 | 12.331.359.805 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Presentase Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran | % | 95 | 95 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | - | | 98 | | |
| 5 | 01 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 85 | 85 | 4.763.149.636 | 85 | 3.595.247.400 | 95 | 3.833.623.900 | 95 | 6.009.000.000 | 100 | 6.109.000.000 | 100 | 27.656.513.744 | 100 | 24.310.020.936 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang perekonomian dan SDA | % | 85 | 85 | | 85 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang Infrastruktur dan kewilyahan | % | 85 | 85 | | 85 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **KEUANGAN** | | | | | | | | **15.793.363.767** | | **9.106.128.690** | | **10.967.584.750** | | **16.372.000.000** | | **20.811.291.550** | | **69.274.481.800** | | **73.050.368.757** | |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Ketepatan waktu penganggaran | % | 100 | 100 | 8.128.072.488 | 100 | 4.716.441.639 | 100 | 4.568.052.250 | 100 | 5.482.000.000 | 100 | 7.405.200.000 | 100 | 42.974.481.800 | 100 | 30.299.766.377 | BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | Capaian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Persentase Kesesuaian pelaporan dengan astandar akuntansi pemerintahan | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD | % | 20 | 20 | 3.651.262.503 | 20 | 1.448.043.816 | 20 | 2.008.472.000 | 90 | 2.690.000.000 | 95 | 5.206.091.550 | 95 | 18.100.000.000 | 95 | 15.003.869.869 | BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| 5 | 02 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | 100 | 100 | 4.014.028.776 | 100 | 2.941.643.235 | 8,00 | 4.391.060.500 | 12,50 | 8.200.000.000 | 13,00 | 8.200.000.000 | 13,00 | 8.200.000.000 | 13,00 | 27.746.732.511 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | **2.177.226.618** | | **2.060.402.760** | | **3.411.989.674** | | **3.369.500.000** | | **3.588.517.000** | | **4.237.629.378** | | **14.607.636.052** | |
| 5 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian | % | 85 | 84 | 2.177.226.618 | 85 | 2.060.402.760 | 86 | 3.411.989.674 | 87 | 3.369.500.000 | 88 | 3.588.517.000 | 85 | 4.237.629.378 | 88 | 14.607.636.052 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | **3.685.345.100** | | **1.168.383.500** | | **2.646.664.000** | | **2.785.000.000** | | **2.966.025.000** | | **4.853.728.600** | | **13.251.417.600** | |
| 5 | 4 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Capaian Pengembangan kompetensi dan pendidikan dan pelatihan aparatur | % | 60 | 65 | 3.685.345.100 | 70 | 1.168.383.500 | 75 | 2.646.664.000 | 80 | 2.785.000.000 | 85 | 2.966.025.000 | 70 | 4.853.728.600 | 85 | 13.251.417.600 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | **1.944.789.483** | | **701.977.500** | | **798.467.000** | | **1.800.000.000** | | **1.630.000.000** | | **10.900.000.000** | | **6.875.233.983** | |
| 5 | 5 | 2 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Persentase Dokumen Kelitbangan Daerah yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan | % | 70 | 70 | 1.944.789.483 | 75 | 701.977.500 | 75 | 798.467.000 | 80 | 1.800.000.000 | 80 | 1.630.000.000 | 80 | 10.900.000.000 | 80 | 6.875.233.983 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase Inovasi yang diterapkan di Daerah | % | 70 | 50 | | 70 | | 70 | | 75 | | 80 | | 90 | | 80 | | |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | **6.821.055.500** | | **3.796.668.970** | | **3.077.345.250** | | **4.400.000.000** | | **4.686.000.000** | | **43.245.910.000** | | **22.781.069.720** | |
| **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | **6.821.055.500** | | **3.796.668.970** | | **3.077.345.250** | | **4.400.000.000** | | **4.686.000.000** | | **43.245.910.000** | | **22.781.069.720** | |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | - | 91,67 | 4.434.635.700 | 95,00 | 3.479.272.470 | 90,00 | 2.300.379.250 | 90,00 | 3.055.000.000 | 100,00 | 3.241.000.000 | 60 | 32.309.210.000 | 100 | 16.510.287.420 | INSPEKTORAT |
| | | | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti | % | 81,65 | 78,52 | | 76,97 | | 90,00 | | 90,00 | | 100,00 | | 60 | | 100 | | |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT | % | - | - | 2.386.419.800 | - | 317.396.500 | 100 | 776.966.000 | 100 | 1.345.000.000 | 100 | 1.445.000.000 | - | 10.936.700.000 | 100 | 6.270.782.300 | INSPEKTORAT |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | **41.776.561.264** | | **75.245.602.173** | | **42.760.999.713** | | **44.971.368.414** | | **45.585.837.947** | | **380.589.541.759** | | **250.340.369.511** | |
| **KECAMATAN** | | | | | | | | **41.776.561.264** | | **75.245.602.173** | | **42.760.999.713** | | **44.971.368.414** | | **45.585.837.947** | | **380.589.541.759** | | **250.340.369.511** | |
| | | | **KECAMATAN SERANG** | | | | | **8.680.458.315** | | **15.897.029.162** | | **10.809.204.268** | | **11.127.250.172** | | **11.175.936.607** | | **56.369.530.844** | | **57.689.878.524** | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 70,00 | 70,00 | 243.974.000 | 75,00 | 282.532.000 | 80,00 | 261.366.907 | 85,00 | 567.503.598 | 90,00 | 600.591.375 | 80,00 | 1.729.912.400 | 90,00 | 1.955.967.880 | KECAMATAN SERANG |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kelurahan Sangat Berkembang | % | 70,00 | 70,00 | 8.258.384.315 | 70,00 | 15.512.162.162 | 70,00 | 9.515.046.361 | 80,00 | 10.268.798.636 | 90,00 | 10.219.031.500 | 90,00 | 53.087.062.682 | 90,00 | 53.773.422.974 | KECAMATAN SERANG |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | - | - | - | - | - | 100,00 | 978.576.000 | 100,00 | - | 100,00 | 55.000.000 | 100,00 | - | 100,00 | 1.033.576.000 | KECAMATAN SERANG |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 70,00 | 70,00 | 178.100.000 | 70,00 | 102.335.000 | 70,00 | 54.215.000 | 70,00 | 290.947.938 | 70,00 | 301.313.732 | 70,00 | 1.552.555.762 | 70,00 | 926.911.670 | KECAMATAN SERANG |
| | | | **KECAMATAN CIPOCOK JAYA** | | | | | **6.341.171.100** | | **9.024.846.735** | | **6.237.967.985** | | **6.951.559.730** | | **6.538.500.000** | | **36.030.722.836** | | **35.094.045.550** | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 90,00 | 90,00 | 623.048.000 | 90 | 264.216.000 | 90 | 139.873.230 | 90 | 387.536.250 | 90 | 1.990.045.000 | 90 | 3.821.257.886 | 90 | 3.404.718.480 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kelurahan Sangat Berkembang | % | 70,00 | 70,00 | 5.339.783.100 | 70 | 8.571.002.520 | 80 | 5.096.994.755 | 90 | 5.918.573.480 | 100 | 1.757.955.000 | 100 | 25.587.314.950 | 100 | 26.684.308.855 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | - | - | - | - | | 70 | 955.000.000 | 70 | - | 80 | 990.000.000 | 70 | - | 80 | 1.945.000.000 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 75,00 | 80,00 | 378.340.000 | 80 | 189.628.215 | 85 | 46.100.000 | 85 | 645.450.000 | 90 | 1.800.500.000 | 90 | 6.622.150.000 | 90 | 3.060.018.215 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| | | | **KECAMATAN KASEMEN** | | | | | **6.259.362.000** | | **10.844.915.759** | | **6.621.199.937** | | **6.933.393.145** | | **7.014.425.641** | | **49.625.505.425** | | **37.673.296.482** | |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 70,00 | 72,29 | 281.809.000 | 73,86 | 380.272.000 | 75 | 183.524.667 | 80 | 200.000.000 | 85 | 202.000.000 | 70 | 3.886.284.700 | 85 | 1.247.605.667 | KECAMATAN KASEMEN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan | % | 20,00 | 10,00 | 5.656.043.000 | 20 | 10.157.428.759 | 30 | 5.507.918.070 | 40 | 6.320.855.000 | 50 | 6.386.063.550 | 20 | 43.857.209.727 | 50 | 34.028.308.379 | KECAMATAN KASEMEN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | - | - | - | | - | 100 | 889.807.200 | 100 | 200.000.000 | 100 | 204.000.000 | | - | 100 | 1.293.807.200 | KECAMATAN KASEMEN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 70,00 | 70,00 | 321.510.000 | 70 | 307.215.000 | 70 | 39.950.000 | 70 | 212.538.145 | 70 | 222.362.091 | 70 | 1.882.010.998 | 70 | 1.103.575.236 | KECAMATAN KASEMEN |
| | | | **KECAMATAN TAKTAKAN** | | | | | **7.129.366.672** | | **13.516.443.529** | | **7.033.532.977** | | **7.869.545.000** | | **7.734.466.150** | | **155.388.667.064** | | **43.283.354.328** | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 100 | 100 | 336.575.000 | 100 | 12.711.742.178 | 100 | 199.535.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 77.179.395.085 | 100 | 13.557.852.178 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | persentase kategori kelurahan berkembang | % | 100 | 100 | 281.100.000 | 100 | 115.374.091 | 100 | 5.622.217.697 | 100 | 7.319.545.000 | 100 | 7.074.466.150 | 100 | 1.439.259.891 | 100 | 20.412.702.938 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | 100 | 100 | 6.496.761.672 | 100 | 668.527.260 | 100 | 1.133.950.280 | 100 | 100.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 74.365.260.088 | 100 | 8.549.239.212 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 50 | 57 | 14.930.000 | 64 | 20.800.000 | 71 | 77.830.000 | 86 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 2.404.752.000 | 100 | 763.560.000 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| | | | **KECAMATAN WALANTAKA** | | | | | **7.546.975.586** | | **15.083.444.384** | | **7.143.268.460** | | **7.091.000.000** | | **7.607.258.750** | | **20.868.301.442** | | **44.471.947.180** | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | - | 70,00 | 119.462.429 | 80,00 | 144.550.000 | 80 | 141.050.000 | 85 | 151.000.000 | 85 | 155.000.000 | 80 | 264.012.429 | 85 | 711.062.429 | KECAMATAN WALANTAKA |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | persentase kategori kelurahan berkembang | % | 7,14 | 7,14 | 7.090.938.157 | 14,3 | 14.020.972.371 | 50 | 5.276.722.175 | 55 | 6.410.000.000 | 60 | 6.914.000.000 | 7,14 | 19.349.792.000 | 60 | 39.712.632.703 | KECAMATAN WALANTAKA |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian penanganan k3 | % | - | 70,00 | 48.000.000 | 70 | 100.000.000 | 70 | 1.460.000.000 | 75 | 60.000.000 | 80 | 65.000.000 | 70 | 148.000.000 | 80 | 1.733.000.000 | KECAMATAN WALANTAKA |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 75,00 | 80,00 | 288.575.000 | 80 | 817.922.013 | 80 | 265.496.285 | 85 | 470.000.000 | 90 | 473.258.750 | 70 | 1.106.497.013 | 90 | 2.315.252.048 | KECAMATAN WALANTAKA |
| | | | **KECAMATAN CURUG** | | | | | **5.819.227.591** | | **10.878.922.604** | | **4.915.826.086** | | **4.998.620.367** | | **5.515.250.799** | | **62.306.814.148** | | **32.127.847.447** | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai SOP/SP/Ketentuan | % | 85 | 85 | 296.690.000 | 90 | 115.374.091 | 90 | 96.710.000 | 95 | 241.100.000 | 100 | 96.710.000 | 100 | 1.402.349.891 | 100 | 846.584.091 | KECAMATAN CURUG |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase kategori kelurahan berkembang | % | 50 | 50 | 5.216.324.591 | 50 | 10.541.198.513 | 50 | 3.933.957.126 | 80 | 4.317.520.367 | 90 | 4.002.284.799 | 100 | 53.208.860.867 | 90 | 28.011.285.396 | KECAMATAN CURUG |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian Penanganan K3 | % | 90 | 90 | 14.930.000 | 90 | 20.800.000 | 90 | 705.992.960 | 100 | 60.000.000 | 90 | 1.060.000.000 | 90 | 4.931.220.000 | 90 | 1.861.722.960 | KECAMATAN CURUG |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan | % | 90 | 90 | 291.283.000 | 90 | 201.550.000 | 90 | 179.166.000 | 90 | 380.000.000 | 90 | 356.256.000 | 90 | 2.764.383.390 | 90 | 1.408.255.000 | KECAMATAN CURUG |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **2.677.817.684** | | **1.922.024.496** | | **3.480.677.824** | | **7.050.000.000** | | **7.508.250.000** | | **9.529.904.500** | | **22.638.770.004** | |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | **2.677.817.684** | | **1.922.024.496** | | **3.480.677.824** | | **7.050.000.000** | | **7.508.250.000** | | **9.529.904.500** | | **22.638.770.004** | |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 8 | 01 | 2 | PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Capaian harmonisasi antar lembaga | % | 100 | 85 | 271.340.000 | 90 | 97.490.000 | 95 | 929.500.050 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.800.000.000 | 100 | 1.928.085.000 | 100 | 4.698.330.050 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BUDAYA POLITIK | Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat | % | 100 | 85 | 1.815.607.684 | 90 | 1.571.974.496 | 95 | 2.127.697.774 | 100 | 2.600.000.000 | 100 | 2.600.000.000 | 100 | 2.469.575.000 | 100 | 10.715.279.954 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100 | 85,00 | 103.250.000 | 90 | 79.180.000 | 95 | - | 100 | 350.000.000 | 100 | 558.000.000 | 100 | 1.066.575.000 | 100 | 1.090.430.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | % | - | 85 | 192.820.000 | 100 | 78.860.000 | 95 | 108.735.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 450.250.000 | 100 | 1.317.605.000 | 100 | 1.230.665.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK | Capaian Pengendalian Potensi Konflik | % | 100 | 85 | 294.800.000 | 90 | 94.520.000 | 95 | 314.745.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.748.064.500 | 100 | 4.904.065.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **JUMLAH** | | | | | | | | **642.278.569.625** | | **578.178.257.756** | | **771.848.775.047** | | **765.887.418.791** | | **773.444.951.266** | | **2.926.242.219.126** | | **3.531.637.972.485** | |

# Tabel 7.6
## Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
## Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
## Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH*** | | | | | | | | ***693.137.539.457*** | | ***745.358.814.400*** | | ***766.845.331.018*** | | ***807.759.899.209*** | | ***832.537.176.657*** | | ***1.331.115.062.253*** | | ***3.856.141.936.569*** | |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 330.913.793.513 | 100 | 310.149.310.816 | 100 | 338.785.981.009 | 100 | 350.588.333.000 | 100 | 357.451.405.150 | 100 | 61.989.286.199 | 100 | 1.687.888.823.488 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 90 | 90 | 52.315.277.685 | 90 | 50.733.237.871 | 100 | 63.756.049.666 | 100 | 90.618.382.152 | 100 | 91.896.483.538 | 100 | 103.048.515.556 | 100 | 349.319.430.912 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Indeks kepuasan pelayanan BLUD | Poin | - | - | | - | | - | | 80 | | 90 | | 90 | | 90 | | |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 8.546.488.870 | 100 | 7.909.805.773 | 100 | 12.031.184.462 | 100 | 12.258.130.805 | 100 | 14.091.147.819 | 100 | 27.611.713.110 | 100 | 54.836.757.729 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 01 | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 6.120.165.740 | 100 | 7.134.340.117 | 100 | 7.472.340.885 | 100 | 7.613.287.000 | 100 | 7.993.951.350 | 100 | 47.113.852.919 | 100 | 46.837.260.919 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 01 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 65 | 70 | 5.990.909.711 | 75 | 5.183.699.439 | 80 | 5.676.524.382 | 85 | 5.915.400.000 | 90 | 6.211.170.000 | 90 | 33.012.051.976 | 90 | 28.977.703.532 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 01 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 2.327.179.586 | 100 | 2.594.932.863 | 100 | 2.315.468.029 | 100 | 2.419.291.000 | 100 | 2.540.255.550 | 100 | 9.714.291.509 | 100 | 12.197.127.028 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 01 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 6.160.164.099 | 100 | 8.200.375.350 | 100 | 6.890.039.360 | 100 | 10.112.765.300 | 100 | 10.536.151.350 | 100 | 32.496.065.497 | 100 | 41.899.495.459 | DINAS SOSIAL |
| 2 | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 5.161.008.744 | 100 | 5.097.434.994 | 100 | 5.938.226.237 | 100 | 6.732.357.000 | 100 | 7.048.974.850 | 100 | 31.425.018.578 | 100 | 29.978.001.825 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 08 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 6.251.836.053 | 100 | 5.089.842.075 | 100 | 6.371.088.274 | 100 | 7.276.095.000 | 100 | 6.580.103.500 | 100 | 11.341.678.128 | 100 | 31.568.964.902 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 7.534.590.434 | 100 | 7.619.300.533 | 100 | 8.920.833.477 | 100 | 10.058.798.495 | 100 | 8.807.667.695 | 100 | 61.412.755.635 | 100 | 42.941.190.634 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 12.474.857.605 | 100 | 9.769.184.105 | 100 | 10.531.078.602 | 100 | 10.741.891.000 | 100 | 11.278.985.550 | 100 | 54.041.983.049 | 100 | 54.795.996.862 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 70 | 77 | 7.827.155.547 | 85 | 6.493.792.120 | 90 | 8.298.703.449 | 95 | 8.403.367.000 | 100 | 8.823.535.350 | 75 | 15.466.651.600 | 100 | 39.846.553.466 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 16 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 70 | 75 | 8.351.787.049 | 80 | 6.074.801.646 | 85 | 6.960.969.954 | 90 | 7.533.605.000 | 95 | 9.366.314.527 | 95 | 14.426.588.695 | 95 | 38.287.478.176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 18 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 6.984.245.673 | 100 | 6.401.789.463 | 100 | 8.434.325.664 | 100 | 8.595.861.000 | 100 | 8.816.187.450 | 100 | 20.775.044.790 | 100 | 39.232.409.250 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 23 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 5.205.924.385 | 100 | 8.094.938.303 | 100 | 9.177.528.417 | 100 | 9.292.218.170 | 100 | 10.785.336.027 | 100 | 10.930.624.970 | 100 | 42.555.945.302 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE REK | | | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN KINERJA | KONDISI AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN | | | | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | | | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | SEBELUM | | SETELAH | | |
| | | | | | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | 26 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 70 | 70 | 5.646.701.943 | 75 | 5.497.543.558 | 100 | 6.107.205.504 | 80 | 6.702.966.000 | 82 | 6.949.944.300 | 82 | 31.102.073.909 | 82 | 30.904.361.305 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3 | 27 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 70 | 70 | 9.727.820.255 | 75 | 8.687.187.887 | 78 | 10.324.316.576 | 80 | 11.070.124.000 | 82 | 11.623.630.200 | 82 | 55.020.443.233 | 82 | 51.433.078.918 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 30 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 8.362.371.569 | 100 | 6.978.134.966 | 100 | 8.371.296.702 | 100 | 8.834.763.000 | 100 | 9.171.501.150 | 100 | 28.063.902.680 | 100 | 41.718.067.387 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4 | 01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 44.290.728.193 | 100 | 36.805.585.227 | 100 | 41.868.914.614 | 100 | 41.869.170.001 | 100 | 43.962.628.500 | 100 | 46.655.745.863 | 100 | 208.797.026.535 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 55.501.807.941 | 100 | 46.668.420.823 | 100 | 48.780.747.405 | 100 | 47.918.759.700 | 100 | 51.335.110.049 | 100 | 124.534.902.197 | 100 | 250.204.845.918 | SEKRETARIAT DPRD |
| 5 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 85 | 85 | 9.078.457.252 | 85 | 8.512.995.689 | 88 | 9.785.450.631 | 90 | 10.073.300.000 | 92 | 10.261.000.000 | 85 | 29.103.794.856 | 92 | 47.711.203.572 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 02 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | - | - | - | - | - | 80 | 14.196.495.116 | 82 | 17.140.075.000 | 85 | 17.600.000.000 | 85 | - | 85 | 48.936.570.116 | BADAN PENDAPATAN DERAH |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 16.825.912.236 | 100 | 102.998.305.497 | 100 | 25.499.668.598 | 100 | 19.127.962.000 | 100 | 18.476.021.601 | 100 | 125.322.389.097 | 100 | 182.927.869.932 | BADAN PERNGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 3 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 6.703.281.221 | 100 | 6.573.185.445 | 100 | 6.401.434.892 | 100 | 6.822.656.000 | 100 | 7.163.788.800 | 100 | 33.139.541.546 | 100 | 33.664.346.358 | BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 7.930.434.780 | 100 | 9.116.820.923 | 100 | 13.002.056.237 | 100 | 13.342.967.000 | 100 | 14.010.115.350 | 100 | 12.278.901.000 | 100 | 57.402.394.290 | INSPEKTORAT |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 70 | 70 | 11.930.055.209 | 75 | 11.926.743.487 | 80 | 13.024.894.220 | 85 | 13.350.905.828 | 90 | 13.956.381.693 | 70 | 58.256.245.975 | 90 | 64.188.980.437 | KECAMATAN SERANG |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 8.367.615.807 | 100 | 9.199.957.030 | 100 | 9.492.605.883 | 100 | 9.884.281.270 | 100 | 10.796.248.000 | 100 | 21.514.135.000 | 100 | 47.740.707.990 | KECAMATAN CIPOCOK JAYA |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 7.402.246.407 | 100 | 9.190.660.637 | 100 | 15.984.577.139 | 100 | 11.058.478.855 | 100 | 11.500.818.009 | 100 | 50.629.803.661 | 100 | 55.136.781.047 | KECAMATAN KASEMEN |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 10.405.585.097 | 100 | 12.711.742.178 | 100 | 14.031.418.668 | 100 | 12.952.443.000 | 100 | 13.735.419.000 | 100 | 77.179.395.085 | 100 | 63.836.607.943 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 90 | 90 | 8.711.820.937 | 90 | 12.687.092.421 | 90 | 13.709.216.515 | 90 | 13.738.408.000 | 90 | 13.869.590.400 | 90 | 24.248.875.096 | 90 | 62.716.128.273 | KECAMATAN WALANTAKA |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 8.291.604.906 | 100 | 9.861.503.911 | 100 | 11.147.205.637 | 100 | 11.469.117.633 | 100 | 11.441.382.901 | 100 | 70.318.173.539 | 100 | 52.210.814.988 | KECAMATAN CURUG |
| 8 | 01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | Poin | 100 | 100 | 1.795.711.010 | 100 | 1.396.149.253 | | 3.557.484.814 | 100 | 4.243.740.000 | | 4.455.927.000 | 100 | 8.940.617.303 | 100 | 15.449.012.077 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Walikota terpilih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD pada berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil RPJMD menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang telah tercapai, telah sesuai jalur dan indikator mana yang belum tercapai.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional yang juga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2018-2023. Terjadi koreksi terhadap sasaran ekonomi yang menurun cukup tajam di 2020 dan diperkirakan akan berpengaruh untuk 2021 hingga 2023.

Berikut target indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2019-2023 :

**Tabel 8.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023**

| NO. | INDIKATOR | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 1 | **Indek Pembangunan Manusia** | | **Poin** | 72,10 | 72,16 | 72,52 | 72,81 | 73,09 | 73,92 | 73,09 |
| | 1 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,67 | 8,76 | 8,81 | 8,86 | 8,91 | 8,68 | 8,91 |
| | 2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,77 | 12,78 | 12,86 | 12,92 | 12,98 | 12,77 | 12,98 |
| | 3 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 67,83 | 68,00 | 68,17 | 68,34 | 68,51 | 68,75 | 68,51 |
| 2 | **Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI)** | | **Poin** | 57,71 | 61,87 | 63,50 | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 1 | Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah | % | 67,55 | 70,09 | 72,21 | 74,83 | 77,14 | 83,00 | 77,14 |
| 3 | **Indeks kualitas lingkungan hidup** | | **Poin** | 47,35 | 54,34 | 50,14 | 50,45 | 50,77 | 51,30 | 50,77 |
| | 1 | Jumlah Penanganan Timbunan Sampah | % | 55,58 | 61,6 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 80,00 |
| | 2 | Ketersediaan RTH Publik | % | 2,98 | 3,43 | 3,45 | 3,50 | 4,05 | 2,05 | 4,05 |
| | 3 | Indeks Risiko Bencana | Poin | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | | **%** | 6,20 | -1,29 | 5 | 5,25 | 5,5 | 6,91 | 5,5 |
| | 1 | Tingkat inflasi daerah | % | 3,06 | 1,91 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 |
| | 2 | Indeks daya beli | Poin | 79,12 | 78,65 | 79,08 | 79,54 | 79,98 | 83,61 | 79,98 |
| | 3 | PDRB per kapita | Juta Rp | 45,89 | 45,17 | 46,99 | 49,14 | 51,67 | 52,50 | 51,67 |
| | 4 | Angka Kemiskinan | % | 5,28 | 6,06 | 5,96 | 5,86 | 5,76 | 4,86 | 5,76 |
| | 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 8,08 | 9,26 | 9,16 | 9,06 | 8,96 | 7,93 | 8,96 |

| NO. | INDIKATOR | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | 6 | Indeks Gini | Poin | 0,342 | 0,352 | 0,350 | 0,348 | 0,346 | NA | 0,346 |
| 5 | **Indeks Reformasi Birokrasi Daerah** | | **Poin** | 59,14 | 58,30 | 60,50 | 61,00 | 61,50 | 80,00 | 61,50 |
| | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) | Poin | 77,80 | 77,74 | 78,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| | 2 | Nilai LPPD Kota | Poin | 3.4365 | 3.4426 | 3.4500 | 3.4550 | 3.4600 | Sangat Tinggi | 3.4600 |
| | 3 | Hasil Evaluasi AKIP | Poin | 54,64 | 55,33 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | BB | 63,00 |
| | 4 | Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023**

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB (LPE) | Persen | 6,59 | 6,20 | -1,29 | 5 | 5,25 | 5,5 | 6,91 | 5,5 |
| 2 | Laju inflasi | Persen | 3,78 | 3,06 | 1,91 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 |
| 3 | PDRB Perkapita | Juta Rp | 42,68 | 45,89 | 45,17 | 46,99 | 49,14 | 51,67 | 52,5 | 51,67 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,68 | 72,10 | 72,16 | 72,52 | 72,81 | 73,09 | 73,92 | 73,09 |
| 5 | Persentase PAD terhadap pendapatan | Persen | 12,17 | 14,16 | 14,38 | 14,69 | 14,89 | 15,09 | 15,69 | 15,09 |
| 6 | Angka melek huruf | Persen | 99,94 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,62 | 8,67 | 8,76 | 8,81 | 8,86 | 8,91 | 8,68 | 8,91 |
| 8 | Indeks Gini | Poin | 0,351 | 0,342 | 0,352 | 0,350 | 0,348 | 0,346 | NA | 0,346 |
| 9 | Indeks Ketimpangan regional (Williamson) | Poin | 0,55 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,50 | 0,40 |
| 10 | Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan | Persen | 94,64 | 94,72 | 93,94 | 94.04 | 94,14 | 94,24 | 95,14 | 94,24 |
| 11 | Angka usia harapan hidup | Tahun | 67,58 | 67,83 | 68 | 68,17 | 68,34 | 68,51 | 68,75 | 68,51 |
| 12 | Persentase balita gizi buruk | Persen | 0,08 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 13 | Prevalensi balita gizi kurang | Persen | 2,08 | 1,60 | 2,19 | 2,70 | 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 14 | Cakupan Desa Siaga Aktif | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80 | 100,00 |
| 15 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 8,16 | 8,08 | 9,26 | 9,16 | 9,06 | 8,96 | 7,93 | 8,96 |
| 16 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 17 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 5,64 | 5,32 | 5,46 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 18 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | Persen | 5,64 | NA | NA | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 19 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | Persen | 0,58 | 0,68 | NA | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 20 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 6,45 | 6,27 | 6,08 | 6,78 | 6,90 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 21 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | Persen | 27,75 | 28,08 | 27,75 | 28,20 | 28,35 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 22 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | Persen | 4,77 | 4,45 | 4,48 | 4,87 | 4,88 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 23 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | Persen | 4,56 | 3,06 | NA | 4,61 | 4,62 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 24 | Indeks kepuasan masyarakat | Persen | 72,00 | 77,80 | 77,74 | 78,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 25 | Pencapaian pola skor pangan harapan (PHP) | Persen | 79 | 87,80 | 87,7 | 88,65 | 89,50 | 90,42 | 84 | 90,42 |
| **ASPEK DAYA SAING** | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | Persen | NA | 99,49 | NA | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Rasio Ketergantungan | Persen | 39,62 | 43,24 | 45,12 | 39,50 | 39,46 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | |
| **11** | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 93,20 | 93,65 | 93,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,45 | 100,00 |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat | Persen | 134,85 | 128,60 | 126,51 | 126,51 | 126,51 | 126,51 | 125,50 | 126,51 |
| 1.2.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat | Persen | 117,04 | 117,35 | 117,97 | 117,97 | 117,97 | 117,97 | 117,34 | 117,97 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 99,28 | 99,45 | 99,46 | 99,51 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 105,04 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,29 | 105,90 |
| 1.5.2 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 99,28 | 99,49 | 99,50 | 99,51 | 99,52 | 99,53 | 99,53 | 99,53 |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.6.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.7 | Angka Kelulusan | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 72,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73,45 | 100 |
| 1.8.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Fasilitas Pendidikan | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 94,10 | 94,25 | 94,45 | 94,45 | 95,00 | 95,50 | 91,45 | 95,50 |
| 1.9.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | Persen | 93,40 | 94,00 | 95,65 | 95,70 | 95,75 | 95,80 | 87,01 | 95,80 |
| 1.9.3 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan | Rasio | 1:35 | 1:40 | 1:42 | 1:38 | 1:37 | 1:36 | 1:32 | 1:36 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | dasar | | | | | | | | | |
| 1.9.4 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio | 1:16 | 1:40 | 1:48 | 1:48 | 1:37 | 1:36 | 1:32 | 1:36 |
| **2** | **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | persen | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 1,17 | 0,18 |
| 2.2 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | persen | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 98,83 | 0,82 |
| 2.3 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | persen | 0,67 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 1,17 | 0,19 |
| 2.4 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup | persen | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 1,02 | 0,17 |
| 2.5 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Wanita Usia Subur | Rasio | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 10 | 0,10 |
| 2.6 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk | Rasio | 0,0467 | 0,0445 | 0,0406 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |
| 2.7 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk | Rasio | 0,015 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2.8 | Rasio dokter per persatuan penduduk | Rasio | 0,073 | 0,005 | 0,011 | 0,083 | 0,085 | 0.088 | 0,088 | 0,088 |
| 2.9 | Rasio tenaga Para Medis persatuan penduduk | Rasio | 0,479 | 0,39 | 0,048 | 1,90 | 2,14 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 2.10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 84,34 | 91,62 | 34,55 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 2.11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan | Persen | 93,74 | 95,18 | 38,76 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2.12 | Cakupan Desa/Kelurahan (UCI) | Persen | 87,88 | 86,36 | 28,36 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 2.13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 2.14 | Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 87,98 | 94,8 | 81,31 | 96 | 96,5 | 97 | 97 | 97 |
| 2.15 | Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk | Persen | 3,68 | 0,00001 | 0,0011 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 |
| 2.16 | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Persen | 58,74 | 57,32 | 48,05 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2.17 | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 75,97 | 100 | 67,81 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.18 | Tingkat Prevelensi Tuberkulosis | Persen | 0,25 | 0,34 | 0,21 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,4 | 0,007 |
| 2.19 | Tingkat Kematian karena Tuberkulosis | Persen | 6,1 | 0,0031 | 0,01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.20 | Proporsi Jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 46,23 | 56,24 | 67,81 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.21 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 75,51 | 58,62 | 70,80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.22 | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.23 | Penderita diare yang ditangani | Persen | 65,30 | 65,04 | 50,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.24 | Angka kejadian malaria | Persen | NA | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 2.25 | Tingkat kematian akibat malaria | Persen | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28 | Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi | Persen | NA | 0,0067 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,05 | 0,007 |
| 2.29 | Prporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persen | NA | 1,16 | NA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.30 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 1,51 | 3,05 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 100 | 3,60 |
| 2.31 | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 90,58 | 88,93 | 85,70 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 2.32 | Cakupan puskesmas | Persen | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 |
| 2.33 | Cakupan pembantu puskesmas | Persen | 20,90 | 19,70 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 17,50 | 19,4 |
| 2.34 | Cakupan kunjungan ibu K4 | Persen | 78,97 | 85,79 | 76,67 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2.35 | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 88,92 | 90,82 | 85,97 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2.36 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 32,06 | 45,06 | 29,41 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 2.37 | cakupan pelayanan anak balita | Persen | 76,17 | 71,01 | 54,41 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 2.38 | cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.39 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD | Persen | 99,42 | 100 | 11,20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.40 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin | Persen | 83,12 | 119,72 | 136,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.41 | Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| 2.42 | Cakupan desa/kelurahan (UCI)mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.43 | Presentase Rumah Tangga ber-PHBS | Persen | 45 | 79,11 | 84,85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 63,63 | 65,5 | 65,85 | 73 | 76 | 79 | 79 | 79 |
| 3.1.2 | Raiso panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 0,03 | 0,032 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 3.1.3 | Presentase drainase dalam kondidsi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 56 | 57 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | 72 |
| 3.1.4 | Presentase irigasi kota dalam kondidsi baik | Persen | 89,98 | 91,00 | 90,43 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 |
| 3.1.5 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 23 | 26 | 29,16 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 |
| **3.2** | **PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan cita satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan | Persen | 47 | 47 | 47 | 43 | 41 | 39 | 39 | 39 |
| 3.2.2 | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 55 | 51 | 51 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 3.2.3 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | Persen | 7,28 | 7,30 | 7,45 | 7,50 | 7,55 | 8,00 | 80 | 8,00 |
| **4** | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0,969 | 0,867 | 0,871 | 0,974 | 0,976 | 0,978 | 86,7 | 0,978 |
| 4.2 | Rasio permukiman layak huni | Rasio | 0,932 | 0,992 | 0,955 | 0,960 | 0,965 | 0,970 | 99,19 | 0,970 |
| 4.3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 96,88 | 86,70 | 66,32 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 86,7 | 97,8 |
| 4.4 | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 93,18 | 99,19 | 93,18 | 96 | 96,5 | 97 | 99,19 | 97 |
| 4.5 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 9,56 | 6,82 | 6,50 | 6 | 5,5 | 5 | 6,82 | 5 |
| 4.6 | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | Persen | 3,02 | 1,44 | 2,00 | 1,59 | 1,08 | 1,07 | 1,44 | 1,07 |
| 4.7 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 3,12 | 13,3 | 2,80 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,33 | 2,2 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 4.8 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 72,6 | 79,27 | 69,33 | 79,29 | 79,3 | 79,31 | 79,27 | 79,31 |
| 4.9 | Presentase penduduk berakses air bersih | Persen | 53,77 | 38,95 | 56,14 | 58 | 60 | 65 | 39,01 | 65 |
| 4.10 | Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk | Rasio | 33,08 | 1.048,09 | 1.037,56 | 1000 | 1000 | 1000 | 1048,09 | 1000 |
| **5** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarat (LINMAS) | Persen | 31,05 | 42 | 42 | 43,04 | 47,04 | 51,04 | 92,03 | 51,04 |
| 5.2 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 72,16 | 72,16 | 72,16 | 79,38 | 87,31 | 96,04 | 100 | 96,04 |
| 5.3 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 91,38 | 97,43 | 99,76 | 100 | 100 | 100 | 92,59 | 100 |
| **6** | **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 21,80 | 62,70 | 63,31 | 63,92 | 64,53 | 65,14 | 68,00 | 65,14 |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 22,14 | 63,33 | 64,18 | 65,03 | 65,88 | 66,73 | 33,5 | 66,73 |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan dasar | Persen | 21,50 | 62,53 | 63,06 | 63,59 | 64,12 | 64,65 | 70,0 | 64,65 |
| 6.4 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 6.5 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 6.6 | persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima | Persen | 16,32 | 45,82 | 31,19 | 32,14 | 33,09 | 34,04 | 22,1 | 34,04 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | jaminan sosial | | | | | | | | | |
| **12** | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **1.** | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun | Persen | 2,94 | 6,45 | 6,15 | 5,30 | 4,20 | 3,10 | 2,40 | 3,10 |
| 1.2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Persen | 100 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 1.3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 4,7 | 8,82 | 7,35 | 7,50 | 7,65 | 7,75 | 5,85 | 5,85 |
| 1.4 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | Persen | 100 | 33,61 | 86,55 | 60,00 | 70,00 | 89,5 | 100 | 89,5 |
| 1.5 | Sasaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 100 | 92 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 23 | 34,51 | 13,09 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| 2.2 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 77 | 32,73 | 34,50 | 36 | 37 | 40 | 80 | 40 |
| 2.3 | Rasio KDRT | Rasio | 0,98 | 0,56 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0040 | 0,0035 | 0,70 | 0,0035 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 2.4 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | Persen | 3,72 | 1,56 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 1 | 0,72 |
| 2.5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 45,94 | 48,68 | 45,94 | 64 | 65 | 66 | 49 | 66 |
| 2.6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persen | 71,43 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | Persen | 76,47 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban | Persen | 65 | 60 | 100 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | kekerasan | | | | | | | | | |
| 2.12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 100 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Persen | 52 | 94,75 | 98 | 98,5 | 99 | 100 | 60 | 100 |
| 2.14 | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian | Org | 21,366 | 22,380 | 27,53 | 28 | 29 | 30 | 21,380 | 30 |
| **3** | **PANGAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan pangan utama | Persen | 78 | 71,72 | 77,24 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| 3.2 | Ketersediaan energi dan protein perkapita | kkal / % | 2.247; 72 | 2.420 ; 141,1 | 2.598 ; 154,08 | 2.649; 155,62 | 2.702; 157,18 | 2.756; 158,75 | 6.247; 76 | 2.756; 158,75 |
| 3.3 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 20 | 66,67 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Penyelesaian tanah negara | Persen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Penyelesaian izin lokasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| | **KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Ada/ Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Ada | Ada | Ada |
| 5.2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Ada/ Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Tidak Ada (proses) | Ada | Ada | Ada |
| 5.3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | tingkat daerah provinsi | Ada | | | | | | | | |
| 5.4 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | Indeks/ Point | 56,3 | 51,05 | 43,33 | 45,71 | 45,81 | 45,91 | 71,00 | 45,91 |
| 5.5 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | Indeks/ Point | 67,83 | 67,20 | 72,46 | 68,03 | 68,12 | 68,20 | 48,00 | 68,20 |
| 5.6 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan | Indeks/ Point | 25,32 | 29,7 | 39,71 | 24,65 | 25,76 | 26,87 | 39,0 | 26,87 |
| 5.7 | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 51,92 | 55,58 | 61,6 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 5.8 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | Persen | 2 | 4,00 | 6,10 | 24 | 26 | 27 | 72,0 | 27 |
| 5.9 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 51,92 | 55,58 | 61,6 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 |
| **6** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk | Rasio | 0,974 | 0,99 | 0,99 | 0,992 | 0,995 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| 6.2 | Rasio Bayi berakte kelahiran (0-2) | Rasio | 0,87 | 0,97 | 0,93 | 0,965 | 0,967 | 0,97 | 0,92 | 0,97 |
| 6.3 | Rasio Pasangan berakte nikah | Rasio | 0,65 | 0,44 | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,75 | 0,47 |
| 6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala Kab/Kota | ada/tidak ada | NA | Ada | Ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | sudah/ belum | Sudah | Sudah | Sudah | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah |
| 6.6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP) | Persen | 97,4 | 98,75 | 99 | 99,2 | 99,5 | 100 | 99.5 | 100 |
| 6.7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran (bagi yg baru lahir) | Persen | 88 | 93 | 92 | 93,5 | 93,7 | 94 | 91 | 94 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | Persen | NA | 14,1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 50 |
| | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 2 Tahun | Persen | 87 | 96,3 | 93 | 96,5 | 96,7 | 97 | 92 | 97 |
| | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun | Persen | NA | 96,5 | 95 | 96,7 | 96,9 | 97 | - | 97 |
| | Cakupan Penerbitan Akta kelahiran Penduduk | Persen | NA | 41,7 | 45 | 45,5 | 46 | 49 | - | 49 |
| | Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim | Persen | NA | 44 | 32 | 70 | 71 | 72 | - | 72 |
| | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | Persen | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | - | 41 |
| | Persentase informasi data kependudukan dan pencatatan sipil | Persen | NA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| **7** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 |
| 7.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 |
| 7.3 | Persentase LPM aktif | Persen | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 7.4 | Persentase LPM Berprestasi | Persen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7.5 | Persentase PKK aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.6 | Persentase Posyandu aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.7 | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat | Persen | 5,66 | 5,70 | 64,18 | 70 | 80 | 90 | 5,95 | 90 |
| 7.8 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 5,66 | 5,70 | 9,30 | 15 | 20 | 25 | 5,95 | 25 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| **8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,09 | 1,49 | 4,42 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 1 | 4,00 |
| 8.2 | Total Fertility Rate (TFR) | Persen | 2,47 | 2,34 | 2,37 | 2,35 | 2,32 | 2,31 | 2,32 | 2,31 |
| 8.3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 7,4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44,4 | 48 |
| 8.4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | NA | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 30,00 | 33,33 |
| 8.5 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Persen | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8.6 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 2,47 | 2,34 | 2,37 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,32 | 2,10 |
| 8.7 | Ratio Akseptor KB | Persen | 69,5 | 80,14 | 73,59 | 73,75 | 74 | 75 | 75,00 | 75,00 |
| 8.8 | Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | Persen | 69,5 | 80,14 | 73,59 | 73,75 | 74 | 75 | 75,00 | 75,00 |
| 8.9 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | Persen | 1,59 | 1 | 32,5 | 31 | 30 | 29 | 1 | 29 |
| 8.10 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | Persen | 5,76 | 32,28 | 32,28 | 31,25 | 31,00 | 29,50 | 29,00 | 29,50 |
| 8.11 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 16,50 | 11,57 | 16,53 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 15,0 | 13,0 |
| 8.12 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 21,93 | 72,47 | 15,8 | 16 | 16,5 | 16,9 | 65 | 16,9 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 8.13 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 2,2 | 2,62 | 1,31 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8.14 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 71,38 | 85,24 | 83,89 | 84 | 84,20 | 85 | 85 | 85 |
| 8.15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 59,76 | 83,98 | 90,38 | 91 | 92 | 93 | 84 | 93 |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 60,46 | 85,75 | 84,54 | 85 | 86 | 87 | 82 | 87 |
| 8.17 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.18 | Cakupan Remaja dalam Pusat informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | Persen | 36 | 38 | 38 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| 8.19 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | NA | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 8.20 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 78 | 88,98 | 86,55 | 87 | 88 | 89 | 83 | 89 |
| 8.21 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.22 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.23 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan | Persen | 60 | 91,43 | 91,43 | 91,78 | 92 | 92,30 | 75 | 92,30 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasipelayanan | | | | | | | | | |
| 8.24 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 8.25 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 |
| 8.26 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 60 | 78,85 | 78,85 | 79 | 80 | 81 | 85 | 81 |
| 8.27 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 8.28 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | Persen | 65 | 95,36 | 21,64 | 22,50 | 23 | 23,50 | 80 | 23,50 |
| **9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 904.936 | 450.592 | 410.763 | 533.440 | 585.550 | 675.820 | 675.820 | 675.820 |
| 9.2 | Rasio ijin trayek | Rasio | 0,082 | 0,3 | 0,002 | 0,096 | 0,103 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 9.3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 5.585 | 4.036 | 5.450 | 8.557 | 9.149 | 9.702 | 9.702 | 9.702 |
| 9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.5 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 71,68 | 94,40 | 97,96 | 75 | 70 | 68 | 4,59 | 68 |
| 9.6 | Pemasangan Rambu-rambu | Persen | 54,90 | 64,9 | 77,10 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 9.7 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,73 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,011 | 0,95 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 9.8 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | Orang | 904.936 | 450.592 | 410.763 | 581.449 | 644.105 | 683.958 | 683.958 | 683.958 |
| 9.9 | Jumlah orang melalui dermaga/ terminal per tahun | Orang | 453.762 | 329.036 | 395.157 | 581.449 | 644.105 | 683.958 | 683.958 | 683.958 |
| **10** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 80 | 80 | 71,61 | 75 | 78 | 80 | 88 | 80 |
| 10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Rasio | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 |
| 10.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | Persen | 60 | 65 | 96,75 | 90 | 92 | 95 | 85 | 95 |
| 10.4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Rasio | 70 | 80 | 99,11 | 90 | 95 | 100 | 88 | 100 |
| 10.5 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | Rasio | 35 | 40 | 29,50 | 30 | 32 | 34 | 60 | 34 |
| **11** | **KOPERASI USAHA, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase koperasi aktif | Persen | 48,53 | 36,17 | 35,42 | 36,24 | 37,06 | 37,87 | 53,87 | 37,87 |
| 11.4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 99,74 | 99,77 | 99,79 | 99,81 | 99,83 | 99,85 | 1,55 | 99,85 |
| **12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 891 | 1.796 | 671 | 1191 | 1291 | 1391 | 1391 | 1391 |
| 12.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp/Milyar | 5.204 | 3.899,08 | 3.143 | 6.075 | 6.450 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| **13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | |
| 13.2 | Persentase wirausaha muda | Persen | 18 | 51,58 | 55,99 | 57 | 58 | 59 | 28 | 59 |
| 13.3 | Cakupan pembinaan olahraga | Persen | 40 | 57 | 57,78 | 55 | 60 | 81,25 | 65 | 81,25 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| **14** | **STATISTIK** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak ada | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 14.2 | Buku "Kota Serang dalam angka" | Ada/Tidak ada | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 14.3 | Buku "PDRB" | Ada/Tidak ada | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| **15** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 3 | 9,09 | 39,4 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| **16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 17 | 17 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 34,48 | 24,14 |
| **17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (terhadap populasi yang dilayani) | rasio | 5,21 | 0,08 | 0,32 | 0,033 | 0,091 | 0,098 | 9,00 | 0,098 |
| 17.2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | rasio | 0,31 | 0,34 | 9,56 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 50,00 | 0,37 |
| 17.3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000 penduduk) | rasio | 0,684 | 0,685 | 0,64 | 0,587 | 0,592 | 0,601 | 0,45 | 0,601 |
| 17.4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | pengunjung | 1948,08 | 2054,75 | 805,83 | 847,5 | 2291,67 | 2458,33 | 28000 | 2458,33 |
| 17.5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 4.532 | 5.100 | 6.629 | 7.129 | 7.629 | 8.129 | 7.000 | 8.129 |
| 17.6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| **18** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 33,00 | 33,33 | 30,30 | 60,61 | 90,91 | 100 | 100 | 100 |
| 18.2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Persen | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 |
| **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | |
| **1** | **PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kunjungan wisata | Orang | 2.233.016 | 12.823.611 | 19.153.821 | 20.000.000 | 20.500.000 | 21.000.000 | 3.018.144 | 21.000.000 |
| 1.2 | PAD sektor pariwisata | Persen | 0,03 | 16,52 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,50 | 0,05 | 14,50 |
| **2** | **PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton/Ha | 5,36 | 5,49 | 5,53 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2 | Cakupan bina kelompok petani | Kelompok | 360 | 341 | 341 | 375 | 380 | 385 | 3.84 | 385 |
| **5** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Capaian bina kelompok pedagang/usaha informal | Persen | 25,27 | 21,78 | 21,78 | 23,29 | 25,23 | 27,17 | 10 | 27,17 |
| **6** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 1,35 | 1,62 | 3,56 | 3,75 | 3,88 | 4,02 | 10 | 4,02 |
| **8** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Produksi perikanan | Ton | 6.111,41 | 5.698,87 | 4.730,78 | 4.935,84 | 5.203,76 | 6.243,64 | 6.243,64 | 6.243,64 |
| 8.2 | Konsumsi ikan | Kg/Kapita | 27,85 | 27,98 | 21,76 | 29,55 | 30,15 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
| 8.3 | Cakupan bina kelompok nelayan | Kelompok | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | 90 |
| 8.4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | Ton | 3.891,53 | 3.521,17 | 3.096,13 | 6.724,56 | 8.069,47 | 9.683,37 | 9.683,37 | 9.683,37 |
| 8.5 | Nilai tukar nelayan | Persen | NA | 102,94 | 98,8 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| **PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | | | | | | | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | |
| 1,1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1,2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1,3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1,4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 97 | 100 | 100 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 1,6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persen | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.1** | **KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| 2.2 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.3 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 35,72 | 35,22 | 34,06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.4 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 10,95 | 11,25 | 9,88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | Persen | 56,12<br>43.18 | 56,07<br>43,93 | 51,40<br>48,60 | 52,67<br>47,33 | 53,89<br>46,11 | 55,10<br>44,90 | 55,10<br>44,90 | 55,10<br>44,90 |
| 2.6 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 9,25 | 9,92 | 5,46 | 10,24 | 10,74 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 2.10 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat | Tepat | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat Waktu |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| | | | Waktu | Waktu | | | Waktu | Waktu | Waktu | |
| **3** | **KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 7,16 | 7,3 | 2,27 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 74,95 | 10,5 |
| **4** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persen | 70 | 70 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 4.2 | Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persen | 70 | 50 | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 | 80 |
| **5** | **PENGAWASAN** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 82,25 | 79,07 | 76,97 | 80 | 85 | 90 | 60 | 90 |
| 5.2 | Jumlah Temuan BPK | Rekomendasi | 37 | 48 | 11 | 35 | 30 | 25 | 15 | 25 |
| **6** | **SEKRETARIAT DEWAN** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6.2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak ada | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN KINERJA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 6.3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak ada | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

**Tabel 8.3**

**Indikator SPM Pemerintah Kota Serang**

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KAB/KOTA | INDIKATOR SPM | SATUAN | CAPAIAN | | Target | | | Target Akhir RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM | SETELAH |
| Pendidikan | Pendidikan anak usia dini | Angka Partisipasi PAUD | % | 93,65 | 93,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pendidikan dasar | APM SD/MI/sederajat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | APM SMP/MTS/ sederajat | % | 99,45 | 99,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pendidikan kesetaraan | Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kesehatan | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 85,80 | 74,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar pelayanan | % | 95,20 | 82,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 88,93 | 85,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan balita | Prensentasi anak 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai setandar | % | 71,01 | 54,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Presentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 100 | 11,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Presentase WNI usia 15-59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 61,15 | 51,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Presentase WNI usia 60 tahun keatas mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | % | 93,74 | 67,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KAB/KOTA | INDIKATOR SPM | SATUAN | CAPAIAN | | Target | | | Target Akhir RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM | SETELAH |
| | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 36,76 | 44,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 73,87 | 77,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Presentase penderita gangguan jiwa mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 77,53 | 80,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis | Presentase penderita Tuberkolosis mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 45,18 | 32,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang melemahkan daya tahan tubuh | Presentase setiap orang beresiko terkena HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan | % | 99,74 | 97,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pekerjaan Umum | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase penduduk berakses air minum | % | 73,32 | 72,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Persentase rumah tangga berakses pengolahan air limbah | % | 80,82 | 79,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perumahan Rakyat | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persentase RTLH bagi korban bencana | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak | Persentase RTLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah | % | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KAB/KOTA | INDIKATOR SPM | SATUAN | CAPAIAN | | Target | | | Target Akhir RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM | SETELAH |
| | huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | |
| Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang mendapat layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | % | 98,24 | 99,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan informasi rawan bencana | Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencanayang ikut pelatihan | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KAB/KOTA | INDIKATOR SPM | SATUAN | CAPAIAN | | Target | | | Target Akhir RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM | SETELAH |
| | | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | | | | |
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah Warga Negara sekitar kawasan rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban Bencana | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | % | 94,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase pemadaman, penyelamatan dan evakuasi perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan | % | 94,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan OPD pemadam kebakaran dan peyelamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| JENIS SPM | JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KAB/KOTA | INDIKATOR SPM | SATUAN | CAPAIAN | | Target | | | Target Akhir RPJMD (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SEBELUM | SETELAH |
| | | Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondidi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sosial | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Presentase (%) penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 10,69 | 11,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Presentase (%) penyandang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 8,91 | 4,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Presentase (%) penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 100 | 50,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Presentase (%) penyandang gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 32,74 | 77,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Presentasi (%) Korban Bencana Alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tenggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tabel 8.4**

**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Serang Tahun 2018-2023**

**(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021)**

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pendidikan | Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah | Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,3 | 47,4 | 47,4 |
| | | | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,6 | 25,7 | 25,7 |
| | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Persen | 93,2 | 93,65 | 93,66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar | Persen | 99,72 | 99,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | Kesehatan | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk) | Rasio | - | - | - | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| | | | Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditas | Persen | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. | Persen | 78,97 | 85,80 | 74,77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. | Persen | 88,92 | 95,20 | 82,80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persen | - | 88,93 | 85,70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan Balita | Persen | 76,17 | 71,01 | 54,41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persen | 99,42 | 100 | 11,20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persen | - | 61,15 | 51,66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia | Persen | - | 93,74 | 67,18 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persen | - | 36,76 | 44,66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persen | - | 73,87 | 77,79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan | Persen | - | 77,53 | 80,28 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persen | - | 45,18 | 32,31 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | .Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persen | - | 99,74 | 97,12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | Rasio | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| | | | Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun | Persen | - | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| | | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | Persen | 93,74 | 95,20 | 91,54 | 92 | 93 | 94 | 94 |
| | | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Persen | - | 4,02 | 3,59 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| | | | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) | Persen | - | 1,08 | 0,97 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Insidensi TB per 100.000 penduduk | Rasio | - | | | 60 | 55 | 50 | 50 |
| | | | Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV | Rasio | - | - | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| | | | Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) | Persen | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | | Treatment coverage pada pasien TB | Persen | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan | Persen | - | 97,7 | 78,1 | 80 | 82 | 84 | 84 |
| | | | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | - | - | - | 12,5 | 18 | 25 | 25 |
| | | | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | Persen | - | - | - | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| | | | Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) | Persen | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 40 |
| | | | Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) | Persen | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 70 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan | Persen | - | - | - | 70 | 72 | 74 | 74 |
| | | | Persentase Sarana Produksi UMOT | Persen | - | - | - | 30 | 32 | 34 | 34 |
| 3 | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | Persentase luas sawah beririgasi | Persen | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 99 |
| | | | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | Ha | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi | Ha | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun | Km | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persen | 96,88 | 86,7 | 86,72 | 86,75 | 86,79 | 86,8 | 86,8 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persen | NA | 98,87 | 99,19 | 99,22 | 99,38 | 99,45 | 99,45 |
| | | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | Persen | 96,88 | 86,7 | 86,72 | 86,75 | 86,79 | 86,8 | 86,8 |
| | | | Persentase PDAM dengan kinerja sehat | Persen | NA | 98,87 | 99,19 | 99,22 | 99,38 | 99,45 | 99,45 |
| | | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Persen | - | - | 6,82 | 6,52 | 6,31 | 6,02 | 6,02 |
| | | | Persentase angka BABS di tempat terbuka | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (% penanganan dan % pengurangan) | Persen | | | 6,82 | 6,52 | 6,31 | 6,02 | 6,02 |
| | | | | Persen | 3,12 | 13,3 | 13,28 | 13,25 | 13,21 | 13,2 | 13,2 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Terwujudnya konektivitas jalan | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan | Km | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang | Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR | Materi Teknis | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW | Persetujuan Substansi | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW | Materi Teknis | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR | Materi Teknis | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| | | Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai | Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, | Jumlah DAS | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan) | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan) | Jumlah DAS | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah | Ya/Tidak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah | Ha | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani | Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | Ha | 3,12 | 13,3 | 13,28 | 13,25 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| | | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 380 |
| | | Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Persen | 19,49 | 24,62 | 28,72 | 30,35 | 32,84 | 35,23 | 35,23 |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standa | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 97,9 | 98,24 | 99,02 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan | Persen | 91,38 | 97,43 | 99,76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana | Persentase penanganan pra bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase penanganan pasca bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | dengan dinyatakan sah/legal | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | Persen | 93,55 | 94,49 | 100 | 100 | 100 | 93,55 | 93,55 |
| | | | Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | Persen | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 66,67 | 66,67 |
| 6 | Sosial | Tersedianya Data Fakir Miskin | Persentase daerah (kecamatan) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Orang | 70 | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 |
| | | | Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Orang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | dimiliki | | | | | | | | |
| | | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Badan Usaha | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin | KPM | 170 | 230 | 130 | 200 | 300 | 300 | 1160 |
| | | | Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat | KPM | 152 | 140 | 137 | 120 | 315 | 260 | 972 |
| | | | Peningkatan kapasitas pendamping PKH | Orang | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos | Lembaga | 30 | 58 | 30 | 59 | 59 | 59 | 265 |
| | | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | Orang | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Jiwa | 228 | 200 | 427 | 12720 | 1100 | 1500 | 15947 |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | Jiwa | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | kelompok masyarakat | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial | kelompok masyarakat | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | Orang | 228 | 200 | 427 | 12720 | 1100 | 1500 | 15947 |
| | | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | - | 10,69 | 11,38 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | - | 8,91 | 4,56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase lanjut usia terlantar yang | Persen | - | 100 | 50,78 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | | | | | | | |
| | | | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | - | 32,74 | 77,52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Tenaga Kerja | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas JaminanSosial Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| | | Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | Orang | 509 | 1121 | 766 | 620 | 625 | 630 | 3.762 |
| | | Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja | Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya | Orang | 35 | 40 | 30 | 70 | 75 | 78 | 293 |
| | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri | Orang | 20 | 43 | 0 | 28 | 48 | 64 | 183 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 22,2 | 9,62 | 23,94 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| | | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | - | - | - | 83 | 85 | 90 | 90 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Poin | 62,65 | 62,10 | 61,26 | 62,65 | 62,91 | 63,20 | 63,20 |
| | | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Poin | NA | NA | NA | 83 | 85 | 88 | 88 |
| | | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Pangan | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Persentase cadangan pangan masyarakat | Persen | - | 24,49 | 29,07 | 34,88 | 42,29 | 51,77 | 51,77 |
| | | | Persentase daerah rentan rawan pangan | Persen | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan | Persen | 79,00 | 87,80 | 87,70 | 88,65 | 89,50 | 90,42 | 90,42 |
| | | Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasiona | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Persen | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 10 | Pertanahan | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | Bidang Tanah | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | Ha | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Lingkungan Hidup | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 47,35 | 47,35 | 54,338 | 47,63 | 47,68 | 47,79 | 47,79 |
| | | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Persen | 20 | 9,2 | 22,5 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | | Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:a. Jumlah pengurangan timbulan sampah | Persen | 2 | 4 | 6,1 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| | | | b. Jumlah penanganan timbulan sampah | Persen | 51,92 | 55,58 | 61,6 | 70 | 75 | 80 | 80 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk | Penyajian data kependudukan skala Kota/Kab dalam 1 Tahun | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | Persen | 0 | 96,5 | 95 | 96,7 | 96,9 | 97 | 97 |
| | | | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Persen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | Persen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | Persen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pemanfaatan data kependudukan | Persen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Berkembangnya status pembangunan kelurahan | Jumlah Kelurahan Mandiri/Cepat Berkembang | Kelurahan | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 25 | 25 |
| | | | Jumlah Kelurahan Berkembang | Kelurahan | 20 | 39 | 40 | 43 | 45 | 37 | 37 |
| | | | Jumlah Kelurahan Tertinggal/Kurang Berkembang | Kelurahan | 41 | 21 | 19 | 11 | 7 | 5 | 5 |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Poin | NA | NA | NA | 56 | 57 | 58 | 58 |
| | | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | Persen | 69,5 | 80,14 | 73,59 | 73,75 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | Persen | 16,5 | 11,57 | 16,53 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 15 | Perhubungan | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Poin | 66,03 | 79,98 | 74,16 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| | | | On Time Performance Layanan Transportasi | Persen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | Terwujudnya Konektivitas Nasional | Rasio Konektivitas Nasional | Rasio | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatnya Keselamatan | Rasio Kejadian Kecelakaan | Rasio | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Transportasi | Transportasi per 10 ribu Keberangkatan | | | | | | | | |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Infrastruktur Digital | Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital | Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Persen | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang miimplementasikan | Persen | 25 | 25 | 50 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| | | MeningkatnyaPemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi | Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital | Persen | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | Persentase (Persen) Perangkat Daerah yang mengimplementasi | Persen | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | /replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Persen | 20 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | Persentase (Persen) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, | Persen | 20 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi | | | | | | | | |
| | | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah | Persen | 20 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | | Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Persen | 20 | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | | Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas | Persen | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | daerah | | | | | | | | |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Terwujudnya Koperasi yang Modern | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 48,53 | 36,17 | 35,42 | 36,23 | 37,87 | 37,87 | 37,87 |
| | | Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Penanaman Modal | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Rp/Milyar | 5.204 | 3.889 | 3.143 | 6.075 | 6.450 | 6.875 | 6.875 |
| 19 | Kepemudaan dan Olah Raga | Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| | | Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional | Peningkatan prestasi olahraga | Medali emas | - | 0 | 0 | 0 | 220 | 23 | 243 |
| 20 | Statistik | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | pembangunan daerah | statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | |
| | | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Persandian | Menguatnya kemanan siber lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | Orang | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | | | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah | Tim | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Orang | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Kebudayaan | Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung | Persen | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | pertunjukan seni | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | Unit | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Persen | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | Unit | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 3 |
| | | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persen | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persen | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, | Unit | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | penghapusan) | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) | Unit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | Orang | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 |
| | | | Pembentukan tim ahli cagar budaya Kota/Kab | Orang | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 5 |
| | | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persen | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | Persen | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 | 20 | 20 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persen | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Persen | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 | Perpustakaan | Literasi masyarakat meningkat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Index | NA | NA | NA | NA | 14 | 16 | 16 |
| | | Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Poin | NA | NA | NA | NA | 64,7 | 66,2 | 66,2 |
| 24 | Kearsipan | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | nilai budaya dan kearifan lokal | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | Orang | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 25 | Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 3891,53 | 3521,17 | 3096,13 | 3250,94 | 3413,48 | 3584,16 | 3584,16 |
| | | | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 2.219,88 | 2177,7 | 1634,65 | 1716,38 | 1802,20 | 1892,31 | 1892,31 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | saing | | | | | | | | | |
| 26 | Pariwisata | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | Rp/Milyar | NA | NA | NA | 150.000.00 | 200.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| | | | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara | Orang | 2.231.748 | 12.823.611 | 19.153.821 | 20.200.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | Kontribusi PDRB Pariwisata | Persen | 4,77 | 4,45 | 4,48 | 4,87 | 4,88 | 4,90 | 4,90 |
| 27 | Pertanian | Meningkatnya produktivitas pertanian | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) | Persen | 5,36 | 5,49 | 5,53 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
| | | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | Persen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan | Persen | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| | | | persentase peningkatan produktivitas peternakan | Persen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan | Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT | Persen | NA | NA | 2,07 | 1,97 | 1,87 | 1,77 | 1,77 |
| | | | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Perdagangan | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Terwujudnya iklim usaha yang kondusif | Tertib Usaha | Persen | 5,63 | 14,4 | 19,32 | 20,26 | 43,71 | 90,62 | 90,62 |
| | | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsisdi sesuai ketentuan jenis, jumlah, wakyu, harga, mutu dan tempat | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Meningkatnyajaminan mutu komoditas potensial daerah | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Persen | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Terwujudnya kecukupan bahanpangan untuk masyarakat | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | Persen | 68,63 | 78,43 | 78,43 | 78,43 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
| | | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan | Inflasi Pangan bergejolak | Persen | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Perindustrian | Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Persen | 2,18 | 4,04 | -0,08 | 1,37 | 1,50 | 1,64 | 1,64 |
| | | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | Persen | 4,56 | 4,45 | 4,59 | 4,61 | 4,62 | 4,64 | 4,64 |

| NO | URUSAN | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2018 | CAPAIAN | | TARGET | | | KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | (USD Miliar) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | orang | 12.751 | 13.969 | 14.069 | 14.169 | 14.269 | 14.369 | 14.369 |
| | | Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas | Rp/Milyar | 54.301.685 | 64.478.005 | 69.478.005 | 74.478.005 | 79.478.005 | 79.478.005 | 79.478.005 |

# BAB IX
# PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan manifestasi dari komitmen dan ikhtiar terbaik seluruh elemen pemerintahan dan stakeholders Kota Serang dalam menata dan meletakan cita-cita bersama dari seluruh aspirasi dan kebutuhan yang dirasakan penting dan mendesak untuk diwujudkan pada kurun waktu sampai dengan tahun 2023 yaitu Kota Serang sebagai "***Kota Peradaban yang berdaya dan berbudaya***".

Namun demikian sangat disadari bahwa terdapat sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, RPJMD ini masih memberi ruang terhadap masukan dan saran bagi penyempurnaannya di masa mendatang, melalui rencana operasional yang disusun setiap tahun pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

## 1.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak menjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Untuk keperluan itu maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Walikota masa bakti tahun 2018-2023 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2024. Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pada penyusunan perencanaan pembangunan atau RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dapat menjadi muatan penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang selanjutnya, dengan mengacu pada RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

## 1.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang kemudian menjadi pedoman untuk menyusun RKPD dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renstra PD. Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan harmonisasi antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra PD, dengan melakukan telaahan terhadap Perubahan RPJMD dalam penyusunan setiap kebijakan ditingkat operasional, baik dalam penyusunan Rencana Kerja PD, RKPD, hingga penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
4. Walikota Serang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.
5. Guna menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka Walikota beserta seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk mensosialisasikan naskah Perubahan RPJMD ini kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama dalam mengimplementasikannya.
6. Dalam hal terdapat perubahan indikator dan target kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah di tetapkanya Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian melalui Peraturan Walikota.

**WALIKOTA SERANG**

**SYAFRUDIN**